

**PRODIGY**

**JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN**

**Volume 12, Nomor 2, Desember 2024**

# **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi / Redaktur : Mardisontori, S.Ag., LLM.

Editor : Akhmad Aulawi, S.H., M.H.

Arif Usman, S.H., M.H.

Nita Ariyulinda, S.H., M.H.

Yeni Handayani, S.H., M.H.

Arrista Trimaya, S.H., M.H.

Woro Wulaningrum, S.H., M.H.

R. Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y.,S.H., M.H

Achmadudin Rajab, S.H., M.H.

Sutriyanti, S.H., M.H.

Olsen Peranto, S.H.

Aryudhi Permadi, S.H., M.H.

Noval Ali Muchtar, S.H. M.H.

Mitra Bestari : Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.

Prof. Alfitri, S.Ag., M.Ag., LL.M., PhD.

Dr. E. Fernando, M. Manullang, S.H, M.H.

Dr. Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.

Desain Grafis : Santoso Wahyu Nugroho

Sekretariat : Intan Pujakesuma, S.E., M.AP. Debora Cahyaningati, A.Md.A.B

Atika Novitasari, A.Md. Ak.

**Alamat**

**Redaksi Prodigy Jurnal Perundang-Undangan**

**Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Badan Keahlian DPR RI**

**Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI**

**Jalan Gatot Subroto, Jakarta Kode Pos 10270**

**e-mail: prodigyjurnalilmiah@gmail.com dan jurnal.prodigy@dpr.go.id**

# **DAFTAR ISI**

[SUSUNAN DEWAN REDAKSI i](#_Toc187057259)

[DAFTAR ISI ii](#_Toc187057260)

[PENGANTAR REDAKSI iii](#_Toc187057261)

[Oktavianto Setyo Nugroho 1](#_Toc187057262)

[Kuntari 55](#_Toc187057263)

[Noval Ali Muchtar 99](#_Toc187057264)

[Arrista Trimaya 129](#_Toc187057265)

[Achmadudin Rajab 168](#_Toc187057266)

[Fahmi 209](#_Toc187057267)

[Nita Ariyulinda 236](#_Toc187057268)

[Aryani Sinduningrum 269](#_Toc187057269)

[Arif Usman 302](#_Toc187057270)

[Riyani Shelawati 328](#_Toc187057271)

[Woro Wulaningrum 364](#_Toc187057272)

[Sutriyanti 394](#_Toc187057273)

[PEDOMAN/PANDUAN PENULISAN NASKAH JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN PRODIGY 423](#_Toc187057274)

# **PENGANTAR REDAKSI**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” Volume 12 Nomor 2, Desember 2024. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang-undangan, kajian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian dan teori dari konsepsi hukum, serta gagasan dan analisis terhadap fungsi legislasi.

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh Redaksi dan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 12 (dua belas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan.

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 12 (dua belas) tulisan tulisan dengan berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Israel terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional; Kedua, **Memahami Ketentuan Pasal 97A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**; Ketiga, Parameter Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan; Keempat, Harmonisasi pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh untuk Optimalisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji; Kelima, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 dan Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keenam, Kajian Hukum Putusan Nomor 100/PUU-XVIII/2020 mengenai Politik Pembentukan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Penolakan Masyarakat.

Selanjutnya Ketujuh, Analisis Implikasi Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Kedudukan Rumah Sakit Daerah dalam Susunan Perangkat Daerah; Kedelapan, Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Industri Kripto di Indonesia; Kesembilan, Pengaturan Hunian Berimbang Sebelum dan Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Kesepuluh, Materi muatan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Hukum Acara Perdata dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; Kesebelas, Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan; dan Kedua Belas, Kewenangan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia.

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan optimisme bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Jakarta, Desember 2024

Redaksi

**TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN PERANG ISRAEL TERHADAP PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

***(JURIDICAL REVIEW OF ISRAELI WAR CRIMES AGAINST PALESTINE IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW)***

# **Oktavianto Setyo Nugroho**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan Sumatera Utara

\*Korespondensi: [oktaviantosn@gmail.com](mailto:oktaviantosn@gmail.com)

**Abstrak**

Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar, terutama terhadap penduduk sipil Palestina di wilayah pendudukan seperti Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dalam konteks **Hukum Humaniter Internasional (HHI)**, banyak tindakan yang dilakukan oleh Israel dalam konflik ini diduga melanggar peraturan yang ditetapkan untuk melindungi penduduk sipil serta mengatur cara dan metode perang. Terkait dengan permasalahan tersebut, tulisan ini menganalisis: Pertama, bagaimana pengaturan kejahatan perang dalam HHI? Kedua, bagaimana bentuk kejahatan perang dalam konflik Israel dan Palestina yang melanggar HHI? Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan kejahatan perang dalam HHI dan menganalisis bentuk kejahatan perang dalam konflik Israel-Palestina yang melanggar HHI. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Hasil pembahasan menyimpulkan: Pertama, meskipun dalam Konvensi Den Haag IV tidak spesifik mengatur mengenai kejahatan perang tapi dalam Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 27 melarang negara yang berperang untuk melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, menghancurkan gedung-gedung dan fasilitas umum yang kemudian aturan tersebut menjadi cikal bakal dari Pasal 8 ayat (2) Statuta Roma 1998 yang mengatur mengenai kejahatan perang; Kedua, kejahatan perang yang melanggar HHI diantaranya pembunuhan penduduk sipil, penyiksaan, penggunaan senjata yang dilarang, serta serangan yang tidak membedakan antara sasaran militer dan sipil; Ketiga, mekanisme penegakan HHI terhadap kejahatan perang Irael dan Palestina dilakukan melalui Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Mahkamah Ad. Hoc Kejahatan Perang, ICJ, dan ICC.

Kata kunci: Kejahatan Perang, Israel, Palestina, Hukum Humaniter Internasional

***Abstract***

*The conflict between Israel and Palestine has been ongoing for decades and has had a major humanitarian impact, particularly on the Palestinian civilian population in occupied territories such as the Gaza Strip and the West Bank. In the context of International Humanitarian Law (IHL), many of the actions taken by Israel in this conflict allegedly violate the rules established to protect the civilian population and regulate the means and methods of war. Related to these problems, this paper analyzes: First, how are war crimes regulated in IHL? Second, what are the forms of war crimes in the conflict between Israel and Palestine that violate IHL? This paper aims to analyze the regulation of war crimes in IHL and analyze the forms of war crimes in the Israeli-Palestinian conflict that violate IHL. Normative legal writing method with prescriptive writing specifications. The discussion concludes: First, although the Hague Convention IV does not specifically regulate war crimes, Articles 23, Articles 25, and, Articles 27 prohibit belligerent states from killing civilians, destroying buildings and public facilities which later became the forerunner of Article 8 paragraph (2) of the 1998 Rome Statute which regulates war crimes; Second, war crimes that violate HHI include the killing of civilians, torture, the use of prohibited weapons, and attacks that do not distinguish between military and civilian targets; Third, the mechanism for enforcing HHI against Israeli and Palestinian war crimes is carried out through the 1949 Geneva Conventions, the 1977 Additional Protocols, the Ad. Hoc Court of War Crimes, ICJ, and ICC.*

*Keywords: War Crimes, Israel, Palestine, International Humanitarian Law*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Dari awal sejarah sampai saat ini, ketakutan perang menghadirkan kengerian, penderitaan, dan kehancuran yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata bagi jutaan orang. Seluruh generasi terluka dan trauma oleh kekerasan, kehilangan, perampasan, dan pelecehan. Keluarga tercabik-cabik dan tercerai-berai, mata pencaharian hancur dan harapan hancur berantakan. Hal ini melahirkan Hukum Humaniter Internasional (HHI), bidang hukum yang disusun di medan perang masa lalu dan masa sekarang untuk meringankan penderitaan manusia dalam situasi konflik bersenjata dimana yang dimaksud dengan konflik bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antar negara yang disertai dengan pengerahan angkatan bersenjata negara.[[1]](#footnote-1) Konflik bersenjata dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya politik, ekonomi, ideologi, strategi militer, maupun perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut.

Palestina merupakan bangsa yang bisa diperkirakan sudah hidup sejak abad ke-XII SM, bangsa Philistin atau pun Pulasati.[[2]](#footnote-2) Bangsa Philistin diprediksi berasal dari laut Aegia, laut tersebut ialah laut antara Asia kecil serta Yunani sehingga bangsa tersebut diketahui sebagai bangsa dari Laut Aegia. Kemudian setelah tinggal di darat Philistin menetapkan diri mereka sebagai penguasa daratan sejauh tepi laut selatan yang berbatasan dengan Sinai memanjang hingga pesisir Syiria di Utara. Nama Palestina diucap pertama kali oleh ayah sejarahwan bangsa Yunani yang bernama Herodotus untuk merujuk pada jalur pantai yang dihuni orang Filistin.[[3]](#footnote-3)

Sejarah konflik bersenjata Israel dan Palestina terjadi kurang lebih enam dekade yang lalu dimana Palestina telah jatuh ke tangan Britania Raya semenjak tahun 1917. Jatuhnya negara Palestina bermula sejak akhir abad ke-19 Masehi yang disebabkan karena kelemahan pemerintahan yang dipimpin oleh Kerajaan Turki Utsmani (Ottoman). Pendirian negara Israel memperoleh pengakuan dari negara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1948.[[4]](#footnote-4) Hal ini berdampak pada warga negara Palestina yang berstatus agama muslim atau pun agama kristen yang mendapatkan tekanan sepanjang hidup mereka. Sebagian besar banyak yang mengira bahwa konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel murni sebagai konflik politik, tetapi sebagian orang lainnya menganggap bahwa konflik ini merupakan konflik yang bernuansa teologis dimana bukan saja memperlihatkan stigma perang antara Yahudi-Islam, akan tetapi penyebabnya ialah “Tanah yang diinjaknya”. Warga Israel mengaku bahwa tanah Palestina merupakan tanah yang di janjikan Tuhan *(Promised Land)* dan kedua pihak tersebut sama-sama ingin mempertahankan haknya.[[5]](#footnote-5) Palestina bersikeras untuk mempertahankan wilayahnya, dan tidak akan merelakan wilayahnya dikuasai oleh Israel, begitu pun juga dengan Israel tetap pada pendiriannya untuk tidak mengganti batasan daerah yang sama setelah ditinggalkan Britania Raya pada tahun 1948.[[6]](#footnote-6)

Konflik antara Israel dan Palestina kembali pecah pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas yang merupakan kelompok militan Palestina melakukan serangan dengan menembakkan 5000 roket ke wilayah Israel.[[7]](#footnote-7) Serangan tersebut dilakukan sebagai respons atas kekejaman yang dirasakan warga Palestina beberapa tahun belakangan. Gerakan zionis Israel yang berlangsung secara terus menerus dan mengancam eksistensi Palestina tidak dapat dibiarkan begitu saja. Gerakan tersebut meliputi perluasan pemukiman Yahudi dimana Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memerintahkan pembangunan 3 (tiga) pemukiman di bagian selatan dari wilayah pendudukan di Tepi Barat, penguasaan Israel atas Masjid Al-Aqsa dimana pada kenyataannya Israel memiliki kekuasaan mengatur siapa yang dapat masuk dan keluar dari Al-Aqsa sehingga dikhawatirkan Israel akan merebut Al-Aqsa, dan blokade pengepungan Israel atas Gaza dimana hal tersebut dianggap penting karena dapat melindungi warga Israel dari Hamas.[[8]](#footnote-8)

Peristiwa tersebut menjadikan Israel dan Palestina berperang dan terlibat dalam konflik bersenjata yang besar yang tidak hanya melibatkan kedua negara saja, namun berimbas ke kawasan timur sampai ke belahan dunia lainnya.[[9]](#footnote-9) Konflik bersenjata tersebut terjadi karena Israel dan Palestina menduduki satu wilayah yang sama dimana peledakan bom, peluncuran rudal balistik, kerusakan gedung, dan fasilitas umum, negosiasi bom, negosiasi damai, menjadi rutinitas bagi rakyat Palestina maupun Israel.[[10]](#footnote-10)

Masyarakat internasional melihat bahwa konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dengan Palestina merupakan peristiwa penuh kekerasan dan permusuhan sehingga mengakibatkan warga sipil menjadi korban, hancurnya berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, kantor, sekolah, dan tempat ibadah. Dalam sejarah konflik bersenjata, terbukti telah menimbulkan ketidakadilan tetapi juga menimbulkan kekejaman yang melanggar prinsip kemanusiaan.[[11]](#footnote-11)

Israel telah banyak melakukan pelanggaran terhadap HHI khususnya kejahatan perang karena telah melakukan kekejaman pada warga sipil Palestina. Dalam laporan Komisi Penyelidik PBB pada 12 Juni 2024 menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Israel di Jalur Gaza merupakan kejahatan perang diantaranya menyebabkan warga sipil Palestina kelaparan dimana hal tersebut digunakan sebagai metode dalam berperang, melakukan pembunuhan yang disengaja dengan mengarahkan serangan terhadap warga sipil, objek sipil, pemindahan paksa, kekerasan seksual, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, penahanan sewenang-wenang dan penghinaan terhadap martabat manusia.[[12]](#footnote-12) Kejahatan perang (*war crime*) merupakan suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional. Untuk menangani kejahatan perang di dalam hukum internasional terdapat beberapa aturan seperti yang diatur didalam HHI, dimana terdapat berbagai cakupan didalam pengaturan tersebut yaitu: Konvensi Den Haag 1907 tentang Penggunaan Alat dan Cara Berperang (Konvensi Den Haag 1907), Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Akibat Konflik Bersenjata Baik yang Bertaraf Internasional maupun non-internasional (Konvensi Jenewa 1949) dan Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta peraturan untuk memerangi kejahataan-kejahatan yang dianggap sebagai ancaman serius bagi umat manusia.

HHI tidak dimaksudkan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan aturan dalam berperang, tetapi karena alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu dan untuk membatasi wilayah kekejaman konflik bersenjata yang diperbolehkan. Dengan alasan tersebut, hukum humaniter disebut juga sebagai peraturan tentang perang berperikemanusiaan.

1. **Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kejahatan perang dalam HHI?
2. Bagaimana bentuk kejahatan perang dalam konflik Israel dan Palestina yang melanggar HHI?
3. Bagaimana mekanisme penegakan HHI terhadap kejahatan perang Israel dan Palestina?
4. **Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini untuk :

1. Pengaturan kejahatan perang dalam HHI.
2. Bentuk kejahatan perang dalam konflik Israel-Palestina yang melanggar HHI.
3. Mekanisme penegakan HHI terhadap kejahatan perang Israel dan Palestina.
4. **Metode Penulisan**

Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[[13]](#footnote-13) Metode dalam penulisan hukum ini bersifat preskriptif yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau panduan mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.[[14]](#footnote-14)

Berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini maka pengkajian dilakukan dengan menganalisis perjanjian internasional yang berkaitan dengan perang dan kejahatan perang yaitu Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional dan Non-Internasional (Protokol Tambahan 1977), dan Statuta Roma 1998. Penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.[[15]](#footnote-15) Kajian bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan serta buku yang terkait dengan HHI yang mengatur mengenai kejahatan perang.

1. **Pembahasan**
2. **Kerangka Konsepsional**
3. **Definisi Kejahatan Perang**

Menurut Konstitusi Nuremberg, kejahatan perang yang identik dengan *violations of the laws or customs of war* mencakup, namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan seperti “*pembunuhan, perlakuan yang menyakitkan atau deportasi terhadap buruh atau untuk tujuan lain dari penduduk sipil atau dalam wilayah yang dikuasai, pembunuhan atau perlakuan yang menyakitkan terhadap tawanan perang atau orang-orang di laut, pembunuhan sandera, merampas barang milik publik atau pribadi tanpa alas dan menghancurkan kota, desa, atau pemusnahan yang tidak sah untuk kepentingan militer."[[16]](#footnote-16)*

Definisi mengenai kejahatan perang dapat ditemukan pada Pasal 6 (b) *London Charter* yang secara tegas menyatakan:[[17]](#footnote-17)

“*War Crimes: Namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not to be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian populations of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity.”*

Ketentuan dalam *The Internationally Military Tribunal For The Far East*, istilah kejahatan perang dapat ditemukan dalam Pasal 5 (b) yang menyebutkan bahwa: “*Conventional War Crimes: Namely, violations of the laws or customs of war”.* Bisa diterjemahkan dimana kejahatan perang konvensional yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum atau pada kebiasaan-kebiasaan perang*.*[[18]](#footnote-18)

Kejahatan perang merujuk pada tindakan-tindakan tertentu yang merupakan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang.[[19]](#footnote-19) Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan perang merupakan kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC*.*[[20]](#footnote-20)Dalam hal ini kejahatan perang secara substansial disebut sebagai pelanggaran berat (*grave breachers*)[[21]](#footnote-21) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 dimana yurisdiksi ICC terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan.[[22]](#footnote-22) ICC mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta Roma 1998 berkenaan dengan kejahatan-kejahatan, yaitu :

1. Kejahatan genosida;
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan;
3. Kejahatan perang; dan
4. Kejahatan agresi.

Kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari ICC pada Statuta Roma 1998 kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 6 yang mengatur mengenai kejahatan genosida. Pasal 7 mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan Pasal 8 mengatur mengenai kejahatan perang. Khusus untuk kejahatan agresi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat menjalankan yurisdiksi atas kejahatan agresi sampai diadopsi sebuah ketentuan yang mendefinisikan kejahatan tersebut dan menetapkan kondisi dimana pengadilan bisa menjalankan yurisdiksi tersebut.[[23]](#footnote-23)

Dalam Hukum Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur tentang Kejahatan HAM Berat yaitu yang disebutkan dalam Pasal 7 dimana Pelanggaran HAM Berat meliputi:[[24]](#footnote-24)

1. Kejahatan Genosida; dan
2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Mengenai kejahatan perang yang menjadi bagian dari kejahatan HAM Berat yang diatur dalam Statuta Roma Tahun 1998 tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan perang secara lebih spesifik bisa ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949 dimana konvensi tersebut memberikan pedoman untuk mengatur perlakuan terhadap warga sipil, tawanan perang, dan tentara yang berada dalam kondisi tidak mampu untuk berperang. Pasal 50 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa pelanggaran berat (*grave breaches)* yang dimaksudkan oleh pasal-pasal terdahulu adalah pelanggaran yang meliputi perbuatan sebagai berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.[[25]](#footnote-25)

Pelanggaran berat *(grave breaches)* juga diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi tentang penindakan terhadap pelanggaran dan pelanggaran berat yang ditambah dengan bagian ini, akan berlaku terhadap penindakan pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran berat Protokol ini.[[26]](#footnote-26) Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 85 ayat (5) Protokol Tambahan I 1977, yang menyatakan bahwa tanpa mengurangi penerapan Konvensi dan Protokol ini, pelanggaran berat atas piagam tersebut harus disebut kejahatan perang. Berdasarkan uraian pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran berat *(grave breaches)* yang disebut dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I 1977, dapat dianggap sebagai kejahatan perang *(war crimes).*

1. **Kategori Kejahatan Perang**

Menurut Mangai Natarajan, kejahatan perang dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: [[27]](#footnote-27)

1. Penggunaan senjata yang dilarang

Kategori pertamakejahatan perang tersebut berupaya melindungi baik para kombatan maupun nonkombatan dengan cara melarang penggunaan senjata yang secara alamiah menyebabkan bahaya berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu atau tidak pandang bulu. Statuta Roma 1998 misalnya melarang penggunaan senjata beracun, gas *asphyxiating*, dan peluru yang menyebar ketika ditembakkan.

1. Keterlibatan dalam piranti pertempuran yang dilarang

Dalam Statuta Roma 1998 berisi daftar campuran mengenai piranti perang yang dilarang. Piranti yang dilarang tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, membunuh atau melukai kombatan yang telah meletakkan senjata, perampasan, kekerasan seksual, dan penggunaan orang-orang sipil sebagai tameng hidup.

1. Pengubahan status penduduk sipil

Pengubahan status orang sipil pada masa perang dikembangkan untuk mencegah pihak yang tengah berperang agar tidak menggunakan taktik yang bisa menghancurkan struktur nasional atau komunitas tertentu adalah termasuk kejahatan perang, misalnya memaksa orang sipil dari negara musuh untuk ambil bagian dalam kekejaman terhadap negara mereka sendiri.

1. Kejahatan terarah

Kejahatan terarahmelibatkan pelanggaran terhadap prinsip yang menyatakan bahwa para partisipan dalam konflik bersenjata hanya boleh menargetkan kombatan dan objek militer, dan harus menahan diri untuk tidak menargetkan penduduk dan objek sipil.

1. **Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional Yang Harus Dipatuhi Oleh Negara Yang Sedang Berperang**

Pada prinsipnya HHI hanya berlaku selama terjadinya konflik bersenjata pada negara yang sedang berperang. Secara garis besar HHI berupaya untuk mengatur perilaku permusuhan agar dapat meminimalkan penderitaan manusia yang dalam hal ini HHI berupaya menyeimbangkan antara keperluan militer *(the military necessity)* yang timbul dalam keadaan perang dan kebutuhan untuk pelindungan kemanusiaan *(the needs for humanitarian protection).[[28]](#footnote-28)*

Prinsip lain dari HHI bahwa pada dasarnya tidak melarang semua jenis kekerasan dan tidak melarang perang itu sendiri. HHI hanya mengatur para pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata agar melindungi kemanusiaan dan menjamin perlindungan bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran (termasuk properti mereka) serta objek lain (seperti rumah sakit, bangunan sekolah, tempat ibadah, situs budaya dan lain sebagainya).[[29]](#footnote-29)

Prinsip-prinsip dasar *(general principle)* tersebut dijabarkan dalam prinsip-prinsip dasar *(basic principle)* HHI sebagai berikut:[[30]](#footnote-30)

1. Prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan kombatan *(distinction between civillians and combatants)*

Prinsip ini menegaskan bahwa hanya para prajurit *(combatants)* yang berperang saja yang boleh menjadi target langsung. Pasal 48 dan Pasal 52 Protokol Tambahan I 1977 menetapkan kombatan dan objek militer adalah yang secara sah dapat diserang. Setiap serangan langsung terhadap penduduk sipil dan/atau objek warga sipil dikategorikan sebagai kejahatan perang *(war crimes).* Setiap senjata yang tidak mampu membedakan antara warga sipil/objek sipil dan pejuang/objek militer juga dilarang dibawah HHI.[[31]](#footnote-31) Tanpa prinsip pembedaan tidak akan ada batasan dalam metode perang yang dengan kata lain prinsip ini mendasari perlunya pembatasan metode perang.

1. Prinsip larangan menyerang terhadap mereka yang termasuk dalam *hors de combat* *(prohibition of attacks against those hors de combat);*

Yang dimaksud dengan *hors de combat* adalah kombatan yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran karena sakit, terluka, terdampar, dan menjadi tawanan perang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 Protokol Tambahan I 1977 bahwa seorang yang diakui, atau dalam keadaan harus diakui, sebagai *hors de combat* dilarang untuk menjadi objek serangan. Seorang tentara dapat menjadi sasaran sah dalam keadaan normal, tetapi jika tentara itu menyerah atau terluka dan tidak lagi menimbulkan ancaman maka dilarang untuk menyerang orang itu. Selain itu mereka berhak atas pelindungan lebih lanjut jika mereka memenuhi kriteria sebagai tawanan perang *(prisoner of war).*

1. Prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu *(prohibition on the infliction of unnecessary suffering)*

Pada dasarnya HHI tidak melarang perang atau konflik bersenjata dan setiap perang pasti menggunakan kekerasan *(the use of violence).* Meskipun penggunaan kekerasan diizinkan atau tidak dilarang oleh HHI, penggunaan kekerasan dilarang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dan cidera yang berlebihan *(superfluous injury).* Bahkan prajurit yang secara sah dapat diserang, diberikan pelindungan melalui larangan ini. Salah satu contoh aturan yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip ini adalah larangan penggunaan senjata laser yang dapat menyebabkan kebutaan.

1. Prinisip proporsionalitas *(the principle of proportionality);*

Prinsip batas proporsionalitas dan melindungi potensi yang membahayakan warga sipil dengan cara menuntut bahwa sedikit mungkin jumlah kerugian yang ditimbulkan untuk warga sipil dan ketika membahayakan warga sipil terjadi harus sebanding dengan keuntungan militer. Misalnya serangan langsung terhadap warga sipil dilarang dan dan karenanya penilaian proporsionalitas bukan sebuah penilaian hukum yang relevan, bahkan setiap serangan langsung terhadap warga sipil yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan maka jelas melanggar HHI. Pelaksanaan prinsip proporsionalitas ini juga ditujukan untuk melindungi lingkungan. Artinya setiap serangan yang dilakukan dalam konflik bersenjata harus mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Ketentuan yang mengatur prinsip proporsionalitas dapat ditemukan dalam dalam Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I 1977.[[32]](#footnote-32)

1. Gagasan tentang kepentingan *(the notion of necessity)*

Sebuah gagasan kepentingan militer sering berbenturan dengan prinsip perindungan kemanusiaan. Kepentingan militer memungkinkan angkatan bersenjata untuk terlibat dalam perilaku yang akan menghasilkan kerusakan dan menimbulkan bahaya bagi manusia. Konsep kepentingan militer mengakui bahwa di bawah hukum perang, memenangkan perang atau pertempuran adalah pertimbangan yang sah namun konsep kepentingan militer tidak memberikan angkatan bersenjata kebebasan untuk mengabaikan pertimbangan kemanusian sama sekali dan melakukan apapun yang mereka inginkan dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 52 Protokol Tambahan I 1977.

1. Prinsip kemanusiaan *(the principle of humanity)*

Prinsip kemanusiaan menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian untuk semua, bahkan musuh bebuyutan mereka sekalipun. Gagasan kemanusiaan adalah penting bagi manusia dan inilah yang membedakan manusia dari binatang. Prinsip-prinsip kemanusiaan dapat ditemukan dalam semua budaya dan agama besar. HHI modern tidak naif dan menerima bahwa bahaya, kehancuran dan kematian bisa dibenarkan selama konflik bersenjata. HHI hanya dimaksudkan untuk membatasi kerugian dan prinsip kemanusiaan sangat banyak di tengah ambisi ini.

Setiap prinsip dasar tersebut dapat ditemukan dalam aturan-aturan dan norma-norma khusus HHI itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar itu juga dapat membantu penafsiran hukum ketika kita menemui sebuah masalah hukum tidak jelas atau kontroversial. Selain itu, keseimbangan antara prinsip dan kepentingan dapat bergeser atau berubah. Sebagai contoh selama situasi permusuhan, kebutuhan militer dapat membatasi gagasan kemanusiaan dengan membiarkan terjadinya sebuah kehancuran. Dalam situasi lain seperti ketika mewajibkan pelindungan korban luka dan sakit, prinsip kemanusiaan adalah jantung dari aturan-aturan HHI.

1. **Analisis**
2. **Pengaturan Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional**

Kejahatan perang termasuk dalam jenis kejahatan internasional yang terlebih dahulu ada dibandingkan dengan jenis kejahatan internasional lain. Bahkan, kemunculan konsep genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan *(crimes against humanity)* bersumber pada konsep kejahatan perang.[[33]](#footnote-33) Hukum internasional yang secara langsung mencakup HHI dan hukum pidana internasional mengatur tentang perang serta pelaku kejahatan perang.

Kejahatan perang merupakan suatu tindakan yang berdasar pada suatu tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan tersebut ada didalam suatu konflik bersenjata. Adapun istilah “kejahatan perang” lebih tepat dipahami bukan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum perang (dalam arti sempit), melainkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter.[[34]](#footnote-34)

Dalam HHI ada beberapa konvensi-konvensi yang memberikan regulasi mengenai perang. *Pertama,* Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (Konvensi Den Haag IV) dimana konvensi tersebut juga memberikan pedoman mengenai penggunaan sarana dan metode peperangan, pelaksanaan permusuhan dan pendudukan. *Kedua,* Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur Perbaikan Keadaan Yang Luka dan Sakit Dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat (Konvensi Jenewa I), Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Di laut Yang Luka, Sakit, dan Korban Karam (Konvensi Jenewa II), Perlakuan Tawanan Perang (Konvensi Jenewa III), dan Perlindungan Warga Sipil di Masa Perang (Konvensi Jenewa IV). *Ketiga,* Protokol Tambahan I 1977 yang mengatur Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II 1977 tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional, *Keempat,* Statuta Roma 1998 yang mengatur tentang Mahkamah Pidana Internasional dimana diatur juga mengenai kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Konvensi Den Haag 1907 merupakan salah satu konvensi penting dalam perkembangan hukum internasional yang mengatur perilaku negara-negara dalam perang. Konvensi ini bertujuan untuk mengatur cara berperang dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat dalam permusuhan. Konvensi Den Haag pertama kali diselenggarakan pada tahun 1899 dimana Konvensi tersebut merupakan pernyataan formal pertama tentang hukum perang dan kejahatan perang dalam hukum internasional yang baru berkembang saat itu. Konvensi Den Haag 1899 menghasilkan 4 (empat) bagian utama dan 3 (tiga) deklarasi tambahan yang mengatur : (I) Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional, (II) Hukum dan Kebiasaan Perang Darat, (III) Penyesuaian Prinsip-Prinsip Konvensi Jenewa 1864 terhadap Peperangan Laut, (IV) Larangan Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon, Deklarasi I mengenai Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon, Deklarasi II mengenai Penggunaan Proyektil yang Tujuannya Ialah Menyebarkan Gas Pencekik atau Gas Perusak, dan Deklarasi III mengenai Penggunaan Peluru yang Mengembang atau Merata dengan Mudah dalam Tubuh Manusia.[[35]](#footnote-35) Tujuan utama dari Konvensi Den Haag 1899 adalah untuk melarang negara yang berperang untuk menggunakan teknologi modern jenis-jenis tertentu yaitu: pengeboman dari udara, perang kimia *(chemical warfare),* dan peluru dengan ujung berongga *(hollow point bullets).*

Untuk melengkapi dan menjelaskan secara rinci Konvensi Den Haag yang pertama maka pada 15 Juni 1907 diadakan Konvensi Den Haag yang kedua yang lebih berfokus pada hukum dan kebiasaan perang didarat.[[36]](#footnote-36) Konvensi Den Haag 1907 menghasilkan 13 (tiga belas) bagian utama dan 2 (dua) deklarasi tambahan yang mengatur: (I) Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional, (II) Pembatasan Penggunaan Kekuatan untuk Penagihan Utang Kontrak, (III) Pembukaan Permusuhan, (IV) Hukum dan Kebiasaan Perang Darat, (V) Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral Bilamana Terjadi Perang Darat, (VI) Status Kapal Dagang Musuh Ketika Pecah Permusuhan, (VII) Konversi Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang, (VIII) Penempatan Ranjau Kontak Bawah Laut Otomatis, (IX) Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut di Masa Perang, (X) Penyesuaian Prinsip-Prinsip Konvensi Jenewa terhadap Perang Laut, (XI) Pembatasan Tertentu Menyangkut Pelaksanaan Hak Menangkap dalam Perang Laut, (XII) Pendirian Pengadilan Hadiah Internasional, (XIII) Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang Laut, Deklarasi I yang isinya memperluas isi Deklarasi II dari Konferensi 1899 untuk mencakup jenis-jenis lain dari pesawat terbang, dan Deklarasi II mengenai arbitrase wajib.[[37]](#footnote-37)

Meskipun dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 tidak menyebutkan secara spesifik apa yang disebut dengan kejahatan perang, tetapi dalam Pasal 23 Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat secara khusus melarang negara yang berperang menggunakan racun atau senjata beracun, membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh, membunuh atau melukai lawan yang sudah menyerah, menggunakan senjata, proyektil yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu, menyalahgunakan bendera perdamaian, bendera nasional atau tanda militer dan seragam musuh, serta menghancurkan harta benda milik musuh.

Dalam Pasal 25 dan Pasal 27 Konvensi Den Haag IV juga melarang negara yang berperang untuk menyerang atau melakukan pengeboman terhadap kota, kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan baik tempat ibadah, tempat kesenian, ilmu pengetahuan, panti sosial, tempat bersejarah, rumah sakit dimana tidak digunakan untuk kepentingan militer. Selain itu dalam Pasal 28 Konvensi Den Haag IV juga melarang penjarahan terhadap suatu kota atau tempat walaupun diperoleh dengan cara penyerangan.

Aturan hukum mengenai kejahatan perang beserta bentuk-bentuknya diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 8 ayat (2) Statuta Roma 1998 yang menyebutkan bahwa yang disebut sebagai kejahatan perang *(war crimes)* adalah:

1. Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak-milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan: (i) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar; (ii) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis; (iii) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau kesehatan; (iv) Perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan; (v) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinas dalam pasukan dari suatu Angkatan Perang lawan; (vi) Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil; (vii) Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah; (viii) Menahan sandera.
2. Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan berikut ini: (i) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu; (ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu, objek yang bukan merupakan sasaran militer; (iii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam PBB, sejauh bahwa mereka berhak atas pelindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai sengketa bersenjata; (iv) Secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidentil terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkret dan langsung dan yang dapat diantisipasi; (v) Menyerang atau membom, dengan sarana apa pun, kota-kota, desa, perumahan atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer; (vi) Membunuh atau melukai seorang lawan yang, setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri atas kemauannya sendiri; (vii) Memanfaatkan secara tidak benar bendera gencatan senjata, atau bendera atau lencana dan seragam militer dari pihak lawan atau milik PBB, maupun tanda-tanda khusus dari Konvensi Jenewa, yang menyebabkan kematian atau luka-luka serius pada individu-individu tertentu; (viii) Pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pasukan Pendudukan terhadap sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan semua atau sebagian dari wilayah yang diduduki itu baik di dalam wilayah itu sendiri maupun ke luar wilayah tersebut; (ix) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer; (x) Membuat orang-orang yang berada dalam kekuasaan suatu pihak yang bermusuhan menjadi sasaran perusakan fisik atau percobaan medis atau ilmiah dari berbagai jenis yang tidak dapat dibenarkan oleh perawatan medis, gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun yang dilakukan tidak demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau sangat membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut; (xi) Membunuh atau melukai secara curang orang-orang yang termasuk pada bangsa atau Angkatan Perang lawan; (xii) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal bagi para tawanan; (xiii) Menghancurkan atau merampas hak-milik lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tak dapat dihindarkan; (xiv) Menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterimanya dalam suatu pengadilan hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak lawan; (xv) Memaksa warga negara dari pihak yang bemusuhan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang ditujukan terhadap negaranya sendiri, bahkan kalau mereka berada dalam dinas lawan sebelum dimulainya perang; (xvi) Menjarah kota atau tempat, bahkan apabila tempat tersebut dikuasai lewat serangan; (xvii) Menggunakan racun atau senjata yang dibubuhi racun; (xviii) Menggunakan gas yang menyesakkan napas, beracun atau lain-lain dan semua cairan, bahan atau peralatan yang serupa; (xix) Menggunakan peluru yang melebar atau menjadi rata dengan mudah di dalam badan seseorang, seperti misalnya peluru dengan selongsong keras yang tidak seluruhnya menutupi intinya atau yang ditusuk dengan torehan; (xx) Menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang merupakan suatu sifat yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa besar atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil dan material serta metode peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada Statuta ini, dan dengan amendemen yang sesuai dengan ketentuan relevan yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 123; (xxi) Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia; (xxii) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (f), sterilisasi yang dipaksakan, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa; (xxiii) Memanfaatkan kehadiran seorang sipil dan orang lain yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat, daerah atau pasukan militer tertentu kebal terhadap operasi militer; (xxiv) Secara sengaja menujukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional; (xxv) Secara sengaja memanfaatkan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metode peperangan dengan memisahkan mereka dari objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk secara sadar menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa; (xxvi) Menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam Angkatan Bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.
3. Dalam hal suatu sengketa bersenjata yang bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang umum bagi 4 (empat) Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu, salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan atau suatu sebab lain: (i) Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh (mutilasi), perlakuan kejam dan penyiksaan; (ii) Melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat; (iii) Menahan sandera; (iv) Dijatuhkannya hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara reguler, yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak terelakkan.
4. Ayat 2 (c) berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi keadaan-keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang sama sifatnya.
5. Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan berikut ini: (i) Secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian; (ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung, material, satuan, dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional; (iii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan, atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam PBB sepanjang mereka berhak atas pelindungan yang diberikan kepada orang-orang dan objek-objek sipil berdasarkan hukum perang; (iv) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dikumpulkan, dengan syarat bahwa hal-hal tersebut bukan sasaran militer; (v) Menjarah suatu kota atau tempat, sekalipun tempat itu dikuasai lewat serangan; (vi) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (f), sterilisasi yang dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa; (vii) Memberlakukan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian; (viii) Mengatur perpindahan penduduk sipil dengan alasan yang berkaitan dengan sengketa, kecuali kalau keamanan orang-orang sipil tersebut terancam atau alasan militer yang amat penting menuntutnya; (ix) Membunuh atau melukai secara curang seorang lawan tempur; (x) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal kepada tawanan; (xi) Menempatkan orang-orang yang berkuasa dari pihak lain dalam sengketa itu sebagai sasaran mutilasi atau pemotongan anggota tubuh secara fisik atau percobaan medis atau suatu jenis percobaan ilmiah yang tidak dapat dibenarkan oleh perlakuan medis, perawatan gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun tidak melaksanakan demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan dari orang atau orang-orang tersebut; (xii) Menghancurkan atau merampas hak milik dari seorang lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut sangat dituntut oleh kebutuhan dari sengketa tersebut; (f) Ayat 2 (e) berlaku untuk sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain dengan sifat yang sama. Ayat ini berlaku terhadap sengketa bersenjata yang berlangung dalam wilayah suatu negara apabila terjadi sengketa bersenjata yang berkelanjutan antara para pejabat pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu.

Dari apa yang sudah dijelaskan pada kedua Konvensi tersebut maka dapat di analisis perbedaan yang terdapat dalam Konvensi Den Haag 1907 dengan Statuta Roma 1998. Pada Konvensi Den Haag 1907 belum mengatur serta menjelaskan definisi kejahatan perang. Konvensi ini berfokus pada peraturan mengenai cara dan alat yang boleh digunakan dalam berperang serta pelindungan terhadap warga sipil dan properti sipil. Selain itu, Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip umum yang menjadi etika dasar dalam berperang, seperti larangan penggunaan senjata kimia beracun dan pelindungan bagi tawanan perang. Pembatasan tersebut masih bersifat umum dan belum mempunyai regulasi yang ketat seperti instrumen hukum internasional modern.

Statuta Roma 1998 memperluas dan memperjelas kategori kejahatan perang serta memberikan definisi yang lebih rinci terhadap tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan perang, seperti pembunuhan massal, serangan terhadap penduduk sipil, penggunaan senjata yang dilarang, dan penyanderaan. Statuta Roma 1998 juga mengakui tanggung jawab individu, tidak hanya negara, dalam pelanggaran hukum perang, sehingga memperluas cakupan hukum internasional dan memperkuat mekanisme penegakan hukum bagi pelaku kejahatan perang.

Perbedaan mendasar antara Konvensi Den Haag 1907 dan Statuta Roma 1998 adalah cakupan dan sifat sanksinya. Konvensi Den Haag lebih mengedepankan prinsip-prinsip normatif dalam perang tanpa adanya mekanisme penegakan yang jelas. Disisi lain, Statuta Roma 1998 menyediakan kerangka kerja yudisial yang konkret, yaitu ICC yang memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang. Ini menjadikan Statuta Roma 1998 sebagai instrumen yang lebih efektif dalam memastikan keadilan bagi korban kejahatan perang.[[38]](#footnote-38)

Dalam Konvensi Den Haag 1907, aturan mengenai pelindungan terhadap penduduk sipil dan tawanan perang lebih bersifat umum dan fokus pada peraturan perang konvensional. Sedangkan pada Statuta Roma 1998, memperhitungkan perkembangan teknologi dan taktik militer modern, seperti penggunaan senjata pemusnah massal dan perang asimetris dimana perang tersebut terjadi antara 2 (dua) belah pihak yang mempunyai kekuatan militer berbeda, yang sebelumnya tidak diatur pada saat Konvensi Den Haag 1907 diadopsi. Dengan demikian, Statuta Roma 1998 dapat merespons tantangan baru dalam perang modern dengan lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, Konvensi Den Haag 1907 dan Statuta Roma 1998 mencerminkan suatu perkembangan dalam HHI. Konvensi Den Haag 1907 menjadi dasar fundamental awal yang penting, sementara Statuta Roma 1998 membawa penegasan lebih lanjut terhadap pentingnya akuntabilitas individu. Kedua instrumen dalam Konvensi ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam mengatur kejahatan perang dan memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban.

1. **Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Perang Israel dan Palestina**

Dengan mengetahui konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang perang serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam HHI maka jelas bahwa konflik bersenjata yang terjadi antara Israel terhadap Palestina merupakan kejahatan perang dan telah melanggar HHI.

Dalam konflik bersenjata, Israel telah melakukan serangan dan pengeboman terhadap beberapa objek vital di Gaza seperti halnya rumah sakit yang digunakan untuk merawat penduduk sipil yang menjadi korban dalam perang. Ada 3 (tiga) rumah sakit di Gaza yang sudah dihancurkan oleh Israel diantaranya Rumah Sakit Al Ahli, Rumah Sakit Indonesia, dan Rumah Sakit Al-Quds.[[39]](#footnote-39) Akibat dari serangan militer yang berulang-ulang terhadap fasilitas medis, staf medis, dan trasportasi semakin menghancurkan sistem fasilitas kesehatan dan Kementerian Kesehatan Palestina menginformasikan bahwa sebanyak 1.150 tenaga medis Palestina menjadi korban dalam serangan tersebut. Jumlah korban yang tewas mencakup 156 dokter, 260 perawat dan 300 staf pendukung.[[40]](#footnote-40)

Serangan Israel di Jalur Gaza juga menghancurkan tempat ibadah dan sekolah. Sebanyak 814 dari 1.245 masjid hancur dan 148 masjid lainnya mengalami kerusakan parah.[[41]](#footnote-41) Tidak hanya masjid, pasukan Israel juga menghancurkan 3 gereja dan membuat kerusakan pada 212 sekolah yang membuat sekitar 2.125 pelajar menjadi korban.[[42]](#footnote-42) Selain melakukan serangan dan pengeboman, warga sipil Israel juga melakukan blokade dan perusakan terhadap bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh Palang Merah Internasional *(International Committee of Red Cross)* baik medis maupun logistik untuk Gaza. Aksi tersebut mencerminkan posisi Israel yang tidak menghendaki masuknya bantuan kemanusiaan serta menghalangi-halangi pendistribusiannya pada korban perang.[[43]](#footnote-43)

Dari fakta-fakta yang terjadi maka Israel telah melanggar ketentuan dalam Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat terutama dalam Pasal 27. Pasal ini melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit serta tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah dalam konflik bersenjata.

Selain itu apa yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dalam konflik bersenjata juga melanggar Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil di Masa Perang diantaranya ketentuan dalam Pasal 3 yang mengatur pelindungan terhadap orang-orang yang tidak mengambil bagian secara aktif dalam permusuhan, termasuk warga sipil. Konvensi ini melarang perlakuan kejam dan memerintahkan penyediaan perawatan dan pelindungan yang layak.

Pasal lain yang dilanggar oleh Israel yaitu Pasal 55 Konvensi Jenewa IV 1949 dimana jika terjadi perang antar negara, maka pemberian bantuan kemanusiaan berupa persediaan makanan dan obat-obatan bagi warga sipil yang membutuhkan harus diizinkan dan tidak boleh ditunda. Pihak-pihak yang terlibat konflik juga memfasilitasi kerja Palang Merah dan organisasi kemanusiaan serupa dalam memberikan bantuan kepada warga sipil yang terkena dampak konflik seperti yang tercantum dalam Pasal 59 Konvensi Jenewa IV 1949. Pembatasan terhadap akses bantuan kemanusiaan ke Gaza saat perang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, terutama jika akses tersebut disengaja.

Sejak terjadinya konflik bersenjata antara Israel dan Palestina pada 7 Oktober 2023, telah mengakibatkan korban penduduk sipil yang tewas mencapai lebih dari 1.200 orang.[[44]](#footnote-44) Pada bulan Juni 2024, *Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS)* mencatat bahwa 36.171 korban berada di Jalur Gaza, sementara 519 korban berada di Tepi Barat dimana wanita dan anak-anak menjadi korban yang paling banyak dalam konflik bersenjata tersebut.[[45]](#footnote-45)

Dengan adanya kejadian tersebut, Israel telah melanggar prinsip kemanusian dalam HHI yang mana prinsip kemanusiaan menetapkan bahwa semua manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menunjukkan rasa hormat dan kepedulian untuk semua, bahkan musuh bebuyutan mereka sekalipun. Prinsip ini melarang serangan langsung terhadap warga sipil, tenaga medis, pers, dan relawan kemanusiaan serta mengharuskan masyarakat sipil dijauhkan dari medan pertempuran dan meminimalkan korban jiwa.

Pasal 53 Protokol Tambahan I 1977 menentukan perlindungan kepada objek-objek yang menjadi cagar budaya dan tempat ibadah. Perlindungan terhadap objek-objek yang diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil diatur dalam Pasal 54 Protokol Tambahan I 1977. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dilarang menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang. Pasal 56 Protokol Tambahan I 1977 menentukan bahwa bendungan, pusat pembangkit tenaga listrik tidak boleh dijadikan sasaran perang.

Israel juga telah melanggar prinsip pembedaan dimana prinsip ini menegaskan bahwa hanya para kombatan yang berperang saja yang boleh menjadi target langsung. Pasal 48 dan Pasal 52 Protokol Tambahan I 1977 menetapkan bahwa kombatan dan objek militer adalah yang secara sah dapat diserang. Setiap serangan langsung terhadap penduduk sipil dan/atau objek warga sipil dikategorikan sebagai kejahatan perang *(war crimes).* Sebagian besar korban yang tewas pada bulan Juni 2024 adalah penduduk sipil yang mencapai 36.171 orang.[[46]](#footnote-46) Selain itu Israel telah menghancurkan objek-objek sipil antara lain, rumah penduduk, rumah sakit, sekolah, instalasi listrik dan air, bahkan tempat ibadah.

Kekejaman Israel dalam konflik bersenjata terhadap warga sipil Palestina, selain melanggar HHI dan prinsip-prinsip dasar dalam HHI, juga telah melakukan kejahatan perang seperti yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Hal tersebut ditunjukkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (a) dimana kejahatan perang berarti pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 yang meliputi: pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, dan kesengajaan yang mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan.

Disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (b) Statuta Roma 1998 yang menyatakan pelanggaran berat terhadap hukum kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional meliputi: dengan sengaja mengarahkan serangan pada penduduk sipil secara individu yang tidak ikut secara langsung dalam perang; dengan sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil yang bukan merupakan objek militer; dengan sengaja menyerang personil, instalasi, bahan-bahan, unit atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan sesuai dengan Piagam PBB; penyerangan dengan cara apapun terhadap kota-kota, desa-desa, gedung-gedung yang bukan merupakan objek militer; dengan sengaja menyerang gedung-gedung yang diperuntukkan untuk ibadah, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan amal, monument historis, rumah sakit yang bukan merupakan objek militer; menggunakan racun atau senjata beracun, menggunakan gas *asphyxiating*; dan mengarahkan serangan pada bangunan, unit medis yang menggunakan perangkat khusus dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional.

1. **Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Kejahatan Perang Israel dan Palestina**

Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina mendapatkan reaksi yang sangat keras dari masyarakat internasional. Negara-negara yang peduli akan perdamaian dunia menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang sehingga Israel dapat diadili ke Mahkamah Internasional. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter ada 4 (empat) alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan untuk menghukum pelaku kejahatan perang, yaitu:[[47]](#footnote-47)

1. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977

Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949 maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa harus menerbitkan undang-undang nasional yang dapat memberi sanksi pidana yang efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi.

1. Mahkamah *Ad Hoc* Kejahatan Perang

Dalam sejarah dikenal ada 2 (dua) Mahkamah yang mengadili penjahat Perang Dunia II yaitu, Mahkamah Tokyo untuk mengadili para penjahat perang Jepang, mahkamah Nuremberg untuk mengadili penjahat perang Nazi, Jerman. Setelah Perang Dunia II berakhir, dibentuk Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia *(international criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY)* dan untuk Rwanda *(International Criminal Tribunal for Rwanda).*

1. Mahkamah Internasional *(International Court of Justice/ICJ)*

ICJdidirikan berdasarkan Piagam PBB pada tahun 1945 yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa antar negara dengan cara damai berdasarkan hukum internasional. ICJ juga memberikan nasihat hukum kepada badan-badan PBB, seperti Majelis Umum PBB atau Dewan Keamanan PBB, serta badan-badan khusus lainnya yang diakui oleh PBB. ICJ dapat mengadili berbagai jenis sengketa yang melibatkan pelanggaran terhadap hukum internasional yang meliputi:[[48]](#footnote-48) sengketa perbatasan antara negara mengenai batas wilayah darat atau maritim, sengketa yang timbul dari dugaan pelanggaran terhadap perjanjian atau konvensi internasional yang telah disepakati oleh negara-negara, sengketa yang melibatkan penggunaan kekuatan militer oleh satu negara terhadap negara lain, seperti invasi atau intervensi militer, sengketa yang berkaitan dengan klaim kedaulatan atas wilayah tertentu, dan sengketa yang berkaitan dengan HAM, dimananegara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM dalam konteks sengketa antarnegara.

1. Mahkamah Pidana Internasional *(International Criminal Court/ICC)*

ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998. Mahkamah ini bersifat permanen untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang sangat serius *(the most serious crimes).* ICC berwenang mengadili 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.[[49]](#footnote-49) ICC bersifat sebagai pelengkap dari pengadilan nasional, artinya jika suatu negara tidak mau *(unwilling)* atau tidak mampu *(unable)* mengadili pelaku kejahatan perang maka ICC baru dapat melaksanakan jurisdiksinya. Negara-negara anggota PBB tidak secara otomatis terikat oleh Jurisdiksi ICC, tetapi melalui suatu pernyataan untuk mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Roma 1998. ICC mulai berlaku secara efektif sejak tahun 2002 ketika sudah mencapai 60 negara yang meratifikasi dan hingga saat ini Amerika Serikat dan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998. [[50]](#footnote-50)

Dari keempat mekanisme penegakan hukum humaniter tersebut di atas dapat dianalisis kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengadili Israel atas kejahatan perang terhadap Palestina. *Pertama,* Melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang menyebutkan bahwa negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 harus menerbitkan undang-undang nasional yang memberi sanksi pidana efektif bagi pelaku kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa I, Pasal 50 Konvensi Jenewa II, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 146 Konvensi Jenewa IV, dan Pasal 85 Protokol Tambahan I 1977. Dalam hal ini Israel telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 pada 6 Juli 1951. Oleh karena itu, Israel terikat secara hukum oleh keempat Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur pelindungan terhadap korban perang, termasuk penduduk sipil dalam konflik bersenjata, tawanan perang, dan anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit.

Akan tetapi, Israel **tidak meratifikasi Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II** 1977yang mengaturtentang perlindungan penduduk sipil dan cara berperang dalam konteks konflik internasional dan non-internasional. Oleh karena itu, Israel secara teknis, **tidak terikat langsung** oleh ketentuan-ketentuan di dalamnya. Dengan demikian, sulit untuk menggunakan Protokol Tambahan ini sebagai dasar hukum untuk mengadili Israel secara langsung. Namun, beberapa aturan di dalam Protokol Tambahan telah diakui sebagai bagian dari **hukum kebiasaan internasional,** yang berarti bahwa meskipun Israel tidak meratifikasi protokol tersebut, beberapa ketentuan tetap dapat dianggap mengikat secara umum. Meskipun Israel terikat oleh Konvensi Jenewa 1949, penegakan hukum internasional sering kali bergantung pada **kemauan politik** negara-negara anggota PBB terutama Dewan Keamanan PBB yang memiliki otoritas untuk memberikan sanksi atau merujuk kasus ke pengadilan internasional dimana sering kali terhambat oleh penggunaan hak veto oleh negara-negara besar, terutama Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel.

*Kedua,* Melalui mahkamah *Ad Hoc* yang khusus mengadili kejahatan Israel di Palestina di mungkinkan jika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk membentuk mahkamah ini seperti dalam pembentukan Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Mahkamah Kriminal Internasional untuk Rwanda*.* Masyarakat internasional dapat terus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membentuk pengadilan kejahatan perang Israel. Kelemahan dalam mekanisme ini harus mendapat dukungan dari 5 (lima) anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Republik Rakyat Cina. [[51]](#footnote-51)

Mekanisme *Ketiga,* melalui Mahkamah Internasional (ICJ) seperti yang dilakukan oleh Afrika Selatan pada tahun 2023, yang menyeret Israel ke **ICJ** dikarenakan konflik yang terus berlanjut antara Israel dan Palestina, khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran HAM di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat. Langkah ini dilakukan karena Israel telah melakukan blokade di Jalur Gaza, pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat, serta penggunaan kekuatan militer yang sering kali dianggap berlebihan terhadap penduduk sipil Palestina.

Afrika Selatan menuduh Israel telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, khususnya kejahatan perang yang melibatkan penduduk sipil dan infrastruktur sipil di wilayah Palestina, pelanggaran HAM terutama yang berkaitan dengan tindakan kekerasan, pembunuhan, pengusiran warga sipil Palestina dan pelanggaran atas hukum internasional terkait pendudukan militer, termasuk pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat yang melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa IV 1949.

Untuk membawa suatu kasus tersebut ke **ICJ**, harus memenuhi beberapa prosedur:[[52]](#footnote-52)

1. **Persetujuan Yuridiksi *(Contentious Cases)***

ICJ hanya dapat menangani kasus jika kedua negara setuju untuk tunduk pada yurisdiksi ICJ dalam bentuk persetujuan khusus *(special agreement)*. Dalam kasus ini, Afrika Selatan bisa mengajukan permohonan, tetapi Israel harus menyetujui yurisdiksi ICJ agar pengadilan dapat menangani kasus tersebut. Namun, negara-negara dapat menggunakan berbagai perjanjian internasional atau resolusi PBB untuk mendesak ICJ untuk memberikan opini penasehat *(advisory opinion).*

1. **Opini Penasehat *(Advisory Opinion)***

Jika persetujuan yurisdiksi tidak dapat diperoleh, Afrika Selatan dapat mengupayakan **opini penasehat** dari ICJ melalui Majelis Umum atau Dewan Keamanan PBB. Meskipun tidak mengikat, opini penasehat ICJ memiliki bobot moral dan politik yang signifikan, seperti yang pernah dilakukan dalam kasus **tembok pemisah Israel di Tepi Barat pada tahun 2004** dimana ICJ menyatakan pembangunan tembok tersebut ilegal berdasarkan hukum internasional.

Salah satu hambatan utama dalam membawa Israel ke ICJ adalah **politik internasional**. Meskipun Afrika Selatan bisa mendorong isu ini melalui berbagai forum internasional, keberhasilan langkah ini tergantung pada dukungan internasional dan dinamika di Dewan Keamanan PBB. Dalam beberapa kasus, negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, yang merupakan sekutu dekat Israel, mungkin akan menggunakan hak veto mereka untuk memblokir resolusi yang mendesak tindakan terhadap Israel.

Mekanisme terakhir yaitu dengan ICC sebagai pengadilan tetap yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2002 namun kewenangan ICC ini hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998. Sebenarnya Israel sudah menandatangani Statuta Roma 1998 pada 31 Desember 2000, tetapi menarik dukungan dan membatalkan penandatanganannya pada 28 Agustus 2002 dengan alasan adanya kekhawatiran atas potensi penyelidikan dan penuntutan oleh **ICC** terhadap tindakan Israel dalam konflik dengan Palestina. Penarikan ini berarti Israel tidak terikat oleh kewajiban Statuta Roma 1998 dan tidak berada di bawah yurisdiksi ICC, kecuali jika Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi untuk merujuk situasi di wilayah Israel atau Palestina ke ICC, atau jika Israel secara sukarela menerima yurisdiksi pengadilan tersebut.

Untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina maka perlu adanya kesatuan suara dan tekad yang kuat dari bangsa-bangsa Arab pada khususnya serta negara-negara di dunia pada umumnya. Konflik tersebut sudah tidak bisa disebut sebagai konflik berbasis teologis atau agama lagi tetapi sudah menyangkut ranah kemanusiaan dimana seharusnya hati nurani berbicara. Atas dasar rasa kemanusiaan itulah, negara-negara di dunia seharusnya mampu untuk mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik tersebut.

1. **Penutup**
2. **Simpulan**

Kejahatan perang merupakan suatu yang berdasar pada tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan dalam suatu konflik bersenjata. Istilah kejahatan perang bukan dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap hukum perang, melainkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter. Pengaturan dalam HHI terdapat dalam beberapa konvensi diantaranya Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat; Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Yang Luka dan Sakit Dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat; Protokol Tambahan I 1977 yang mengatur Konflik Bersenjata Internasional; dan Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dimana diatur juga mengenai kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Dalam konflik bersenjata yang melibatkan Israel dan Palestina maka Israel melanggar prinsip-prinsip dasar hukum humaniter yang terdiri dari:

* 1. Konvensi Den Haag 1907, Pasal 27 yang melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit serta tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah dalam konflik bersenjata.
  2. Konvensi Jenewa IV 1949, Pasal 3 yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil yang tidak ikut berperang. Pasal 55 mengenai bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang tidak boleh ditunda dan Pasal 59 mengenai palang merah dan organisasi kemanusiaan dalam memberikan bantuan kepada warga sipil.
  3. Protokol Tambahan I 1977, Pasal 48 dan Pasal 52 mengenai yang dapat diserang hanya kombatan dan objek militer. Pasal 53 dan Pasal 54 mengenai pelindungan kepada cagar budaya dan tempat ibadah, serta Pasal 56 mengatur bendungan dan pusat pembangkit tenaga listrik tidak boleh dijadikan sasaran perang.
  4. Statuta Roma 1998, Pasal 8 ayat (2) dimana Israel dengan sengaja menyerang warga sipil Palestina, melakukan serangan dan perusakan terhadap gedung-gedung, fasilitas medis, tenaga medis, monumen bersejarah, sekolah, dan perkantoran yang bukan menjadi objek militer.

1. **Saran**

Untuk menyelesaikan kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap Palestina maka perlu diadili ke ICC. Walaupun Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998, kejahatan perang ini bisa diadili dengan syarat bahwa semua negara Arab dan negara yang ikut dalam anggota PBB harus berkomitmen untuk bersatu atas dasar kemanusiaan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM. Konflik tersebut sudah tidak bisa disebut sebagai konflik berbasis teologis atau agama lagi tetapi sudah menyangkut genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dimana seharusnya hati nurani berbicara. Atas dasar rasa kemanusiaan dan penghormatan terhadap HAM itulah, negara-negara di dunia seharusnya mampu mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel tersebut dan mengabaikan hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

**Daftar Pustaka**

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Konvensi Den Haag 1907 tentang Penggunaan Alat dan Cara Berperang.

Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Akibat Konflik Bersenjata Baik yang Bertaraf Internasional maupun non-internasional.

London Charter of the International Military Tribunal tentang Perjanjian Penuntutan dan Penghukuman Terhadap Penjahat Perang Utama Poros Eropa.

Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.

**Putusan Pengadilan**

The International Military Tribunal for the Far East tentang Tokyo War Crimes Tribunal.

**Buku**

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Bakry, Umar Suryadi. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2019.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

ELSAM. S*tatuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional Mengadili Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi.* Jakarta:ELSAM, 2000.

Ghani, Abdul*. Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa Perdamaian*.Jakarta: PT Gramedia, 2013.

Henckaerts, Jean-Marie dan Louise Doswald-Bec. *Costumary International Humanitarian Law Volume I.* Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Hieriej, Eddy O.S. *Pengantar Hukum Pidana Internasional.* Jakarta: Erlangga, 2009.

ICR. *Protocols Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949.* Genewa: ICRC, 2010.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2005.

Melzer, Nils. *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif.* Jakarta: International Committee of the Red Cross, 2019.

Natarajan, Mangai. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Parthiana, I Wayan. *Hukum Pidana Internasional.* Bandung: Yrama Widya, 2015.

Siswanto, Arie. *Hukum Pidana Internasional.* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005.

\_\_\_\_\_\_\_. *Yurisdiksi Material Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Widyawati, Anis. *Hukum Pidana Internasional.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

**Jurnal**

Banjarani, Desia Rakhma. *Studi Perbandingan Kelembagaan Dan Yurisdiksi Internasional Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) Dan The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC),* Jurnal Fakultas Hukum Unila, Vol. 1 No. 1 Juli 2017.

Binti Nazri, Noor Atika Shafinaz. *Peranan Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) Dalam Konflik Kemanusiaan Di Palestina.* Journal of Islamic & Social Studies, Vol. 3 No. 1, Januari 2017.

Cahya, Ega Nur. *Agresi Israel Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Palestina*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 1, April 2022.

Cahyono, Heru. *Kejahatan Perang yang Diatur Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional.* Jurnal Hukum Humaniter, Vol 1 No. 1, Juli 2005.

Islamiyah, Nur dan Agus Trilaksana. *Aspek Historis Peranan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1955*. Jurnal Avatara, Vol. 3 No. 4, Juni 2016.

Kalolo, Julianto Jover Jotam. *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court of Justice/Mahkamah Internasional)*. Jurnal Jurisprudentie, Vol. 3 No. 2, Desember 2016.

Lamadju, Devian Abdulfatah. *Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.* Jurnal Lex Administratum, Vol. 6 No. 4, Juli 2018.

Maynard Soselisa, Dave. *Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Pattimura Law Study Review, Vol. 1 No. 1, Agustus 2023.

Muhamad, Simela Victor. *Konflik Palestina (Hamas)-Israel*. Jurnal Info Singkat, Vol. 15 No. 20, Oktober 2023.

Natanel, Katherine. *Border collapse and boundary maintenance: militarisation and the micro-geographies of violence in Israel–Palestine.* Journal Gender, Place and Culture, Vol. 23 No. 6, Juni 2016.

Nor, Mohd Roslan Mohd. *Konflik Israel-Palestina dari Aspek Sejarah Modern dan Langkah Pembebasan dari Cengkaman Zionis*. Jurnal of Al-Tamaddun, Vol. 5 No. 1, Juli 2010.

Paat, Vera Ellen. *Posisi Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1*. Jurnal Politico, Vol. 2 No. 1, Januari 2013.

Poluakan, Qrei M. *Perlindungan HAM Bagi Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perspektif Hukum HUmaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011)*. Jurnal Lex Adminstratum, Vol. 10 No. 3, Juli 2023.

Pratiwi, Nurlita. *Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina.* Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 2, April 2023.

Sompotan, Hendrik B. *Peranan Hukum Humaniter Dalam Masyarakat Internasional*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. 3 No. 1, Januari 2015.

Wotulo, Joshua R. *Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional.* Jurnal Lex et Societatis, Vol. 7 No. 4, April 2019.

Yuliantiningsih, Aryuni, *Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2, Mei 2009.

**Laman**

Aco, Hasanudin. *Hima Persis: Hentikan Kejahatan Perang, Wujudkan Kemerdekaan Palestina,* dimuat dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/06/01/hima-persis-hentikan-kejahatan-perang-wujudkan-kemerdekaan-palestina>, diakses tanggal 8 Oktober 2024.

Andhara Herawati, Ludwina. *Sejarah dan Asal Usul Bangsa Palestina,* dimuat dalam <https://news.okezone.com/read/2023/12/09/18/2935766/sejarah-dan-asal-usul-bangsa-palestina?page=all>, diakses tanggal 11 November 2024

Christiastuti, Novi. *Penyelidikan PBB Simpulkan Israel-Hamas Lakukan Kejahatan Perang.* Dimuat dalam <https://news.detik.com/internasional/d-7387551/penyelidikan-pbb-simpulkan-israel-hamas-lakukan-kejahatan-perang/1>, diakses tanggal 8 Oktober 2024.

Ihsan, Nabil. *Hampir 80 Persen Masjid Di Jalur Gaza Hancur Akibat Serangan Israel,* dimuat dalam <https://www.antaranews.com/berita/4378646/hampir-80-persen-masjid-di-jalur-gaza-hancur-akibat-serangan-israel>, diakses tanggal 8 Oktober 2024.

Nugraha, Fajar. *Lebih Dari 1.000 Tenaga Kesehatan di Gaza Dibunuh Oleh Pasukan Israel,* dimuat dalam <https://www.metrotvnews.com/read/b1oC9vA8-lebih-dari-1-000-tenaga-kesehatan-di-gaza-dibunuh-oleh-pasukan-israel>, diakses tanggal 8 Oktober 2024.

Rahman, Muhammad Razi. *PBB: Agresi Israel Telah Hancurkan 212 Sekolah Di Gaza,* dimuat dalam <https://www.antaranews.com/berita/4035390/pbb-agresi-israel-telah-hancurkan-212-sekolah-di-gaza>, diakses tanggal 8 Oktober 2024.

Rosdalina, Ida. *Jajak Pendapat Palestina: Dukungan Terhadap Serangan 7 Oktober Menurun Jauh,* dimuat dalam <https://dunia.tempo.co/read/1917435/jajak-pendapat-palestina-dukungan-terhadap-serangan-7-oktober-menurun-jauh>, diakses tanggal 11 Oktober 2024.

Sanjaya, Yefta Christopherus Asia. *Alasan Militan Palestina Hamas Serang Israel, Korban Tewas 250 Orang*, dimuat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/08/074500765/alasan-militan-palestina-hamas-serang-israel-korban-tewas-250-orang?page=all>, diakses tanggal 10 Oktober 2024.

Sorongan, Tommy Patrio. *Deretan Rumah Sakit Yang Kena Rudal Israel, Ada RS RI,* dimuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231025091852-4-483436/deretan-rumah-sakit-gaza-yang-kena-rudal-israel-ada-rs-ri>, diakses tanggal 8 Oktober 2024.

**MEMAHAMI KETENTUAN PASAL 97A UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

***(UNDERSTANDING THE ARTICLE 97A OF LAW NUMBER 13 OF 2022 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 12 OF 2011 CONCERNING THE FORMATION OF LAWS AND REGULATIONS}***

# **Kuntari**

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

\*Korespondensi: kuntari5705@gmail.com

**Abstrak**

Pengaturan Pasal 97A **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** yang berbunyi “Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut” bertujuan untuk menjamin materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan metode omnibus tidak akan diubah atau dicabut. Namun rumusan yang terdapat dalam Pasal 97A tersebut menimbulkan beragam pandangan, dimaknai bertentangan dengan hierarki norma hukum, menyandera Undang-Undang (UU) sektoral, bahkan dalam praktik penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dimaknai sebagai keharusan suatu UU yang telah disusun dan/atau diubah dengan metode omnibus harus diubah dalam bentuk perubahan. Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana **dampak** pengaturan Pasal 97A **UU terhadap teknik penyusunan RUU** dan bagaimana memaknai eksistensi Pasal 97A di masa mendatang**.** Tujuan penulisan ini untuk mengetahui **dampak** pengaturan Pasal 97A **terhadap teknik penyusunan RUU** dan pemaknaan keberadaan Pasal 97A dalam penyusunan RUU. Penulisan dilakukan dengan metode yuridis normatif yaitu menganalisis sumber kepustakaan terkait keberlakuan Pasal 97A serta penerapannya dalam praktik penyusunan RUU, dan menggunakan pendekatan deskriptif preskriptif untuk menjawab permasalahan dimaksud. Keberadaan Pasal 97A **ternyata** berdampak baik terhadap substansi maupun bentuk dari RUU yang telah diubah dengan menggunakan metode omnibus. Rumusan Pasal 97A tersebut berikut penjelasannya sebagai satu kesatuan perlu diperbaiki agar tafsirnya jelas, tegas, tidak ambigu, dan mempermudah proses penyusunan RUU dan penerapan teknik penyusunan RUU.

Kata kunci: undang-undang, materi muatan, metode omnibus

***Abstract***

*The regulation of Article 97A of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations: "Content material regulated in Laws and Regulations that use the omnibus method can only be changed and/or revoked by amending and/or revoking the Laws and Regulations" aims to ensure that the content of laws and regulations formed by the omnibus method is not will be changed or revoked. However, the formulation contained in Article 97A rise various point of view such as interpreted as contrary to the hierarchy of legal norms, holding sectoral laws hostage, even in the practice of drafting the bill is interpreted as a necessity for a law that has been drafted and/or amended by the omnibus method to be amended in the form of amendments. This article raisis the issue of how the regulation of Article 97A has an impact on the drafting technique of the Bill and how to interpret the existence of this Article in the future. The purpose of this writing is to find out the impact of the regulation of Article 97A on the drafting technique of the Bill and the meaning of the existence of Article 97A in the preparation of the Bill. This writing usses a normative juridical method, analyzing literature sources related to the enactment of Article 97A and its application in the practice of drafting bills, and using a prescriptive descriptive approach to answer the problem in question. The existence of Article 97A turns out to have an impact on both the substance and the form of the bill that has been amended using the omnibus method. The formulation of Article 97A and its explanation as a unit with this article need to be improved so that the interpretation is clear, firm, unambiguous, and simplifies the process of drafting the bill and the application of the drafting technique.*

*Keywords: law, legal substance, omnibus method*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Setiap penyelenggaraan pemerintahan negara harus mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan yang sah dan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Artinya, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules* and *procedures* (*regels*).[[53]](#footnote-53)

Sebagai upaya penegakan negara hukum maka dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan dua hal, yaitu dasar suatu peraturan dan proses pembentukannya. Dasar dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan asas, jenis, tingkatan hierarki, dan isi materi muatan. Sedangkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tahapan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai dengan tahap pengundangan.[[54]](#footnote-54)

Dua hal sebagai tertib pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang PPP). Dalam UU tentang PPP diatur substansi pokok mengenai asas, jenis, tingkatan hierarki, dan isi materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian dimuat juga substansi mengenai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan/penetapan, dan tahap pengundangan.

Sebagai pedoman tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan dalam UU tentang PPP harus disesuaikan dengan perkembangan bidang legislasi yang sangat dinamis. Pada Tahun 2022 telah dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sejak berlakunya UU tentang PPP dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ditambahkan materi muatan mengenai metode omnibus. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1a) UU tentang PPP, penyusunan dari suatu rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus.[[55]](#footnote-55)

Terkait metode omnibus, terdapat Pasal 97A UU tentang PPP (Pasal 97A) yang mengatur mengenai perubahan dan/atau pencabutan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Ketentuan Pasal 97A tersebut berbunyi:

“Materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut”.[[56]](#footnote-56)

Pasal 97A dirumuskan supaya pasal-pasal dalam UU sektoral yang sudah diubah oleh UU dengan metode omnibus hanya dapat diubah oleh UU bermetode omnibus tersebut, dan pasal-pasal dalam UU sektoral yang tidak diubah olehUU bermetode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan UU sektoral tersebut. Bentuk UU sektoral yang akan dibuat dimungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan (perubahan atau penggantian).

Rumusan Pasal 97A diusulkan oleh Badan Legislasi DPR RI, dan melalui rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi pada hari Rabu, 13 April 2022, rumusan Pasal 97A disetujui sesuai dengan usulan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah, yaitu hanya perubahan redaksional (huruf kapital). Meskipun telah disepakati, rumusan Pasal 97A tersebut kembali disoroti oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dalam Rapat Kerja Badan Legislasi terkait Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Rabu 13 April 2022. Dalam rapat pengambilan keputusan tersebut, delapan fraksi menerima/menyetujui Pasal 97A dan hanya F-PKS yang menyatakan belum bisa menyetujui materi muatan Pasal 97A tersebut.[[57]](#footnote-57)

Keberlakuan Pasal 97A dalam pelaksanaannya menimbulkan problematika hukum dalam kaitannya dengan kedudukan UU yang bermetode omnibus. Ketentuan Pasal 97A yang berisi pembatasan atau larangan secara implisit untuk melakukan perubahan dan/atau pencabutan materi muatan UU yang menggunakan omnibus maka secara tidak langsung telah memosisikan UU bermetode omnibus berada lebih tinggi secara hierarki dibandingkan dengan UU sektoral yang diubah dan/atau dicabutnya.[[58]](#footnote-58)

Menurut Ihsan Badruni Nasution, ketentuan Pasal 97A secara tidak langsung memosisikan UU yang bermetode omnibus berada lebih tinggi secara hierarkis dibandingkan dengan UU sektoral yang sejenis, sehingga substansi Pasal 97A tersebut perlu dikaji guna memperjelas dan memberikan legitimasi secara hukum terhadap kedudukan dari UU yang dibentuk bermetode omnibus dalam hierarki peraturan perundang-undangan.[[59]](#footnote-59) Setelah berlakunya Pasal 97A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terdapat praktik berbeda yang telah diterapkan terkait dengan perubahan dan/atau pencabutan terhadap materi muatan UU yang bermetode omnibus.[[60]](#footnote-60)

Adanya inkonsistensi dalam praktik tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, khususnya mengenai kedudukan UU yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus. Padahal kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*hendhaving, uitvoering*). Adanya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya tercermin dalam perumusannya yang jelas (*unambiguous*) serta konsisten dalam perumusannya.[[61]](#footnote-61)

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat terdapat urgensi untuk mengkaji mengenai perkembangan penafsiran dan teknik penyusunan RUU sebagai dampak keberadaan Pasal 97A dan menganalisis makna keberadaan Pasal 97A agar di masa mendatang rumusannya lebih jelas dan tidak multitafsir.

1. **Permasalahan**

Berdasarkah latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana **dampak** pengaturan Pasal 97A **terhadap teknik penyusunan suatu RUU?**
2. Bagaimana memaknai eksistensi Pasal 97A dalam penyusunan RUU di masa mendatang?
3. **Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan penulis di atas, tulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui **dampak** pengaturan Pasal 97A **terhadap teknik penyusunan suatu RUU**.
2. Mengetahui pemaknaan eksistensi Pasal 97A dalam penyusunan RUU di masa mendatang.
3. **Metode Penulisan**

Tulisan ini disusun dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dengan melakukan pengkajian terhadap sumber sumber kepustakaan yang terdiri dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tulisan. Penulisan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur terkait dengan penormaan suatu pasal dalam penyusunan RUU dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum[[62]](#footnote-62), dan mengkaji naskah pendukung dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait.[[63]](#footnote-63)

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif preskriptif guna memberikan gambaran yang mendalam terhadap permasalahan yang akan dikaji sekaligus memberikan alternatif solusi guna menjawab permasalahan.

1. **Pembahasan**
2. **Kerangka Konsepsional**
3. **Undang-Undang**

Di Indonesia, kekuasaan membentuk UU menurut Pasal 20 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaksanakan bersama dengan Presiden. Keberadaan lembaga legislatif sangat menentukan keabsahan materiil dari suatu UU. Jimly Asshiddiqie menjelaskan konsep UU sebagai suatu “*legislative act*” atau akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif (DPR) dengan persetujuan bersama dengan lembaga eksekutif (Presiden) melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan.[[64]](#footnote-64)

Dalam Pasal 1 angka 2 UU tentang PPP mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. Definisi Undang-Undang menurut Pasal 1 Angka 3 UU tentang PPP adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

1. **Materi Muatan**

Perumusan setiap pokok pikiran dalam norma UU harus selalu dilakukan melalui proses perancangan yang sesuai antara materi muatan dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Demikian pula ketika merancang suatu RUU sebagai salah satu jenis peraturan perundangan-undangan harus diisi dengan substansi yang memenuhi syarat sebagai materi muatan UU. Maria Farida menguraikan tentang sembilan butir materi muatan dari UU Indonesia yang menunjukkan “pena-pena penguji” (*test-pennen*) apakah suatu materi peraturan perundang-undangan negara termasuk materi muatan UU atau tidak:

1. yang tegas-tegas diperintahkan oleh UUD dan TAP MPR;
2. yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD;
3. yang mengatur hak-hak (asasi) manusia;
4. yang mengatur hak dan kewajiban warga negara;
5. yang mengatur pembagian kekuasaan negara;
6. yang mengatur organisasi pokok Lembaga-Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara;
7. yang mengatur pembagian wilayah/daerah negara;
8. yang mengatur siapa warganegara dan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan;
9. yang dinyatakan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.[[65]](#footnote-65)

Menurut Supar dan Modoeng sebagaimana dikutip Eka NAM Sihombing, supaya norma yang terkandung dalam suatu UU ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat perlu dilihat dari segi ketepatan, segi kesesuaian, dan segi aplikatif.[[66]](#footnote-66)

Pasal 1 Angka 12 U UU tentang PPP mendefinisikan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 10 UU tentang PPP lebih lanjut ditegaskan mengenai materi muatan yang harus diatur dengan UU antara lain memuat:

1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
2. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
6. **Metode Omnibus**

Istilah omnibus berasal dari negara-negara yang menganut sistem *common law*. Kata omnibus ditinjau dari terminologi bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu “*omnis*” yang berarti bahwa “*all, every, the whole, of every kind*” untuk menggambarkan apa pun yang dapat dipakai secara bersama-sama sekaligus.[[67]](#footnote-67) Dari segi hukum kata omnibus seringkali dipasangkan dengan kata *law* atau *bill* yang memiliki arti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil dari penggabungan beberapa peraturan hukum dengan substansi materi muatan dan tingkatan yang berbeda.[[68]](#footnote-68) *Omnibus law* dapat diartikan sebagai hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu UU yang mengatur banyak hal.[[69]](#footnote-69) Definisi omnibus yang terdapat dalam Duhaime *Legal Dictionary* adalah: “*omnibus is a draft law before a legislature which contains more than substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience*”.[[70]](#footnote-70)

A. Ahsin Thohari memandang bahwa omnibus (*omnibus law making technique*) sebagai suatu teknik pembentukan UU yang menyangkut pilihan metode belaka.[[71]](#footnote-71) Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa *omnibus law* dipahami sebagai metode atau teknik dalam membentuk UU yang dimaksudkan untuk mengubah beberapa UU yang telah ada dan berlaku secara sekaligus.[[72]](#footnote-72)

Pengaturan mengenai penggunaan metode omnibus di Indonesia diatur dalam Pasal 64 ayat (1a) dan ayat (1b) UU tentang PPP.

1. **Analisis**

**Dampak Pengaturan Pasal 97A** **Terhadap Teknik Penyusunan Suatu Rancangan Undang-Undang**

RUU dengan menggunakan metode omnibus semakin populer pada Tahun 1967 dengan adanya *Criminal Law Amendment Bill* yang berisi perubahan terhadap UU mengenai hukum pidana dan memuat banyak isu.[[73]](#footnote-73) Contoh lainnya terkait pelaksanaan metode omnibus di Amerika Serikat adalah *The Consolidated Appropriations Act* Tahun 2018 yang secara menyeluruh mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Federal sejumlah 2.232 halaman.[[74]](#footnote-74)

Di negara Eropa Kontinental yang menganut sistem hukum *civil law* dengan metode kodifikasi, terdapat negara yang menerapkan metode omnibus dalam membentuk UU, di antaranya adalah Belanda dan Jerman. Di Belanda misalnya, pada 2016 mengesahkan kode lingkungan (*Omgevingswet)* yang berisi 26 (dua puluh enam) UU. Kemudian pada tahun 2018 Jerman membentuk *Omnibus Energy Act* yang bertujuan untuk menerapkan hal penting yang termuat dalam *coalition agreement*, khususnya yang berkaitan dengan energi terbarukan dan persoalan *market-oriented*.[[75]](#footnote-75)

Ada beragam pandangan mengenai pemahaman mengenai metode omnibus, Menurut Wicipto Setiadi, omnibus dapat dimaknai sebagai sebuah metode atau konsep dari pembentukan peraturan dengan menggabungkan beberapa aturan yang memiliki substansi pengaturan berbeda sehingga menjadi sebuah peraturan yang besar. Pada saat peraturan tersebut diundangkan maka akan memiliki konsekuensi pencabutan terhadap beberapa peraturan yang telah berlaku sebelumnya, baik untuk beberapa materi muatan maupun secara keseluruhan.[[76]](#footnote-76) Selanjutnya Maria Farida Indrati memberikan makna dari *omnibus law* sebagai suatu UU baru yang mengatur berbagai materi muatan dan berbagai macam subyek yang dilakukan sebagai langkah untuk menyederhanakan berbagai UU yang masih berlaku. UU dengan metode omnibus tidak dapat disamakan dengan UU payung (*raamwet, basiswet, moederwet*).[[77]](#footnote-77)

Terdapat beberapa ciri khas dari penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: pertama, terdiri atas banyak materi muatan sektoral dengan tema yang sama; kedua, memiliki jumlah pasal yang banyak sebagai akibat dari cakupan yang multisektor; ketiga, mengumpulkan banyak peraturan perundang-undangan eksisting dalam satu peraturan perundang-undangan yang baru; keempat, bersifat mandiri tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan kelima, mencabut dan/atau mengubah sebagian dan/atau seluruh materi muatan dari peraturan perundang-undangan lainnya.[[78]](#footnote-78)

Penulis sepaham dengan Jimly Asshiddiqie yang mengemukakan bahwa *omnibus law* dipahami sebagai metode atau teknik dalam membentuk UU yang dimaksudkan untuk mengubah beberapa UU yang telah ada dan berlaku secara sekaligus. Istilah *omnibus law* tersebut selalu terkait dan dipahami lebih luas sebagai *omnibus bill* atau RUU omnibus, yang setelah disetujui bersama dan disahkan kan menjadi *omnibus law*. Hal ini berarti bahwa jika RUU yang menggunakan metode omnibus tersebut telah sah menjadi UU maka sebutan *omnibus law* sebagai omnibus tersebut tidak terlalu penting dan tidak diperlukan lagi, karena UU tersebut sudah resmi berstatus sebagai UU sebagaimana UU lainnya.[[79]](#footnote-79)

* 1. **Lingkup Pengaturan Metode Omnibus dalam UU tentang PPP**

Sejak tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) berlaku sebagai pedoman tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 telah ditentukan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus menggunakan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 64 sehingga produk hukum yang terbentuk menjadi mudah untuk dipahami dan dilaksanakan.[[80]](#footnote-80)

Lampiran II UU tentang PPP belum mengakomodasi pedoman yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus untuk mengatur banyak hal dalam satu peraturan yang menyinkronkan satu bidang materi muatan yang sama yang sebelumnya diatur dengan aturan yang berbeda-beda. Menurut Bayu Dwi Anggono, metode yang terdapat dalam Lampiran II hanya mencakup metode satu usulan perubahan UU mengubah dan/atau mencabut UU saja. Sedangkan dalam metode omnibus menggunakan teknik mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai UU hanya melalui satu usulan pembentukan UU.[[81]](#footnote-81)

Untuk itu pada tahun 2022 dilakukan perubahan yang kedua terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 disesuaikan dengan perkembangan hukum. Perubahan kedua dilakukan melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) khususnya Pertimbangan Hukum Mahkamah [3.18.2.2] yang memerintahkan adanya tata cara yang jelas dan baku mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.[[82]](#footnote-82)

Materi muatan baru dalam UU tentang PPP menambahkan ketentuan mengenai penggunaaan metode omnibus dalam penyusunan semua jenis peraturan perundang-undangan.

* + 1. Pasal 42A UU tentang PPP

Sebagaimana diatur dalam Pasal 42A bahwa penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dokumen perencanaan" antara lain adalah Program Legislasi Nasional, program penyusunan Peraturan Pemerintah, program penyusunan Peraturan Presiden, Program Legislasi Daerah Provinsi, dan Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota.

Rumusan penjelasan Pasal 42A muncul saat pembahasan draf RUU dalam forum rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahwa pentingnya untuk menegaskan penggunaaan metode omnibus suatu RUU mulai dari tahap perencanaan yang dimuat dalam dokumen perencanaan berupa Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

* + 1. Pasal 64 UU tentang PPP

Ketentuan Pasal 64 UU tentang PPP terutama dalam ayat (1) *juncto* ayat (2) diatur bahwa penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Adapun UU ini juga melakukan perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II yaitu dengan menambahkan metode omnibus untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.[[83]](#footnote-83) Hal ini sebagaimana telah dicantumkan dalam Lampiran II UU tentang PPP di Angka 27a, Angka 41b s.d Angka 41d, Angka 111b s.d Angka 111j, 189a, Angka 233b, dan bentuk RUU perubahan UU (metode omnibus).

Selanjutnya, dalam Pasal 64 ditambahkan ketentuan ayat (1a) menyatakan bahwa penyusunan dari suatu rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus. Di ayat (1b) diatur bahwa metode omnibus merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan:

1. memuat materi muatan baru (yang dimaksud dengan "materi muatan baru” adalah materi muatan yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang metode omnibus dan/atau penambahan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang diubah dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus);
2. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
3. mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Penjelasan ayat (1b) huruf a:

Yang dimaksud dengan "materi muatan baru” adalah:

1. materi muatan yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang metode omnibus; dan/atau
2. penambahan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang diubah dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.
   * 1. Pasal 97A

Ketentuan baru terkait metode omnibus yang masih dipahami berbagai pihak secara beragam yaitu ketentuan Pasal 97A yang menyatakan:

“Materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut”.

Penjelasan Pasal 97A menyatakan:

“Yang dimaksud dengan "hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang undangan tersebut" yaitu contoh, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2O07 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan melakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2O2O kntang Cipta Kerja. Contoh lain, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20O7 tentang Penataan Ruang.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 97A dan tafsir resmi penjelasan pasalnya maka dapat dimaknai bahwa Pasal ini dirumuskan supaya pasal-pasal dalam UU sektoral yang sudah diubah oleh UU dengan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut oleh UU bermetode omnibus tersebut, dan pasal-pasal dalam UU sektoral yang tidak diubah olehUU bermetode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan UU sektoral tersebut. Materi muatan dalam ketentuan Pasal 97A serta penjelasannya tersebut sama sekali tidak menentukan mengenai bentuk atau format untuk UU sektoral, yang beberapa materi muatannya telah diubah oleh UU dengan metode omnibus, harus seperti apa ketika akan diubah atau diganti untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, mengenai bentuk atau format suatu RUU atau UU dengan metode apa pun, tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UU tentang PPP.

**b.** **Dampak Ketentuan Pasal 97A dalam Teknik Penyusunan Rancangan Undang-Undang**

Keberadaan ketentuan Pasal 97A terkait erat dengan penerapan metode omnibus sebagai sentra utama pokok perubahan sebagaimana diatur dalam UU tentang PPP. Ketika metode omnibus diinisiasi untuk diadopsi dalam sistem pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia maka penjelasan DPR dan Pemerintah kepada publik pada saat itu adalah bahwa omnibus hanyalah metode, bukan bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya saat itu publik menerima dan rumusan atau penjelasan mengenai penggunaan metode omnibus tidak merubah apapun dalam sistem pembentukan UU di Indonesia, termasuk tidak akan merubah persyaratan apakah suatu UU itu dibentuk dalam UU baru atau perubahan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU tentang PPP.[[84]](#footnote-84)

Hal tersebut sejalan dengan pandangan A. Ahsin Thohari bahwa omnibus (*omnibus law making technique*) sebagai suatu teknik pembentukan UU yang menyangkut pilihan metode belaka, metode omnibus memungkinkan terbentuk satu RUU yang terpadu yang memuat perubahan dan bahkan penggantian beberapa UU secara sekaligus untuk memperoleh persetujuan dalam satu kesempatan pengambilan keputusan.[[85]](#footnote-85). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa omnibus merupakan metode untuk menggabungkan atau mengombinasikan beragam materi muatan hukum dalam satu peraturan.

Melalui metode omnibus dapat dilakukan pembentukan terhadap satu UU yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa materi muatan dalam berbagai UU lain yang saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, materi muatan dari suatu UU tidak hanya terfokus dan dibatasi pada materi yang berkaitan secara langsung dengan judul UU tertentu sebagaimana selama ini lazim dipraktikkan di Indonesia, melainkan dapat juga mengatur materi muatan yang terdapat dalam berbagai UU lainnya, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.[[86]](#footnote-86) Tujuan dirumuskannya ketentuan Pasal 97A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 supaya pasal-pasal dalam UU sektoral yang sudah diubah oleh UU dengan metode omnibus hanya dapat diubah oleh UU bermetode omnibus tersebut, dan pasal-pasal dalam UU sektoral yang tidak diubah olehUU bermetode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan UU sektoral tersebut.

Namun demikian, dalam praktik penyusunan RUU adanya Pasal 97A tersebut menimbulkan beragam pandangan yang berkaitan dengan kedudukan UU yang menggunakan metode omnibus, keberadaan UU sektoral yang telah diubah oleh suatu UU bermetode omnibus, serta bentuk atau format RUU/UU sektoral tersebut. Pasal tersebut dinilai beberapa pihak mengurangi keleluasaan dalam rencana perubahan UU sektoral untuk meninjau kembali materi muatan yang telah diatur dalam UU yang dibentuk bermetode omnibus, karena harus menggunakan metode omnibus untuk materi muatan yang telah diubah dengan metode omnibus.

Terdapat pula persepsi bahwa dengan adanya pengaturan ketentuan Pasal 97A yang berisi pembatasan atau larangan secara implisit untuk melakukan perubahan dan/atau pencabutan materi muatan undang undang yang menggunakan omnibus, secara tidak langsung telah memosisikan UU yang bermetode omnibus berada lebih tinggi secara hierarki dibandingkan dengan UU sektoral yang diubah dan/atau dicabutnya yang disusun dengan tidak menggunakan metode omnibus.[[87]](#footnote-87) Menurut Ihsan Badruni Nasution, rumusan ketentuan Pasal 97A beserta penjelasannya membatasi dan tidak memberikan peluang untuk dilakukan revisi atau perubahan terhadap materi muatan UU sektoral yang telah diubah oleh UU yang menggunakan metode omnibus. Padahal dapat saja terjadi bahwa salah satu materi muatan UU omnibus, karena perkembangan sosial, politik, dan kebutuhan hukum masyarakat dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dan/atau pencabutan melalui revisi perubahan dan/atau pencabutan terhadap UU sektoralnya. Selain terjadi inkonsistensi dengan ketentuan yang mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 97A juga menyimpangi asas preverensi yang lazim digunakan dalam penyelesaian konflik antarnorma hukum (antinomi hukum), salah satunya yaitu asas *lex posterior derogate legi priori*.[[88]](#footnote-88)

Penerapan ketentuan Pasal 97A sangat dipengaruhi dinamika hukum ketatanegaraan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya UU dan RUU, sehingga berdampak pada keragaman produk UU yang dihasilkan serta penerapan teknik penyusunan RUU. Dampak berlakunya Pasal 97A terlihat dalam praktik perubahan dan/atau pencabutan terhadap materi muatan UU yang bermetode omnibus, terdapat dua praktik berbeda yang telah diterapkan terkait dengan perubahan dan/atau pencabutan materi muatan UU yang bermetode omnibus, yaitu:

* + - 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU tentang Kesehatan) yang disusun bermetode omnibus. Ketentuan Pasal 59 sampai dengan Pasal 61 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja) telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, namun norma materi muatan dalam UU tentang Cipta Kerja tersebut turut diubah dan diatur ulang, bahkan ketentuan Pasal 454 UU tentang Kesehatan mengatur bahwa keseluruhan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya, materi muatan UU sektoral yang telah diubah oleh UU tentang Cipta Kerja diubah bahkan dicabut oleh UU tentang Kesehatan.Dalam hal ini pembentuk UU memaknai Pasal 97A memungkinkan UU bermetode omnibus di sektor/bidang tertentu mengubah UU lain bermetode omnibus dan sekaligus mencabut UU sektoral lainnya. Di dalam UU Kesehatan juga tidak ada aturan/penjelasan mengenai pasal-pasal yang telah diubah oleh UU tentang Cipta Kerja.
      2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU tentang P2SK) sebagai UU baru yang disusun bermetode omnibus. Ada empat UU lain yang diubah oleh UU tentang P2SK namun substansi perubahan dalam UU tentang P2SK tersebut tidak mengubah kembali atau menghapus materi muatan dalam 4 UU lain tersebut yang telah diubah atau dihapus oleh UU tentang Cipta Kerja. Hal ini sekilas tampak sejalan dengan Pasal 97A, tetapi jika dikaitkan dengan tafsir resmi penjelasannya maka di masa mendatang empat UU lain yang telah diubah oleh UU tentang Cipta Kerja dan UU tentang P2SK berpotensi mengalami disharmoni antarmateri muatannya, kendala dalam implementasi, dan kesulitan menyusun peraturan pelaksanaan.

Keberlakuan Pasal 97A juga berdampak pada penentuan judul suatu UU dan RUU yang beragam, diantaranya yaitu:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa).

UU tentang Desa mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja yang bermetode Omnibus. Dengan adanya Pasal 97A pembentuk UU memaknai UU tentang Desa sebagai perubahan kedua, meskipun beberapa materi muatannya telah diubah oleh Cipta Kerja.

Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU tentang Kepolisian).

RUU ini telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada tanggal 28 Mei 2024) menjadi RUU usul inisiatif DPR. Dalam ketentuan menimbang diuraikan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU tentang Cipta Kerja masih terdapat kelemahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, dan belum sejalan dengan perkembangan paradigma penegakan hukum dan pemidanaan, serta perubahan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga perlu diubah.[[89]](#footnote-89)

Berbeda dengan pemaknaan dalam UU tentang Desa, dengan alas hukum yang sama yaitu Pasal 97A penyusun RUU memaknai RUU tentang Kepolisian sebagai perubahan ketiga dengan pertimbangan beberapa materi muatannya telah diubah dua kali, pertama dilakukan dalam UU Nomor 11 Tahun 2019 yang kemudian dicabut oleh PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 dan selanjutnya PERPPU tersebut ditetapkan menjadi UU tentang Cipta Kerja.

* + - 1. Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan (RUU tentang Kepariwisataan).

Komisi X sejak Juni tahun 2022 telah menyusun RUU tentang Kepariwisataan sebagai penggantian atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan karena secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terdapat perubahan mendasar terutama paradigma kepariwisataan yaitu dari *mass tourism* menjadi *quality tourism*, serta adanya penguatan pengaturan yang berorientasi pada budaya*.* Selain itu juga karena materi yang diubah dalam RUU ini mencapai lebih dari 50% di luar pasal-pasal yang telah diubah dalam UU tentang Cipta Kerja. Pasal-Pasal yang telah diubah oleh UU tentang Cipta Kerja diatur kembali (diadopsi) secara utuh ke dalam RUU guna mengantisipasi substansinya tidak diubah atau terhapus.

Kemudian dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI yang dimulai pada tangal 20 Mei 2024, RUU tentang Kepariwisataan tersebut dikaji dari aspek teknis dan substansi, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 97A maka RUU tentang Kepariwisataan dengan bentuk/format penggantian bertabrakan dengan ketentuan Pasal 97A, sehingga harus diubah dalam format perubahan dan judul RUU perlu diperbaiki menjadi Rancangan Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mengingat beberapa materi muatannya telah diubah dua kali pertama dilakukan dalam UU Nomor 11 Tahun 2019 yang kemudian dicabut oleh PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 dan selanjutnya PERPPU tersebut ditetapkan menjadi UU tentang Cipta Kerja.[[90]](#footnote-90) Dalam Rapat Paripurna tanggal 9 Juli 2024, RUU tentang Kepariwisataan disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dan dikirim ke Pemerintah untuk dibahas di Pembicaraan Tingkat I.

Pada tanggal 5 September 2024, bersamaan dengan dikirimnya Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Kepariwisataan, terkirim DIM atas RUU tentang Kepariwisataan dimana dalam DIM Nomor 1 pemerintah mengusulkan perubahan judul menjadi Rancangan Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Dengan alas hukum yang sama yaitu Pasal 97A, terdapat tiga pemahaman berbeda. Komisi X sebagai penyusun RUU memaknainya dimungkinkan adanya penggantian terhadap UU sektoral sepanjang tidak mengubah dan mengadopsi seluruh pasal yang telah diubah oleh UU bermetode omnibus, sedangkan Badan Legislasi DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan yang bertugas melakukan harmonisasi RUU memaknai RUU tentang Kepariwisataan sebagai perubahan ketiga dengan pertimbangan beberapa materi muatannya telah diubah oleh Cipta Kerja, dan ternyata Presiden (diwakili oleh lima Kementerian) memiliki pemaknaan berbeda mengenai RUU tentang Kepariwisataan sebagai perubahan kedua.

**Eksistensi Pasal 97A dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Masa Mendatang**

Agar tercipta suatu peraturan perundang-undangan yang baik maka setiap pembentukannya harus bertumpu pada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yang dikristalisasi pada konsiderans setiap peraturan perundang-undangan.[[91]](#footnote-91) Setiap jenis peraturan perundang-undangan akan mengatur suatu substansi tertentu, hal tertentu, atau keadaan tertentu. Setiap tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.[[92]](#footnote-92) Jika suatu tindakan atau perbuatan tersebut tidak didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan maka perbuatan atau tindakan yang dilakukan tidak memiliki legitimasi. Peraturan perundang-undangan berperan sangat sentral dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap pembentukan peraturan negara harus dilakukan berdasarkan pada metode dan tata cara yang baik.[[93]](#footnote-93)

UU merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat menunjang penegakan negara hukum maka dalam membentuk UU perlu memperhatikan dua hal, yaitu dasar suatu peraturan dan proses pembentukannya. Dasar dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan asas, jenis, tingkatan hierarki, dan isi materi muatan. Sedangkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tahapan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai dengan tahap pengundangan.[[94]](#footnote-94)

Ketentuan dalam UU tentang PPP mengakui pentingnya kedua tertib tersebut. Hal ini dapat diketahui dengan diaturnya substansi pokok mengenai asas, jenis, tingkatan hierarki, dan isi materi muatan suatu RUU kemudian dimuat juga substansi mengenai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan/penetapan, dan tahap pengundangan. Perlu ada persepsi yang sama mengenai materi muatan sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 12 UU tentang PPP yang mendefinisikan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 UU tentang PPP telah menggariskan apa saja isi materi muatan dari setiap jenis peraturan perundang undangan. Materi muatan dari suatu peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan sesuai dengan jenisnya, karena pertama, konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat berisikan materi sesuai dengan jenis dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan materi muatan yang akan dituangkan, karena setiap jenis peraturan perundang undangan memiliki materi muatan tersendiri yang didasarkan pada peraturan atau norma di atasnya. Ketiga, peraturan perundang-undangan tersusun secara hierarkis dan memiliki proporsi substansi atau materi muatan tersendiri.[[95]](#footnote-95)

Materi muatan dari suatu peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan sesuai dengan jenisnya disebabkan karena beberapa hal, yaitu: pertama, konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat berisikan materi sesuai dengan jenis dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan materi muatan yang akan dituangkan, karena setiap jenis peraturan perundang undangan memiliki materi muatan tersendiri yang didasarkan pada peraturan atau norma di atasnya. Ketiga, peraturan perundang-undangan tersusun secara hierarkis dan memiliki proporsi substansi atau materi muatan tersendiri.[[96]](#footnote-96)

UU sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan harus mengandung materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 12 jo. Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 UU tentang PPP sebagai alasan dan dasar pembentukannya. Materi muatan tersebut lebih lanjut akan dijabarkan dan dimuat seluruhnya ke dalam batang tubuh undang-undang yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika diperlukan), ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan, ketentuan penutup.[[97]](#footnote-97) Pengelompokkan materi muatan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf,[[98]](#footnote-98) yang harus merupakan jabaran normatif, saling terkait, serta saling mendukung, sehingga UU dapat berlaku efektif dan efisien.

Artinya, materi muatan dapat dipahami sebagai substansi yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, terdiri dari huruf, kata, frasa, dan kalimat secara normatif disusun sebagai rincian, atau ayat, atau pasal-pasal, kemudian dikelompokkan ke dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.

Penormaan setiap materi muatan yang akan dirancang dalam suatu RUU harus dilakukan secara hati-hati agar tidak hanya menjadi kumpulan argumentasi pembuat UU. Agar norma yang terkandung dalam suatu UU ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat perlu dilihat dari segi ketepatan, segi kesesuaian, dan segi aplikatif. Segi ketepatan yaitu tepat struktur, tepat pertimbangan, tepat dasar hukum, tepat bahasa (istilah), tepat pemakaian huruf, dan tepat tanda baca. Segi kesesuaian dititikberatkan pada materi muatan yang sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Segi aplikatif artinya harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian baik bagi pemerintah maupun masyarakat.[[99]](#footnote-99)

Ditinjau dari segi ketepatan, Pasal 97A ini belum tepat penempatannya dalam struktur UU karena disisipkan diantara Pasal 97 dan Pasal 98 di dalam BAB XII Ketentuan Lain-Lain sebagai Bab yang berfungsi menampung materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada.[[100]](#footnote-100) Sedangkan materi muatan Pasal 97A ini ternyata berdampak dan terkait erat dengan ruang lingkup teknik penyusunan maka sebaiknya diletakkan berdekatan dengan Pasal 64 di BAB VI Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 97A juga belum tepat pertimbangan, hal ini dapat dilihat dalam dokumen Naskah Akademik dan draf RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun oleh Tim Badan Keahlian DPR RI per tanggal 1 Februari 2022 sudah terdapat kajian dan usulan merancang materi muatan Pasal 97A namun penjelasan pasalnya cukup jelas (tidak ada penjelasan untuk Pasal 97A).

Keberadaan ketentuan Pasal 97A serta penjelasannya tidak dapat dilepaskan dari latar pemikiran Pasal 97A yang terdapat dalam risalah rapat pembahasan draf RUU sebagai usul inisiatif DPR RI. Dalam forum rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 8 Februari 2022, terhadap DIM Pasal 97A hanya fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) disampaikan oleh Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. yang berpandangan masih memberikan peluang perubahan terhadap UU sektoralnya berdasarkan atas kesepakatan antara Pemerintah bersama DPR RI serta hanya bertujuan untuk menguatkan dan menyempurnakan politik legislasi UU omnibus tersebut.[[101]](#footnote-101) Dalam DIM yang diajukan oleh Pemerintah, rumusan Pasal 97A diajukan hanya sebagai DIM perubahan redaksional.[[102]](#footnote-102)

Meskipun telah disepakati, rumusan Pasal 97A tersebut kembali disoroti oleh F-PKS dalam Rapat Kerja Badan Legislasi terkait Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Rabu, 13 April 2022. Dalam rapat pengambilan keputusan tersebut, delapan fraksi menerima dan satu Fraksi yaitu F-PKS menyatakan belum bisa menyetujui RUU tersebut. Pendapat mini F-PKS yang disampaikan oleh Ledia Hanifah Amalia menyatakan bahwa:

“Fraksi PKS tidak sepakat jika materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini karena ketentuan tersebut membatasi adanya revisi suatu materi muatan langsung di peraturan perundang-undangan asal atau peraturan perundang-undangan induk yang terdampak oleh peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus”.[[103]](#footnote-103)

Pasal 97A juga belum tepat bahasa (istilah), tepat pemakaian huruf, dan tepat tanda baca. Materi muatan Pasal 97A belum bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.[[104]](#footnote-104) Berdasarkan interpretasi secara gramatikal (*de gramatikale of taalkunde interpretatie*) terhadap frasa “hanya dapat” dalam ketentuan pasal tersebut, kata “hanya” memiliki arti “cuma” Sedangkan kata “dapat” bermakna “mampu, sanggup, atau bisa”.[[105]](#footnote-105) Berdasarkan interpretasi secara otentik terhadap ketentuan Pasal 97A yang dapat ditelusuri dalam penjelasan resmi Pasal 97A tersebut yang berisi pembatasan atau larangan secara implisit, karena terhadap materi muatan yang telah diatur atau diubah dalam UU yang menggunakan metode omnibus tidak dapat dilakukan perubahan dan/atau pencabutan, kecuali melalui perubahan dan/atau pencabutan terhadap UU omnibus tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas hierarki norma hukum dan asas *lex priori derogate legi posterior*.

Adapun dari segi aplikatif, keberadaan Pasal 97A belum menjamin kepastian dalam praktek penyusunan peraturan perundang-undangan. Munculnya berbagai pemahaman mengakibatkan ragam penerapan Pasal 97A, diantaranya:

* 1. Dalam hal Pasal 97A dimaknai secara terpisah dari penjelasannya timbul pemahaman bahwa jika UU “X” sudah diubah oleh UU dengan metode omnibus maka UU “X” akan hanya dapat diubah/dicabut oleh UU dengan metode omnibus apa pun (contoh: keberlakuan UU tentang Kesehatan yang telah mencabut beberapa UU lain)
  2. Dalam hal Pasal 97A dimaknai secara terpisah dari penjelasannya timbul pemahaman bahwa jika UU “X” sudah diubah oleh UU “Y” bermetode omnibus maka UU “X” akan hanya dapat diubah/dicabut oleh UU “Y”. Sedangkan materi muatan dalam UU “X” yang tidak diubah oleh UU “Y” hanya dapat diubah/dihapus dalam bentuk UU perubahan atas UU “Y”, serta UU “X” tidak dimungkinkan untuk dicabut maupun diganti dalam bentuk UU penggantian (contoh: keberlakuan UU tentang Cipta Kerja yang berdampak pada keberlakuan materi muatan dan bentuk/format UU sektoral yang telah diubahnya).
  3. Dalam hal Pasal 97A dimaknai secara terpisah dari penjelasannya timbul pemahaman bahwa jika UU “X” sudah diubah pertama kali oleh UU “Y” bermetode omnibus maka UU “X” akan hanya dapat diubah dengan judul “Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU “X” dan seterusnya (Contoh: UU tentang Kepolisian, RUU tentang Kepariwisataan, dan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi).
  4. Dalam hal Pasal 97A dimaknai secara utuh dengan penjelasannya sebagai tafsir resmi timbul pemahaman bahwa jika suatu materi muatan dalam UU “X” sudah diubah oleh UU bermetode omnibus maka materi muatan tersebut akan hanya dapat diubah/dihapus oleh UU bermetode omnibus apa pun (contoh: keberlakuan UU tentang Kesehatan yang telah mengubah beberapa materi muatan UU tentang Cipta Kerja).
  5. Dalam hal Pasal 97A dimaknai secara utuh dengan penjelasannya sebagai tafsir resmi timbul pemahaman bahwa jika suatu Pasal dalam UU “X” sudah diubah oleh UU “Y” bermetode omnibus maka Pasal tersebut akan hanya dapat diubah/dihapus oleh UU “Y”. Sedangkan Pasal-Pasal dalam UU “X” yang tidak diubah oleh UU “Y” hanya dapat diubah/dihapus dalam bentuk UU perubahan atas UU “Y”, serta UU “X” tidak dimungkinkan untuk dicabut maupun diganti dalam bentuk UU penggantian (contoh: keberlakuan UU tentang Cipta Kerja yang berdampak pada keberlakuan materi muatan dan bentuk/format UU sektoral yang telah diubahnya).
  6. Dalam hal Pasal 97A dimaknai secara utuh dengan penjelasannya sebagai tafsir resmi timbul pemahaman bahwa beberapa materi muatan dalam UU “X” yang sudah diubah oleh UU “Y” bermetode omnibus maka terhadap materi muatan dalam UU “X” lainnya dapat diubah dengan judul “Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU “X” dan seterusnya (Contoh: RUU tentang Desa).

Namun demikian, dari segi kesesuaian materi muatan dengan jenis peraturan perundang-undangannya Pasal 97A sudah tepat diatur dalam UU tentang PPP sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU XVIII/2020 mengenai pengujian UU tentang Cipta Kerja.[[106]](#footnote-106) Dalam Putusan tersebut MK menyatakan bahwa metode omnibus dalam UU tentang Cipta Kerja tidak memiliki dasar hukum pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Seharusnya UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur terlebih dahulu dasar hukum dan teknik penyusunan omnibus sebelum menyusun UU tentang Cipta Kerja. Dengan pertimbangan hukum tersebut maka MK memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman dalam pembentukan UU dengan menggunakan metode *omnibus law* yang mempunyai sifat kekhususan dan mengikat.

Ada urgensi kuat untuk mempertahankan Pasal 97A, karena keberadaan Pasal 97A tidak terlepas dari urgensi pengaturan metode omnibus dalam UU tentang PPP, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011.

Secara filosofis, praktik pembentukan peraturan perundang-undangan bermetode *Omnibus Law* dipandang baik untuk diterapkan di Indonesia sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan UU yang saling berkaitan. Metode pendekatan *omnibus law* juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan *hyper regulation* peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum. Pendekatan hukum yang bersifat positif legalistik dan linier sangat sulit dan selalu tertinggal untuk menjawab persoalan hukum yang berkembang di dalam masyarakat yang sedang berubah, oleh karena itu pendekatan hukum dengan menggunakan pendekatan baru yang bersifat *out of the box* sangat relevan untuk digunakan dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan. Pendekatan hukum progresif mengandung semangat melepaskan dari tradisi berhukum yang konvensional.[[107]](#footnote-107)

Secara sosiologis, sejak berlakunya UU tentang PPP masih terdapat kelemahan di antaranya yaitu banyaknya peraturan yang telah disusun baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan banyaknya regulasi tersebut dapat mengakibatkan tumpang tindih pengaturan yang dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan timbulnya ego sektoral dari masing-masing instansi pembentuk peraturan. Guna mengatasinya dan untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan terstandar maka dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dengan menambahkan pengaturan mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,.[[108]](#footnote-108)

Secara yuridis, perubahan terhadap UU tentang PPP tidak terlepas dari upaya tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU XVIII/2020 mengenai pengujian UU Cipta Kerja, dimana MK menyatakan bahwa metode omnibus dalam UU Cipta Kerja tidak memiliki dasar hukum pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan pertimbangan hukum tersebut maka MK memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law* yang mempunyai sifat kekhususan dan mengikat.[[109]](#footnote-109)

Selama metode omnibus dibutuhkan sebagai upaya mengatasi *hyper regulation* maka Pasal 97A dibutuhkan keberadaaannya sebagai jangkar dan tolok ukur bagi UU sektoral yang diubah/dicabut oleh UU dengan metode omnibus dan UU yang akan dibentuk dengan metode omnibus. Munculnya beragam pandangan beberapa kata/frasa yang digunakan belum memenuhi kejelasan rumusan dan dampak yang ditimbulkan, perlu segera direspon dengan melakukan perbaikan perumusan Pasal 97A UU.

Kelemahan rumusan ketentuan Pasal 97A dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Pasal 97A menyebutkan materi muatan yang lingkupnya lebih luas tidak sekadar pasal, sedangkan di penjelasan Pasal 97A langsung memberikan contoh pasal tertentu.
        2. Frasa “materi muatan” diidentikkan dengan jenis peraturan perundang-undangan tertentu, sehingga sesama UU bermetode omnibus dapat saling mengubah/mencabut dan UU sektoral yang telah diubah oleh UU bermetode omnibus hanya dapat diubah saja. Padahal pengertian materi muatan yang telah ada di Pasal 1 Angka 12 *jo.* Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 UU tentang PPP materi muatan dapat dipahami sebagai substansi yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, terdiri dari huruf, kata, frasa, dan kalimat secara normatif disusun sebagai rincian, atau ayat, atau pasal-pasal, kemudian dikelompokkan ke dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
        3. Ketentuan Pasal 97A menimbulkan interpretasi terhadap frasa “hanya dapat” dalam ketentuan pasal tersebut, kata “hanya” memiliki arti “cuma” Sedangkan kata “dapat” bermakna “mampu, sanggup, atau bisa”. Selain itu, berdasarkan interpretasi secara otentik atas penjelasan resminya maka norma Pasal 97A bertentangan dengan asas hierarki norma hukum dan asas *lex priori derogate legi posterior*.
        4. Dalam praktik penyusunan RUU khususnya Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan dewan yang bertugas melakukan harmonisasi telah bersepakat memaknai Pasal 97A secara lebih luas.

Berbagai kelemahan tersebut menjadi dasar pemikiran dalam memperbaiki rumusan Pasal 97A serta perlu digarisbawahi bahwa materi muatan dalam setiap Pasal tidak dapat dipisahkan dengan penjelasannya sebagai tafsir resmi dan harus dibaca sebagai satu kesatuan.[[110]](#footnote-110) Selain itu, perlu dipahami UU perubahan yang bermetode omnibus tidak mengambil alih aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dari kebijakan mendasar terkait dengan pengembangan, perluasan, dan pembangunan sektor lainnya, hanya mengambil porsi kecilnya yang mengatur mengenai hal/topik/tema tertentu, sebagian besar kebijakan pembangunan pada sektor yang diubah masih berada di UU sektoralnya.[[111]](#footnote-111)

**Dari sisi bahasa perundang-undangan, ketentuan** Pasal 97A tersebut mengatur sebatas substansi atau materi muatan pengaturan dalam suatu RUU bermetode omnibus dan tidak mengatur mengenai bentuk RUU baru/penggantian atau RUU perubahan. Ketentuan Pasal 97A dirumuskan agar materi muatan dalam suatu UU sektoral yang diubah dan/atau dicabut dalam UU yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan UU yang menggunakan metode omnibus tersebutsehingga materi muatannya tersebut tidak dapat diubah dan/atau dicabut kembali dengan perubahan UU sektoralnya.

Berdasarkan penafsiran gramatikal, Pasal 97A pada hakikatnya hanya memperbolehkan materi muatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus (UU tentang “XX”) untuk diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut (UU tentang “XX”). Berdasarkan penafsiran *a contrar*io, Pasal 97A pada hakikatnya tidak melarang materi muatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus untuk diubah dan/atau dicabut dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan lainnya tersebut dapat menggunakan metode omnibus atau metode lain.

Ketentuan Pasal 97A harus dimaknai satu kesatuan dengan Lampiran II Angka 237 UU tentang PPP bahwa penggantian UU tetap dapat dilakukan sepanjang memenuhi salah satu kondisi terpenuhi (sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah atau materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen), atau esensinya berubah). Substansi Pasal 97A tersebut perlu segera diperbaiki guna memperjelas dan memberikan legitimasi secara hukum terhadap kedudukan dari UU yang dibentuk menggunakan metode omnibus, UU sektoral yang diubah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terdampak. Hal ini karena dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai negara hukum, diperlukan untuk menjaga konsistensi norma dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan Pasal 97A harus tetap dipertahankan dengan usulan perbaikan rumusan sebagai berikut:

Pasal 97A

Materi Muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dihapus dengan mengubah, mengganti, atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut.

Penjelasan Pasal 97A

Pasal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus.

Yang dimaksud dengan “Materi Muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan” meliputi bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau rincian dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

1. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Materi muatan tersebut hanya dapat diubah atau dihapus dengan melakukan perubahan, penggantian, atau pencabutan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak diubah/dihapus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Materi muatan tersebut dapat diubah dan/atau dihapus dengan melakukan perubahan, penggantian, atau pencabutan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. **PENUTUP**
   * 1. **Simpulan**
4. UU dan RUU yang menggunakan metode omnibus telah disusun setelah berlakunya UU tentang PPP. Lingkup pengaturan metode omnibus dalam UU tentang PPP terdapat dalam Pasal 42A, Pasal 64, dan Pasal 97A. Dalam praktik penyusunan RUU adanya Pasal 97A menimbulkan beragam pandangan yang berkaitan dengan kedudukan UU yang menggunakan metode omnibus, keberadaan UU sektoral yang telah diubah oleh suatu UU bermetode omnibus, serta bentuk atau format RUU atau UU sektoral tersebut. Penerapan ketentuan Pasal 97A sangat dipengaruhi dinamika hukum ketatanegaraan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga berdampak pada keragaman produk UU yang dihasilkan serta penerapan teknik penyusunan RUU. UU dan RUU yang terdampak diantaranya UU tentang Kesehatan, UU tentang P2SK, UU tentang Desa, RUU tentang Kepolisian, dan RUU tentang Kepariwisataan.
5. Indonesia belum lama mempraktikkan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law* sebagai upaya penyederhanaan dan keterpaduan UU yang saling berkaitan. Selama metode omnibus dibutuhkan sebagai upaya mengatasi *hyper regulation* maka Pasal 97A dibutuhkan keberadaaannya sebagai jangkar dan tolok ukur bagi UU sektoral yang diubah/dicabut oleh UU bermetode omnibus dan UU yang akan dibentuk dengan metode omnibus. Eksistensi Pasal 97A harus diperkuat dan agar ditaati dan dilaksanakan perlu dilakukan perbaikan rumusan materi muatan Pasal 97A berikut penjelasannya dengan memperhatikan pemenuhan segi ketepatan, segi kesesuaian, dan segi aplikatif. Dengan perumusan materi muatan yang hati-hati dan cermat sesuai dengan ciri bahasa perundang-undangan akan menghasilkan norma hukum yang baik, akan mendorong tertib teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pada akhirnya menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai asas-asas dan bermanfaat.
   * 1. **Saran**

Materi muatan Pasal 97A sebagai ketentuan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan UU baik bermetode omnibus maupun bermetode lain harus segera direvisi dengan usulan rumusan: Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dihapus dengan mengubah, mengganti, atau mencabut Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20O7 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**Buku**

Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 8, 2016.

Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang, Cetakan Kelima.* Jakarta: Rajawali Press, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Natabaya, H.A.S. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.

Redi, Ahmad dan Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*, *Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Setiadi, Wicipto. *Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Jakarta: Damera Press, 2022.

Sihombing, Eka NAM, dan Ali Marwan HSB. *Ilmu Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2021.

**Jurnal**

Anggono, Bayu Dwi. *Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang Undangan Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No.1, 2020.

Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agung et.al. *Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 2, 2022.

Purwaningtyas, Lovika Augusta et.al. *Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang*. Jurnal Interdisciplinary, Journal on Law, Social, Science, and Humanities, Vol. 4 No. 1, 2023.

Putra, Antoni. *Penggunaan Pendekatan Omnibus Law dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 2, 2022.

Setiadi, Wicipto. *Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Pendekatan Omnibus Law*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1, April 2020.

Sodikin. *Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1, April 2020.

**Harian/Surat Kabar**

A. Ahsin Thohari. *Menakar Omnibus Law*. Opini Koran Sindo, Rabu 30 Oktober 2019.

**Bahan yang Tidak Diterbitkan**

**Makalah**

Samsul, Inosentius. *Argumentasi terhadap Pasal 97A UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dalam Bentuk RUU Penggantian*. Bahan Paparan Badan Keahlian DPR RI, disampaikan di Komisi X DPR RI, 4 Juni 2024.

Samsul, Inosentius. *Evaluasi Metode Omnibus Law Termasuk Pasal 97A UU No 13 Tahun 2022*. Bahan Paparan Badan Keahlian DPR RI disampaikan dalam *Seminar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Evaluasi dan Tantangan ke Depan*, 29 Juli 2024.

**Risalah**

Badan Legislasi DPR RI. *Kajian Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Atas Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan*. 22 Mei 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 7 April 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Risalah Rapat Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 13 April 2022.

**Naskah Akademik**

Badan Keahlian DPR RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* 1 Februari 2022.

**Tesis**

Nasution, Ihsan Badruni. *Tesis:* *Materi Muatan Perubahan dan/atau Pencabutan Undang-Undang yang Menggunakan Metode Omnibus (Tinjauan Atas Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*. Jakarta: Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2024.

**Laman**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI VI daring*. Dimuat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hanya>, diakses tanggal 10 September 2024.

Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Ahmad Naufal Zulfaroh. *Poin-Poin Draf Revisi UU Polri yang Disorot*. Dimuat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/29/201500165/poin-poin-draf-revisi-uu-polri-yang-disorot-tambah-masa-jabatan-dan>, diakses tanggal 10 September 2024.

Jimly Asshiddiqie. *UU Omnibus (Omnibus Law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif*. Dimuat dalam https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif, diakses tanggal 2 September 2024.

Muhammad Idris. *Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?*. Dimuat dalam, <https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law?page=all>, diakses tanggal 3 September 2024.

**PARAMETER PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN**

***(PARAMETERS OF MEANINGFUL PUBLIC PARTICIPATION IN THE FORMATION OF LEGISLATION)***

# **Noval Ali Muchtar, S.H.,M.H.**

Perancang Peraturan Perundang-undangan

Pusat Perancangan Undang-Undang

Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia

Sekretariat Jenderal DPR RI

\*Korespondensi: novalali95@gmail.com

**Abstrak**

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No.13 Tahun 2022) yang memuat pengaturan tentang *meaningful participation* yang dilaksanakan melalui *rights to be heard*, *rights to be explain, dan rights to be consider* telah membawa perubahan positif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana suatu peraturan perundang-undangan telah dibentuk secara partisipatif ataukah tidak. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana parameter yang menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan telah memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna? Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Parameter untuk mengukur apakah suatu peraturan perundang-undangan telah memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna yaitu pertama adalah partisipasi masyarakat harus mulai dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu pada tahapan perencanaan, penyusunan, sampai dengan pembahasan. Parameter yang kedua adalah partisipasi masyarakat harus dilaksanakan terbuka terhadap seluruh masyarakat tetapi harus mengutamakan *stakeholders* yang terdampak terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Parameter yang ketiga adalah partisipasi masyarakat harus dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pembahasan selesai dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan itikad baik dari pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU No.13 Tahun 2022 sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih partisipatif.

Kata kunci: parameter partisipasi masyarakat yang bermakna, pembentukan peraturan perundang-undangan.

***Abstract***

*Article 96 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation 1 (Law No. 13 of 2022), which contains provisions on meaningful participation implemented through the rights to be heard, rights to be explain, and rights to be consider, has brought positive changes in the formation of legislation. However, there are questions about how a regulation has been formed participatively or not. Based on this, what are the parameters that determine whether a regulation has fulfilled meaningful public participation? This study uses the normative legal writing method and uses a legislative approach and a conceptual approach. The parameters to measure whether a regulation has fulfilled meaningful public participation are: first, public participation must begin in the formation of legislation, namely at the planning, drafting, and discussion stages. The second parameter is that public participation must be open to all members of the society but must prioritize stakeholders who are impacted by the enactment of a regulation. The third parameter is that public participation must be carried out according to the specified timeframe, starting from the planning stage until the discussion stage is completed. Based on this, the good faith of the legislators is needed to implement the provisions of Article 96 of Law No. 13 of 2022 so as to produce more participatory legislation.*

*Key words: parameters of meaningful community participation, formation of laws and regulations*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022) membawa angin segar terutama dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 dianggap merupakan pengejawantahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa berkenaan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna (*meaningful participation)* sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.[[112]](#footnote-112) Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) yaitu asas keterbukaan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.[[113]](#footnote-113)

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang ketika rancangan peraturan perundang-undangan disahkan/ditetapkan maka akan menjadi sasaran penerapan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka sudah menjadi keharusan bahwa Masyarakat harus terlibat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini, keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri di tingkat pusat, serta peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota masih menjadi persoalan.[[114]](#footnote-114)

Sebelumnya, diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja) telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Bagi pembentun undang-undang yaitu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), UU tentang Cipta Kerja merupakan terobosan baru dalam rangka melaksanakan reformasi regulasi. Reformasi regulasi diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan regulasi di Indonesia diantaranya adalah adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, inkonsistensi peraturan, multitafsir peraturan, dan regulasi yang tidak operasional.[[115]](#footnote-115) Selain keempat permasalahan tersebut, hukum di Indonesia juga mengalami situasi yang menurut Richard Susskind disebut sebagai *over-regulated[[116]](#footnote-116)* atau istilah lain yaitu obesitas hukum, dimana di antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang tindih (*overlapping)* sehingga menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Obesitas hukum tersebut tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencapai total 59.300 (lima puluh sembilan ribut tiga ratus) peraturan perundang-undangan per 7 Januari 2022 dengan rincian sebagai berikut:[[117]](#footnote-117)

* + - 1. Undang-Undang sebanyak 1.809 (seribu delapan ratus sembilan);
      2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas);
      3. Peraturan Pemerintah sebanyak 4.928 (empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan);
      4. Peraturan Presiden sebanyak 2.471 (dua ribu empat ratus tujuh puluh satu);
      5. Peraturan Menteri sebanyak 18.540 (delapan belas ribu lima ratus empat puluh);
      6. Peraturan Badan/Lembaga sebanyak 6.077 (enam ribu tujuh puluh tujuh); dan
      7. Peraturan Daerah sebanyak 19.587 (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh).

Disahkannya UU tentang Cipta Kerja merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk menjawab permasalahan tersebut. Dengan mengubah hampir 80 (delapan puluh) undang-undangan dan terbagi atas 11 (sebelas) klaster diantaranya 1) Penyederhanaan perizinan tanah 2) Persyaratan investasi 3) Ketenagakerjaan 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM 5) Kemudahan berusaha 6) Dukungan riset dan inovasi 7) Administrasi Pemerintahan 8) Pengenaan sanksi 9) Pengendalian lahan 10) Kemudahan proyek pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). UU tentang Cipta Kerja mengadopsi metode *omnibus law* dalam pembentukannya.

Bagi kubu yang kontra, UU tentang Cipta Kerja hanya merupakan jalan bagi pemerintah untuk menekan hak yang dimiliki oleh pekerja dan menguntungkan pengusaha. UU tentang Cipta Kerja dalam pembentukannya juga dirasakan tidak memenuhi syarat partisipasi masyarakat, kemudahan akses untuk mendapatkan RUU tentang Cipta Kerja tidak dipenuhi, terlebih dengan beredarnya 5 (lima) Naskah RUU tentang Cipta Kerja dengan substansi yang berbeda. Substansi yang sangat banyak semakin membingungkan masyarakat (orang perseorangan atau kelompok hukum) untuk memberikan masukan.[[118]](#footnote-118) Oleh karena itu beberapa pihak akhirnya mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) baik dalam aspek formiil pembentukannya maupun dalam aspek substansinya.

Pada saat ini, pengaturan tentang cipta kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023). UU No. 6 Tahun 2023 merupakan undang-undang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu tentang Cipta Kerja). Perpu tentang Cipta Kerja ditetapkan oleh Presiden karena dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (*climate change*), dan terganggunya rantai pasokan (*supply chain*) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam UU tentang Cipta Kerja.[[119]](#footnote-119)

Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kehendak masyarakat dalam perumusan substansi dan norma dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini karena adanya daya laku (*validity*) juga didasarkan karena adanya daya guna (*efficacy*) dari norma tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat apakah suatu norma yang ada dan berdaya laku itu berdaya guna secara efektif atau tidak, atau dengan kata lain apakah norma itu ditaati atau tidak.[[120]](#footnote-120)

Pada dasarnya, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan antara lain untuk (1) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan; (2) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusi dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (3) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confindence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (4) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (5) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (6) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (7) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).[[121]](#footnote-121)

Dengan terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, tentu memiliki tujuan dalam rangka pembentukan hukum yang baik. Hukum yang baik sangat diperlukan karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam pembentukan hukum yang baik, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan, yang berarti tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat banyak agar dapat menciptakan kepastian yang berkeadilan sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.[[122]](#footnote-122)

Selain itu, partisipasi masyarakat bertujuan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Tujuan ini terkait dengan efektivitas, pembagian beban, dan efisiensi. Meningkatkan partisipasi akan membantu memastikan bahwa kepentingan rakyat dapat lebih besar dipenuhi. Meningkatkan partisipasi juga dapat menghasilkan titik temu kepentingan tersebut, dengan solusi yang diambil yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan banyak pihak akan suatu kebijakan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa ketika kelompok-kelompok yang dituju suatu kebijakan terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, serta dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka hasil kebijakan yang lebih baik dapat dicapai.[[123]](#footnote-123)

2 (dua) tahun sejak diakomodirnya *meaningful participations* dalam UU No.13 Tahun 2022, terdapat pertanyaan apakah pembentuk peraturan perundang-undangan sudah melaksanakan ketentuan norma tersebut dan bagaimana parameter apakah suatu peraturan perundang-undangan telah memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna? Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengkaji hal tersebut agar menjadi jelas bagaimana parameter partisipasi masyarakat yang bermakna tersebut.

1. **Permasalahan**

Berdasarkan latar bekakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah bagaimana parameter yang menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan telah memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna?

1. **Tujuan**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan penulis di atas, tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui parameter yang menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan telah memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna.

1. **Metode Penulisan**

Tulisan ini disusun dengan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif memiliki tujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan sebagai aturan-aturan yang telah diterima sebagai aturan yang sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, maupun kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian atau dasar dalam hukum.[[124]](#footnote-124) Berbagai bahan tersebut disusun secara sistematis untuk kemudian dikaji sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti serta memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.[[125]](#footnote-125)

Penulisan dilaksanakan dengan melakukan pengkajian terhadap sumber kepustakaan yang terdiri dari berbagai literatur terkait dengan pengaturan untuk pelindungan semua orang dari penghilangan Paksa.[[126]](#footnote-126) Selanjutnya penulis melakukan deskriptif analisis terhadap berbagai bahan tersebut guna menjawab permasalahan.

1. **Pembahasan**
2. **Kerangka Konsepsional**
3. **Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Partispasi masyarakat adalah serangkaian kegiatan berupa tuntutan ataupun “perlawanan” terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir.[[127]](#footnote-127) Tujuannya untuk memengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan sebagai upaya penyampaian kepentingan masyarakat. Untuk merepresentasikan ide, rakyat tetap dapat menyuarakan aspirasinya melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, dan media konvensional lainnya yang secara konstitusional dijamin dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia.[[128]](#footnote-128) Pengertian lainnya menyatakan bahwa partisipasi adalah turut sertanya masyarakat pada proses mengidentifikasi potensi dan masalah, ikut sertanya masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, serta keterlibatan dalam proses evaluasi kegiatan. Partisipasi masyarakat menekankan pada "partisipasi" warga secara langsung di lembaga dan dalam proses pemerintahan.[[129]](#footnote-129)

Proses partisipasi masyarakat selalu menjadi perhatian utama dalam pembangunan Indonesia, Partisipasi merupakan bagian penting dari budaya bangsa kita yang senantiasa menempuh pendekatan musyawarah untuk mufakat dalam mencari jalan keluar serta pengambilan keputusan bersama.[[130]](#footnote-130) Partisipasi masyarakat berperan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peran penting tersebut karena partisipasi masyarakat memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik; memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik; meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif; dan efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.[[131]](#footnote-131)

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dilakukan untuk menghindari: *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, dalam arti tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan; *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang tidak implementatif; *Ketiga*, peraturan perundang-undangan yang tidak responsif, yang sejak dirancang dan diundangkan mendapatkan penolakan yang keras dari Masyarakat; *Keempat*, peraturan perundang-undangan yang bukannya memecahkan masalah sosial, tetapi malah menimbulkan kesulitan baru di masyarakat; dan *Kelima*, peraturan perundang-undangan yang tidak relevan dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat.[[132]](#footnote-132)

Dengan memahami pentingnya aspirasi masyarakat, materi muatan akan lebih berpihak untuk kepentingan rakyat. Adanya penyelewengan terhadap materi muatan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat berarti mengingkari hakikat keberadaan peraturan perundang-undangan di tengah masyarakat. Berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan berbahaya bagi kelangsungan tatanan hidup masyarakat luas.[[133]](#footnote-133)

1. **Sejarah Pengaturan tentang Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam kehidupan bernegara, partisipasi merupakan salah satu hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang­undang*.” Kemudian dikuatkan kembali dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004) yang menyatakan bahwa “*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah*.” Pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 menurut pembentuk undang-undang dianggap masih sumir dan belum mencerminkan partisipasi masyarakat secara optimal sehingga perlu untuk diganti.

Dalam rangka mengatasi kelemahan partisipasi masyarakat dalam UU No. 10 Tahun 2004, maka ditetapkanlah UU No. 12 Tahun 2011. Partisipasi masyarakat dalam UU No. 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 96 yang berisi memperkuat pengaturan tentang partisipasi masyarakat dengan cara menjelaskan dan mengatur tata cara partisipasi masyarakat. UU No. 12 Tahun 2011 juga mensyaratkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan yang memiliki pengertian: [[134]](#footnote-134)

“bahwa dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan lebih terbuka kepada masyarakat dan masyarakat-pun dapat menyampaikan aspirasinya melalui metode yang telah terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Partisipasi masyarakat juga diatur dalam Bab IX Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Pada saat ini ketentuan tentang partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022, yang berbunyi:

Pasal 96

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
5. Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
7. rapat dengar pendapat umum;
8. kunjungan kerja;
9. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
10. kegiatan konsultasi publik lainnya.
11. Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
14. **Parameter partisipasi masyarakat yang bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perudang-undangan**

Tujuan mengkaji parameter partisipasi masyarakat yang digunakan sebagai ukuran bagi pembentuk peraturan perundang-undangan apakah pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna ataukah tidak. Parameter ini diperlukan karena banyak tanggapan dari masyarakat bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, lebih khusus undang-undang belum partisipatif. Sebagai contoh adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) yang dinilai belum partisipatif. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Akses Kesehatan dalam konferensi pers yang meminta DPR dan pemerintah menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. Hal itu disebabkan pembahasan RUU tersebut dinilai tanpa partisipasi publik yang bermakna dan bisa memperluas komersialisasi layanan kesehatan.[[135]](#footnote-135) Sedangkan DPR dan Pemerintah merasa bahwa pembentukan UU No. 17 Tahun 2023 sudah partisipatif dan sudah mendengarkan masukan berbagai pihak terkait.

Terdapat 4 (empat) konsep terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:[[136]](#footnote-136)

1. partisipasi sebagai kebijakan. Konsep ini memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan;
2. partisipasi sebagai strategi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah;
3. partisipasi sebagai alat komunikasi. Konsep ini melihat partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan; dan
4. partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada di masyarakat.

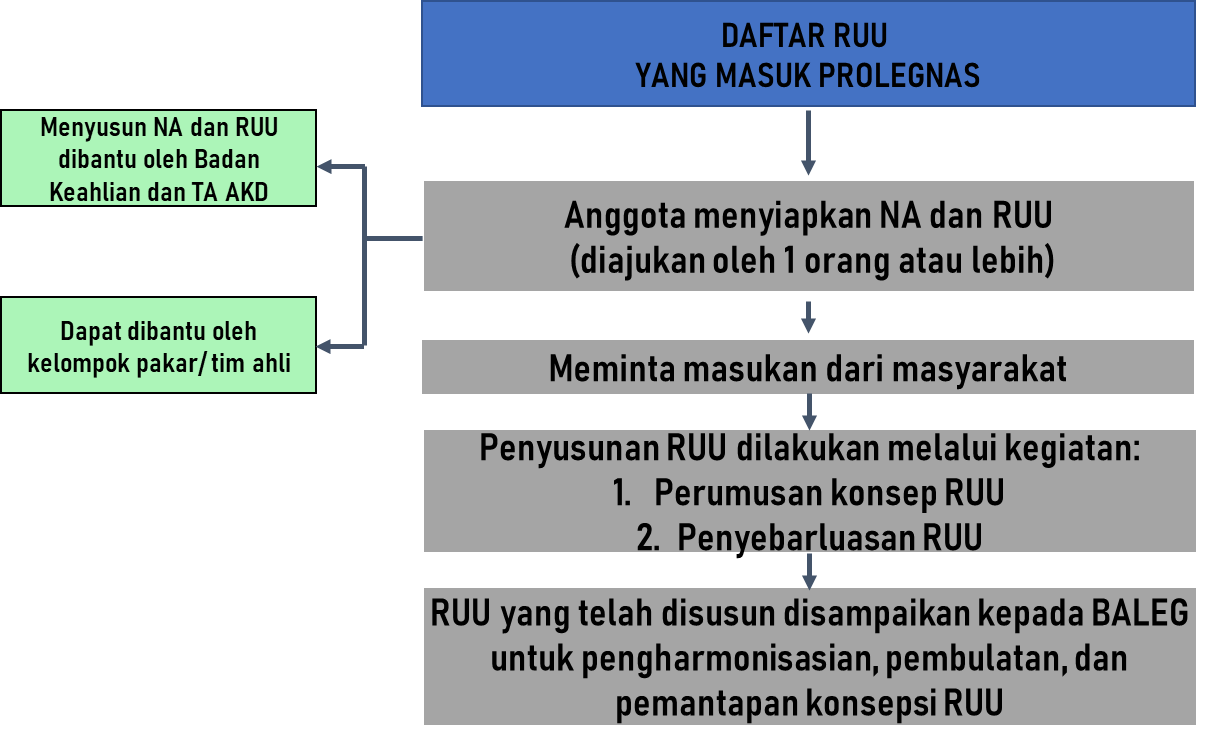
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan prasyarat dari terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka demokrasi dalam sistem pemerintahan negara tidak akan terwujud. Oleh karena itu, sangat penting bagi sebuah pemerintahan yang baik dalam upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang paling berimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan.

Dalam rangka mengetahui parameter partisipasi masyarakat apakah pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna ataukah tidak, harus terlebih dahulu mengetahui sampai tahapan apa partisipasi dapat diberikan. Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.12 Tahun 2011 menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

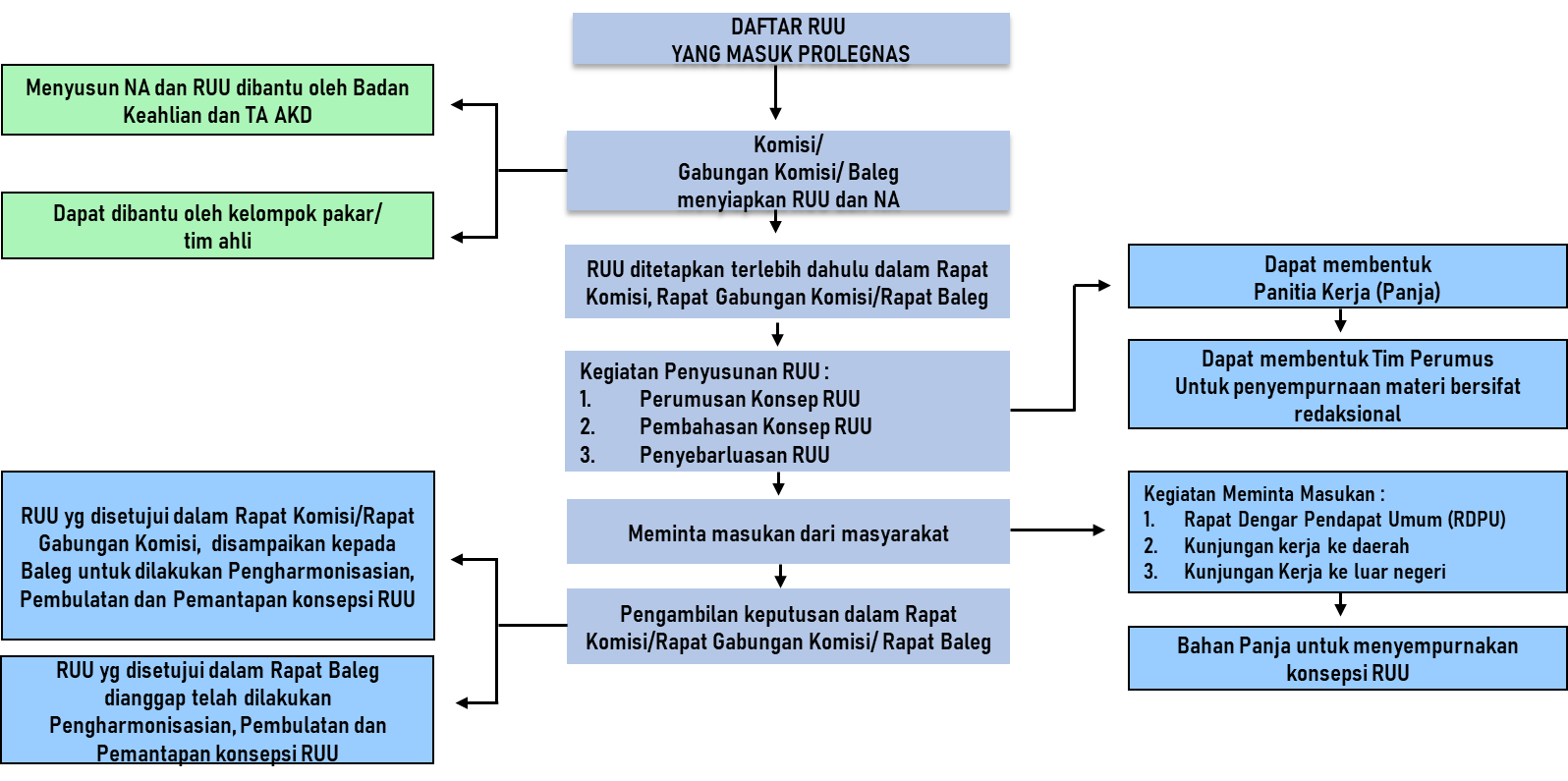
Tahapan perencanaan Undang-Undang dilakukan dalam program legislasi nasional (Prolegnas), perencanaan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah (Propsun PP), perencanaan penyusunan Peraturan Presiden (Propsun Perpres) dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi, dan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Dalam tahapan perencanaan ini dimungkinkan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya karena dalam Prolegnas tersebut memuat kajian awal berupa Naskah Akademik, judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Prolegnas dapat diusulkan baik oleh DPR, Pemerintah, maupun DPD. Konsep Prolegnas di Pemerintah dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Konsep Prolegnas di DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi, dan Konsep Prolegnas di DPD dikoordinasikan oleh Panitia Rancangan Undang-Undang. [[137]](#footnote-137) Pasal 118 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyampaikan bahwa dalam penyiapan konsep Prolegnas, masyarakat dapat menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang kepada Badan Legislasi. Pasal 66 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa Badan Legislasi pun bertugas untuk melakukan sosialisasi Prolegnas dan/atau Prolegnas perubahan. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat sudah dapat memberikan masukan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahapan perencanaan.

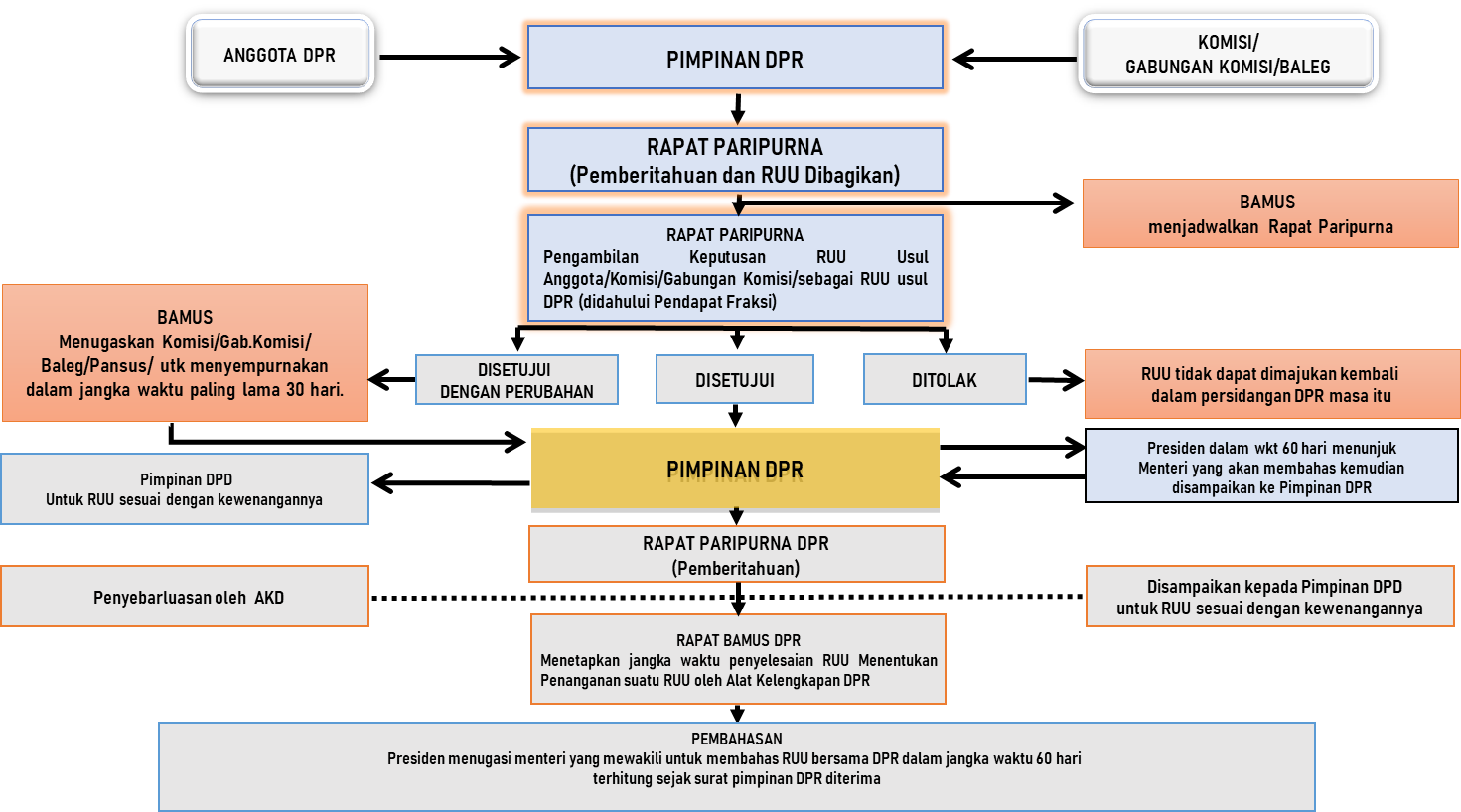
Tahapan penyusunan Undang-Undang dapat digambarkan dengan gambar berikut:



Sumber: https://pusatpuu.dpr.go.id/tentang/alur-penyusunan-ruu



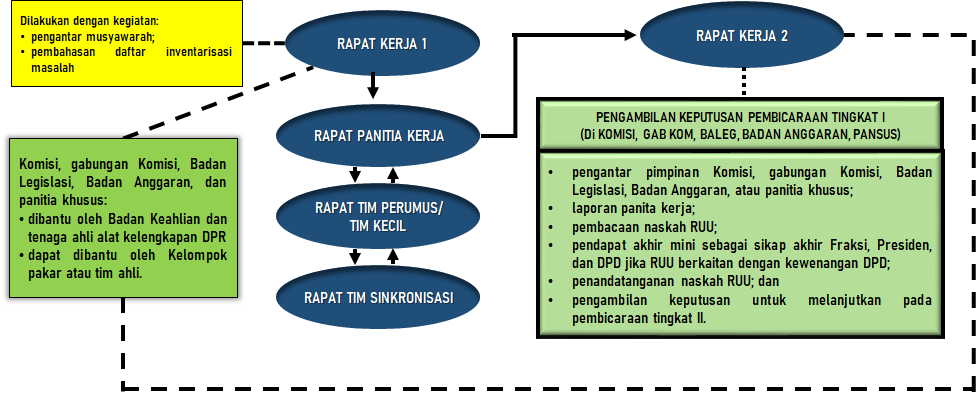
Sumber: https://pusatpuu.dpr.go.id/tentang/alur-penyusunan-ruu



Sumber: https://pusatpuu.dpr.go.id/tentang/alur-penyusunan-ruu

Dari gambar skema tersebut dapat terlihat adanya kegiatan meminta masukan dari masyarakat dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja dalam dan luar negeri, serta kagiatan lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tahapan penyusunan memungkinkan terjadinya partisipasi masyarakat.

Tahapan pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 tahapan pembicaraan. Pembicaraan Tingkat (Tk.) I dilaksanakan dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden. Pembicaraan Tk. II dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR. Berikut kegiatan yang dilakukan dalam Pembicaraan Tk.I:



Sumber: https://pusatpuu.dpr.go.id/tentang/alur-penyusunan-ruu

Dalam pembicaraan Tk. I tersebut sangat dimungkinkan untuk meminta masukan dari masyarakat. Masukan dari masyarakat tersebut disampaikan melalui tahapan RDPU dengan para *stakeholders* terkait, ahli/pakar, maupun melakukan kunjungan kerja secara langsung ke pihak yang berpotensi mengalami dampak dikarenakan adanya pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tersebut.

Tahapan selanjutnya adalah pengesahan, pengesahan Rancangan Undang-Undang dilakukan dengan membubuhkan tandatangan Presiden paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah dalam pembicaraan Tk.II (Pembahasan), kemudian Menteri Sekretaris Negara membubuhkan nomor dan tahun di rancangan undang-undang tersebut dan Menteri Hukum mengundangkannya dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mungkin dilakukan partisipasi masyarakat dalam tahapan pengesahan dan pengundangan. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa tahapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dimulai pada saat perencanaan sampai dengan tahapan pembahasan.

Menurut Ubbe, Proses pembentukan Undang-Undang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu: pra legislasi, tahap legislasi, dan tahap pasca legislasi.[[138]](#footnote-138) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam salah satu tahapan ataupun ketiganya. Menurut Pataniari Siahaan, pada tahap perencanaan dan penyiapan RUU terdapat 4 (empat) bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang yaitu penelitian, diskusi, lokakarya dan seminar, pengajuan usul inisiatif, dan perancangan.[[139]](#footnote-139) Pada tahap pembahasan RUU terdapat enam bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang yaitu audiensi/Rapat Dengar Pendapat Umum, penyusunan RUU alternatif, melalui media cetak, melalui media elektronik, unjuk rasa, diskusi, lokakarya, dan seminar.[[140]](#footnote-140)

Menurut Ichwanuddin, ruang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang menyejahterakan, setidaknya terdapat 5 (lima) tahapan, yaitu:[[141]](#footnote-141) Pertama, tahap penyusunan program legislasi nasional, dimungkinkan partisipasi masyarakat dalam tahap konsultasi dan komunikasi untuk memberi masukan dan memantabkan program legislasi nasional, tetapi tidak jelas siapa yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam forum tersebut, ditunjuk oleh pembentuk undang-undang. Kedua, penyusunan prakarsa rancangan undang-undang, ada dua tahap masyarakat bisa terlibat yaitu dalam penyusunan naskah akademik dan forum konsultasi, namun keduanya bersifat fakultatif tergantung dari niat dan kepentingan pembentuk undang-undang untuk mengikutsertakan masyarakat.

Ketiga, proses perancangan undang-undang di DPR, DPD, dan pemerintah, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui peran perguruan tinggi yang bekerjasama dengan alat kelengkapan DPR dalam membuat RUU. Keempat, proses pengusulan di DPR dalam tahap ini, tidak ada peran serta masyarakat karena sifatnya DPR hanya menyampaikan informasi saja. Kelima, dalam pembahasan di DPR, peran serta masyarakat terletak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum.

Parameter yang pertama untuk mengukur apakah suatu undang-undang telah memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna adalah partisipasi masyarakat harus dimulai dalam tahapan perencanaan, penyusunan, sampai dengan pembahasan. Masyarakat juga harus bergerak aktif agar jangan sampai partisipasi masyarakat baru ramai dilaksanakan pada saat tahapan pembahasan akan berakhir atau pada saat pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Partispasi harus diberikan sedini mungkin yaitu tahapan perencanaan. Selain peran aktif masyarakat, pembentuk peraturan perundang-undangan juga harus melaksanakan sosialisasi secara masif sejak tahapan penyebarluasan Prolegnas.

Parameter yang kedua untuk mengukur apakah suatu peraturan perundang-undangan telah memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna adalah partisipasi masyarakat harus dilaksanakan terbuka terhadap semua masyarakat dengan mengutamakan *stakeholders* yang terdampak terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Maria Farida Indrati menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat harus diartikan sebagai setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang “rentan” terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga yang terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait.[[142]](#footnote-142)

MK dalam putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 telah menetapkan *guidelines* tentang batasan kerugian bagi masyarakat yang dapat menjadi permohon gugatan *judicial review* terhadap suatu undangn-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
2. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. adanya hubungan sebab akibat *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Putusan MK tersebut dapat menjadi contoh untuk menentukan mengenai kriteria *stakeholders* terkait atau yang harus diutamakan dalam memenuhi partisipasi masyarakat. Dapat diketahui bahwa *stakeholders* terkait atau yang harus diutamakan untuk memberikan masukan yaitu:

1. masyarakat yang dianggap akan terdampak dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut; dan/atau
2. masyarakat yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadinya kerugian hak dan/atau kewenangan.

Pada dasarnya akan lebih baik apabila terdapat kesinambungan antara masyarakat dan pembentuk peraturan perundang-undangan.Masyarakat harus dapat membuktikan argumentasinya bahwa dirinya akan terdampak terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentuk peraturan perundang-undangan juga harus aktif mengidentifikasi *stakeholders* yang dianggap akan terdampak dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut dan/atau masyarakat yang berpotensial mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan terhadap berlakunya peraturan perundang-undangan.

Identifikasi *stakeholder* harus dilakukan secara cermat oleh pembentukan peraturan perundang-undangan karena *stakeholder* memiliki pengaruh besar dalam keberlakuan peraturan perundang-undangan apakah akan efektif atau tidak efektif atau bahkan tidak dapat dilaksanakan. Identifikasi *stakeholder* harus dilakukan dalam tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Identifikasi *stakeholder* adalah proses yang mengidentifikasi orang, kelompok, atau organisasi yang dapat memberikan dampak atau yang terkena dampak atas suatu peraturan perundang-undangan. Tahapan dalam melakukan identifikasi *stakeholder*, yaitu:

1. Melakukan pendataan *stakeholder*

Penting untuk mendata siapa *stakeholder* yang terlibat dan terdampak.

1. Mengelompokkan dan mengategorikan *stakeholder*

Kelompokkan dan kategorikan siapa *stakeholder* dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

Pendataan *stakeholder* harus dilakukan secara cermat dengan memasukan semua pihak yang berpotensi terdampak dengan adanya peraturan perundang-undangan. Bagir Manan mengklasifikasi terdapat dua sumber partisipasi, terkait dengan proses pembentukan peraturan daerah. Pertama, dari unsur pemerintahan di luar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi dan lain-lain. Kedua, dari masyarakat, baik individual seperti ahli atau yang memiliki pengalaman atau dari kelompok LSM sesuai keahlian atau pengalamannya.[[143]](#footnote-143)

Sebagai contoh, dalam UU tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan maka harus melibatkan buruh dan pengusaha untuk dimintai masukannya. Keterlibatan buruh dan pengusahan diidentifikasikan sebagai organisasi dan/atau serikatnya. Kemudian pentingnya mengelompokan dan mengkategorikan *stakeholder* adalah karena tidak semua *stakeholder* memiliki kapabilitas untuk dapat menyampaikan masukan. Sebagai contoh persyaratan secara umum adalah organisasi atau LSM yang dapat menyampaikan masukannya harus terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian Hukum dan HAM serta secara khusus sudah banyak menulis dalam artikel resmi tentang tema yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Ketentuan tersebut tidak untuk membatasi partisipasi masyarakat tetapi partisipasi masyarakat harus dilaksanakan secara tertib agar pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat optimal dan diterima oleh masyarakat.

Parameter ketiga untuk mengukur apakah suatu undang-undang telah memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna adalah partisipasi masyarakat harus dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pembahasan selesai dilakukan. Proses pembentukan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHP) perlu menjadi pembelajaran baik bagi masyarakat maupun pembentuk peraturan perundang-undangan. RKUHP yang sudah disepakati dalam pembahasan Pembicaraan Tk.I batal disepakati dalam Pembicaraan Tk.II. Hal ini dikarenakan terjadi penolak besar dari masyarakat yang menganggap pembentukan RKUHP tidak partisipatif. Pada saat ini RKUHP sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setelah melewati beberapa kali kegiatan konsultasi publik di perguruan tinggi di Indonesia.

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Moh Fadli yang menyatakan bahwa Parameter peraturan perundang-undangan yang partispatif bisa dilihat dari:[[144]](#footnote-144)

1. penyusunan peraturan perundang-undangan dijalankan dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik;
2. partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap anggaran pembangunan pemerintahan, merupakan dasar-dasar yang prinsipal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
3. partisipasi dalam penyusunan peraturan pemerintahan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat;
4. adanya pemberdayaan para pihak agar mampu berpartisipasi secara seimbang;
5. setiap aspirasi diperhatikan tanpa terkecuali;
6. pengambilan keputusan melalui proses yang jujur, terbuka dan adil;
7. adanya akses yang luas terhadap berbagai informasi yang merupakan hak publik; dan
8. adanya mekanisme penilaian terhadap hasil-hasil keputusan dan pelaksanannya.

Dengan adanya parameter tersebut, pembentuk peraturan perundang-undangan dan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah aspiratif ataukah tidak aspiratif. Dengan terciptanya partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama negara hukum yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bangsa.[[145]](#footnote-145)

1. **PENUTUP**
   * 1. **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, untuk mengukur apakah suatu peraturan perundang-undangan telah memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna, parameter yang pertama adalah partisipasi masyarakat harus dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pada tahapan perencanaan, penyusunan, sampai dengan pembahasan. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menyampaikan aspirasinya agar jangan sampai partisipasi masyarakat baru ramai dilaksanakan pada saat tahapan pembahasan akan berakhir atau pada saat pengesahan rancangan undang-undang tersebut, karena hal tersebut tidaklah efektif.

Parameter yang kedua adalah partisipasi masyarakat harus dilaksanakan terbuka terhadap semua masyarakat tetapi harus mengutamakan *stakeholders* yang terdampak atau setidaknya berpotensial terdampak terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Parameter yang ketiga adalah partisipasi masyarakat harus dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pembahasan selesai dilakukan.

* + 1. **Saran**

Dengan diundangkannya UU No. 13 Tahun 2022, pengaturan tentang partisipasi masyarakat yang bermakna secara normatif telah dipenuhi. Tahapan selanjutnya adalah diperlukan niat baik bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menerapkan ketentuan tersebut secara baik dan efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

**Buku**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Fadli, Moh., Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partsipatif (Head To A Good Village Governance)*. Malang: UB Press. 2011.

Halim, Hamzah dan Putera, Kemal Redindo Syahrul. *Cara praktis menyusun dan merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana. 2010.

Ichwanuddin, Wawan. *Masyarakat Sipil dan Kebijakan Publik, Studi Kasus Masyarakat Sipil dalam Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan.* Jakarta: YAPPIKA. 2006.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius. 2007.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Cetakan 11, Jakarta: Kanisius. 2013.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII. 2004,

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group. 2016.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2017.

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Sadiawati, Dian. *Strategi Nasional Reformasi Regulasi*.Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2015.

Siahaan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Konpress. 2012.

Susanti, Bivitri. *Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). 2006.

Utomo, Sad Dian. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan*, dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: *Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa. 2003.

**Jurnal**

Febriansyah, Ferry Irawan. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Perspektif, Vol. XXI No. 3, September, 2016.

Laily, Elida Imro’atin Nur. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3, No. 3, September-Desember, 2015.

Latif, Adam, Irwan, Ahmad Mustanir. *Pengaruh Kepemimpinan terhadap Partisipasi Masyarakat pada perencanaan Pembangunan*. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Vol. 5, No.2, Desember 2019

Muchtar, Noval Ali. *Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. Jurnal Prodigy Vol.10, No.2, Desember 2022.

Riskiyono, Joko. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan.* Jurnal Aspirasi, Vol. 6, No. 2, Desember, 2015.

Susskin, Richard. *Legal Information: a Personal Appraisal of Context and Progress.* European Journal of Law and Technology. Vol. 1. No. 1, 2010.

**Laman**

Atiek Ishlahiyah Al Hamasy, Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Kesehatan Dinilai Belum Bermakna, dimuat dalam https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/13/ruu-kesehatan, diakses tanggal 6 September 2024

Website Peraturan.go.id, Kementerian Hukum dan HAM, dimuat dalam https://peraturan.go.id, diakses tanggal 4 Januari 2024.

**HARMONISASI PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMROH**

**UNTUK OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

***(HARMONIZATION OF HAJJ FINANCIAL MANAGEMENT OF LAW NUMBER 34 YEAR 2014 ON HAJJ FINANCIAL MANAGEMENT AND LAW NUMBER 8 YEAR 2019 ON ORGANIZATION OF THE HAJJ AND UMRAH IN SUPPORTING OPTIMALIZATION ON HAJJ ORGANIZATION)***

# **Arrista Trimaya**

Perancang Undang-Undang Ahli Madya

Pusat Perancangan Undang-Undang

Sekretariat Jenderal DPR RI

\*Korespondensi: [arrista3maya@gmail.com](mailto:arrista3maya@gmail.com)

**Abstrak**

Peran dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi jamaah haji sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU tentang PIHU). Pengelolaan keuangan haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU tentang PKH) yang merupakan UU pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan menjadi rujukan pembentukan UU tentang PKH. Dalam implementasinya masih terdapat permasalahan, misalnya kondisi dan fasilitas bagi jemaah haji yang memprihatinkan dan masih rendahnya kinerja BPKH dalam mengelola keuangan haji. Untuk itu, perlu ada harmonisasi materi muatan UU tentang PKH dan UU tentang PIHU. Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana harmonisasi pengelolaan keuangan haji yang diatur dalam UU Tentang PKH dan UU Tentang PIHU serta upaya BPKH agar penyelenggaraan ibadah haji dapat optimal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana harmonisasi pengelolaan keuangan haji yang diatur dalam UU Tentang PKH dan UU Tentang PIHUsertaupaya BPKH dalam pengelolaan keuangan haji yang optimal. Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, diperoleh simpulan terdapat materi muatan yang perlu disinkronisasikan antara UU tentang PKH dan UU tentang PIHU dan perlunya upaya yang dilakukan oleh BPKH agar terjadi optimalisasi dalam pengelolaan keuangan haji.

Kata kunci: harmonisasi, Undang-Undang, keuangan haji, ibadah haji.

***Abstract***

*The role and responsibility of the state in organizing the Hajj is carried out by the Government by providing guidance, services, and protection in accordance with the provisions of Sari’ah that regulated on Law Number 8 Year 2019 on The Implementation of the Hajj and Umrah (Law on PIHU). Meanwhile, the management and utilization of hajj finances are regulated in Law Number 34 Year 2014 on The Management of Hajj Finances (Law on PKH) which is a reference for the formation of The Law on PKH. In its implementation, there are still various problems so that the implementation of the Hajj is not optimal, In addition, the performance of BPKH as a hajj financial management body must be improved. For this reason, there needs to make harmonization of the contents of The Law on PKH and The Law on PIHU. The issues of this paper are how to harmonize the regulations regarding the management of hajj finances regulated in the The Law on PKH and The Law of PIHU and what BPKH efforts in the management of hajj finances, so the implementation of the hajj can run optimally. The aims of this paper are to determine the harmonization of regulations regarding the management of hajj finances regulated in The Law on PKH and The Law of PIHU and the BPKH efforts in the management of hajj finances so that the implementation of the hajj can be optimal. The writing method used is the normative legal analysis method, which uses primary legal materials in the form of laws and regulations, books, and journals. Based on the discussion conducted, it concluded that various factors need to be synchronized between The Law on PKH and The Law of PIHU and the need for efforts that can be made by BPKH so that the management of hajj finances can be optimal.*

*Keywords: harmonization, laws, hajj finance, hajj.*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan nilai-nilai yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Hak mendapat keadilan dalam kehidupan warga negara antara lain, berupa hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, terdapat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang mengamanatkan bahwa *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terdapat jaminan dari negara untuk memberikan  kebebasan kepada setiap orang dalam memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya masing-masing. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ini kemudian dipertegas kembali pada Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia,[[146]](#footnote-146) dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hal ini semakin menekankan bahwa kemerdekaan dan kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Jaminan dari negara atas kemerdekaan dan kebebasan beribadah, khususnya bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, salah satunya diwujudkan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi suatu kewajiban dalam syariat Islam.[[147]](#footnote-147) Ibadah haji wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun finansial (*istitha’ah*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU tentang PIHU), disebutkan bahwa peran dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi Warga Negara Indonesia yang menunaikan ibadah haji agar dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Minat Warga Negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, kuota Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 sebesar 221.000 jemaah. Selain itu, Indonesia juga mendapat kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah. Sebanyak 10.000 kuota tambahan diperuntukan bagi jemaah haji reguler, sementara 10.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Sehingga total jemaah haji Indonesia tahun ini berjumlah 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jemaah dan 27.680 jemaah haji khusus.[[148]](#footnote-148) Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat penambahan kuota jemaah haji, namun kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi sangat terbatas sehingga jumlah calon jemaah haji tunggu semakin meningkat.[[149]](#footnote-149)

Peningkatan jumlah jemaah haji tunggu dalam jumlah besar menimbulkan terjadinya penumpukan akumulasi dana jemaah haji dalam jumlah besar yang berasal dari setoran awal dana haji dari para calon jemaah haji tersebut. Waktu tunggu untuk melaksanakan ibadah haji terbilang cukup lama dikarenakan kuota haji yang terbatas menyebabkan banyak jemaah haji yang mendaftar haji terlebih dahulu. Besarnya pendaftar ibadah haji ini lantas membuat penumpukan dana haji yang juga cukup besar.[[150]](#footnote-150)

Pengelolaan dan pemanfaatan dana haji pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU tentang PKH). Pengelolaan keuangan haji erat kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji bagi umat Islam dan terdapat akumulasi dana haji yang berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[151]](#footnote-151) Dibentuknya UU tentang PKH merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU tentang PKH.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU tentang PKH, disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Keberadaan BPKH juga diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang BPKH (Perpres tentang BPKH), yang menyatakan bahwa BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Perpres tentang BPKH disebutkan bahwa BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan UU tentang PKH bersifat mandiri, dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan ibadah haji belum berjalan dengan optimal dari tahun ke tahun, terdapat berbagai temuan dari sisi penyelenggaraan yang masih perlu diperbaiki. Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI masih menemukan sejumlah permasalahan. Melalui Rapat Paripurna, menyetujui pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pengawasan Pelaksanaan ibadah Haji 2024 (Pansus Timwas Haji).[[152]](#footnote-152) Pembentukan Pansus Timwas Haji disahkan oleh Rapat Paripurna ke-21 pada masa persidangan DPR RI tahun 2023-2024, tanggal 9 Juli 2024. Pansus ini dibentuk untuk menyelidiki berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Haji 2024. Pansus Timwas Haji juga dimaksudkan untuk mengungkap penyimpangan peraturan dan kebijakan, penetapan kuota haji dan penyelenggaraan haji sesuai prinsip dan asas keadilan, transparansi dan akuntabilitas.[[153]](#footnote-153) Secara singkat, pembentukan Pansus Timwas Haji bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji ke depan serta memastikan penyelenggaraan ibadah haji terlaksana dengan lebih efektif.

Khusus mengenai pembagian dan penetapan kuota haji, adanya tambahan quota yang diberikan pemerintah Arab Saudi tidak sesuai dengan UU tentang PIHU. Dalam Pasal 64 ayat (2) UU tentang PIHU mengatur kuota haji khusus ditetapkan 8 persen dari kuota haji Indonesia sehingga Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama No.118 Tahun 2024 tidak sesuai dengan hasil rapat panitia kerja (panja) Komisi VIII dengan Menteri Agama terkait penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).[[154]](#footnote-154)

Selain itu, pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dinilai masih belum optimal dan masih adanya kekhawatiran terkait dengan sustainabilitas (keberlanjutan) keuangan haji. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang sangat signifikan antara komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan nilai manfaat yang akan diterima oleh jemaah. BPIH merupakan sejumlah dana atau total biaya yang digunakan untuk operasional penyelenggaran ibadah haji, sedangkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) merupakan biaya yang ditanggungkan atau biaya yang wajib dibayar langsung oleh jemaah haji. Nilai manfaat merupakan dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. Singkatnya BIPIH merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh jemaah sementara nilai manfaat merupakan hak yang diterima jemaah yang disebut bantuan keuangan (*financial support*).[[155]](#footnote-155)

Contoh Perbandingan BPIH, sebagai berikut:[[156]](#footnote-156)

|  | **BPIH** | **Bipih** | **Nilai Manfaat** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 97,80 Juta | 39,89 Juta | 57,91 Juta |
| 2023 | 90,05 Juta | 49,81 Juta | 40,24 Juta |
| 2024 | 93,4 Juta | 56,0 Juta | 37,4 Juta |

*Sumber: Laporan Keuangan BPKH Tahun 2023*

Permasalahan tentang pengelolaan keuangan haji sebagaimana telah disebutkan, berdampak pada keadilan bagi setiap jemaah baik yang akan berangkat maupun jemaah tunggu (tahun selanjutnya). Jika diperhadapkan dengan nilai keadilan dan kebaikan jemaah tunggu, Menteri beranggapan bahwa kebijakan biaya haji yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun agar lebih rasional maka sudah saatnya untuk peninjauan ulang. Nilai manfaat yang bisa juga disebut sebagai subsidi bukanlah berasal dari APBN, melainkan bantuan keuangan (*financial support*) yang berasal dari nilai manfaat.[[157]](#footnote-157)

Dalam memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan dana haji untuk waktu jangka panjang, Menteri mengadakan penyesuaian biaya haji yang prosentasenya dibagi menjadi Bipih 70% dan nilai manfaat 30%. Adanya perumusan tersebut berdasar pada proses kajian dan diskusi antara Kementerian Agama dengan BPKH yang ditinjau dari tanggungan biaya yang besar dari nilai manfaat. Penyesuaian ini diambil untuk masa yang akan datang sehingga seluruh jemaah yang akan segera berangkat ataupun jemaah tunggu akan merasakan penyetaraan tanpa mengancam dana untuk tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, adanya perubahan paradigma sistem penyelenggaraan ibadah haji dari Kerajaan Arab Saudi yang menjadikan haji sebagai bagian bisnis dan pariwisata. Perubahan paradigma ini dinilai sudah tidak sejalan dengan kebijakan konvensional Pemerintah Indonesia terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini jelas akan berdampak pada pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji ke depan.[[158]](#footnote-158) Perubahan paradigma kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah di Arab Saudi melalui Visi 2030 Kerajaan Arab Saudi perlu diantisipasi dan diadaptasi oleh regulasi di Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada pengaturan penyelenggaraan ibadah haji dan aspek keuangan haji di Indonesia.

Untuk itu, diperlukan kepastian hukum yang menjamin pengelolaan keuangan haji untuk penyelenggaraan ibadah haji yang optimal. Beberapa materi muatan antara lain definisi penyelenggaraan ibadah haji dan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diatur dalam UU tentang PKH perlu disinkronisasikan dengan UU tentang PIHU sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU tentang PIHU), Hal ini karena pada saat pembentukan UU tentang PKH, beberapa ketentuannya masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah dicabut dan diganti melalui UU tentang PIHU.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa belum ada harmonisasi materi muatan antara UU tentang PKH dan UU tentang PIHU terutama dari definisi dan batasan pengertian. Oleh karena itu, harmonisasi diperlukan agar calon jemaah haji mendapatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk nilai manfaat yang akan diterima oleh jemaah haji berdasarkan pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH.

1. **Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas yaitu:

* + - 1. Bagaimana harmonisasi pengaturan mengenai pengelolaan keuangan haji yang diatur dalam UU tentang PKH dan UU tentang PIHU?
      2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh BPKH dalam pengelolaan keuangan haji agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan optimal?

1. **Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui**:**

1. harmonisasi pengaturan mengenai pengelolaan keuangan haji yang diatur dalam UU tentang PKH dan UU tentang PIHU; dan
2. upaya yang dapat dilakukan oleh BPKH dalam pengelolaan keuangan haji agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan optimal

Kedua tujuan penulisan tersebut sangat penting untuk dikaji karena dinamika pembangunan dan perekonomian akan terus berjalan sehingga perlu dikendalikan oleh kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Namun, penulis hanya terbatas atau terfokus pada analisis terhadap harmonisasi pengaturan mengenai pengelolaan keuangan haji yang diatur dalam UU tentang PKH dan UU tentang PIHU karena keterbatasan kemampuan dan daya jangkau penulis sehingga analisis hanya dibatasi dalam lingkup tersebut, meskipun idealnya analisis tersebut sebaiknya juga dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan haji dan penyelenggaraan ibadah haji secara komprehensif.

1. **Metode Penulisan**

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan.” Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian atau penulisan di bidang hukum.[[159]](#footnote-159) Kemudian, metode penulisan didefinisikan menjadi cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan ,dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.[[160]](#footnote-160)

Adapun metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan). Penelitian yuridis normatif merupakan metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah berbagai konsep, teori, asas hukum, putusan pengadilan, doktrin (ajaran), dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi tulisan ini. Berbagai bahan tersebut disusun secara sistematis untuk kemudian dikaji sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti serta memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. [[161]](#footnote-161)

Berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, pengkajian dilakukan dengan menganalisis keterkaitan antara penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji. Selain itu, penulisan ini juga dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan literatur (pustaka), baik berupa buku atau catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.[[162]](#footnote-162) Penulis juga menggali data yang bersumber dari sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji dan penyelenggaraan ibadah haji, antara lain diterbitkan oleh Kementerian Agama serta media lainnya.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Kerangka Konsepsional**
3. **Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tentang PIHU, Ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang PIHU, mendefinisikan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

Kemudian, berdasarkan Pasal 10 UU tentang PIHU, diatur bahwa penyelenggaraan ibadah haji reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan melalui satuan kerja yang bersifat tetap dan terstruktur di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi. Oleh karena itu, peran negara dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan keniscayaan yang harus dilaksanakan secara optimal.

Adapun tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Tentang PIHU), yaitu memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi jemaah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.[[163]](#footnote-163)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ini menjadi dasar pengaturan secara umum penyelenggaraaan ibadah haji hingga dibentuknya UU tentang PKH. Artinya, pengaturan dalam UU tentang PKH ini masih mengacu pada konsep penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji *jo.* Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.

1. **Pengelolaan Keuangan Haji**

Kata pengelolaan merujuk pada kata manajemen. Kata ini berasal dari "*to manage"* yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Hamiseno mengemukakan bahwa manajemen berarti, suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Stoner dan Winkel mengatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika kegiatan diorganisir dengan pengelolaan yang baik akan berkorelasi positif terhadap pengefektifan dan efesiensi kegiatan secara teknis, demikian juga dalam pelayanan.[[164]](#footnote-164)

Dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang PKH, didefinisikan bahwa keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Namun, dengan adanya tantangan berupa cakupan tanggung jawab yang terlalu luas dan kemampuan pengelolaan yang belum mumpuni, tanggung jawab pengelolaan keuangan haji berubah menjadi tanggung jawab BPKH berdasarkan UU tentang PKH pada tahun 2014. BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.[[165]](#footnote-165)

Dalam UU tentang PKH, didefinisikan dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.[[166]](#footnote-166) Pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji, nilai manfaat dan efisiensi BPIH, dan meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.[[167]](#footnote-167)

Salah satu poin penting dalam UU tentang PKH tersebut, yakni adanya pemisahan fungsi regulator dan operator penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama dengan fungsi pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. Melalui pemisahan fungsi ini diharapkan pemanfaatan dana haji akan dapat dikelola oleh BPKH secara lebih profesional demi kemaslahatan umat. Dalam Pasal 22 UU tentang PKH disebutkan bahwa BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Selanjutnya dalam Pasal 24 UU tentang PKH juga disebutkan bahwa BPKH dalam melaksanakan tugasnya, berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.

Berikut beberapa kewenangan BPKH yang tercantum dalam Pasal 24 UU tentang PKH, yaitu:

* 1. menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
  2. melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan BPKH hanya terbatas pada lingkup penempatan investasi dana haji.

1. **Harmonisasi Undang-Undang**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata, sedangkan kata harmonisasi diartikan sebagai pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan.[[168]](#footnote-168) Dalam kajian ini, kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian/keselarasan antara peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan.

Pada aspek hukum, pemahaman mengenai harmonisasi hukum sejatinya berkaitan dengan kebijakan hukum atau reformasi hukum yang diorientasikan untuk menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman. Tentu setiap negara memiliki kebijakan hukum tersendiri mengenai perkembangan hukum dan modernisasi hukum. Namun, terdapat pola universalitas yang diterapkan di hampir semua negara dalam menghadapi modernisasi hukum. Pola tersebut adalah harmonisasi hukum identik dengan dominannya aturan hukum tertulis (*text law*). Hal ini dapat dimaknai bahwa harmonisasi hukum berkaitan erat dengan berkembangnya gejala positivisasi. Hal ini tentu berkaitan juga dengan pengaruh hukum tertulis yang mendominasi aspek modernisasi hukum. Perkembangan hukum yang bersifat tertulis ini sejatinya merupakan perkembangan yang bersifat umum dan universal.[[169]](#footnote-169)

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan hukum secara umum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Oleh karena itu eksistensi hukum mempunyai suatu tujuan. Tujuan hukum menurut Geny adalah semata-mata keadilan. Secara teori, tujuan hukum dipetakan menjadi dua, yakni mewujudkan keadilan yang berorientasi pada teori etis dan kemanfaatan hukum bagi kehidupan masyarakat yang berorientasi pada teori utilistis. Menurut teori etis, yang hendak dicapai hukum adalah keadilan.[[170]](#footnote-170)

Oleh karena itu, harmonisasi kedua Undang-Undang tersebut akan sesuai dengan teori utilistis yang menawarkan bahwa hukum ingin menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Selain itu, berdasarkan asas *Lex posteriore derogat generalis lex priori,* yang berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu maka perlu dilakukan penyesuaian agar kedua peraturan tersebut tetap eksis dan berjalan beriringan secara harmonis.[[171]](#footnote-171)

Kondisi inilah yang mengakibatkan pentingnya dilakukan harmonisasi antar peraturan, yaitu substansi UU tentang PKH untuk diharmonisasikan materi muatannya dengan UU tentang PIHU. Hal ini disebabkan adanya pemisahan fungsi regulator dan operator penyelenggaraan ibadah haji dengan fungsi pengelolaan keuangan haji melalui pembentukan BPKH yang didasarkan pada UU tentang PKH.[[172]](#footnote-172) Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, UU tentang PIHU dan UU tentang PKH tentu memiliki keterkaitan yang sangat erat karena hasil pengelolaan keuangan haji sangat mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji, demikianpula sebaliknya bahwa penyelenggaraan ibadah haji yang optimal dapat terwujud apabila didukung dengan pengelolaan anggaran yang tepat.

Dengan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan maka kehadiran hukum diperlukan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan. UU tentang PIHU merupakan dasar berpijak dalam penyelenggaraan ibadah haji saat ini. Sedangkan keuangan haji dilandasi oleh UU tentang PKH. Bentham mengutarakan “…*law as a balance of interests…”[[173]](#footnote-173)* sedangkan Rudolf Stammler[[174]](#footnote-174) juga mengemukakan bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi pelbagai maksud, tujuan, dan kepentingan, baik antar individu dengan individu, maupun antar individu dengan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilihat hal apa saja yang perlu diharmonisasikan dari kedua peraturan tersebut agar dapat berjalan secara sinergis dan harmonis.

Dalam operasionalisasi harmonisasi hukum,[[175]](#footnote-175) pada intinya meliputi: *pertama*, mengindentifikasi apa yang bertentangan (merupakan disharmoni) yang menimbulkan masalah dan memerlukan harmonisasi. *Kedua*, perlu mengetahui sebab dan akibat benturan tersebut, seperti siapa atau instansi apa yang terlibat, apa maksud dan tujuannya, apa pangkal tolak pengaturannya, serta apa dasar hukumnya masing-masing. *Ketiga*, jika memang peraturan memerlukan harmonisasi maka perlu diketahui latar belakang serta tujuan peraturan-peraturan tersebut. Setelah itu, barulah diambil langkah-langkah harmonisasi. Dasar dan orientasi setiap langkah harmonisasi adalah tujuan harmonisasi nilai-nilai, asas hukum, serta tujuan hukum itu sendiri.[[176]](#footnote-176)

Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan sudah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Mengapa dikatakan mendesak karena permasalahan pembangunan hukum semakin hari membutuhkan pendekatan secara holistik.[[177]](#footnote-177) Dalam kajian ini, pengertian harmonisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara horisontal.[[178]](#footnote-178)

1. **Analisis**
2. **Harmonisasi Pengaturan Mengenai Pengelolaan Keuangan Haji Dalam UU tentang PKH dan UU tentang PIHU.**

UU tentang PKH merupakan undang-undang yang secara khusus *(lex specialist)* mengatur mengenai keuangan haji dari pengaturan secara umum *(lex generalist)* penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang diatur dalam UU tentang PIHU. Hal ini berarti, ketentuan dalam UU tentang PKH harus diharmonisasikan atau diselaraskan dengan ketentuan dalam UU tentang PIHU baik secara substansi maupun redaksional.

Beberapa ketentuan dalam UU tentang PKH yang perlu disinkronkan dengan ketentuan dalam UU tentang PIHU diantaranya: *Pertama,* mengenai definisi penyelenggaraan ibadah haji. Dalam Pasal 1 angka 9 UU tentang PKH menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang PIHU menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umrah. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan tahapan penyelanggaraan antara ibadah haji dan ibadah umrah. Selain itu, penyelenggaraan ibadah umroh bukan menjadi domain pemerintah

*Kedua*, mengenai definisi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dalam Pasal 1 angka 12 UU tentang PKH menyebutkan BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Sedangkan Pasal 1 angka 13 UU tentang PIHU menyebutkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara substansi, kedua definisi ini memiliki pemahaman yang berbeda. BPIH dalam UU tentang PIHU dimaknai sebagai biaya operasional yang harus dikeluarkan *(expense cost)* oleh pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji yang meliputi penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH. Sedangkan BPIH dalam UU tentang PKH dimaknai sebagai dana setoran awal dan kekurangan sisa biaya yang harus dikeluarkan warga negara setelah penetapan BPIH.

Untuk membedakan diksi BPIH tersebut, dalam UU tentang PIHU memunculkan nomenklatur baru yakni Bipih. Definisi Bipih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU tentang PIHU sama persis dengan definisi BPIH dalam Pasal 1 angka 12 UU tentang PKH, yaitu “sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.” Dengan kata lain Bipih ini adalah pembayaran setoran jemaah haji yang mekanisme pembayarannnya melalui dana setoran awal dan dana setoran pelunasan.

Bipih tersebut terbagi 2 (dua), yaitu Bipih untuk haji reguler dan Bipih untuk haji khusus. Perbedaan nomenklatur ini berdampak secara substansi pada pasal-pasal yang mengatur mengenai BPIH dalam UU tentang PKH. Ketidaksinkronan atau disharmoniini pada dasarnya terjadi karena UU tentang PKH masih mengacu pada rezim UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang.

*Ketiga,* keterlibatan BPKH dalam penetapan besaran BPIH. Mekanisme penetapan besaran BPIH sebagaimana diatur dalam UU tentang PIHU, dilakukan melalui usulan Menteri kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Besaran BPIH yang telah disetujui oleh DPR kemudian ditetapkan oleh Presiden. Penetapan besaran BPIH ini harus dilakukan setiap tahun karena nilainya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji. Permasalahannya adalah seringkali terjadi penambahan BPIH diluar dari yang telah ditetapkan oleh Presiden pada tahun tersebut. Penambahan BPIH ini dapat disebabkan karena faktor eksternal seperti adanya kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi ataupun faktor internal akibat adanya kenaikan biaya *(cost)* dari komponen penyelenggaraan ibadah haji. BPKH perlu dilibatkan dalam penetapan BPIH karena merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU tentang PKH untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji tersebut, perlu dilakukan harmonisasi antara UU tentang PKH terhadap ketentuan dalam UU tentang PIHU. Harmonisasi dilakukan dengan mengakomodasi beberapa ketentuan dalam UU tentang PIHU baik secara substansi maupun redaksional agar kedua undang-undang tersebut selaras. Keharmonisan berbagai peraturan yang berkaitan dengan ibadah haji sangat penting agar tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Dengan demikian, UU tentang PKH memerlukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap beberapa pasal agar dapat kembali sejalan dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat melalui harmonisasi atau penyelarasan materi muatan pengaturannya dengan UU tentang PIHU sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan secara optimal, termasuk pengelolaan keuangan haji (hasil nilai manfaat) untuk sebesar-besarnya kemanfaatan dan kemashalatan umat, khususnya bagi jemaah haji Indonesia.

1. **Upaya BPKH Dalam Pengelolaan Keuangan Haji agar Penyelanggaraan Ibadah Haji Berjalan Optimal.**

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh BPKH agar pengelolaan keuangan haji berjalan optimal, yaitu:

1. Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Haji

Pasal 8 UU tentang PKH mengatur bahwa nilai manfaat keuangan haji dari hasil pengembangan keuangan haji dan ditempatkan pada kas haji. Dengan demikian, dana haji yang disetorkan oleh jemaah adalah titipan yang dapat dikelola oleh BPKH dengan tujuan kemaslahatan jemaah. Sebagai pengelola, BPKH bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan risiko dana tersebut. Artinya, BPKH memiliki otoritas untuk mengelola dana haji melalui berbagai instrumen investasi, asalkan dana tersebut dapat dikembalikan saat jemaah membutuhkannya.[[179]](#footnote-179)

Selanjutnya, salah satu poin penting dalam UU tentang PKH yaitu adanya pemisahan fungsi regulator dan operator penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama dengan fungsi pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. Melalui pemisahan fungsi ini diharapkan pemanfaatan dana haji akan dapat dikelola oleh BPKH secara lebih profesional demi kemaslahatan umat. Dalam Pasal 22 UU tentang PKH, disebutkan bahwa BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Selanjutnya dalam Pasal 24 UU tentang PKH juga disebutkan bahwa BPKH dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKH berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.

Selain itu, pengelolaan keuangan haji oleh BPKH menjadi isu krusial mengingat dana tersebut berasal dari setoran calon jemaah yang harus dikelola dengan prinsip syariah, keamanan, dan kehati-hatian. Berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BPIH 1444 H/2023 M, biaya rata-rata penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 90.050.637,26 per jemaah, di mana jemaah hanya membayar Rp49.812.700,26 atau 55,3% dari BPIH, sementara sisanya ditutupi oleh nilai manfaat dari pengelolaan dana haji sebesar Rp40.237.937 atau 44,7%. [[180]](#footnote-180)

Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada akhir tahun 2023, total dana haji yang dikelola telah mencapai Rp166 triliun. Namun, seiring dengan meningkatnya BPIH, terdapat tantangan baru dalam memastikan keberlangsungan (*going concern*) dari pengelolaan dana haji untuk masa mendatang. Pada tahun 2024, BPIH ditetapkan sebesar Rp 93,4 juta per jemaah, di mana sekitar 56% dari biaya tersebut harus ditanggung oleh jemaah sendiri, sementara sisanya berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH.[[181]](#footnote-181)

Pada dasarnya BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Investasi keuangan haji oleh BPKH dapat dilakukan pada instrumen investasi surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Namun upaya yang sudah dilakukan oleh BPKH masih sebatas menjalankan ketentuan UU tentang PKH. Hal ini belum memberikan nilai manfaat yang maksimal bagi jamaah haji yang sudah menyetorkan dana setoran awal yang cukup besar.

Untuk meningkatkan kualitas layanan dan profesionalismenya, terdapat beberapa upaya lain yang telah dilakukan oleh BPKH yaitu: [[182]](#footnote-182)

1. BPKH secara rutin menyusun laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan operasional. Laporan ini menjadi acuan untuk menggambarkan kesehatan keuangan BPKH dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana haji.
2. Pengawasan Ketat

BPKH tunduk pada pengawasan ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK menjadi bukti bahwa dana haji dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

BPKH telah mendapatkan Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan BPKH. Ini menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan haji yang baik dan transparansi dalam pelaporan.

Seiring dengan peningkatkan kinerja BPKH sebagai badan pengelola keuangan haji, perlu ada kejelasan BPKH secara entitas kelembagaan. Kejelasan tersebut diarahkan untuk menjawab tantangan apakah BPKH akan ditingkatkan statusnya sebagai lembaga pengelola keuangan atau terbatas pada lembaga sosial keagamaan. Hal ini penting karena nantinya BPKH akan menjalin kerja sama dengan mitra afiliasi. Selain itu perlu juga digagas terkait dengan mekanisme pengawasan eksternal terhadap BPKH, sebagai konsekuensi jika statusnya menjadi lembaga pengelola keuangan.[[183]](#footnote-183) Untuk memenuhi kualifikasi dan mempersiapakan adanya pengawasan dari pihak eksternal, selain menerapkan standar akuntasi negara BPKH harus menerapkan standar audit atau pelaporan yang memenuhi kualifikasi aspek keuangan syariah.[[184]](#footnote-184)

1. Pemilihan Investasi yang Tepat untuk Memberikan Nilai Manfaat yang Lebih bagi Jemaah Haji

Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 24 UU tentang PKH, BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Investasi keuangan haji BPKH dapat dilakukan pada instrumen investasi surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Yang harus diperhatikan oleh BPKH yaitu pilihan jenis investasi yang akan diambil oleh BPKH harus mempertimbangkan aspek keamanan, likuiditas, dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) UU tentang PKH.

Luasnya ruang lingkup investasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPKH, terutama untuk menjalankan strategi investasi yang efektif dalam mengoptimalkan nilai manfaatnya. Tantangan yang lain adalah bagaimana mengantisipasi kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji, baik yang langsung maupun yang tidak langsung sehingga BPKH perlu menjalankan strategi investasi yang dapat memenuhi kebutuhan biaya tersebut melalui imbal hasil dari berbagai instrumen investasi. [[185]](#footnote-185)

Efektivitas pengelolaan dana haji sangat tergantung pada strategi investasi yang dilakukan oleh BPKH. Investasi jangka pendek dilakukan untuk menjaga likuiditas, sedangkan investasi jangka panjang ditujukan untuk mengoptimalkan manfaat. Hal ini memungkinkan BPKH untuk melakukan investasi dalam proyek infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah, meskipun sampai dengan saat ini dana haji belum secara langsung diinvestasikan dalam infrastruktur. Sebagai contoh, pada Januari 2023, BPKH mengalokasikan 70,50% atau sekitar Rp 117,05 triliun dana haji ke dalam berbagai investasi seperti surat berharga, investasi langsung, dan emas. Investasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah serta aspek keamanan, kehati-hatian, dan nilai manfaat yang optimal.[[186]](#footnote-186)

Sejauh ini, dana haji diinvestasikan terutama dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan alokasi 70%, sementara 30% sisanya ditempatkan pada deposito di bank syariah. Ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) UU Tentang PKH yang mengizinkan investasi dana haji dalam berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah.[[187]](#footnote-187) Investasi yang dilakukan oleh BPKH bertujuan untuk mengoptimalkan nilai manfaat dari dana haji. Misalnya, pada 2018, dana haji dialokasikan sebesar 50% pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS), 20% pada sukuk dan 20% pada investasi langsung. Target investasi pada tahun 2020 menunjukkan diversifikasi yang lebih luas dengan penambahan investasi pada emas dan kategori lainnya untuk menjaga keseimbangan antara keamanan, likuiditas, dan manfaat yang optimal.[[188]](#footnote-188)

Meskipun BPKH telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji, namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan investasi dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan operasional haji. Pengelolaan ini juga harus mempertimbangkan risiko fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi *return on investment*.[[189]](#footnote-189) Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga menjadi perhatian utama. Publik perlu mendapatkan akses yang cukup terhadap informasi mengenai penggunaan dan pengelolaan dana haji untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan aman dan sesuai dengan kepentingan jemaah.[[190]](#footnote-190)

Pasal 54 UU tentang PKH mengamanatkan pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal dan eksternal. Pada sisi pengawasan, dari pihak eksternal ditemukan catatan belum terpenuhinya aspek syariah. Hal ini ditandai dengan standar akutansi yang masih terbatas pada standar akutansi negara meskipun terdapat kewenangan BPK untuk melakukan audit tersebut[[191]](#footnote-191). Untuk itu, BPKH perlu lebih memperhatikan penempatan investasi dan pembuatan laporan keuangan yang memenuhi unsur syariah. Selain itu, BPKH harus melakukan berbagai mitigasi risiko agar pengelolaan dana haji tetap aman, efisien, dan likuid. Yang terpenting juga untuk meningkatkan investasi yang memberi nilai manfaat, BPKH harus meningkatkan sinergi dan inovasi dalam investasi dana haji.[[192]](#footnote-192)

c. Pelibatan BPKH bersama Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pemberian tugas dan wewenang BPKH yang diatur dalam UU tentang PKH ternyata belum sepenuhnya membuat BPKH terlibat penuh dalam penyelenggaraan ibadah haji, terutama terkait dalam pembahasan penetapan besaran BPIH.[[193]](#footnote-193) BPKH menganggap kewenangan yang diberikan oleh Kementerian Agama belum optimal karena beberapa alasan yang terkait dengan pengelolaan dana haji dan implementasi UU tentang PKH. Dalam pelaksanaannya selama ini, BPKH sebagai badan yang mengelola keuangan haji sejak awal tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan perhitungan Bipih. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang kurang tepat. Oleh karena itu, pelibatan BPKH dalam penyusunan perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji hingga penetapannya agar dapat mengantisipasi kenaikan biaya masyair dengan menyediakan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ibadah haji secara cepat dan tepat dalam pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan pemaknaan biaya penyelenggaraan haji.[[194]](#footnote-194)

Kurangnya sinergitas antara BPKH dengan Kementerian Agama dan DPR RI dalam penetapan Bipih juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja BPKH. Dalam implementasinya, BPKH dalam mengelola keuangan haji masih belum optimal terutama terkait sustainabilitas (keberlanjutan) keuangan haji. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang sangat signifikan komponen BPIH yaitu Bipih dan nilai manfaat.

Selain itu, perlu kerja sama BPKH dan Kementerian Agama dalam penentuan BPIH dan Bipih sehingga tidak memberatkan calon jemaah haji. Penggunaan dan pemindahan dana untuk operasional haji, baik reguler maupun khusus telah diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020. Pengeluaran tersebut mencakup alokasi dana untuk berbagai layanan yang diberikan kepada jemaah haji, baik di dalam negeri maupun selama pelaksanaan di Arab Saudi.

Permasalahan tentang pengelolaan keuangan sebagaimana yang telah disebutkan, berdampak pada keadilan bagi setiap jemaah, baik yang akan berangkat maupun jemaah tunggu (tahun selanjutnya). Jika diperhadapkan dengan nilai keadilan dan kebaikan jemaah tunggu, kebijakan biaya haji yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun agar lebih rasional maka sudah saatnya untuk peninjauan ulang. Nilai manfaat yang bisa juga disebut sebagai subsidi bukanlah berasal dari APBN, melainkan bantuan keuangan (*financial support*) yang berasal dari nilai manfaat.

Dalam pemenuhan prinsip keadilan dan keberlanjutan dana haji untuk waktu jangka panjang, Menteri mengadakan penyesuaian biaya haji yang dibagi menjadi BIPIH 70% dan nilai manfaat 30%.[[195]](#footnote-195) Penyesuaian ini diambil sebagai proteksi untuk masa yang akan datang sehingga seluruh jemaah haji yang akan segera berangkat maupun jemaah tunggu akan mendapatkan nilai manfaat yang proposional tanpa adanya kekhawatiran terhadap ketersediadaan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji berikutnya.

1. **PENUTUP**
2. **Simpulan**

Berdasarkan uraian analisis dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

* + - 1. Ketentuan dalam UU tentang PKH harus diharmonisasikan atau diselaraskan dengan ketentuan dalam UU tentang PIHU, baik secara substansi maupun redaksional. Beberapa ketentuan dalam UU tentang PKH yang perlu diharmoniskan dengan ketentuan dalam UU tentang PIHU diantaranya:

*Pertama,* mengenai definisi penyelenggaraan ibadah haji yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 UU tentang PKH dan Pasal 1 angka 3 UU tentang PIHU.

*Kedua*, mengenai definisi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang termuat dalam Pasal 1 angka 12 UU tentang PKH dan Pasal 1 angka 13 UU tentang PIHU. Secara substansi, kedua definisi ini memiliki pemahaman yang berbeda. BPIH dalam UU tentang PIHU dimaknai sebagai biaya operasional yang harus dikeluarkan *(expense cost)* oleh pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji, sedangkan BPIH dalam UU tentang PKH dimaknai sebagai dana setoran awal dan kekurangan sisa biaya yang harus dikeluarkan warga negara setelah penetapan BPIH.

*Ketiga,* keterlibatan BPKH dalam penetapan besaran BPIH. Mekanisme penetapan besaran BPIH sebagaimana diatur dalam UU tentang PIHU dilakukan melalui usulan Menteri kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Di sisi lain, berdasarkan UU tentang PKH bahwa BPKH diberi wewenang untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Oleh karenanya BPKH perlu dilibatkan dalam penetapan BPIH.

* + - 1. Beberapa upaya dalam pengelolaan keuangan haji agar penyelanggaraan ibadah haji dapat berjalan optimal, yaitu:

a. Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Haji

Adanya pemisahan fungsi regulator dan operator penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama dan fungsi pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. Melalui pemisahan fungsi ini diharapkan BPKH dapat mengelola dana haji secara lebih profesional demi kemaslahatan umat. Profesionalisme BPKH juga telah dibuktikan dalam pengelolaan keuangan haji setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Seiring dengan peningkatkan kinerja BPKH, perlu ada kejelasan BPKH secara entitas kelembagaan. Kejelasan tersebut diarahkan untuk menjawab tantangan apakah BPKH akan ditingkatkan statusnya sebagai lembaga pengelola keuangan atau terbatas pada lembaga sosial keagamaan.

* 1. Pemilihan Investasi Yang Tepat Untuk Memberikan Nilai Manfaat Yang Lebih Bagi Jemaah Haji

BPKH perlu lebih memperhatikan penempatan investasi dan pembuatan laporan keuangan yang memenuhi unsur syariah. Selain itu, BPKH harus melakukan berbagai mitigasi risiko agar pengelolaan dana haji tetap aman, efisien, dan likuid. Yang juga terpenting BPKH harus meningkatkan sinergi dan inovasi dalam investasi dana haji untuk meningkatkan investasi yang dapat memberi nilai manfaat.

* 1. Pelibatan BPKH bersama Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pelibatan BPKH dalam penyusunan perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji hingga penetapannya akan dapat mengantisipasi kenaikan biaya masyair dengan menyediakan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ibadah haji secara cepat dan tepat, terutama berkaitan dengan pemaknaan biaya penyelenggaraan haji.

1. **Saran**
   * + 1. Agar terjadi harmonisasi yang berkelanjutan, perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah dan DPR pada saat akan melakukan penyusunan perubahan UU tentang PKH, terlebih dahulu dikaji materi muatan yang bersinggungan dengan UU tentang PIHU, demikian pula dalam penyusunan semua peraturan pelaksana undang-undang tersebut. Tujuannya yaitu agar susbtansi yang diatur dalam UU perubahan tersebut tidak tumpang tindih, dapat berjalan sinergis, dan dapat diimplementasikan di masyarakat.
       2. Melalui perubahan UU tentang PKH diharapkan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan optimal dan memberikan nilai manfaat yang lebih tinggi untuk jemaah haji. Hal ini sebagai bentuk jaminan perlindungan dari negara kepada penduduk atas kemerdekaan dan kebebasan untuk beribadah, khususnya bagi umat muslim.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

**Buku**

Abimanyu, Anggito. *Kajian Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Juni 2015.

Aulia, M. Zulfa. *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, Universitas Jambi: 2018,

Friedmann, W. *Legal Theory*, Fifth Edition, New York: Columbia University Press, 1967.

Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2009.

Nur Dewata, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2017.

Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Balai Pustaka, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Sadijiono, *Hukum Antara Sollen dan Sein*, Jawa Timur: Ubhara press dan Laksbang Pressindo, 2018,

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021.

Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Syaukani, Imam. (ed), *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2019.

Tim Kajian Puspanlak, *Buku Kajian Akademik Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Haji*, PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW IV 2022,

Jurnal

A., Ikhwani. Rozalinda, dan Wira, A. *Rentabilitas penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)*. *Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol 3, 2024.

Kriswanto, *Harmonisasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan, Istinbath: Jurnal Hukum, Volume 19 Nomor 1, 2022.*

Prasetyo, Bagus. *Harmonisasi Pengaturan Pengelolaan Pariwisata Dan Pemajuan Kebudayaan Dalam Menunjang Peningkatan Perekonomian Di Indonesia,* Jurnal Prodigy Vol.2, 2019.

R. A. Kasri. *Menjaga Keberlanjutan Dana Haji.* Jurnal Pusat Ekonomi Dan Bisnis Syariah (PEBS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Vol. 3, 2024.

Syahrullah, Muhammad. *Manajemen Investasi Keuangan Haji Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan*, Jurnal ISLAMIKA, Vol. 5, No. 2, 2023.

***Website***

B. Prasetyo, *Risk Integration in Hajj Fund Investment Management*. dimuat dalam <https://www.academia.edu/>, diakses tanggal 9 September 2024.

Badan Pengelola Keuangan Haji, *Tiga Cara BPKH Jalankan Transparansi Pengelolaan Dana Haji,* dimuat dalam <https://bpkh.go.id/tiga-cara-bpkh-jalankan-transparansi-pengelolaan-danuruta-haji/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.

Badan Pengelola Keuangan Haji, *Laporan Keuangan BPKH Tahun 2023*. Dimuat dalam <https://bpkh.go.id/download/laporan-keuangan-bpkh-tahun-2023-audited-format-koran/>, diakses tanggal 3 September 2024.

BPKH*: 70% Dana Haji Diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara*. dimuat dalam <https://minanews.net/bpkh-70-dana-haji-diinvestasikan-pada-surat-berharga-syariah-negara/>, diakses tangga 7 September 2024.

Budi Prihatin, Rohani. *Permasalahan Penyelenggaraan Haji 2024.* Dimuat dalam<https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Juni-2024-198.pdf>, diakses tanggal 2 September 2024.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Kuota 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Dimuat dalam <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji>, diakses tanggal 26 Agustus 2024.

Dwi, Chandra. *Daftar Waktu Tunggu Haji Kab/Kota di RI: Ada yang Hampir Setengah Abad,* dimuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240517053132-128-538862/daftar-waktu-tunggu-haji-kab-kota-di-ri-ada-yang-hampir-setengah-abad>, diakses tanggal 27 Agustus 2024

Gunawan, Indra. *Tantangan Kinerja, Tatakelola dan Sinergi serta Inovasi Investasi Dana Haji Menuju Kemaslahatan yang Berkesinambungan*, dimuat dalam <https://bpkh.go.id/tantangan-kinerja-tatakelola-dan-peluang-sinergi-bpkh-sinergi-dan-inovasi-investasi-dana-haji-menuju-kemaslahatan-yang-berkesinambungan/>,diakses tanggal 10 September 2024.

Humas BPKH. *BPKH Nyatakan Kesiapan Pendanaan Haji Tahun 1444 H/2023,* dimuat dalam<https://bpkh.go.id/bpkh-nyatakan-kesiapan-pendanaan-haji-tahun-2023/>, diakses tanggal 6 September 2024.

Humas BPKH, *Catat Biaya Pelunasan BPIH 1445H/2023M dan Masa Waktu Pembayarannya,* <https://bpkh.go.id/catat-biaya-pelunasan-bpih-1445h-2023m-dan-masa-waktu-pembayarannya/>, diakses tanggal 9 September 2024.

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Diah Pitaloka Nilai Perlu Adanya Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Haji*. Dimuat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39044/t/Diah%20Pitaloka%20Nilai%20Perlu%20Adanya%20Revisi%20UU%20Pengelolaan%20Keuangan%20Haji%20dan%20UU%20Haji>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024.

PPID BPKH, Konsisten *Jaga Laporan Keuangan Haji, BPKH Raih Opini WTP 5 Kali berturut-turut dari BPK RI*, dimuat dalam <https://ppid.bpkh.go.id/foto/konsisten-jaga-laporan-keuangan-haji-bpkh-raih-opini-wtp-5-kali-berturut-turut-dari-bpk-ri/>, diakses tanggal 11 September 2024.

R., Setiawan. dan Restu Diantina Putri. *BPKH Bantah Biaya Haji Naik untuk Pembangunan Infrastruktur,* dimuat dalam <https://tirto.id/bpkh-bantah-biaya-haji-naik-untuk-pembangunan-infrastruktur-gBtH>, diakses tanggal 6 September 2024.

Rahayu, Eva Martha. *BPKH dan BI Dorong Inklusivitas dan Digitalisasi Layanan Haji dan Umrah*. Dimuat dalam <https://www.republika.co.id/berita/rjh7mv162534949221000/bpkh-dan-bi-dorong-inklusivitas-dan-digitalisasi-layanan-hajiumrah>, diakses tanggal 12 September 2024.

Satu Data Kementerian Agama Republik Indonesia, *Daftar Tunggu Jemaah Haji Indonesia Menurut Usia*. Dimuat dalam <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/daftar-tunggu-jemaah-haji-indonesia-menurut-usia>, diakses tanggal 28 Agustus 2024.

Thea, Ady. *Tok! DPR Resmi Bentuk Pansus Angket Pengawasan Haji 2024*. Dimuat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tok-dpr-resmi-bentuk-pansus-angket-pengawasan-haji-2024-lt668d1e4e17525/?page=2>, diakses tanggal 27 Agustus 2024.

Wis, mnf/. *DPR Resmi Bentuk Pansus Angket Beranggotakan 30 Orang*. Dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240709123541-32-1119175/dpr-resmi-bentuk-pansus-angket-haji-beranggotakan-30-orang>, diakses tanggal 26 Agustus 2024.

**ANALISIS** **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 DAN PUTUSAN** **MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

***ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 23 P/HUM/2024 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 70/PUU-XXII/2024 CONCERNING AGE REQUIREMENTS FOR CANDIDATES FOR REGIONAL HEAD AND DEPUTY REGIONAL HEAD***

# **Achmadudin Rajab, SH, MH**

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

\*Korespondensi: achmadudin.rajab@gmail.com

**Abstrak**

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan proses untuk pergantian kekuasaan yang secara konstitusional telah diatur dalam konstitusi di setiap daerah. Dalam perhelatan Pilkada saat ini terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Kedua putusan ini saling bertentangan dalam hal menyikapi norma mengenai syarat batasan umur dari calon yang dapat mencalonkan dalam Pilkada. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan mengangkat permasalahan yakni bagaimanakah analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Begitu juga bagaimanakah analisis dampak pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis baik itu analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 maupun analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Begitu juga mengetahui dampak pertentangan kedua putusan tersebut. Adapun metode penulisan yang digunakan yakni yuridis normatif Pada akhirnya penulis melihat bahwa pada pokoknya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 telah keliru dengan menambahkan norma pelantikan sebagai sebuah acuan. Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang berisi menolak permohonan, penulis melihat hal ini sudah benar karena norma di undang-undang dianggap sudah benar. Pada akhirnya dalam tulisan ini dihasilkan bahwa meskipun terdapat pertentangan dari kedua putusan tersebut, namun menurut Penulis sudah tepat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang digunakan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan undang-undang lebih tinggi dari peraturan komisi pemilihan umum yang diuji dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

Kata kunci: putusan mahkamah konstitusi, putusan mahkamah agung, syarat usia

***Abstract***

*The election of regional heads and deputy regional heads is a process for changing power which is constitutionally regulated in the constitution of each region. In the current regional elections there is the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 and the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024. These two decisions conflict with each other in terms of addressing norms regarding the age limit requirements for candidates who can nominate in the Pilkada. Based on this, the author will raise the problem, namely how to analyze the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 and the analysis of the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024. Likewise, what is the analysis of the impact of the conflict between the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 and the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024. This article aims to analyze both the analysis of the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 and the analysis of the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024. Likewise, knowing the impact of the conflict between the two decisions. The writing method used is normative juridical. In the end, the author sees that in essence the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 was wrong by adding inauguration norms as a reference. For the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024 which contains rejecting the application, the author sees this as correct because the norms in the law are considered correct. In the end, this article shows that although there are contradictions between the two decisions, according to the author, it is correct that the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024 is used as a reference for the formation of statutory regulations. This is because the law is higher than the general election commission regulations tested in the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024.*

*Keywords: constitutional court decision, supreme court decision, age requirements*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) dilaksanakan berdasarkan perintah dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan “*Gubemur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”. Pada tahun 2024 tepatnya di bulan November ini akan diselenggarakan Pilkada serentak secara nasional. Pilkada serentak nasional ini merupakan amanat Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016). Perhelatan Pilkada ini akan sangat menarik karena Pilkada merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis melalui konsep kepemiluan.[[196]](#footnote-196)

Saat ini undang-undang yang mengatur mengenai Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2020), UU No. 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015). Adapun sejumlah undang-undang ini masih berlaku sebagai UU Pilkada, dan kesemuanya bersama-sama menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pilkada serentak.

Menjelang penyelenggaraan pilkada ini terdapat peristiwa yang menarik yakni lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 (Putusan MA No. 23 P/HUM/2024). Putusan ini dianggap sangat politis, karena dampak dari Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 sangat kuat diduga menguntungkan pihak tertentu yang berkuasa saat ini.[[197]](#footnote-197) Patut diduga bahwa syarat usia yang dipersoalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari calon yang mau diusung Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 belumlah mencukupi, sehingga terbit putusan tersebut.

Beberapa bulan kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 (Putusan MA No. 23 P/HUM/2024). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini seolah-olah menjawab kisruh persoalan batas usia yang telah ramai dengan hadirnya Putusan MA No. 23 P/HUM/2024. Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 jelas tidak sejalan dengan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 karena cenderung menguatkan syarat usia bagi calon dalam UU No. 10 Tahun 2016.[[198]](#footnote-198)

Kedua putusan tersebut menarik untuk dikaji secara mendalam dan komprehensif karena substansi amar putusannya berbeda yang berdampak pada ketidakpastian bagi penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu. Oleh karena itu, penulis melakukan kajian terhadap perbedaan substansi tersebut dengan judul “*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.*

1. **Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka pokok permasalahan dalam tulisan ini yakni:

1. Bagaimanakah analisis Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimanakah analisis dampak Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggaraan pilkada?
3. **Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yakni:

1. Untuk menganalisis Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024.
2. Untuk menganalisis dampak Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggaraan pilkada
3. **Metode Penulisan**

Metode yang berasal kata metodologi dari bahasa Yunani, yaitu kata “*Methodos*” dan “*Logos*”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah–langkah yang sistematis, meliputi prosedur dan teknik.[[199]](#footnote-199)

Metode penulisan ini bersifat yuridis normatif yang memiliki tujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan sebagai aturan-aturan yang telah diterima sebagai aturan yang sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.[[200]](#footnote-200) Metode penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum,  
dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[[201]](#footnote-201)

1. **Pembahasan**
2. **Kerangka Konsep**
3. **Konsep Demokrasi**

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.[[202]](#footnote-202)Lebih lanjut lagi, Demokrasi dikenal dengan berbagai macam penerapan, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Istilah tersebut semuanya berasal dari kata “demokrasi“ yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*.[[203]](#footnote-203)

Konsep demokrasi identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah.

Salah satu hal yang penting terwujud dalam konsep demokrasi yang sehat adalah perwujudan negara hukum yang demokratis. Adapun ide dasar negara hukum demokratis itu dapat dilihat dalam praktik pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang dilahirkan sesuai dengan konstitusi. Dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma. Oleh karena itu, suasana kebatinan *(geistichenhenterground)* yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, dan historis perumusan yuridis suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perlu dipahami dengan seksama untuk dapat dimengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.[[204]](#footnote-204) Dengan demikian maka masing-masing dari kita dapat memahami perwujudan negara hukum yang demokratis tersebut.

1. **Konsep Hak Asasi Manusia**

Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban  
manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik.[[205]](#footnote-205)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Menurut Ahmad Kosasih bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tak dapat dipisahkan menurut hakikatnya dan karena itu bersifat suci.[[206]](#footnote-206)

Adapun berdasarkan sejumlah definisi terkait dengan HAM, perlu diketahui juga bahwa konsep HAM mengikuti perkembangan  
zaman, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa HAM adalah hak yang ada dalam diri manusia yang diperoleh sejak berada dalam kandungan dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia karena kalau  
dipisahkan atau dihilangkan maka hilang martabatnya manusia, dan kerena hak tersebut merupakan pemberian mutlak dari Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu harus dilindungi oleh negara dan dihormati oleh sesama manusia.[[207]](#footnote-207)

Meskipun demikian, bukan berarti perwujudan HAM dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Wajib disadari bahwa hak-hak yang sifatnya asasi selalu berbatasan dengan hak asasi orang  
lain.

1. **Konsep Putusan Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan di bawah Undang-Undang**

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan MK. Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung, dan diangkat oleh Presiden. Hakim Agung dipilih dari hakim karier dan non karier, profesional atau akademisi.[[208]](#footnote-208) Selengkapnya berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundang-undang. Adapun, keberadaan MA di Indonesia merupakan kelanjutan dari *“Her Hooggerechts Hof Vor Indonesia*” (Mahkamah Agung Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia).[[209]](#footnote-209)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[[210]](#footnote-210) Selanjutnya, dalam Konsideran UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan:[[211]](#footnote-211)

Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Adapun kekuasaan kehakiman terkait dengan kebebasan lembaga peradilan dan hal ini merupakan hal yang penting dalam suatu negara hukum.

Lebih lanjut, kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kemudian diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa:[[212]](#footnote-212)

1. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;
4. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan pengujiannya oleh MA, yaitu:[[213]](#footnote-213)

1. Peraturan delegasi dan subdelegasi dari undang-undang, yakni Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden; serta
2. Peraturan yang bersifat atribusian dari undang-undang, yaitu, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, termasuk Peraturan Gubernur Kepala Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang merupakan peraturan delegasi dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Kewenangan MA terkait pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan *“Mahkamah Agung* *berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang*”. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan juga bahwa kewenangan MA melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana berbunyi *“Dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”*

Jika ditelusuri lebih lanjut, terkait dengan undang-undang yang menjadi *batu uji* suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA sejatinya secara teoritis terdapat 2 (dua) pengertian. Undang-Undang dalam arti formal dan material *(wet in formele zin en materiele zin).* P.J.P. Tak dalam bukunya *Rechtsvorming in Nederland*, mengatakan bahwa pengertian undang-undang dibagi dalam dua pengertian yaitu Undang-Undang dalam arti formal *(wet in formele zin)* dan Undang-Undang dalam arti material *(wet in materiele zin).[[214]](#footnote-214)* Prof A. Hamid S. Attamimi, berpendapat bahwa dalam pengertian *wet* dalam arti formal dan *wet* dalam arti materiil, kata *wet* di sini tidak tepat apabila diterjemahkan dengan Undang-Undang. Jadi tidak tepat apabila kata-kata *“wet in formele zin”* diterjemahkan dengan *“undang-undang dalam arti formal”* atau pun kata-kata *“wet in materiele zin”* dengan *“undang-undang dalam arti material”.* Oleh karena kata *“undang-undang”* dalam Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan kaitannya dari konteks pengertian ketatanegaraan Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945.[[215]](#footnote-215)

Kemudian, kewenangan MA untuk melakukan uji materiil terhadap peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang secara teknis telahdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Peraturan MA No. 1 Tahun 2011), yang dalam Pasal 1 angka 1disebutkan bahwa:

Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan MA No. 1 Tahun 2011 dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yangmengikat umum di bawah undang-undang. Sesuai tema tulisan yang kali ini yakni membahas tentang Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 yang melakukan pengujian untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020). Peraturan KPU tersebut dianggap bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016.

Atas dasar pengujian dalam perkara pengujian MA No. 23 P/HUM/2024 adalah mengujiperaturan KPU yang secara hierarki berada di bawah undang-undang, maka dengan demikian MA berwenang untuk melakukan uji materiil Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Penghormatan terhadap hierarki ini penting dalam berhukum yang baik, hal ini berkesesuaian juga pandangan Hans Kelsen tentang teori jenjang norma yang menjadi acuan bagi kita semua sarjana hukum.[[216]](#footnote-216)

1. **Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang**

Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi kewenangan MK merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang *mutatis mutandis* ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang ekplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut. Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* itu merupakan *“the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution”*, disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak[[217]](#footnote-217)

Kehadiran MK dengan peran pentingnya dalam UUD NRI Tahun 1945 sejatinya merupakan bentuk pemisahan kekuasaan (perspektif *separation of power).* Berdasarkan perspektif *separation of power* maka mengharuskanuntuk mengelompokkan berbagai lembaga negara menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu fungsi legislatif atau fungsi membentuk undang-undang (dilakukan oleh DPR bersama Presiden). Fungsi eksekutif atau fungsi melaksanakan undang-undang merupakan peran dari Presiden. Begitu juga, fungsi yudikatif atau fungsi mengadili para pelanggar undang-undang (dilakukan oleh MA dan MK).Ada kemungkinan bahwa pengelompokan lembaga-lembaga negara yang disebut dalam UUD NRI Tahun 1945 akan mengalami kesulitan, terutama ketika dihadapkan pada lembaga negara yang tidak memiliki sifat dari ketiga cabang kekuasaan/fungsi atau justru ketika terdapat lembaga negara yang memiliki lebih dari satu sifat cabang kekuasaan/fungsi. Permasalahan demikian juga muncul di banyak negara. Pada tahun 1984 Peter L Strausssudah menggagas adanya cabang keempat dalam *separation of power* di Amerika Serikat. Cabang keempat tersebut adalah *administrative agencies*.[[218]](#footnote-218)

Adapun peran MK dalam menegakkan hukum di negara ini dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun NRI 1945 dinyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Begitu juga, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
5. kewenangan Iain yang diberikan oleh undang-undang.

MK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undangundang (UU) terhadap UUD NRI tahun 1945".*

Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi ini umum disebut dengan istilah *judicial review.* Adapun sejatinya dalam pengujian undang-undang, terdapat dua istilah yakni *judicial review* dan *constitutional review*. *Constitutional review* yang dapat diartikan sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang pada saat ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, *judicial review* dapat diartikan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang pada saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung.[[219]](#footnote-219)

Pembagian kewenangan kepada sejumlah lembaga negara termasuk kepada MK dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan peralihan dari paradigma sebelumnya yang menganut supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan konstitusi menyatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Supremasi konstitusi, perubahan kedudukan MPR, serta munculnya lembaga negara lain sebagai pelaku kedaulatan rakyat, menunjukkan bahwa ide dasar penataan struktur negara dalam UUD NRI Tahun 1945 dilandaskan pada konsep hubungan “*checks and balances*”. Untuk menguatkan konsep *checks and balances*, serta utamanya demi menjamin supremasi konstitusi, maka dimunculkan lembaga pengadilan konstitusional yaitu MK. Konsep Supremasi Konstitusi (*The Supremacy of The Constitution*) sebagaimana dirumuskan oleh Jutta Limbach memiliki ciri yakni:[[220]](#footnote-220)

1. pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum lainnya;
2. keterikatan penguasa terhadap UndangUndang Dasar; dan
3. adanya suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan tindakan hukum pemerintah.

Lebih lanjut, kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 13 Tahun 2022), yang menyatakan bahwa *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.* Dalam tulisan ini, terkait dengan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, penulis mencoba membahas mengenai Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut merupakan pengujian dari UU No. 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian hal ini termasuk dalam kewenangan yang dimiliki oleh MK.

1. **Analisis**
2. **Analisis Putusan MA** **No. 23 P/HUM/2024**

Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 diajukan oleh Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) yang diwakili oleh Ahmad Ridha selaku ketua umum dan Yohana Murtika selaku sekretaris jenderal, yang keduanya selaku Pemohon dalam perkara ini. Adapun, pengujian dilakukan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 9 Tahun 2020). Pemohon dalam perkara ini mempersoalkan norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020 yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan dianggap bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016. Pandangan Pemohon ini muncul karena Pemohon berasumsi bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d dalam PKPU No. 9 Tahun 2020 dianggap telah menambahkan syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) yang dihitung sejak penetapan pasangan calon. Pemohon beranggapan bahwa hal ini berbeda dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 yang kalimat normanya berhenti cukup sampai di ketentuan usia 30 (tiga puluh) tahun, tidak ada frasa “dihitung sejak penetapan pasangan calon”.

Dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020, Pemohon mendalilkan bahwa pihaknya mengalami kerugian baik aktual maupun potensial yakni menjadi terhambat/tidak dapat mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur karena calon yang diusung Pemohon terbentur syarat usia yang terhitung sejak penetapan pasangan calon. Hal ini dikarenakan calon yang hendak diusung oleh Pemohon sebagai calon dari sisi usia belum mencukupi 30 (tiga puluh) tahun, oleh karenanya dianggap terlalu dini jika syarat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020 mengacu kepada penetapan pasangan calon. Hal ini yang kemudian menjadi dasar keberatan dari Pemohon atas keberadaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020 yang dianggap telah menimbulkan ketidakadilan bagi pihak Pemohon.

Adapun pada akhirnya di tanggal 29 Mei 2024, Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:[[221]](#footnote-221)

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (PARTAI GARUDA)** tersebut;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“berusia paling* *rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur* *dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau* *Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan* *Calon terpilih”,* sehingga Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) huruf d:

*“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan* *Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan* *Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak* *pelantikan pasangan Calon terpilih”;*

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesiauntuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi PemilihanUmum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang PerubahanKeempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan adanya amar putusan seperti di atas, maka keinginan yang ingin dicapai oleh Pemohon yakni untuk dapat mencalonkan calonnya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang kebetulan belum memenuhi usia 30 (tiga puluh) tahun ketika penetapan pasangan calon akan terpenuhi.

Dengan adanya amar Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 di atas maka dapat ditafsikan bahwa syarat usia dalam pencalonan ditarik menjadi usia ketika nanti dilantik. Perubahan norma ini merupakan amar putusan dimana yang dimaksud dengan putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antarpihak.[[222]](#footnote-222) Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim, demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.[[223]](#footnote-223)

Penulis mencoba menganalisis Putusan MA No. 23 P/HUM/2024, dan dapat diketahui bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut, Penulis sedikit sekali menemukan alasan yang begitu subtansial yang dapat menjadi argumen mengapa pada akhirnya MA memutuskan seperti demikian. MA dalam pertimbangannya beralasan telah melihat risalah Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 dan tidak menemukan penjelasan tentang kapan atau pada tahapan apa syarat usia bagi calon gubernur dan wakil gubernur maupun calon bupati/wakil bupati dan calon walikota/wakil walikota harus dipenuhi.

Penulis melihat bahwa dalam pertimbangannya putusannya, MA berargumentasi bahwa karena Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tidak secara tegas menjelaskan kapan usia calon kepala daerah itu dihitung, sementara dalam pemilihan kepala daerah terdapat banyak tahapan-tahapan, maka KPU kemudian dianggap menafsirkan sendiri terkait dengan kapan usia tersebut harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. MA kemudian berpandangan bahwa penafsiran dari KPU dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tersebut telah melahirkan makna dan tafsir yang berbeda. MA juga berpandangan bahwa tidak tertutup kemungkinan akan kembali terjadi perubahan makna dan tafsir terhadap hal tersebut di masa yang akan datang.

Dalam pertimbangan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024, dapat diketahui juga bahwa MA berpandangan apabila terkait syarat usia calon kepala daerah jika dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, maka terdapat potensi kerugian. Potensi tersebut dianggap diskriminatif bagi warga negara atau partai politik sehingga tidak dapat mencalonkan diri atau mengusung calon kepala daerah yang baru akan mencapai usia 30 tahun bagi gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun bagi bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota pada saat telah melewati tahapan penetapan pasangan calon. Untuk itu sesuai dengan petitum dari Pemohon maka MA kemudian berpendapat bahwa penghitungan usia bagi calon pejabat atau calon penyelenggara negara termasuk calon kepala daerah haruslah dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya statusnya sebagai calon, baik sebagai calon yang mendaftar sebagai kepala daerah, pasangan calon kepala daerah maupun calon kepala daerah terpilih.

Menariknya dalam Putusan MA ini juga yang jarang sekali orang ketahui yakni ada hakim yang berpendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam perkara ini, yakni dari *dissenting opinion* dari Hakim Anggota I, Dr. Cerah Bangun. Pada *dissenting opinion* tersebut Hakim Anggota I, Dr. Cerah Bangun menyatakan bahwa:[[224]](#footnote-224)

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I, frasa *"terhitung sejak* *penetapan Pasangan Calon"* pada peraturan *a quo*, justru diperlukan untuk melaksanakan dan/atau menyelenggarakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga semakin jelas pokok pikiran, tujuan, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo*. Frasa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip "*perlakuan* *yang sama di hadapan hukum”,* prinsip “*kesempatan yang sama dalam pemerintahan”,* dan prinsip “*jaminan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif”.*

Menimbang, bahwa pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan dan/atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional memang dibutuhkan oleh jabatan itu. Limitasi waktu perlu dan harus dirumuskan dalam norma dan kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Pengaturan tersebut sejalan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim Anggota I berpendapat, bahwa norma objek Hak Uji Materiil tidak bertentangan dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Penulis menganalisis bahwa Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 merupakan putusan yang keliru. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai hal ini merupakan pengaturan yang bersifat umum. Sejak dahulu ketika Pilkada masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) hingga yang ada saat ini, syarat umur untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah normanya memanglah hanya seperti itu. Pasal 58 huruf d UU No. 32 Tahun 2004 pun mengatur demikian yakni “*berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun”.* Barulah dalam peraturan KPU selaku turunannya dilengkapi juga dengan frasa ketika penetapan calon. Jadi sejak awal norma semacam ini sudah demikian, *mutatis mutandis* serupa. Untuk itu dapat dipertanyakan mengapa baru kali ini muncul persoalan dari Pemohon terkait dengan hal tersebut. Lagipula tidak *apple to apple* ketika syarat calon dikaitkan dengan pelantikan. Patut dipahami bahwa syarat calon adalah syarat ketika seseorang maju sebagai calon, belum tentu seseorang itu dilantik, karena pelantikan itu terkait dengan si calon itu telah berhasil dalam kontestasi dan menjadi calon terpilih. Hal ini tidak relevan, dan dalam syarat calon untuk jabatan publik manapun yang dipilih, semuanya tidak mengacu terhadap kapan seseorang itu dilantik melainkan usia ketika seseorang itu mendaftarkan. Dengan demikian syarat tersebut jika dikaitkan dengan aktualnya ketika penetapan sebagai calon sudah sangat relevan.

Penulis juga menganalisis bahwa amar Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 justru mengakibatkan norma baru yang justru bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016. Hal yang semacam ini sejatinya bukanlah kewenangan yang semestinya ditangani oleh MA dan selayaknya menambah norma dan maksud semacam ini merupakan kewenangan dari MK. Seharusnya Pemohon mempersoalkan ini dan membawanya ke MK yakni menguji UU No. 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945, bukan justru menguji PKPU No. 9 Tahun 2020 terhadap UU No. 10 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan dengan berdasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, apa yang diinginkan oleh Pemohon yakni pengacuan untuk pencalonan didasarkan kepada saat pelantikan jelas belum terpenuhi apa yang diinginkannya. Jadi hal yang dianggap masalah oleh Pemohon bukan kewenangannya PKPU No. 9 Tahun 2020 melainkan UU No. 10 Tahun 2016. Untuk itu, Penulis memandang dari sisi analisis Penulis, bahwa Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 amar putusannya keliru.

1. **Analisis Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024**

Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 diajukan oleh A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee, masing-masing merupakan mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah dan Podomoro *University*. Perkara uji materiil ini dilakukan untuk UU No. 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Adapun pengujian dilakukan untuk Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur mengenai syarat-syarat usia sebagai acuan dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam norma tersebut diatur bahwa usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 (tiga puluh) tahun sedangkan untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota atau wakil walikota adalah 25 tahun.

Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 karena dengan berlakunya norma tersebut para pemohon berhalangan mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkepastian hukum karena ketentuan norma pasal tersebut dianggap tidak memuat norma terkait "mekanisme penghitungan" syarat minimum usia calon kepala daerah. Untuk itu maka norma tersebut dianggap dapat menyebabkan proses pencalonan menjadi tidak berkepastian hukum sekaligus tidak demokratis.

Sejatinya dalam perkara ini para pemohon meminta kepada MK untuk menambahkan norma mengenai dengan konteks penetapan calon. Jadi sesuai petitumnya, para pemohon selengkapnya meminta normanya menjadi *“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”.*

Para pemohon mendalilkan hal ini karena Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 dianggap kurang lengkap, kurang sempurna. Kekhawatirannya adalah jangan sampai kemudian nanti dari Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 bisa diinterpretasikan menjadi sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Hal ini dikarenakan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Alhasil pada akhirnya di tanggal 20 Agustus 2024, Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 memutuskan untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.[[225]](#footnote-225) Penulis menganalisis, ada sejumlah alasan dari MK terhadap permohonan para pemohon. Alasan pertama, yakni MK menggunakan dasar aturan yakni Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU tentang MK) dan Pasal 78 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2 Tahun 2021). Masing-masing norma tersebut yakni sebagai berikut, Pasal 60 UU MK menyatakan:

1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan:

1. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Penulis menganalisis bahwa MK mempertimbangkan kedua norma pengaturan di atas, karena setelah Penulis mencari tahu ternyata ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019, dengan amar putusan menolak permohonan para pemohon di perkara tersebut.

Alasan kedua, Penulis juga menganalisis bahwa MK membandingkan pengaturan-pengaturan sebelumnya yang sejatinya sama dalam hal normanya (tanpa melihat besaran angka usia). Hal ini terlihat misalnya Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Pasal 7 huruf e Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan Pasal 7 huruf e UU No. 1 Tahun 2015, dan Pasal 7 huruf e UU No. 8 Tahun 2015. Berdasarkan pengaturan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tidak pernah terjadi perubahan norma untuk batas persyaratan usia minimum untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Selain itu, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam empat undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud. Kenyataannya pelaksanaannya selama ini baik-baik saja meskipun di peraturan yang sifatnya teknis, kemudian KPU mengatur penetapan calon sebagai acuan menentukan kapan dianggap minimal dari syarat batas umur tersebut.

Untuk itu, karena dianggap tidak bermasalah maka dalam pendapat mahkamah pada [3.17][[226]](#footnote-226) , MK kemudian berpendapat sebagai berikut:

**[3.17]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, *bak basuluh matohari, cetho welo-welo*, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, termasuk seperti yang dimohonkan para Pemohon, justru akan memosisikan norma *a quo* menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bilamana terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para Pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian, dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kalau kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Artinya, pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Penulis dalam hal ini berpendapat sepakat dengan pandangan MK ini karena sejatinya norma di UU No. 10 Tahun 2016 ini sudah tegas dan selama ini sudah berjalan dengan baik. Ada suatu filosofi yang berbunyi *the devil is in the details[[227]](#footnote-227) ,* sesuai filosofi tersebut maka tidak baik mengatur norma menjadi sangat detail dalam undang-undang, yang seharusnya mengatur secara umum karena yang detail ada dalam pengaturan teknis, yakni peraturan KPU.

1. **Analisis** **Dampak Putusan MA** **No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada**

Adanya pertentangan antara Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 merupakan diskursus hukum yang menarik untuk dibahas. Hal ini jelas terlihat ketika terdapat ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (RUU tentang Perubahan Keempat UU Pilkada), di Badan Legislasi DPR RI. Pembahasan atas pertentangan kedua putusan ini pun juga berlanjut dalam pembahasan rancangan peraturan KPU yang dibahas di Komisi II DPR RI.

Perlu diketahui bahwa adanya RUU tentang Perubahan Keempat UU Pilkada telah diinisiasi lama oleh Badan Legislasi DPR RI pada akhir tahun 2023, RUU ini merupakan RUU kumulatif terbuka karena menindaklanjuti sejumlah putusan MK yang pernah diputuskan untuk UU Pilkada. Keinginan DPR pada awalnya untuk RUU tentang Perubahan Keempat UU Pilkada yakni terkait dengan pengaturan Pasal 201 UU Pilkada yakni untuk memajukan pelaksanaan Pilkada dari semula di bulan November menjadi bulan September 2024.

Alasan memajukan jadwal Pilkada dari bulan November menjadi bulan September 2024 yakni untuk sebagai bentuk antisipasi kekosongan kepala daerah ini dibutuhkan agar daerah tidak terlalu lama dan banyak yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah akibat adanya kekosongan. Banyaknya daerah yang kosong dengan pejabat yang berasal dari penjabat (PJ) dan bukan kepala daerah definitif dianggap akan berpotensi menjadi masalah. Urgensi perubahan undang-undang tersebut diantaranya yakni:

Pasalnya, terdapat 101 daerah dan 4 daerah otonom baru di Papua dan Papua Barat yang diisi oleh penjabat kepala daerah sejak 2022. Kemudian terdapat 170 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah pada 2023, serta 270 kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang akan berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut, terdapat potensi terjadinya kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Apabila ini terjadi, maka pada 1 Januari 2025 terdapat 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif.[[228]](#footnote-228) Oleh karena itu, hal itu perlu dihindari sebab penjabat kepala daerah dinilai kurang memiliki legitimasi yang kuat lantaran bukan berdasarkan hasil pemilihan masyarakat melalui Pilkada. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu agenda pembangunan terutama dari aspek dukungan masyarakat. Apabila pelaksanaan Pilkada tidak dimajukan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah yang sifatnya strategis untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.[[229]](#footnote-229)

Untuk itu maka pada akhir tahun 2023 diinisiasilah RUU tentang Perubahan Keempat UU Pilkada dengan keinginan utama dalam salah satu perubahannya adalah perubahan Pasal 201 UU Pilkada tersebut.

Pada tanggal 20 Agustus 2024 seperti kita ketahui muncul sejumlah putusan MK yang beberapa diantaranya menjadi diskusi hukum yang menarik pada saat ini. Putusan MK yang menarik tersebut diantaranya yakni Putusan MK Nomor (No.) 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 berisi terobosan hukum mengenai syarat dukungan minimal partai politik dalam bentuk persentase yang selama ini selalu dibatasi minimal memperoleh 20% jumlah kursi DPRD atau 25% suara sah dari Pemilu DPRD. Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 berisi penegasan dari MK bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 sudah tepat apa adanya sesuai norma eksisting pada saat ini. Dalam kesempatan kali ini Penulis akan membahas tentang Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 ini menarik karena sebelumnya ada Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 yang secara subtansi mengatur hal yang sama, meski yang diuji pada putusan MA adalah peraturan KPU. Putusan ini sama-sama menguji ketentuan yang mengatur mengenai syarat pencalonan seseorang dari sisi usia yakni 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan Wakil Bupati serta calon walikota dan wakil walikota. Perbedaannya adalah pada Putusan MA No. 23 P/HUM/2024, MA mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa norma dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020 perlu disempurnakan dengan menambah frasa *“terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”.* Pada Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 untuk Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, MK menolak permohonan para pemohon karena memandang norma yang ada saat ini sudah benar.

Penulis menganalisis pertentangan kedua putusan ini muncul karena adanya muatan yang sifatnya politis yakni terkait calon tertentu yang dianggap kuat dan belum mencukupi syarat umur ketika penetapan calon yang oleh KPU telah dijadwalkan tanggal 27-29 Agustus 2024. Penulis yang juga bagian dari tim RUU tentang Perubahan Keempat UU Pilkada di Badan Legislasi DPR RI melihat bahwa perdebatan antara Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 terasa kurang produktif karena cenderung kepada alasan politis, tanpa berkeinginan masuk ke ranah subtansi. Bagaimana mungkin, Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dianggap tidak bisa dijadikan sebagai acuan karena amar putusannya menolak sedangkan pertimbangan hukum yang ada di batang tubuh putusan tidak bisa dijadikan sebagai acuan.

Penulis perlu menegaskan bahwa putusan MK itu satu kesatuan yang utuh baik itu amar putusan dengan pertimbangan hukumnya, jadi tidak bisa dilihat secara terpisah. Penulis menggunakan dasar yakni Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 06 Tahun 2005). Secara terang dan jelas dalam norma tersebut dinyatakan bahwa bahwa putusan MK tentang pengujian undang-undang memuat:[[230]](#footnote-230)

1. kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. identitas Pemohon;
3. ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;
4. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
5. **pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan**;
6. amar putusan;
7. pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi; dan
8. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera.

Dalam pasal tersebut di atas yakni Pasal 33 huruf e PMK No. 06 Tahun 2005 dinyatakan **pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.** Dengan demikian **Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan** **memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum hal yang membangun amar putusan**. Selain itu pertimbangan/pendapat hakim tersebut dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu menurut Penulis, perdebatan tentang Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 di Badan Legislasi yang mencoba mengesampingkan amar putusan karena pertimbangan hukum tidak bisa jadi rujukan adalah perdebatan usang yang digunakan untuk kepentingan politis yakni untuk memilih menggunakan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024.

Perdebatan usang mengenai apakah pertimbangan hukum mengikat atau tidak sejatinya berkaitan dengan kekuatan putusan MK yang final dan mengikat. Sebagai contoh Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang amar putusannya menolak, seolah-olah putusan tersebut dianggap tidak final dan mengikat. Sejatinya semua putusan MK final dan mengikat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap objek sengketa. Apabila suatu peraturan perundang‐undangan oleh hakim menyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang‐undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang‐undangan tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang.[[231]](#footnote-231) Namun demikian, kembali lagi pertimbangan putusan itu satu kesatuan dengan amar putusan jadi tidak bisa dilihat sebagian-sebagian saja.

Adapun pada akhirnya RUU tentang Perubahan Keempat UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus 2024 batal diparipurnakan menjadi undang-undang. Begitu juga dalam pembahasan peraturan KPU meskipun sempat mau dibahas ulang tentang pertentangan antara Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024, Komisi II DPR RI memilih untuk menggunakan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang kemudian dinormakan dalam Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan (Peraturan KPU No. 10 Tahun 2024). Walaupun demikian, pertentangan antara kedua Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 menurut Penulis tetap menarik untuk dibahas apalagi masih ada potensi maupun celah hukum yang dapat digunakan bilamana ingin memperkeruh situasi dalam Pilkada.

Bilamana ada pihak manapun yang mau memperpanjang masalah, apalagi ketika calonnya kalah, dengan beralasan bahwa pencalonan calon dalam Pilkada sesuai Peraturan KPU No. 10 Tahun 2024 tidak menjalankan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024, bisa saja terjadi. Konstruksi hukum tersebut juga berkesesuaian dengan adanya norma dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Dalam norma tersebut diatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberhentikan baik itu bilamana meninggal dunia, permintaan sendiri ataupun diberhentikan.[[232]](#footnote-232) Ketentuan selanjutnya yakni untuk yang kategori diberhentikan salah satu hal yang dapat menjadi dasar pemberhentian yakni persyaratan pencalonan yang keliru dalam hal ini di Pasal 78 ayat (2) huruf h UU No. 23 Tahun 2014. Dengan demikian Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 masih menyimpan problematika hukum jikalau ada pihak yang ingin mengungkitnya kembali, dengan alasan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 tidak ditindaklanjuti dalam perubahan peraturan KPU.

Adapun Penulis berpendapat bahwa sudah sepantasnya Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang pada akhirnya digunakan dalam hal ini intrepretasi KPU membuat Peraturan KPU No. 10 Tahun 2024 sudah betul adanya. Semula dalam draf usulan perubahan peraturan KPU yang sempat beredar luas di masyarakat pasca RUU tentang Perubahan Keempat UU Pilkada selaras dengan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024. Menurut Penulis hal ini adalah salah, sejak awal Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 menurut Penulis sudah salah menafsirkan.

Ketika menambahkan acuan pencalonan dengan merujuk kepada kapan seseorang itu dilantik maka akan timbul ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan pada umumnya untuk jabatan apapun lainnya yang dipilih secara *elected official* apakah itu Presiden dan Wakil Presiden ataupun misalnya calon anggota dewan perwakilan rakyat, syarat calon dewan perwakilan daerah, semua itu tidak mengacu kepada waktu ketika dilantik. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan konstitusi yakni terkait kepastian hukum, karena Indonesia negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena pemaknaan tersebut tidak sesuai dengan kerangka berhukum yang ada serta membawa konsekuensi munculnya norma yang tidak berkepastian secara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Penulis memandang bahwa berdasarkan teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kepastian hukum diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Hal ini tentunya akan terlanggar manakala ketentuan pencalonan dihubungkan dengan kapan seseorang itu dilantik.[[233]](#footnote-233) Bagaimana mungkin hal ini menjadi norma baru sedangkan seseorang tersebut belum tentu dilantik (belum tentu menang dalam pemilihan tersebut), hal tersebut sangatlah tidak masuk dalam logika penalaran yang sehat.

Penulis berpandangan bahwa justru dalam Putusan MA No. 23 P/HUM/2024, telah menambahkan norma baru yang mana bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016. Penulis yang menjadi bagian dari tim *legal drafter* untuk UU No. 10 Tahun 2016 berpandangan bahwa tidak pernah dalam pembahasan terdahulu memperdebatkan norma pencalonan ini dengan merujuk kepada pelantikan dari calon tersebut. Hal ini jelas karena sejak awal setiap syarat yang ada itu diukur dengan waktu ketika seseorang mendaftarkan diri sebagai calon. Bagaimana mungkin untuk syarat misalnya anggota DPR, DPRD, atau DPD harus mundur ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah sedangkan syarat usia dihitung ketika seseorang itu dilantik. Kondisi ini jelas tidak relevan dari segi penalaran manapun.

Penulis juga melihat bahwa dalam pertentangan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dengan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, perlu dikembalikan lagi sesuai hierarkinya. Sesuai amanat dari konstitusi yakni dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah dari undang-undang terhadap undang-undang. Adapun untuk MK sesuai dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dari segi hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, hal ini sudah sangat jelas. Posisi undang-undang hierarkinya di atas dibandingkan peraturan di bawah undang-undang. Peraturan KPU posisinya ada di dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, yang mana tidak masuk hierarki namun posisinya di bawah undang-undang. Untuk itu jelas untuk dari segi subtansi sudah tepat antara pertentangan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dengan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, rujukan yang dipilih adalah Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024.

1. **Penutup**

Pada bagian penutup ini terdapat simpulan dan saran sebagai berikut:

**A. Simpulan**

1. Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 justru mengakibatkan norma baru yang justru bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016. Hal yang semacam ini sejatinya bukanlah kewenangan yang semestinya ditangani oleh MA dan selayaknya menambah norma dan maksud semacam ini merupakan kewenangan dari MK. Seharusnya Pemohon mempersoalkan ini dan membawanya ke MK yakni menguji UU No. 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945, bukan justru menguji PKPU No. 9 Tahun 2020 terhadap UU No. 10 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan dengan berdasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016, apa yang diinginkan oleh Pemohon yakni pengacuan untuk pencalonan didasarkan kepada saat pelantikan jelas belum dapat terjawab keinginannya. Jadi hal yang dianggap masalah oleh Pemohon bukan kewenangannya PKPU No. 9 Tahun 2020 melainkan UU No. 10 Tahun 2016. Untuk itu, Penulis memandang dari sisi analisis Penulis, bahwa Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 amar putusannya keliru. Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 sesuai dengan amar putusannya yang menolak permohonan para pemohon melihat bahwa sejatinya norma di UU No. 10 Tahun 2016 ini sudah tegas dan selama ini sudah berjalan dengan baik. Belum lagi selama ini di sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud. Kenyataannya pelaksanaannya selama ini baik-baik saja meskipun di peraturan yang sifatnya teknis, kemudian KPU mengatur penetapan calon sebagai acuan menentukan kapan dianggap minimal dari syarat batas umur tersebut.
2. Bahwa tentang pertentangan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dengan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, perlu dikembalikan lagi sesuai hierarkinya. Sesuai amanat dari konstitusi yakni dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah dari undang-undang terhadap undang-undang. Adapun untuk MK dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dari segi hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, hal ini sudah sangat jelas. Posisi undang-undang hierarkinya di atas dibandingkan peraturan di bawah undang-undang. Peraturan KPU posisinya ada di dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, yang mana tidak masuk hierarki namun posisinya di bawah undang-undang.

**B. Saran**

1. Bahwa dengan adanya Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, maka pada ke depan perlu diagendakan perubahan UU Pemilu. Hal ini penting karena negara Indonesia menganut prinsip hukum *civil law.*
2. Bahwa terkait dampak kedua putusan yang dijatikan topik bahasan ini, Penulis sependapat dengan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2024 yang telah mengedepankan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dibandingkan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024. Hal ini tentunya akan baik di mata publik karena aspek kepastian hukum dan aspek keadilan. Semoga dengan pilihan hukum yang terbaik ini penyelenggaraan Pilkada serentak nasional 2024 aman dan lancar.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Buku**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ajid, Syawal Abdul dan Anshar. *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer.* Cetakan Pertama. Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2013.

Ahmad, Ma’shum. *Politik Kekuasaan Kehakiman Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.* Yogyakarta: Total Media, 2017.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Biro Advokasi Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan RI. *Buku 5 Pedoman Penanganan Perkara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung*. Cetakan Pertama, Jakarta: Bunga Rampai Advokasi, 2019.

Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam Menyingkap Perbedaan Antara Islam Dan Barat*. Cetakan Pertama, Jakarta : Salemba Diniyah, 2013.

Lesmana, Lady dkk. *Memahami Dengan Lebih Baik.* Jakarta: Grafindo Persada, 2015.

MD, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 2017.

Nainggolan, Marsudin. *Kajian Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung.* cetakan pertama, Jakarta: kencana, Jakarta, 2021.

Ruslan, Achmad. *Teori dan Pantuan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.* Tangerang: Rangkang Education, 2021.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ubaidillah, A. *et al. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2014.

T, Zubakhrum B. *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak.* Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020.

**Jurnal**

Angkow, Kevin. *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*. Jurnal Lex Administratum, Manado, Vol 2. No.2, 2014.

Aziz, Machmud. *Pengujian Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.* Jurnal Konstitusi, Jakarta Pusat, Vol 7, No 5, 2015.

Lailam, Tanto. *Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Juni 2014.

Siahaan, Maruarar. *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2016.

**Laman**

Hamdi, Imam. *Pakar Sebut Putusan MA Untungkan Kaesang Bukan untuk Buka Jalan Anak Muda.* dimuat dalam https://nasional.tempo.co/read/1875279/pakar-sebut-putusan-ma-untungkan-kaesang-bukan-untuk-buka-jalan-anak-muda, diakses tanggal 26 Agustus 2024.

Pratiwi, Adinda Aulia. *Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK terhadap Pelaksanaan Pilkada.* dimuat dalam https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/, diakses tanggal 27 Agustus 2024.

Sarasvati, Dhitta Puti. *"The Devils are in The Details", Karut Marut Pendidikan Indonesia.* dimuat dalam  https://edukasi.kompas.com/read/2012/04/18/16184013/~Edukasi~News?page=all.., diakses tanggal 27 Agustus 2024.

**KAJIAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XVIII/2020 MENGENAI POLITIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENOLAKAN MASYARAKAT**

***(LEGAL REVIEW OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 100/PUU-XVIII/2020 CONCERNING THE POLITICS OF FORMING LAWS AMENDING THE CONSTITUTIONAL COURT LAW AND PUBLIC REJECTION)***

# **Fahmi**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila

\*Korespondensi: **fahmiimfahmiiz@yahoo.com**

**Abstrak**

Mahkamah Konstitusi sejak awal diharapkan dapat berperan untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dibentuk bersama oleh para pembentuk undang-undang. Urgensi dan manfaat dari judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yakni untuk menjaga kesesuaian makna undang-undang dengan konstitusi selaku hierarki norma tertinggi. Begitu juga, untuk menjaga konstitusionalitas suatu undang-undang sebagai norma dengan norma konstitusi. Hal ini patut dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Selain diatur dalam konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki sejumlah undang-undang tersendiri. Adapun Undang-Undang Mahkamah Konsitusi terakhir diketahui dibentuk secara tergesa-gesa, dan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Permasalahan dalam tulisan ini yakni bagaimana bentuk penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi? Begitu juga bagaimana respon negara *(state respond*) dalam menghadapi tuntutan atas penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi? Adapun, tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab sejumlah permasalahan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan tulisan ini menemukan bahwa bentuk penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diwujudkan dengan pengujian undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Respon negara dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 diwujudkan dengan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 untuk seluruhnya. Untuk itu disarankan untuk perlunya ada perubahan keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Kata Kunci**:** putusan mahkamah konstitusi, penolakan, perubahan undang-undang.

***Abstract***

*The Constitutional Court has been expected from the start to play a role in conducting judicial reviews of laws jointly formed by lawmakers. The urgency and benefits of judicial review conducted by the Constitutional Court are to maintain the conformity of the meaning of the law with the constitution as the highest hierarchy of norms. Likewise, to maintain the constitutionality of a law as a norm with constitutional norms. This should be understood as part of an effort to realize a checks and balances mechanism between branches of state power based on the principle of democracy. In addition to being regulated in the constitution, the Constitutional Court also has a number of its own laws. The last Constitutional Court Law is known to have been formed in a hurry, and has caused rejection from the public. The problem in this article is how does the public reject Law Number 7 of 2020 as the third amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court? Likewise, how does the state respond in facing demands for rejection of Law Number 7 of 2020 as the third amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court? The purpose of this article is to answer a number of these problems. This paper uses a normative legal research method. The conclusion of this paper finds that the form of public rejection of Law Number 7 of 2020 is manifested by testing the law at the Constitutional Court. The state's response in facing public demands for rejection of Law Number 7 of 2020 is manifested by rejecting the request for a judicial review of Law Number 7 of 2020 in its entirety. For this reason, it is suggested that there needs to be a fourth amendment to Law Number 24 of 2003.*

*Keywords: constitutional court decision, rejection, change of law*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Hadirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia berdampak positif untuk perkembangan ketatanegaraan dan bermanfaat untuk menunjang eksistensi penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan hukum di suatu negara. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Indonesia juga merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena abad ke-20 karena sebelumnya tidak dikenal lembaga peradilan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan dan baru berkembang pada abad ke-20.[[234]](#footnote-234) Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan perintah perubahan konstitusi tersebut memliki kewenangan eklusif yakni salah satunya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Kewenangan eksklusif atas hal-hal bersifat konstitutif yang dimiliki Mahkamah Konstitusi umum disebut sebagai *centralized system of constitutional review*. Sedangkan, ada pula Mahkamah Konstitusi yang tersebar yang umum disebut sebagai '*diffused*' atau *'American system'* dengan yurisdiksi umum atas semua masalah perdata, pidana, dan hukum publik yang biasanya finalitasnya terdapat pada pengadilan puncak, yaitu Mahkamah Agung. Model ini biasa terlihat di Argentina, Australia, Filipina, dan negara lainnya.[[235]](#footnote-235) Hal inilah yang mendasari tidak semua negara memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi secara terpisah. Terlepas dari pembagian jenis itu, setidaknya Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) jenis kekuasaan sebagai berikut:[[236]](#footnote-236)

1. *Constitution-drafting jurisdiction* (mengawasi konstitusi itu sendiri);
2. *Judicial review of legislative acts* (mengawasi pembentuk undang-undang);
3. *Jurisdiction over officials and agencies* (mengawasi eksekutif);
4. *Jurisdiction over political parties and elections* (mengawasi jalannya pemilihan umum).

Dalam menjalankan 4 (empat) jenis kekuasaan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam konteks Indonesia diatur secara konstitusional melalui Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dalam bab Kekuasaan Kehakiman sebagai hasil perubahan ketiga di tahun 2001. I Dewa Gede Palguna yang saat itu mewakili Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa dalam bingkai prinsip *integrated justice system*, menjadi logis jika kekuasaan kehakiman dijalankan oleh 2 (dua) badan peradilan, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.[[237]](#footnote-237)

Sembilan belas tahun berkiprah, undang-undang yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU tentang MK Tahun 2003) telah mengalami beberapa kali perubahan. Di antara perubahan itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU tentang MK (UU tentang MK Tahun 2020) sebagai perubahan ketiga dari UU tentang MK Tahun 2003 adalah perubahan yang mendapat sangat banyak sorotan hingga menghasilkan 3 (tiga) nomor perkara di Mahkamah Konstitusi (tidak termasuk amar putusan tidak dapat diterima), yakni perkara nomor 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020.

Sorotan tersebut diperoleh karena beberapa hal yakni pertama, bahwa pembentukan perubahan ketiga UU tentang MK Tahun 2003 dianggap untuk mencapai sebuah tujuan atau misi tertentu, sebab pembentukan perubahan ketiga UU tentang MK Tahun 2003 dilaksanakan pada tahun 2020 yang pada saat itu baru beradaptasi dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga pembentukan UU ini tidak mencerminkan adanya *sense of crisis*. Krisis yang dihadapi negara karena pandemi itu muncul dalam berbagai jenis, diantaranya *economic crisis, health crisis, social crisis, political crisis, cultural crisis, labor crisis,* hingga *education crisis*.[[238]](#footnote-238)

Kedua, UU ini dilaksanakan dengan proses yang sangat cepat dan terkesan tergesa-gesa. Diketahui, usulan perubahan ketiga UU tentang MK Tahun 2003 sampai pada tahap pengesahan revisi undang-undang (UU) tersebut hanya membutuhkan waktu 7 (tujuh) bulan sehingga proses yang cepat tersebut terkesan sengaja mengabaikan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) yang terdiri dari tiga prasyarat, yakni hak untuk didengarkan pendapatnya (*rights to be heard*), hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*rights to be explained*), dan hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*rights to be considere*d).

Ketiga, substansi UU ini dinilai publik mengandung banyak konflik kepentingan (*conflict of interest*).[[239]](#footnote-239) Salah satu substansi yang dimaksud ialah mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi yang berlaku hingga Hakim berusia 70 (tujuh puluh tahun) atau tidak melebihi masa jabatan selama 15 (lima belas) tahun yang juga diberlakukan untuk Hakim Konstitusi yang saat itu menjabat. Meskipun diskursus mengenai penghapusan periodisasi Hakim Konstitusi sudah lama diperbincangkan, namun ketentuan tersebut dinilai sarat akan transfer kepentingan karena digadang-gadang sebagai 'hadiah' yang menguntungkan bagi Hakim Konstitusi yang saat itu menjabat.

Proses pembentukan UU yang cenderung 'abnormal' tersebut mencerminkan bahwa politik memang masih menjadi determinan atas hukum. Sebab hukum diposisikan sebagai kristalisasi atau produk atas keputusan-keputusan politik yang terdiri dari berbagai macam kepentingan dan sarat akan persaingan politik. Asumsi yang lahir dari keserampangan pembentukan undang-undang ini ialah hukum sebagai produk politik. Hal ini membawa konsekuensi bahwa corak atau isi produk hukum akan sangat bergantung pada konfigurasi politik yang melahirkannya.[[240]](#footnote-240)

Beberapa kelompok yang menentang proses pembentukan UU tentang MK Tahun 2020 diantaranya Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) serta beberapa lembaga dan individu lainnya yang terhimpun dalam sebuah perkumpulan Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (KSMK). Ketidakberpihakan tersebut diekspresikan KSMK melalui *judicial review* UU tentang MK Tahun 2020 dengan nomor perkara MK 100/PUU-XVIII/2020 yang menghasilkan amar Putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Adapun dalam perkara MK No. 100/PUU-XVIII/2020 sejumlah lembaga tersebut mengajukan uji materi ini ke MK karena pembahasan UU MK terbaru tersebut terkesan berlangsung sangat cepat mengabaikan partisipasi masyarakat.[[241]](#footnote-241)

Adanya *judicial review* UU tentang MK Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga dari UU tentang MK Tahun 2003 juga mendapatkan respon negara *(state respond)*. Dalam hal ini negara memberikan respon dengan menerima perkara pengujian undang-undang tersebut. Melalui perkara MK No. 100/PUU-XVIII/2020 negara merespon tuntutan masyarakat akan keberlakuan perubahan UU MK. Respon ini menarik untuk didalami karena negara memiliki tanggungjawab untuk menegakkan konstitusionalisme melalui praktik penyelenggaraan negara.

Lebih lanjut, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas rancangan perubahan keempat atas UU tentang MK Tahun 2003. Melalui draft yang beredar di masyarakat hingga saat tulisan ini dibuat, Hakim Konstitusi akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh lembaga yang mengangkatnya sebagai Hakim MK. Substansi demikian jelas mengejutkan publik sebab DPR, MA, dan Presiden akan bertindak sebagai lembaga pengawas Hakim MK. Hingga kini, proses dengar pendapat belum kunjung dilakukan untuk menyempurnakan perubahan keempat atas UU tentang MK 2003 tersebut.

Tanda-tanda unsur politik yang kuat ini kiranya tidak hanya terjadi dalam proses pembentukan undang-undang yang melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif, namun juga turut menyeret lembaga yudikatif yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Berdasarkan keadaan demikian, maka penting kiranya untuk mengkaji kemungkinan transfer kepentingan dalam proses pembentukan kebijakan dalam tulisan yang berjudul "Fungsi Hukum Terhadap Politik dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi".

Sejauh ini, belum ditemukan penelitian yang dipublikasikan terkait hubungan hukum dan politik yang terfokus pada proses pembentukan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian sebelumnya terfokus pada hubungan hukum dan politik yang dialami Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan, penelitian itu salah satunya “*The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review*” oleh Andy Omara yang berfokus pada hubungan antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dapat membatalkan keputusan mayoritas (*counter majoritarian*), legislatif, dan eksekutif dalam mekanisme judicial review.[[242]](#footnote-242)

1. **Permasalahan**

Berdasarkan pendahuluan yang disebutkan di atas, ada permasalahan yakni:

1. Bagaimana bentuk argumentasi masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
2. bagaimana respon negara *(state respond)* dalam menghadapi tuntutan atas penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
3. **Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yakni:

1. Untuk mengetahui argumentasi masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mendapatkan respon negara *(state respond)* dalam menghadapi tuntutan atas penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. **Metode Penulisan**

Penelitan hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[[243]](#footnote-243) Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[[244]](#footnote-244) Dalam tulisan ini dilakukan pengkajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020 dan UU tentang MK Tahun 2020 untuk mendalami argumentasi masyarakat terkait dengan penolakan terhadap UU tentang MK Tahun 2020 dan respon negara terhadap hal tersebut.

1. **Pembahasan**
2. **Kerangka Konseptual**
3. **Konsep Putusan MK**

Dasar hukum putusan perkara konstitusi adalah UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis negara Republik Indonesia. Untuk putusan yang mengabulkan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa permohonan itu memenuhi alasan dan syarat-syarat konstitusional sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Oleh karena itu putusan harus memuat fakta-fakta yang terungkap dan terbukti secara sah di persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasarnya.[[245]](#footnote-245)

Cara pengambilan putusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) melalui sidang pleno tertutup dipimpin oleh Ketua sidang. Ketentuan mengenai ketua sidang pleno sebagaimana telah disebutkan di atas berlaku secara *mutatis mutandis* dalam RPH ini. Di dalam rapat pengambilan putusan ini setiap hakim konstitusi menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan *(legal opinion).* Dengan demikian maka tidak ada suara *abstain* dalam rapat pengambilan putusan*.*

Dalam hal putusan tidak dapat dihasilkan melalui musyawarah untuk mufakat, maka musyawarah ditunda sampai sidang pleno berikutnya. Dalam permusyawaratan itu diusahakan secara sungguh-sungguh untuk mufakat. Namun apabila ternyata tetap tidak dicapai mufakat itu, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Pengambilan putusan dengan suara terbanyak bisa jadi mengalami kegagalan karena jumlah suara sama. Apabila demikian, maka suara terakhir ketua sidang pleno hakim menentukan. Dalam pengambilan putusan dengan cara demikian tersebut, pendapat hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Putusan dapat diucapkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain. Hari pengucapan putusan itu diberitahukan kepada para pihak*.*

Putusan yang telah diambil dalam RPH itu dilakukan editing tata tulis dan redaksinya sebelum ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera yang mendampingi hakim, kemudian ditetapkan jadwal pengucapan putusan setelah jadwal itu di tetapkan hari, tanggal dan jamnya, pihak-pihak dipanggil. Putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sejak pengucapan itu, putusan MK sebagai putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir berkekuatan hukum tetap dan final. Artinya, terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum lagi dan waib dilaksanakan.[[246]](#footnote-246)

1. **Konsep Sistem Hukum**

Sistem adalah “*perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya; metode*”.[[247]](#footnote-247) Berdasarkan pada pengertian sistem demikian, istilah sistem ketatanegaraan kurang lebih dapat dimaknai sebagai susunan berbagai perangkat unsur yang saling berkaitan membentuk struktur organisasi negara.

Adapun hukum dapat dimaknai dalam dua besaran pengertian, yaitu i) sebuah sistem atau kumpulan peraturan tertulis dan baku yang mengikat masyarakat dan ditegakkan oleh otoritas tertentu; atau ii) sebagai sebuah sistem berpikir dan berperilaku (atau lebih luas sebagai sistem budaya) dari masyarakat tertentu.

Lawrence M. Friedman mengemukakan teorinya tentang tiga lapisan hukum dalam masyarakat, yaitu i) substansi hukum; ii) struktur -fisik- hukum; dan iii) budaya hukum. Substansi hukum, menurut Friedman, adalah isi dari peraturan perundang-undangan baik itu tertulis (sebagaimana sistem *civil law*) atau tidak tertulis (sebagaimana sistem *common law*) yang coba diberlakukan.

Struktur fisik hukum menurut Friedman lebih berupa lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang diinginkan dan kemudian dibentuk oleh substansi hukum, yang ketika lembaga-lembaga maupun institusi-institusi tersebut telah dibentuk dapat dibayangkan untuk dirangkai sehingga membentuk suatu struktur atau jejaring atau “bangunan” dimana hukum dapat bekerja. Sementara budaya hukum menurut Friedman adalah kondisi ketika peraturan-peraturan atau substansi hukum telah terinternalisasi, diterima oleh masyarakat, mengendalikan cara berpikir masyarakat, serta mengarahkan tindakan-tindakan masyarakat.[[248]](#footnote-248)

Dari pemahaman sistem hukum seperti diuraikan di atas, bagian utama struktur hukum ketatanegaraan RI dapat ditemukan dalam naskah undang-undang dasar atau konstitusi yang menyebutkan keberadaan lembaga-lembaga negara dan/atau kewenangannya, serta posisi atau hubungannya secara relatif terhadap lembaga negara yang lain. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945,

1. **Analisis**
2. **Bentuk Penolakan Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sebagai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

W. Zevenbergen menyebut bahwa setiap kaidah hukum wajib memenuhi syarat-syarat pembentukannya.[[249]](#footnote-249) Hal mendasar mengapa undang-undang yang disusun harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya selain karena corak negara hukum modern, ialah karena konsep negara hukum saat ini tidak lagi dimaknai sebagai thinner concept yang mengutamakan hukum dari segi formal, melainkan dimaknai dalam bentuk thicker concept yang menekankan aspek *substantive social welfare*.[[250]](#footnote-250) Sudah barang tentu bahwa prosedur pembentukan undang-undang yang baik dan konstitusional akan menentukan kadar *substantive social welfare* yang dimaksud.

Mekanisme formal pembentukan undang-undang telah dirumuskan secara eksplisit dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengalami beberapa kali perubahan (selanjutnya disebut UU tentang P3). Guna mengukur konstitusionalitas pembentukan suatu UU, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan parameter pengujiannya melalui Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019, sebagai berikut:

* 1. Pengujian atas tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam tataran pembahasan hingga pengambilan keputusan bersama eksekutif dan legislatif;
  2. Pengujian atas bentuk atau sistematika suatu undang-undang;
  3. Pengujian mengenai wewenang lembaga yang sah untuk mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang;
  4. Pengujian atas hal-hal lainnya diluar objek pengujian materil.

Hal-hal lain yang dimaksud di atas termasuk pula pada kesesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kesemua parameter pengujian diatas bersifat kumulatif, artinya jika ada satu poin yang tidak terpenuhi, maka suatu undang-undang akan dinyatakan cacat formil atau inkonstitusional. Secara garis besar, setidaknya parameter pengujian tersebut akan dinilai dalam 3 (tiga) tahapan pembentukan undang-undang, yakni tahap *ante legislative*, tahap legislative, dan tahap *post legislative*. Masing-masing tahapan setidaknya terdiri dari:[[251]](#footnote-251)

* 1. *Ante Legislative*, terdiri dari tahap penelitian, tahap pengajuan usul inisiatif, tahap perancangan, dan tahap pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU);
  2. Tahap *Legislative*, terdiri dari tahap pembahasan, tahap penetapan RUU menjadi UU, dan tahap pengesahan UU;
  3. Tahap *Post Legislative*, terdiri dari tahap pengundangan, tahap pemberlakuan, dan tahap penegakan.

Pertama, dalam tahap *ante legislative*, Presiden, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk materi muatan tertentu akan menjadi aktor dalam inisiasi RUU yang wajib disertai dengan Naskah Akademik sebagai dokumen yang menjelaskan perdebatan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan.[[252]](#footnote-252) Naskah RUU tersebut akan berubah status sesuai dengan proses yang dilaluinya, yang terdiri dari Naskah Akademik (ketentuan normatif yang bersifat akademik), akan berubah menjadi Naskah Politik (ketika telah disepakati oleh pemegang otoritas politik), dan RUU akan berubah menjadi Naskah Yuridis (ketika telah disahkan menjadi UU).[[253]](#footnote-253)

Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dalam tahap ante legislative, utamanya ketika RUU berasal dari Presiden, maka Presiden akan menyiapkan Naskah Akademik dan RUU yang hendak diusulkan. Ketika naskah tersebut telah disepakati di lingkungan Presiden, maka Presiden akan menyerahkan draft tersebut secara resmi ke Pimpinan DPR yang disertai dengan Amanat Presiden (Ampres) atau yang disebut juga sebagai Surat Presiden (Suspres) dalam UU 12/2011 tentang P3.[[254]](#footnote-254) Namun, Ampres tersebut hanya berisikan amanat untuk menunjuk kementerian mana yang akan mewakili Pemerintah selama proses pembahasan berlangsung.

Ampres tersebut tidak dijadikan sebagai media bagi Presiden untuk mengarahkan jajarannya mengenai bagaimana politik hukum pemerintah terhadap RUU tersebut.[[255]](#footnote-255) Idealnya, Ampres tersebut dijadikan sebagai alat bagi Presiden untuk memberitahu tindakan apa yang harus diambil dan tindakan apa yang tidak boleh diambil oleh Kementerian yang bersangkutan saat mewakili Pemerintah.[[256]](#footnote-256) Sehingga kelak produk hukum yang dihasilkan akan menjadi jelas apakah ini merupakan sikap Presiden dalam artian sebagai politik hukum Presiden, atau justru RUU tersebut merupakan arah yang didorong oleh Menteri yang terafiliasi dengan partai politik tertentu.

Kedua, dalam tahap legislative, pertanyaan yang paling krusial untuk di tanyakan adalah apakah dimungkinkan masyarakat melakukan penolakan atas adanya RUU? Konstitusi negara-negara tertentu memberikan wewenang kepada warga negara untuk menolak RUU sebelum disahkan diundangkan, contohnya Swiss.[[257]](#footnote-257) Secara garis besar, Konstitusi Federal Swiss menyediakan 3 (tiga) instrumen utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang, yakni konsultasi (consultation), referendum, dan inisiatif rakyat (popular initiative).[[258]](#footnote-258) Tidak ada ukuran bahwa suatu RUU akan menjadi UU selain sampai warga negara menyetujuinya. Setiap perubahan konstitusi yang diusulkan oleh parlemen Swiss misalnya, harus disetujui dalam referendum.

Konsep di atas menggambarkan bahwa ada negara-negara tertentu yang menempatkan konstituennya dalam posisi yang sangat strategis dalam pembentukan undang-undang. Metode referendum di Swiss melengkapi warga negara dengan kekuatan untuk melakukan veto terhadap undang-undang jika mereka tidak setuju dengan RUU yang diinisiasi. Bahkan Swiss dapat membuat undang-undang melalui inisiatif yang digerakkan oleh warga negara. Inisiatif tersebut setidaknya memerlukan petisi dengan 100.000 (seratus ribu) tanda tangan melalui sistem yang disebut popular inisiative.

Kekuatan rakyat dalam mempengaruhi pembentukan undang-undang dalam konteks Indonesia selalu menjadi polemik. Setidaknya, setiap permohonan *judicial review* secara formil pasti selalu mencantumkan minimnya partisipasi masyarakat. Secara garis besar, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu *non-participation, tokenism,* dan *citizen power*.[[259]](#footnote-259) Tokenism (partisipasi semu) nampaknya menjadi kecenderungan tingkat partisipasi dalam konteks Indonesia yang terdiri dari placation, consultation, dan informing. Nyatanya, tokenism ini hanya memberikan ruang bagi mereka untuk mendengar dan didengar. Namun, warga negara tidak memiliki justifikasi untuk memastikan bahwa pandangan mereka akan didengar dan dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang.[[260]](#footnote-260)

Kecenderungan ini membuat Mahkamah Konstitusi memperkenalkan konsep partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Melalui putusan tersebut, diamanatkan bahwa partisipasi yang bermakna harus dilaksanakan setidaknya dalam tahap pengajuan RUU, tahap pembahasan antara Presiden dan DPR serta tahap pembahasan antara Presiden, DPR, dan DPD dalam lingkup materi muatan yang menyangkut daerah[[261]](#footnote-261), serta dalam tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Artinya, setidaknya Mahkamah Konstitusi telah menyadari bahwa partisipasi warga negara dalam pembentukan kebijakan publik masih semu sehingga harus ditekankan dengan frasa 'bermakna'.

Partisipasi dalam pembentukan undang-undang menjadi penting karena itu erat kaitannya dengan hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang dijamin oleh konstitusi. Maka setidaknya model partisipasi masyarakat dapat dikembangkan dalam beberapa bentuk, misalnya (i) Negara dapat memaksimalkan lembaga-lembaga survey untuk mengetahui kecenderungan warga negara terhadap sebuah RUU sebelum RUU tersebut diundangkan menjadi UU, (ii) Negara dapat mempertimbangan petisi sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang. Terkait petisi, kegunaan petisi demikian telah dimaksimalkan melalui *Article 119 of the Constitution Kenya*, bahkan petisi dari masyarakat juga digunakan Kenya sebagai bahan pertimbangan untuk menurunkan pejabat publik dari jabatannya berdasarkan Article 251.[[262]](#footnote-262)

Model lain partisipasi yaitu (iii) mekanisme pertanggungjawaban partisipasi publik oleh legislatif dan eksekutif. Saat proses pembahasan selesai, pembentuk undang-undang idealnya membentuk sebuah draft pertanggungjawaban bahwa beberapa atau bahkan keseluruhan substansi UU adalah hasil masukan dari publik yang diadopsi oleh pembentuk undang-undang. Sekalipun beberapa masukan publik ditolak, pembentuk UU dalam draft tersebut harus mampu menjelaskan konsiderasi secara logis mengapa pendapat tertentu tidak dapat diadopsi dalam RUU yang dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan atau dengan kata lain menjadi jaminan bahwa pendapat publik benar-benar diperhitungkan pendapatnya dan menggeser paradigma partisipasi semu yang selama ini dipraktikkan.

Pembentukan suatu undang-undang sangat dimungkinkan mengalami cacat formil dan cacat materiil sejak awal pembentukannya. Jeremy Bentham menyebut hal demikian sebagai bentuk ketidaksempurnaan dan membagi ketidaksempurnaan itu menjadi 2 (dua) tingkatan, yakni tingkatan pertama disebabkan oleh arti ganda (*ambiguity*), kekaburan (*obscurity*), dan terlalu luas (*overbulkiness*). Sedangkan tingkatan kedua disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ketidaktepatan ungkapan (*unsteadiness in respect of ezpression*), ketidaktepatan tentang pentingnya sesuatu (*unsteadiness in respect of import*), berlebihan (*redundancy*), terlalu panjang lebar (*longwindedness*), membingungkan (*entanglement)*, tanpa tanda yang memudahkan pemahaman (*nakedness in respect of helps to intellection*), dan ketidakteraturan (*disorderliness*).[[263]](#footnote-263)

Oleh karena ketidaksempurnaan itu, judicial review menjadi sarana yang dapat ditempuh oleh warga negara baik secara perseorangan maupun kelompok untuk merespons ketidaksempurnaan atas pembentukan suatu UU. Dengan kata lain, judicial review dimaknai sebagai bentuk penolakan masyarakat atas ditetapkannya suatu undang-undang. Hal ini didasarkan bahwa konsep *judicial review* merupakan "*a key vehicle for enbling the judiciary to prevent and check the abuse of executive power*"[[264]](#footnote-264). Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa politik saat ini menjadi independent variabel sedangkan hukum menjadi dependent variabel[[265]](#footnote-265), namun hadirnya Mahkamah Konstitusi merupakan manifestasi dari prinsip check and balances yang meletakkan semua lembaga negara setara dan dapat saling mengimbangi dan mengawasi sebagai proses pendewasaan politik dalam praktik penyelenggaraan negara.[[266]](#footnote-266) Lebih lanjut, *judicial review* merupakan sarana mempertahankan *lex specialis* pada jalur yang semestinya apabila bertentangan dengan aturan yang lebih umum (*lex generalis*).[[267]](#footnote-267)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada tahun 2003 yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 ini mengadopsi sistem *centralized* atau kerap dikenal dengan istilah European Model of Constitutional Review. Centralized system ini dicirikan dengan hanya memiliki satu organ negara yang terpisah dengan badan peradilan umum. Sedangkan sistem lain seperti yang terdapat di Amerika Serikat mengadopsi sistem *decentralized (all courts)* dimana *judicial review* adalah kompetensi yang melekat pada hampir semua pengadilan.[[268]](#footnote-268) Artinya, kewenangan review tersebut disebar ke semua tingkat pengadilan dan review dilakukan berdasarkan kasus konkret baik yang disebabkan oleh pertentangan norma ataupun tindakan pejabat publik.[[269]](#footnote-269)

Salah satu esensi penting dalam konsep negara hukum ialah kemandirian kekuasaan kehakiman. Mengutip pernyataan George Tridimas, bahwa sejatinya independensi politik hakim akan meningkat bila diikuti dengan hal-hal berikut, (i) semakin kecil keterlibatan Pemerintah dalam proses pengangkatan mereka, bahkan independensi hakim akan lebih tinggi ketika hakim dicalonkan oleh lembaga peradilan itu sendiri, (ii) semakin lama masa kerja mereka, kemerdekaan juga lebih tinggi ketika hakim hanya menjabat untuk satu periode atau tidak mencari pengangkatan kembali, (iii) semakin besar otonomi keuangan hakim yang menyiratkan bahwa gaji dan anggaran tidak dapat dikurangi dengan tindakan diskresi eksekutif, (iv) transparansi, meningkatkan informasi yang tersedia untuk umum, (v) mendisiplinkan hakim dan memberhentikan hakim, dan (vi) lebih sulit lagi bagi pemerintah untuk membatalkan putusan pengadilan yang tidak disukainya.[[270]](#footnote-270)

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus sebisa mungkin dibangun dan dipertahankan bersamaan dengan aspek independensinya. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi didesain sebagai counter majoritarian, yaitu Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan untuk menetapkan hal yang bisa saja bertentangan dengan keinginan dari institusi politik.[[271]](#footnote-271) Artinya, Mahkamah Konstitusi berhadapan dengan 2 (dua) institusi politik, yaitu pemerintah dan parlemen. Mahkamah Konstitusi tentu tidak dapat membawa pengaruh yang signifikan apabila MK sebagai lembaga juga diwarnai dengan unsur politik. Jika demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak lagi berperan sebagai counter majoritarian sebab MK memiliki unsur yang sama dengan lembaga pembentuk undang-undang, yakni sama-sama memiliki unsur politik.

Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (KSMK) yang terdiri dari Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) serta sejumlah lembaga dan individu lainnya menyuarakan penolakannya terhadap UU tentang MK Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas UU tentang MK Tahun 2003. Penolakan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 100/PUU-XVIII/2021 yang mempermasalahkan UU secara formil dan materil.

Secara formil, KSMK setidaknya mendasari argumentasinya pada 5 (lima) poin, yaitu (i) pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan memasukkan substansi diluar amanat putusan MK; (ii) revisi UU MK tidak terkualifikasi dalam syarat carry over; (iii) pembentuk undangundang gagal memperhatikan dan memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang yang baik dalam membentuk suatu undang-undang; (iv) naskah akademik UU MK tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik; (v) proses pembentukan undang-undang tidak memberi ruang bagi publik, tergesa-gesa, tertutup, serta tidak mencerminkan adanya sense of crisis pandemi COVID-19, (vi) revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid.

Sebagaimana didalilkan, bahwa revisi UU MK tidak masuk dalam Prolegnas Jangka Menegah Tahun 2020-2024. Oleh karenanya, revisi UU MK menggunakan daftar kumulatif terbuka dalam poin sebagai akibat putusan MK untuk tetap dapat melakukan revisi terhadap UU MK. Namun, KSMK menilai bahwa terdapat beberapa substansi yang sama sekali tidak pernah diamanatkan dalam putusan manapun. Artinya, KSMK menilai bahwa revisi UU MK ini menyelundupkan beberapa substansi yang didasari atas politik kepentingan. dengan mengatasnamakan tindak lanjut atas putusan MK. Substansi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

* 1. perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi selama 15 (lima belas tahun) atau hingga usia purna tugas yakni 70 (tujuh puluh) tahun dan diberlakukan bagi hakim yang pada waktu itu menjabat (*incumbent*);
  2. peningkatan usia minimal Hakim Konstitusi yang semula berada pada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun;
  3. dihapuskannya periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi;
  4. adanya perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari dua tahun enam bulan menjadi 5 (lima) tahun;
  5. penambahan 1 (satu) orang akademisi sebagai anggota Majelis Kehormatan MK yang berlatar belakang hukum; dan
  6. Persyaratan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung wajib berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi, atau sebagai hakim agung.

Kesemua substansi diatas termasuk substansi lain didalamnya diyakini disusun dengan melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang setidaknya tertuju pada asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Lebih lanjut, KSMK menganggap bahwa naskah akademik RUU MK terkesan cherry picking dan gagal menjelaskan mengapa revisi UU MK saat itu menjadi prioritas di tengah pandemi COVID-19.

Pembentukan suatu undang-undang idealnya berdasar atas sistem *bottom-up* (dari bawah ke atas). Sistem itu digunakan untuk memastikan bahwa suatu UU memang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dalam rangka melindungi hak konstitusional masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, naskah akademik menduduki posisi strategis untuk bertindak sebagai wadah yang menampung dan menganalisis kebutuhan masyarakat.[[272]](#footnote-272) Namun dalam revisi UU MK, KSMK menilai bahwa naskah akademik RUU MK hanya sekedar formalitas belaka dan tidak mengikuti standar penyusunan naskah akademik yang baik.

Revisi UU MK juga diyakini tidak mengadopsi prinsip transparansi. Pengusulan RUU dilakukan pada bulan Februari 2020 dan pengesahan dilakukan pada awal September 2020. Bahkan, pembahasan DIM UU MK diyakini hanya berlangsung selama 3 (tiga) hari saja. Proses pembahasan yang kilat ini berkonsekuensi pada minimnya partisipasi publik dalam pembentukan UU. Jika dikomparasikan, UU lain mengalami proses advokasi pembentukan yang sangat panjang. Misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang pertama kali diinisiasi tahun 2012 dan baru disahkan pada tahun 2022, RUU Masyarakat Adat yang disuarakan sejak tahun 2009, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang dibahas sejak tahun 2016, hingga RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diusulkan sejak tahun 2004.

Sedangkan secara materil, setidaknya terdapat 5 substansi yang diperkarakan oleh KSMK, yaitu berkaitan dengan (i) limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul, (ii) sistem rekrutmen hakim konstitusi dari sudut pandang penafsiran konstitusional, (iii) penafsiran konstitusional usia minimal menjadi hakim konstitusi dan masa bakti hakim konstitusi, (iv) hapusnya Pasal 59 ayat (2) revisi UU MK, dan (v) Pasal 87 revisi UU MK.

Pada intinya, KSMK mempersoalkan banyaknya konflik kepentingan di balik pembentukan perubahan UU MK. Padahal judicial review ini juga bertentangan dengan asas *nemo judex idoneous in propria causa*, yang berarti bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini disebabkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar bisa objektif dalam mengadili perkara dimana dia menjadi salah satu pihak yang berperkara, memiliki kepentingan substansial di dalamnya, memiliki kepentingan substansial dengan orang-orang yang berperkara dimana kepentingan orang tersebut dapat mempengaruhi hasil putusan, atau terlihat telah mempengaruhi putusan.[[273]](#footnote-273) Namun hal ini tetap dilakukan karena tidak ada forum lain untuk melakukan pengujian UU MK.

Karakteristik pembentukan UU demikian memiliki kemiripan dengan legislasi era otoritarianisme Orde Baru, dimana produk hukum berwatak positivistik-intrumentalistik. Watak ini lebih banyak digunakan sebagai sarana untuk membenarkan (mempositifkan) tindakan Pemerintah atau memberi wadah bagi keinginan-keinginan penguasa[[274]](#footnote-274). Penguasa bisa saja "memperalat" UU menjadi instrumen yang dapat melegalkan perbuatan penguasa, sehingga keinginannya tersebut menjadi sah karena berlandaskan atas hukum positif.

Berdasarkan permohonan pengujian yang diajukan oleh KSMK, maka kita dapat melihat bagaimana fungsi hukum ditempatkan. Terdapat beberapa fungsi hukum dalam hubungannya dengan politik yang disebut sebagai *three basic aspects on the law functions in relation to politics* oleh Miro Cerar, yaitu:[[275]](#footnote-275)

1. hukum sebagai tujuan (*goals*), pemahaman politik terhadap nilai atau institusi menjadi sama persis dengan pemahaman hukum terhadap nilai dan institusi;
2. hukum sebagai alat (*means*), politik memahami hukum sebagai alat untuk pemenuhan kepentingan politik tertentu;
3. hukum sebagai rintangan (*obstacles*), politik memahami hukum sebagai halangan dalam realisasi tujuan politik tertentu. Dalam hal ini akan ada 2 (dua) kemungkinan, yakni apakah politik yang menang atau hukum yang akan menang.

Maka dalam konteks ini tampak bahwa hukum difungsikan sebagai alat untuk pemenuhan kepentingan politik tertentu (means). Hal ini tampak bahwa sebenarnya perubahan ketiga UU MK diajukan secara perorangan (bukan dari fraksi tertentu), namun rencana tersebut tetap memperoleh kemudahan karena kepentingan yang kuat didalamnya. Idealnya, hukum harus mampu difungsikan sebagai rintangan (*obstacle*) bagi realisasi tujuan politik yang bertolak belakang dengan keadaan masyarakat. Hukum memang merupakan hasil kristalisasi dari kekuatan politik, namun ketika produk hukum tersebut telah mengikat secara sah, maka politik harus tunduk pada hukum yang telah disepakati tersebut.

1. **Respon Negara *(State Respond)* Dalam Menghadapi Tuntutan Atas Penolakan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Sebagai Perubahan Ketiga Atas Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Sikap Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PUU-XVIII/2020 merupakan perlambangan dari bagaimana negara merespon tuntutan masyarakat akan keberlakuan perubahan UU MK. Hal ini disebabkan bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk menegakkan konstitusionalisme melalui praktik penyelenggaraan negara yang setidaknya terdiri dari 3 (tiga) kesepakatan, yakni (i) kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the philosophy of government*), (ii) kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of the government*), (iii) kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).[[276]](#footnote-276)

Terdapat beberapa pertimbangan hukum Hakim Konstitusi yang menggambarkan bagaimana MK bersikap sebagai lembaga yang menguji perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Pertama, MK menerima kedudukan hukum para pemohon dalam hal pengujian formil. Hal ini dikarenakan ditemukan adanya hubungan pertalian antara profesi pemohon dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Adapun profesi Pemohon I hingga Pemohon IV dalam perkara ini merupakan peneliti yang memiliki concern terhadap perkembangan hukum tata negara termasuk perkembangkan MK secara kelembagaan. Sedangkan profesi dari Pemohon V hingga Pemohon VII merupakan dosen yang mengimplementasikan pilar pengabdian kepada masyarakat dengan memohonkan pengujian UU di MK.

Namun, MK menilai bahwa KSMK tidak memiliki kedudukan hukum dalam pengujian materiil UU MK. Sebab, KSMK dinilai tidak mampu menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) terhadap anggapan potensi kerugian konstitusionalnya ataupun terhadap kerugian faktual terhadap pasalpasal yang dimohonkan dalam UU No. 7 Tahun 2020. MK menilai bahwa setidaknya para pemohon harus memiliki pengalaman kerja setidak-tidaknya 15 (lima belas) tahun dibidang hukum dan/atau sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai Hakim Agung bagi calon hakim yang berasal dari Mahkamah Agung. Sehingga jika dilihat kualifikasi pemohon, pemohon belum memenuhi persyaratan apapun untuk menjadi hakim konstitusi karena salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi ialah harus memiliki pengalaman kerja setidak-tidaknya 15 (lima belas) tahun dibidang hukum dan/atau sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai Hakim Agung bagi calon hakim yang berasal dari Mahkamah Agung.

Artinya, Mahkamah menginginkan pemohon benar-benar memiliki kerugian konstitusional yang konkrit terhadap pasal-pasal yang dimohonkan, sehingga ketika permohonan pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian yang dimaksud tidak akan terjadi lagi. Ketiadaan kedudukan hukum tersebut membuat MK sama sekali tidak mempertimbangkan pokok-pokok permohonan materil yang dimohonkan oleh para pemohon.

Persoalan legal standing memang membutuhkan diskursus lebih komprehensif. Jika merujuk pada Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK, persoalan apakah pemohon memiliki legal standing atau tidak menjadi perdebatan sengit yang diwarnai dengan dissenting opinion. Pengujian UU tersebut menyoal batas atas dan batas bawah hakim konstitusi saat pengangkatan yang berpotensi tidak dapat memperoleh kesempatan untuk melanjutkan periode kedua sebagai hakim konstitusi karena harus diberhentikan dengan hormat di usia 70 (tujuh puluh) tahun. Pengujian UU tersebut diajukan oleh akademisi yang telah memperoleh gelar doktor ilmu hukum dan masing-masing berpengalaman sebagai asisten hakim konstitusi dan Panitera Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah menilai pemohon pada waktu yang akan datang berpotensi diangkat menjadi hakim konstitusi dan berpeluang pula diperpanjang masa jabatannya.

Namun, pendapat berbeda justru disuarakan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Harjono mengenai pemberian legal standing tersebut. Pendapat berbeda tersebut pada intinya menyatakan bahwa pemohon tidak sedang menduduki jabatan sebagai hakim konstitusi, sehingga pemohon tidak mungkin dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Lebih lanjut, pemohon juga belum jelas kapan akan diangkat dan belum tentu juga bahwa para pemohon akan menjadi Hakim Konstitusi suatu hari nanti, atau dengan kata lain proyeksi pemohon untuk menjadi Hakim Konstitusi masih sangat abstrak. Secara ringkas, kerugian konstitusional harus diwujudkan dengan keadaan pemohon yang benarbenar berpotensi akan menjadi hakim konstitusi suatu hari nanti, misalnya para pemohon telah dinyatakan sebagai calon hakim konstitusi baik oleh Presiden, DPR, atau MA saat mengajukan permohonan pengujian.

Menurut penulis, menjadi sangat wajar bila KSMK tidak memperoleh legal standing dalam pengujian materiil. Sebab, KSMK tidak memiliki keterkaitan secara langsung atau keterkaitan yang konkret terhadap MK, Presiden, DPR, ataupun MA. Memang doktrin kedudukan hukum ini cukup membingungkan masyarakat mengenai bagaimana rakyat harus bertindak menghadapi keserampangan pembentukan undang-undang. Meskipun begitu, MK setidaknya harus menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat yang peduli dengan perkembangan ketatanegaraan melalui mekanisme pengujian formil.

Kedua, berkaitan dengan pengujian formil, berdasarkan keterangan DPR bahwa perubahan ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 telah masuk dalam daftar Prolegnas 2015-2019, prioritas tahun 2019. Lebih lanjut, DPR juga menjelaskan bahwa revisi UU ini merupakan usulan yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan MK (6 putusan). Berdasarkan fakta tersebut, MK meyakini bahwa tata cara perubahan UU a quo yang didasarkan atas dalil tindak lanjut putusan MK dapat dibentuk dalam rentang waktu kapanpun dan jumlahnya tidak terbatas sepanjang memenuhi kriteria sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. MK menilai bahwa UU yang telah dimasukkan dalam daftar Prolegnas tidak berarti bahwa perubahan UU tersebut menjadi tertutup untuk diusulkan dalam daftar kumulatif terbuka. Sepanjang UU yang diusulkan memang memenuhi kriteria dalam UU tentang P3, maka tidak menutup kemungkinan sebuah UU tetap diusulkan dalam daftar kumulatif terbuka.

Oleh karena revisi UU ini menggunakan jalur daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan MK, maka MK meyakini bahwa proses revisi UU ini menjadi tidak perlu lagi melalui proses pembahasan dan tidak perlu dilekatkan dengan syarat partisipasi publik yang bermakna. MK beralasan bahwa mekanisme yang berbeda dari UU yang diajukan di luar daftar kumulatif terbuka ditujukan untuk menjaga kemurnian substansi yang memang dikhususkan sebagai penyesuaian atas putusan MK.

Padahal, jika merujuk pada UU tentang P3 utamanya dalam bagian penyusunan undangundang dan partisipasi masyarakat, maka tidak ditemukan satupun klausul yang menjelaskan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa UU yang dibentuk dengan jalur daftar kumulatif terbuka tidak perlu diikat dengan partisipasi yang bermakna dan pembahasan secara terbuka. Mekanisme demikian justru akan membuat substansi UU cenderung 'disusupi' dengan materi-materi lain diluar jalur daftar kumulatif terbuka. Oleh karenanya, tidak ada mekanisme kontrol yang mengawasi bahwa substansi yang dimasukkan dalam UU tertentu murni apa yang pernah diamanatkan oleh MK dalam putusan-putusan tertentu.

Justru UU yang diperkarakan di MK secara logika adalah UU yang paling berpotensi menyimpan banyak kepentingan politik, UU yang paling berpotensi melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, UU yang paling berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara, dan UU yang paling mendapat sorotan dari masyarakat dibanding UU yang tidak dipersoalkan di MK. Maka dalam batas penalaran yang wajar, jenis UU yang memiliki karakteristik demikian harus diawasi lebih ekstra karena substansinya yang sangat rentan.[[277]](#footnote-277)

1. **Penutup**

**A. Kesimpulan**

1. Bentuk penolakan masyarakat terhadap UU No. 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diwujudkan dengan pengujian UU No. 7 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Pembentukan UU yang cenderung abnormal menjadikan hukum difungsikan sebagai alat (*means*) untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu.
2. Respon negara dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas penolakan terhadap UU No. 7 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diwujudkan dengan menolak permohonan pengujian UU No. 7 Tahun 2020 untuk seluruhnya oleh yudikatif dan penyusunan perubahan keempat UU No. 24 Tahun 2003 oleh pembentuk undang-undang. Banyaknya kepentingan politik yang masuk ke dalam sistem hukum melahirkan produk hukum dengan karakter konservatif.

**B. Saran**

Saran yang diajukan ialah pertama, pembentuk undang-undang perlu meningkatkan ruang partisipasi bagi publik untuk terlibat dalam proses pembentukan undang-undang baik dengan cara memaksimalkan lembaga-lembaga survey, mempertimbangan petisi sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang, ataupun dengan menyusun mekanisme pertanggungjawaban partisipasi publik oleh legislatif dan eksekutif. Kedua, pemerintah perlu kiranya memperluas penggunaan Amanat Presiden (Ampres) sebagai sarana penyampaian politik hukum Presiden terhadap suatu rancangan undang-undang. Ketiga, negara perlu mempertimbangkan kemungkinan perluasan doktrin kerugian konstitusional dalam pengujian UU di Mahkamah Konstitusi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

**Buku**

Atok, A. Rosyid Al. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Malang: Setara Press, 2015.

Bockenforde, Markus. *A Practical Guide to Constitution Building: The Design of the Legislature*. International IDEA resources on Constitution Building, 2011.

Gabisel Barsallo and Elisa Mendoza. *Enough Crises to Choose from: The Perceived Sense of Crisis in Panam*a. Social Science Article, 2022.

Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hofler, Stefan, and friends, *Legislation in Switzerland*, University of Zurich: Zurich Open Repository and Archive, 2020.

Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*, Buku VI, Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang.* Yogyakarta: EA Books, 2022.

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Hirschl, Ran. *The Judicialization of Politics*. ​Oxford: ​Oxford University Press, 2018

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting (Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2016.

Tridimas, George. *Independent Judiciary.* New York: Springer Encyclopedia of Law and Economics, 2019.

**Jurnal**

Andryan. *Open Court Principle for the Public in Material Judicial Review Right in the Supreme Court*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22, No. 3, 2022.

Andy Omara. *The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institution in Judicial Review*, Constitutional Review, Vol. 3 No. 2, December 2017.

Arnstein, Sherry R. *A Ladder of Citizen Participation*, Journal of the American Institute of Planners, Volume 35, Issue 4, 2007.

Hess, Robert Uwe. *Nemo Judex in Sua and the Challenge Procedure Under the Uncitral Model Law*, International Law and Politics, Vol. 50, 2018.

M. Nur Rasyid, dkk. *The Decrease of Legislative Functions of The People’s Representative Council of The Republic of Indonesia In the Reform Era*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22, No. 2, 2022.

Miro Cerar, *The Relationship between Law and Politics*, Annual Survey of International & Comparative Law, Vol. 15, Issue 1, 2019.

**Laman**

The National Assembly, Parliament of Kenya, *Public Participation in the Legislative Process*, dimuat dalam <https://www.google.com/search?q=arliament+of+Kenya%2C+%22Public+Participation+in+the+Legislative+Process%22%2C+Fact+She&sca_esv=56a6e72bcd16fe02&rlz=1C1YTUH_enID1083ID1083&biw=1280&bih=631&sxsrf=ADLYWIIUFuIgo52lKCie2T_FlDUnkWv_2Q%3A1725950525347&ei=PerfZpLuFKmz4-EPr-6kOA&ved=0ahUKEwjSgNrf4reIAxWp2TgGHS83CQcQ4dUDCA4&uact=5&oq=arliament+of+Kenya%2C+%22Public+Participation+in+the+Legislative+Process%22%2C+Fact+She&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiT2FybGlhbWVudCBvZiBLZW55YSwgIlB1YmxpYyBQYXJ0aWNpcGF0aW9uIGluIHRoZSBMZWdpc2xhdGl2ZSBQcm9jZXNzIiwgRmFjdCBTaGVIAFAAWABwAHgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcA&sclient=gws-wiz-serp>, diakses tanggal 10 September 2024.

**ANALISIS IMPLIKASI PASAL 209 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEDUDUKAN RUMAH SAKIT DAERAH DALAM**

**SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

***(ANALYSIS OF THE IMPLICATIONS OF ARTICLE 209 OF LAW NUMBER 23 OF 2014 ABOUT REGIONAL GOVERNMENT ON THE POSITION OF REGIONAL HOSPITALS IN THE COMPOSITION OF THE REGIONAL APPARATUS)***

# **Nita Ariyulinda**

Perancang Undang-Undang Madya

Pusat Perancangan Undang-Undang Ekuinbang Kesra

Badan Keahlian DPR RI

\*Korepondensi: [nita\_ldf@yahoo.com](mailto:nita_ldf@yahoo.com)

**Abstrak**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) menghapus nomenklatur Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Rumah Sakit Daerah (RSD) yang semula sebagai perangkat daerah yang berbentuk LTD, pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. 18 Tahun 2016), dikembalikan ke bentuk lamanya, yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan (Dinkes). Hal ini berimplikasi terhadap kemandirian RSD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu dalam penulisan ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kelebihan dan kelemahan kedudukan/status RSD berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU tentang Pemda, bagaimana implikasi yang timbul dari Pasal 209 UU tentang Pemda terhadap kedudukan RSD dalam susunan perangkat daerah dan bagaimana bentuk kelembagaan RSD yang ideal dalam perangkat daerah. Adapun tujuan penulisan adalah untuk mengetahui kondisi RSD dalam UU No. 32 Tahun 2004, untuk mengetahui implikasi yang timbul dari Pasal 209 UU tentang Pemda terhadap RSD dan untuk mengetahui bentuk kelembagaan RSD yang ideal dalam perangkat daerah. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. RSD ketika berkedudukan sebagai LTD sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 memiliki kemandirian dalam pengelolaan RSD sehingga RSD dapat bergerak secara cepat dalam memenuhi kebutuhan RSD sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Saat ini kedudukan RSD kembali menjadi UPT Dinkes yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes. Hal ini menyebabkan panjangnya birokrasi dan keterbatasan wewenang dalam pengambilan keputusan sehingga berakibat menurunannya kualitas layanan kesehatan.

Kata Kunci: lembaga teknis, rumah sakit daerah, unit pelaksana teknis.

***Abstract***

*The enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (UU concerning Regional Government) removed the nomenclature of Regional Technical Institutions (LTD) which was previously contained in Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (UU No. 32 of 2004). The Regional Hospital (RSD), which was originally a regional apparatus in the form of LTD, in Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus (PP No. 18 of 2016), was returned to its old form, namely the Technical Implementation Unit (UPT) of the Health Service (Health Department). This has implications for the RSD's independence in carrying out its duties and functions. Therefore, in this writing, the problem is how the advantages and disadvantages of the position/status of RSD based on Law No. 32 of 2004 and the Law on Regional Government, what are the implications arising from Article 209 of the Law on Regional Government on the position of RSD in the composition of regional apparatus and what is the ideal institutional form of RSD in regional apparatus. The purpose of writing is to find out the condition of RSD in Law no. 32 of 2004, to find out the implications arising from Article 209 of the Law on Regional Government on RSD and to find out the ideal institutional form of RSD in regional apparatus. This writing method uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach. RSD when domiciled as LTD as regulated in Law no. 32 of 2004 has independence in managing the RSD so that the RSD can move quickly to meet the needs of the RSD as a health service facility. Currently, the position of the RSD has returned to being the UPT Health Office which is responsible to the Head of the Health Office. This causes lengthy bureaucracy and limited authority in decision making, resulting in a decline in the quality of health services.*

*Keywords: technical institutions, regional hospitals, teknis implementation units.*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Revisi UU No. 32 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh timbulnya beberapa permasalahan yang baru dalam pelaksanaannya sehingga perlu memperoleh perhatian Pemerintah Pusat dan semua pemangku kepentingan. Permasalahan tersebut antara lain ketidakjelasan pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang sering menimbulkan intepretasi yang berbeda dari berbagai kelompok kepentingan dan menjadi salah satu sumber konflik antar susunan pemerintahan dan aparatnya.[[278]](#footnote-278) Revisi dilakukan disamping untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan yang ada agar lebih mampu menjawab berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2004.[[279]](#footnote-279) Adapun perubahan UU No. 32 Tahun 2004 ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Pemerintah Pusat.[[280]](#footnote-280)

Pada tahun 2014 disahkannya UU tentang Pemda sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dibentuknya UU tentang Pemda yang baru sebagai pengganti UU No.32 Tahun 2004 yaitu *pertama*, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[281]](#footnote-281) *Kedua[[282]](#footnote-282),* efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Pemda mengatur bahwa urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU tentang Pemda. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU tentang Pemda.

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang berhak diperoleh oleh masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), sehingga hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang kepada masyarakat sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat daerah.[[283]](#footnote-283) Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengaturan perangkat daerah sebelumnya diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan diatur kembali dalam UU tentang Pemda yang mengalami perubahan subtansi terhadap susunan perangkat daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 mengatur terkait susunan perangkat daerah dalam Pasal 120. Dalam Pasal 120 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan dalam Pasal 120 ayat (2) mengatur bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Lembaga teknis daerah (LTD) merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.[[284]](#footnote-284) Jika dilihat dari susunan perangkat daerah maka nampak secara jelas kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berada dalam LTD yang bersifat spesifik dalam bentuk RSUD. Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Dengan demikian peraturan pelaksana dari UU No. 32 Tahun 2004 terkait susunan perangkat daerah dapat menjabarkan teknis pelaksanaan dari perintah undang-undang sehingga tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Berbeda halnya dengan UU tentang Pemda, UU tentang Pemda melakukan perubahan terhadap subtansi pengaturan terkait susunan perangkat daerah yang sebelumnya diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 209 UU tentang Pemda yang mengatur terkait perangkat daerah telah menghapus nomenklatur LTD. Dengan demikian dalam perangkat daerah tidak lagi dikenal istilah LTD. Namun nomenklatur ”badan” yang sebelumnya merupakan salah satu bagian dari LTD sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, menjadi salah satu organisasi perangkat daerah yang sejajar dengan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dan dinas dalam UU tentang Pemda.

Dengan berlakunya UU tentang Pemda, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan perubahan terhadap organisasi perangkat daerah yang mulai diimplementasikan secara efektif semenjak bulan Januari 2017.[[285]](#footnote-285) Dalam perubahan organisasi perangkat daerah tersebut terlihat adanya permasalahan terkait bagaimana dengan kedudukan Rumah Sakit Daerah dalam susunan organisasi perangkat daerah. Mengapa RSD sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam menjaga kesehatan masyarakat tidak menjadi salah satu unsur organisasi perangkat daerah. Selain itu dengan seiring perkembangan zaman dan kebutuhan di masyarakat, peran RSD tidak hanya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tetapi juga berperan dalam pendidikan untuk menghasilkan tenaga medis dan tenaga kesehatan (*university based*).

Saat ini RSD juga dapat menyelenggarakan program pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan spesialis dan sub spesialis untuk pemenuhan ketersediaan dokter spesialis dan dokter subspesialis (*hospital based*). Dengan demikian dalam UU tentang Pemda tidak mengatur kembali RSD dalam susunan organisasi perangkat daerah. Dengan tidak diaturnya RSD dalam susunan perangkat daerah, tentunya terdapat beberapa implikasi yang berpengaruh terhadap RSD dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

**B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana kelebihan dan kelemahan kedudukan/status RSD berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU tentang Pemda?
2. Bagaimana implikasi yang timbul dari Pasal 209 UU tentang Pemda terhadap kedudukan RSD dalam susunan perangkat daerah?
3. Bagaimana bentuk kelembagaan RSD yang ideal dalam perangkat daerah?
4. **Tujuan Penulisan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kelebihan dan kelemahan kedudukan/status RSD berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 dan UU tentang Pemda.
2. Implikasi yang ditimbulkan dari Pasal 29 UU tentang Pemda terhadap kedudukan RSD dalam susunan perangkat daerah.
3. Bentuk kelembagaan RSD yang ideal dalam perangkat daerah.

**D. Metode Penulisan**

Adapun metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan). Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah berbagai konsep, teori, asas hukum, putusan pengadilan, doktrin (ajaran), dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi tulisan ini. Berbagai bahan tersebut disusun secara sistematis untuk kemudian dikaji sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti serta memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.[[286]](#footnote-286)

Berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini maka pengkajian dilakukan dengan menganalisis UUD NRI Tahun 1945, UU tentang Pemda, dan peraturan pelaksana dari UU tentang Pemda. Selain itu, penulisan ini juga dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan literatur (pustaka), baik berupa buku atau catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai RSD dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Penulis juga menggali data yang bersumber dari sumber data sekunder[[287]](#footnote-287) yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan berbagai sumber media yang terdiri dari berbagai buku yang terkait dengan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan.

**II. Pembahasan**

1. **Kerangka Konsepsional**
2. **Organisasi Dalam Perangkat Daerah**

Organisasi berasal dari kata ”*organism”,* yaitu struktur dengan bagian yang demikian diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka.[[288]](#footnote-288) Jadi organisasi terdiri dari dua pokok yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan.[[289]](#footnote-289) Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu penetapan dan pembagian tugas, tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antara unsur organisasi sehingga orang dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuannya.[[290]](#footnote-290)

Pengertian organisasi sekarang ini telah bergeser dari pengertian organisasi yang sesungguhnya. Pada hakekatnya rumah sakit merupakan sebuah organisasi, dalam hal ini organisasi pemerintahan daerah yang menjadi UPT Dinkes. Seiring dengan terjadinya perubahan tentang pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang maka terjadi juga perubahan dan pengembangan organisasi perangkat daerah. Menurut Prajudi Atmosudirjo,[[291]](#footnote-291) pengembangan organisasi mempunyai dua arti yaitu sebagai fungsi administrasi dan sebagai fungsi spesialis. Pengambangan organisasi sebagai fungsi administator adalah kegiatan yang merupakan fungsi dan kewajiban dari pada administrator serta manajer-manajer bawahan untuk selalu mengembangkan dan menyesuaikan organisasi yang dipimpinnya kepada perkembangan tugas pokok. Sedangkan pengembangan organisasi sebagai fungsi spesialis adalah sebagai suatu teknik managemen yang dipergunakan untuk menghadapi masalah organisasi tertentu.

Sementara itu menurut Kusworo pengembangan organisasi atau *organizational* *development* yang sering disingkat OD adalah suatu pendekatan secara komprehensif terhadap perubahan-perubahan yang direncanakan atau didesain untuk memperbaiki dan menyempurnakan efektivitas organisasi secara menyeluruh agar organisasi mampu bersaing.[[292]](#footnote-292) Sedangkan menurut Warner (dalam Kusworo) pengembangan organisasi merupakan penerapan ilmu tentang perilaku (*behavioral science knowledge*) dalam suatu upaya jangka panjang, untuk memperbaiki kemampuan sebuah organisasi dalam rangka menghadapi perubahan dalam lingkungan eksternal, dan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan pemecahan masalah-masalah internalnya.[[293]](#footnote-293) Pengembangan organisasi akan berdampak terhadap bagan organisasi, rantai komandi, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, pendelegasian wewenang, sentralisasi versus desentralisasi, terutama dalam pengambilan keputusan operasional, rentang kendali, serta pengelompokan tugas-tugas yang sejenis dan sebagainya.[[294]](#footnote-294)

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Manusia yang mengelola organisasi, diluar manusia adalah aset pasif yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa intevensi kebijakan manusia lainnya.[[295]](#footnote-295) Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU tentang Pemda, perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjalankan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum maka kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 208 ayat (1) UU tentang Pemda. Berdasarkan Pasal 209 UU tentang Pemda, perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan, sedangkan untuk di kabupaten/kota ditambah dengan kecamatan. Dalam menyusun perangkat daerah harus memperhatikan kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut dari urusan pemerintahan yang telah dibagi dalam UU tentang Pemda.

Menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:[[296]](#footnote-296)

a. kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah;

b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;

c. kemampuan keuangan daerah;

d. kesediaan sumber daya aparatur; dan

e. pengembangan pola kerja sama (antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga).

Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:[[297]](#footnote-297)

1. otoritas yang memerintah dari suatu unit politik;
2. kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik;
3. aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan; dan
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.[[298]](#footnote-298)

1. **Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU tentang Pemda, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sesuai amanat UU tentang Pemda, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.[[299]](#footnote-299)

Dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Pemda mengatur bahwa yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Kemudian urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU tentang Pemda. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU tentang Pemda, yaitu:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f. sosial.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU tentang Pemda sangat jelas bahwa kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah. Penyediaan RSD merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menjalankan kewenangan tersebut.

UU tentang Pemda telah mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota.[[300]](#footnote-300) Sub urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri dari upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.[[301]](#footnote-301)

Salah satu asas dalam menjalankan pemerintahan yang baik adalah asas tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Pemerintah pusat telah menyerahkan segala urusan pemerintahannya kepada daerah dengan prinsip otonomi daerah. Oleh sebab itu hal ini berlaku pula pada pelayanan kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan konkuren. Oleh sebab itu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai salah satu peran wajib pemerintah daerah. Salah satu bentuk dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendirikan rumah sakit milik pemerintah daerah yang dikenal dengan RSD.

RSD bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik kepada perorangan maupun kelompok. Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pelayanan publik. Dalam Pasal 1 angka 16 UU tentang Pemda bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (8) huruf b UU tentang Pemda bahwa parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan di bidang kesehatan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan indeks pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b UU tentang Pemda.

1. **Rumah Sakit**

Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi rumah sakit adalah integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat.[[302]](#footnote-302) Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat peneliti medik. Menurut *American Hospital Association* dalam Azrul Azwar rumah sakit adalah suatu alat organisasi yang terdiri dari tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.[[303]](#footnote-303)

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU tentang Kesehatan) Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UU tentang Kesehatan, rumah sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Rumah sakit dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan memiliki fungsi dan tugas.

1. Fungsi Rumah Sakit

Rumah sakit menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan/atau subspesialistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) UU tentang Kesehatan. Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan, rumah sakit dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (3). Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.[[304]](#footnote-304)

1. Tugas Rumah Sakit

Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan pelayanan, penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. Dimana untuk menyelenggarakan fungsinya, maka rumah sakit umum menyelenggarakan kegiatan:[[305]](#footnote-305)

1. pelayanan medis;
2. pelayanan dan asuhan keperawatan;
3. pelayanan penunjang medis dan non medis;
4. pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan;
5. pendidikan, penelitian dan pengembangan; dan
6. administrasi umum dan keuangan;
7. **Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan merupakan kegiatan dinamis berupa membantu menyiapkan, menyediakan dan memproses, serta membantu keperluan orang lain. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.[[306]](#footnote-306) Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.[[307]](#footnote-307) Menurut pendapat Hodgetts dan Cascio, ada dua macam jenis pelayanan Kesehatan, yaitu:[[308]](#footnote-308)

* 1. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat *(public health services*) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, dan sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.

b. Pelayanan kedokteran

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (*medical service*) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (*soslo practice)* atau secara bersama-sama dalam satu organisasi *(institution*), tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.

Ada beberapa yang menjadi syarat pokok pelayanan kesehatan, yaitu:[[309]](#footnote-309)

a. tersedia (*available*) dan berkesinambungan (*continuous).* Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit ditemukan;

b. dapat diterima (*acceptable*) dan bersifat wajar *(appropriate*). Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat;

c. mudah dicapai (*accessible)* pelayanan kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja, dan sementara itu tidak ditemukan didaerah pedesaan, bukanlah pelayanan kesehatan yang baik;

d. mudah dijangkau (*affordable*). Keterjangkauan yang dimaksud adalah terutama dari sudut biaya. Pelayanan kesehatan yang mahal hanya mungkin dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja bukanlah kesehatan yang baik; dan

e. bermutu *(quality*). Mutu yang dimaksud disini adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

Definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekitjo Notoatmojo pelayanan kesehatan[[310]](#footnote-310) adalah sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan *prefentif* (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Menurut Level dan Loomba pelayanan kesehatan[[311]](#footnote-311) adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam waktu organisasi dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan.

Adapun yang terkait dengan teori sistem pelayanan kesehatan, meliputi:[[312]](#footnote-312)

a. Input

Merupakan subsistem yang memberikan masukan yang berfungsi untuk sebuah sistem, seperti system pelayanan kesehatan, maka masukan dapat berupa potensi masyarakat, tenaga kesehatan,dan lain-lain.

b. Proses

Suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan untuk menjadikan sebuah hasil yang diharapkan dari sistem tersebut, contoh dalam system pelayanan kesehatan, maka yang dimaksud proses ada berbagai kegiatan dalam pelayanan kesehatan.

c. Output

Hasil yang diperoleh dari sebuah proses, dalam sistem pelayanan kesehatannya hasilnya dapat berupa pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan efisien serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat sheingga pasien cepat sembuh dan sehat optimal.

d. Dampak

Dampak merupakan akibat yang dihasilkan sebuah hasil bari sistem, yang terjadi relatif lama waktunya. Setelah hasil dicapai, sebagaimana dalam sistem pelayanan kesehatan, maka dampaknya akan terlihat.

1. Umpan Balik

Umpan balik merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadikan masukan dan ini terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

f. Lingkungan

Lingkungan disini adalah semua keadaan diluar sistem tetapi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan sebagaimana dalam sistem pelayanan kesehatan, lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan strategis, atau situasi kondisi sosial yang ada di masyarakat.

Menurut Parasuraman aspek-aspek mutu atau kualitas pelayanan adalah: [[313]](#footnote-313)

1. keandalan *(reliability*), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, memuaskan, jujur, aman, tepat waktu, dan ketersediaan;
2. ketanggapan (*responsiveness)*, yaitu keinginan parawat membantu konsumen dan memberikan pelayanan itu dengan tanggap terhadap kebutuhan konsumen, cepat memperhatikan dan mengatasi kebutuhan-kebutuhannya;
3. jaminan (*assurance*)

Mencakup kemampuan, pengetahuan, kesopanan dan sifat yang dimiliki perawat, bebas dari bahaya, resiko, memiliki kompetensi, percaya diri dan menimbulkan keyakinan kebenaran (obyektif);

d. empati atau kepedulian *(emphaty*), meliputi komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan konsumen untuk melayaninya dengan ramah dan menarik, berkomunikasi yang baik dan benar serta bersikap dengan penuh simpati; dan

e. bukti langsung meliputi fasilitas fisik, peralatan pegawai, kebersihan (kesehatan), ruangan baik teratur rapi, berpakaian rapi dan harmonis, penampilan karyawan.

Menurut Leavel & Clark dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memandang pada tingkat pelayanan kesehatan yang akan diberikan, yaitu:[[314]](#footnote-314)

a. *Health Promotion* (Promosi Kesehatan)

Merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Contoh: Kebersihan perorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagainya.

* 1. *Specifik Protection* (Perlindungan Khusus)

Perlindungan khusus adalah masyarakat terlindung dari bahaya atau penyakit penyakit tertentu. Contoh: imunisasi, perlindungan keselamatan kerja.

* 1. *Early Diagnosis and Prompt Treatment*

Sudah mulai timbulnya gejala penyakit dan dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Contoh: survei penyaringan kasus.

* 1. *Disability limitation* (pembatasan cacat)

Pembatasan kecacatan ini dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit yang ditimbulkan. Tingkat ini dilaksanakan pada kasus atau penyakit yang memiliki potensi kecacatan. Bentuk kegiatan yang dapat di lakukan dapat berupa perawatan untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan dan mencegah kematian.

* 1. *Rehabilitation* (rehabilitasi)

Tingkat pelayanan ini di laksanakan setelah pasien didiagnosis sembuh. Sering pada tahap ini dijumpai pada fase pemulihan terhadap kecacatan sebagaimana program latihan-latihan yang diberikan pada pasien. Kemudian memberikan fasilitas agar pasien memiliki keyakinan kembali atau gairah hidup kembali ke masyarakat dan masyarakat mau menerima dengan senang hati karina kesadaran yang dimilikinya.

1. **Analisis**
   * + 1. **Kelebihan dan Kelemahan Kedudukan/Status RSD Berdasarkan No. 32 Tahun 2004 dan UU tentang Pemda**

Pada tahun 1999 pengaturan terkait pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999) diberlakukan selama kurun waktu 2001-2004 dirasakan banyak hal yang kurang sesuai dan kurang bermanfaat baik dalam konteks perkembangan pemerintahan daerah maupun pusat, maka pada tahun 2004 dilakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 kemudian lahirlah UU No. 32 Tahun 2004).[[315]](#footnote-315)

UU No. 32 Tahun 2004 mengatur terkait perangkat daerah. Dalam Pasal 120 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Selanjutnya dalam Pasal 120 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian dalam Pasal 125 UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa LTD merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah yang dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Berdasarkan rumusan Pasal 120 dan Pasal 125 UU No. 32 Tahun 2004 tersebut maka secara tegas RSD sebagai LTD.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 kedudukan RSD merupakan salah satu perangkat daerah yang berbentuk LTD dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala daerah. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap RSD dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian UU No. 32 Tahun 2004 diikuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa RSD yang menerapkan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berkedudukan langsung di bawah kepala daerah yang secara operasional sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Kedudukan RSD sebagai perangkat daerah dan berbentuk LTD tentunya memiliki kelebihan dalam menjalankan operasional rumah sakit. Adapun kelebihan RSD berkedudukan sebagai perangkat daerah, antara lain:[[316]](#footnote-316)

anggaran operasional terpisah dari anggaran dinas kesehatan, alokasi ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan anggaran investasi merupakan anggaran BLUD RSD;

RSD di bawah kepala daerah sehingga memiliki pengelolaan anggaran yang fleksibel dengan bentuk BLUD; dan

Dengan kondisi ini maka RSD tidak lagi memiliki kewajiban menyetor dan dapat menggunakan anggaran langsung sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan maka RSD dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui sejumlah aktifitas misalnya pengadaan barang dan jasa serta pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan RSD dalam pengembangan pelayanan RSD. Kemudian SDM yang dimiliki oleh RSD tidak hanya berasal dari PNS namun juga bisa merekrut pegawai professional non PNS yang dapat dilakukan sebagai bentuk dari fleksibilitas BLUD. Dengan demikian RSD memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan, barang dan SDM.

3. RSD terlibat secara langsung dalam penyusunan instrument hukum daerah, yaitu peraturan gubernur, peraturan walikota/peraturan bupati maupun SK kepala daerah terkait RSD, sehingga mempercepat proses pembuatan peraturan kepala daerah terkait pelaksanaan RSD.

RSD berkedudukan sebagai perangkat daerah dalam bentuk LTD mengalami kemajuan yang signifikan. Fleksibilitas yang dimiliki, membuat RSD terus mengembangkan pelayanan yang diikuti dengan peningkatan kinerja, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan membawa RSD kepada kemandirian yang dicita citakan.

Dengan kondisi seperti ini maka RSD mampu bersaing dengan rumah sakit swasta. Kedudukan RSD sebagai perangkat daerah dalam bentuk LTD telah berhasil merubah predikat buruk RSD. RSD mulai dibandingkan dengan rumah sakit yang dikelola oleh sektor swasta. Keberhasilan ini merupakan pengaruh dari kedudukan dan bentuk kelembagaan LTD dan pengelolaan keuangan BLUD. Adapun kelemahan dari kedudukan RSD sebagai perangkat daerah yaitu Dinkes hanya sebagai pembuat kebijakan dan hubungan Dinkes dengan RSD sebatas koordinasi.

Dalam UU tentang Pemda, kedudukan RSD dikembalikan lagi menjadi salah satu UPT Dinkes sehingga RSD bukan lagi berkedudukan sebagai perangkat daerah. Hal ini tentunya membawa kembali RSD ke dua dekade yang lalu yang mana RSD sebagai UPT memiliki pengalaman yang buruk yang disebabkan dari kelemahan berbentuk UPT Dinkes. Adapun kelemahan kedudukan RSD sebagai UPT Dinkes, antara lain:

* + - 1. anggaran operasional menyatu dengan anggaran Dinkes

Dalam hal ini Dinkes sebagai PA dan RSD sebagai KPA. Dengan demikian Direktur RSD dalam pengadaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan RSD harus meminta persetujuan kepala Dinkes. Hal ini tentunya membutuhkan waktu sementara RSD harus dituntut cepat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk pasien. Contoh, Dalam pemenuhan SDM harus melalui birokrasi yang sangat panjang. Saat ini dari Kementerian Kesehatan mendorong RSD menjadi prioritas program unggulannya yaitu (Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi (KJSU)).

Dalam pengembangan prioritas program unggulan tersebut dibutuhkan SDM yang sesuai. Sementara disatu sisi untuk izin penambahan SDM harus berjenjang. Hal ini tentu tidak bisa dalam waktu yang singkat sehingga pengembangan pelayanan kesehatan disertai dengan penambahan jumlah SDM tidak bisa langsung dilaksanakan oleh RSD.

* + - 1. RSD tidak dilibatkan dalam penyusunan peraturan kepala daerah atau SK kepala daerah.

Hal ini dikarenakan RSD bukan sebagai perangkat daerah. Tentunya dalam penyusunan peraturan kepala daerah atau SK kepala daerah membutuhkan waktu yang lama dikarenakan Dinkes tidak mengetahui kebutuhan prioritas dari RSD dalam peraturan kepala daerah atau Surat Keputusan tersebut.

* + - 1. Anggaran gaji pegawai RSD ada di Dinkes

Terkait hal ini, kendalanya yaitu setiap kali pengurusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan penggajian, RSD meminta terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan. Dalam pengajuan gaji tersebut menemukan kesulitan karena ada birokrasi di dalam Dinas Kesehatan yang harus dilalui itu sehingga pemberian gaji pegawai RSD tidak bisa tepat waktu.

* + - 1. Dinkes sebagai regulator dan operator

Hal ini memberatkan Dinkes yang diberikan tambahan tanggung jawab untuk pengelolaan RSD.

Dikembalikannya kedudukan RSD sebagai UPT Dinkes menyebabkan hilangnya kemandirian dan flekisibilitas RSD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien. Adapun kelebihan kedudukan RSD sebagai UPT Dinkes yaitu Dinkes dapat mengawasi dan mengetahui secara langsung kinerja dari RSD tersebut.

* + - 1. **Implikasi Pasal 209 UU tentang Pemda Terhadap Kedudukan RSD Dalam Susunan Perangkat Daerah**

Dalam implementasi UU No. 32 Tahun 2004 dirasakan kurang efektif dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan maupun ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka pada tanggal 30 September 2014 mengganti UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU tentang Pemda.[[317]](#footnote-317) UU tentang Pemda mengatur terkait perangkat daerah yang diatur dalam Bab VIII. Dalam Pasal 209 ayat (1) UU tentang Pemda mengatur bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan.

Selanjutnya dalam Pasal 209 ayat (2) UU tentang Pemda mengatur bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Jika dilihat dalam Pasal 209 UU tentang Pemda tersebut maka pasal tersebut menghapus nomenklatur LTD yang sebelumnya diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian RSD tidak lagi menjadi salah satu dari perangkat daerah. Hal ini berimpilikasi pada kedudukan RSD dalam susunan perangkat daerah dan tentunya juga berimplikasi pada pelaksanaan operasional RSD dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.

Implikasi terhadap kedudukan RSD yang tidak diatur dalam Pasal 209 UU tentang Pemda mengakibatkan kedudukan RSD tersebut diatur dalam peraturan pelaksana UU tentang Pemda, yaitu PP Nomor 18 Tahun 2016. Dalam Pasal 21 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016, RSD dikembalikan ke bentuk lamanya, yaitu UPT dari Dinkes. Sehingga RSD bukan lagi berkedudukan sebagai perangkat daerah. Namun sampai saat ini Peraturan Presiden sebagai aturan turunan dari PP Nomor 18 Tahun 2016 belum terbit. Belum diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut menimbulkan persepsi beragam dari para pemegang kebijakan ditingkat daerah yang berimplikasi pada timbulnya variasi kelembagaan RSD.

Saat ini terdapat tiga bentuk variasi kelembagaan RSD setelah adanya PP No. 18 Tahun 2016 yaitu[[318]](#footnote-318) *pertama,* sejumlah RSD masih menerapkan bentuk LTD sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden. *Kedua,* sejumlah lainnya telah mengembalikan ke bentuk UPT tetapi implementasinya menunggu Peraturan Presiden dan *ketiga,* sebagian lainnya sudah mengimplementasikan UPT. RSD yang sudah kembali dalam bentuk UPT mengemuka sejumlah permasalahan operasional seperti[[319]](#footnote-319) terjadinya kekosongan obat bahan medis habis pakai, bahan makanan, lambatnya pengadaan sumber daya manusia kesehatan yang dibutuhkan, pemberian gajian kepada pegawai RSD yang harus melalui beberapa tahapan sehingga mengalami keterlambatan waktu penerimaan gaji.

Selanjutnya implikasi terhadap kedudukan RSD sebagai UPT Dinkes yaitu RSD bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes. Hal ini menyebabkan apa yang dilakukan oleh RSD sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan harus meminta persetujuan dari Kepala Dinkes dan melalui beberapa tahapan. Hal ini menjadi permasalahan bagi RSD karena melalui birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang lama sehingga memperlambat terpenuhinya kebutuhan RSD dalam pemberian pelayanan kesehatan. Keadaan seperti ini menjadikan RSD tidak memiliki kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dan cepat. RSD sebagai organisasi padat modal, padat karya, padat profesi, padat teknologi, padat regulasi dan tentu saja padat masalah yang membutuhkan waktu yang cepat untuk mengambil keputusan maupun tindakan agar berjalannya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Perubahan status RSD sebagai UPT membuat tekanan terhadap RSD semakin berat. Perubahan kebijakan pada PP No. 18 Tahun 2016 mengenai kelembagaan RSD berdampak kepada 3 (tiga) tingkatan di rumah sakit, yaitu[[320]](#footnote-320) *immediate outcome* (tingkatan staf manajemen rumah sakit), *intermediate outcome*, dan *ultimate outcome.* Saat ini, dampak pada tingkat *immediate outcome* telah dirasakan. Tingkat kepuasan manajemen rumah sakit mengalami penurunan. Jika saat berbentuk LTD berada pada persen tase dengan rentang antara 65,9% – 100%, maka pada saat berbentuk UPT persentase berada pada rentang antara 0% - 73,3%.[[321]](#footnote-321)

Dalam implementasinya PP No. 18 Tahun 2016 belum mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sehingga diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. 72 Tahun 2019). Dalam Pasal 21 PP No. 72 Tahun 2019 mengatur perubahan kedudukan RSD yaitu RSD sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memberikan pelayanan profesional. RSD sebagai UOBK memiliki otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. RSD sebagai UOBK namun Direktur RSD tetap bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes sebagaimana diatur dalam Pasal 21A ayat (1) PP No. 72 Tahun 2019. Hal ini dapat diartikan bahwa RSD menjadi bagian dari Dinkes dan tidak berdiri sendiri sebagai perangkat daerah[[322]](#footnote-322). Timbulnya nomenklatur UOBK yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2019 menimbulkan beberapa kondisi yang beragam di daerah, antara lain:[[323]](#footnote-323)

1. Pemahaman UOBK disamakan dengan UPT Dinkes. Hal ini terjadi karena:
2. UOBK merupakan nomenklatur baru dan istilah tersebut tidak diatur dalam UU tentang Pemda.
3. Kata ”unit” didepan frasa ”Organisasi Bersifat Khusus” menunjukkan bahwa RSD merupakan bawahan Dinkes.
4. Di daerah selama ini hanya dikenal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau UPT. Dikarenakan RSD bukan OPD maka RSD otomatis dianggap sebagai UPT dan UOBK hanya dianggap ”sifat”.
5. Pengelolaan anggaran UOBK di beberapa daerah tidak terakomodasi dalam sistem informasi keuangan daerah.
6. Anggaran RSD menjadi bagian anggaran Dinkes;
7. Wewenang direktur tidak penuh dalam pengelolaan keuangan, perencanaan dan implementasi keuangan, harus sepersetujuan Kepala Dinkes.
8. Pemahaman laporan keuangan UOBK merupakan bagian dari laporan keuangan Dinkes.
9. Direktur RSD bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes dalam arti pertanggungjawaban sebagai anak buah;dan
10. Dinkes merasa berhak menentukan kebijakan keuangan RSD dan implementasinya.
11. Pengelolaan sumber daya kesehatan harus melalui dinas yang berakibat panjangnya proses administrasi sehingga menghambat pelayanan RSD. Contohnya, pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sehubungan dengan pengembangan pelayanan. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan mendorong prioritas program unggulan RSD adalah KJSU. Dalam mengembangkan hal itu tentu dibutuhkan SDMK yang sesuai. Namun disatu sisi, untuk izin penambahan SDMK harus dilakukan secara berjenjang sehingga tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat.
12. RSD dianggap tidak perlu dilibatkan dalam pembahasan lintas sektor dikarenakan bukan OPD tetapi sebuah UPT Dinkes; seperti pembahasan anggaran, baik di TAPD maupun di Panitia Anggaran DPRD, serta penyusunan SK kepala daerah terkait RSD.

Dalam kondisi tersebut, masing-masing daerah akhirnya mencari jalan keluar sendiri tanpa arah yang jelas. Hal ini mulai mempengaruhi pelayanan RSD di setiap daerah.

* + - 1. **Bentuk Kelembagaan RSD yang Ideal dalam Perangkat Daerah**

Besaran organisasi perangkat daerah baik untuk mengakomodasikan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, dan beban kerja.[[324]](#footnote-324) Selain itu harus mempertimbangkan pula berdasarkan filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga kelembagaan tersebut dalam perangkat daerah mempunyai tujuan yang jelas. Terkait bentuk kelembagaan yang ideal untuk RSD maka dapat dipertimbang secara:

1. Filosofis

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi setiap orang. Oleh sebab itu untuk memenuhi hak tersebut, negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

1. Yuridis

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.[[325]](#footnote-325)

Merujuk pada pengertian fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU tentang Kesehatan, RSD merupakan salah satu dari fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Selanjutnya rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.[[326]](#footnote-326) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memberikan perlindungan kepada rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab.

Selain itu RSD tidak hanya berperan dalam sektor kesehatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, RSD dapat juga berperan dalam sektor pendidikan yang menjadikan RSD sebagai wahana pendidikan utama dalam mendidik calon tenaga kesehatan (medis dan tenaga kesehatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU tentang Kesehatan. Dengan lahirnya UU tentang Kesehatan maka membuka peluang RSD dapat menjadi rumah sakit pendidikan yang menyelenggarakan program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (4) UU tentang Kesehatan.

Selain berfungsi sebagai wahana pendidikan, RSD juga berkontribusi terhadap sejumlah publikasi.[[327]](#footnote-327) Besarnya peran yang dimiliki RSD, menjadikan RSD sebagai bagian penting program *academic health system* yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan disebuah wilayah melalui pendekatan kolaborasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, dan pemerintah daerah).[[328]](#footnote-328)

Jika dilihat dalam UU tentang Pemda Pasal 12 ayat (1) huruf b urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu kesehatan. Oleh sebab itu pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan bermutu serta mampu menjaga keselamatan pasien.

1. Sosiologis

Dengan dihapusnya LTD dalam UU tentang Pemda maka kedudukan RSD dalam perangkat daerah tidak terdapat pengaturannya, sehingga terkait hal ini maka pengaturannya terdapat dalam PP No. 18 Tahun 2016. Dalam PP tersebut kelembagaan RSD kembali menjadi UPT Dinkes. RSD sebagai UPT Dinkes menimbulkan permasalahan, diantaranya[[329]](#footnote-329), *pertama,* otoritas berada dalam kendali Kepala Dinkes yang berarti semakin memanjangnya hirarki pengambilan keputusan dengan birokrasi yang berbelit-belit. *Kedua* terbatasnya kewenangan, tidak adanya kemandirian dan minimnya fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. *Ketiga*. terjadi pembatasan kewenangan dari sebagai PA menjadi KPA sehingga rawan di intervensi oleh PA.

Berdasarkan filosofis, yuridis dan sosiologis maka kedudukan kelembagaan RSD dalam susunan perangkat daerah menjadi salah satu perangkat daerah, bukan menjadi salah satu unit teknis salah satu perangkat daerah. Jika dilihat dari fungsi dan peran RSD serta luasnya cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSD kepada masyarakat dalam satu provinsi atau satu kab/kota tidak dimungkinkan untuk menjadi sebuah UPT. RSD sebuah organisasi besar yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatan masyarakat maka RSD membutuhkan:

1. pengelolaan yang fleksibilitas;
2. memiliki kemudahan berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah untuk menjalin kerjasama.
3. Memiliki otonom dalam penggunaan anggaran sehingga dapat menjalankan kegiatan RBA RSD.
4. Pengadaan barang dan jasa serta SDM kesehatan tidak perlu melalui birokrasi yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama.
5. Dapat bertindak cepat sesuai dengan kebutuhan RSD dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan metamorfosis kelembagaan RSD yaitu, UPT, lalu LTD, dan kembali menjadi UPT, maka sejarah perkembangan RSD tersebut membuktikan, bahwa pelayanan mutu RSD sangat bergantung pada 2 (dua) hal yaitu, bentuk kelembagaan dan pola pengelolaan. Bentuk kelembagaan RSD harus mengarah pada kemandirian pengelolaan. Dari metamorfosis tersebut maka RSD mengalami kemajuan dan melakukan inovasi sehingga dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari segi pelayanan ketika menjadi perangkat daerah dalam bentuk LTD.

**III. Penutup**

1. **Simpulan**

1. Kedudukan/status RSD berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya, antara lain:

a. bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah, dan

b. memiliki kewenangan otonom dalam pengelolaan anggaran, sehingga dapat secara langsung pengadaan barang dan jasa serta sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh RSD dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta mempersingkat birokrasi.

Sedangkan kelemahannya yaitu hubungan RSD dengan Dinkes sebatas koordinasi. Adapun kelemahan kedudukan/status RSD berdasarkan UU tentang Pemda, antara lain:

RSD tidak memiliki otonom dalam pengelolaan anggaran sehingga tidak memiliki fleksibilitas dan kemandirian dalam melaksanakan operasional rumah sakit; dan

tidak dilibatkan dalam penyusunan peraturan kepala daerah dan SK kepala daerah.

Kelebihan dari kedudukan/status RSD berdasarkan UU tentang Pemda yaitu RSD berkedudukan sebagai UPT Dinkes sehingga Dinkes dapat secara langsung mengawasi dan mengetahui kinerja RSD.

Implikasi Pasal 209 UU tentang Pemda terhadap kedudukan RSD dalam perangkat daerah, yaitu dihapusnya nomenklatur LTD dalam Pasal 209 UU tentang Pemda sehingga berimplikasi terhadap kedudukan RSD dalam perangkat daerah. Dalam PP No. 18 Tahun 2016 diatur bahwa RSD kembali menjadi UPT Dinkes yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes. Dengan demikian RSD tidak memiliki otonom dalam penggunaan anggaran dikarenakan harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Dinas Kesehatan, tidak memiliki fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa serta sumber daya manusia, dan memperpanjang birokrasi yang menghambat pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kelembagaan RSD yang ideal dalam perangkat daerah yaitu dalam bentuk LTD dengan dasar pertimbangan, yaitu:

1. Filosofis, berdasarkan pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
2. Yuridis, berdasarkan pada UU tentang Kesehatan yang mengatur terkait tugas dan peran dari RSD yang tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga berperan dalam hal penelitian, pendidikan dan penyelenggara program pendidikan spesialis dan subspesialis. Berdasarkan UU tentang Pemda bahwa kesehatan merupakan salah satu dari urusan wajib pemerintahan dalam pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
3. Sosiologis, RSD dalam bentuk UPT mendapatkan permasalahan diantaranya RSD tidak memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran, birokrasi yang panjang dan lama, tidak memiliki fleksibelitas dalam pengadaan barang dan jasa serta sumber daya manusia. Hal ini menghambat pelayanan kesehatan yang diberikan RSD kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka bentuk ideal kelembagaan RSD adalah LTD atau menjadi salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah sehingga memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran, memperpendek birokrasi dan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan jasa serta sumber daya manusia.

1. **Saran**

Sebagai masukan kepada Pemerintah agar merubah kedudukan RSD dari UPT menjadi salah satu perangkat daerah, mengingat fungsi, peran dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh RSD.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

**Buku**

Anwar. *Program menjaga mutu pelayanan kesehatan*. Jakarta: Bina Putra, Edisi Ketiga, 1996.

Arsada. *Kajian Akademik RSD Sebagai Perangkat Daerah Dalam Rangka RSD Mendukung Keberhasilan Transformasi Kesehatan Dan Implementasi.* Jakarta: Arsada, 2023.

Arsada. *Rumah Sakit Daerah, haruskah Mengalami Kemunduran*. Jakarta: Arsada, 2019.

Astuti, A. R. *Manajemen Organisasi (Teori dan Kasus)*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Azwar, Azrul. *Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1994.

Azwar, Azrul. *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Badan Litbangkes Kemenkes. *Laporan Hasil Survei Kepuasan pada Rumah Sakit Daerah*. Kementerian Kesehatan RI, 2019.

Basabih, Massyitoh. *Buku Putih Rumah Sakit Daerah*. Jakarta: ARSADA, 2017.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2017.

Fithriyyah, M. U. *Dasar - Dasar Teori Organisasi*. Jakarta: *Institue for Research and Development,* 2021.

Haryanti, Amelia. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Banten: Surya Kencana, 2019.

Herlambang, S. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2016.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, 2011.

Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Semarang: Unnisula Press, 2019.

Kusworo. *Manajemen konflik dan perubahan dalam organisasi.* Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2019.

Muninjaya, A. *Manajemen Kesehatan*. Jakarta : EGC, Edisi 2, 2004.

Pohan, Imbalo. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan*: dasar-Dasar Pengertian Dan Penerapan. Jakarta: EGC, 2007.

Pohan, Imbalo. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: dasar-Dasar Pengertian Dan Penerapan*. Jakarta : EGC, 2007.

Rahman, Fathur. *Teori Pemerintahan*. Jakarta: UB Press, 2018.

Soekidjo, Notoatmodjo. *Peran Pelayanan Kesehatan Swasta dalam Menghadapi Masa Krisis.* Jakarta: Suara Pembaruan Daily, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Tim Akademik Rumah Sakit Daerah (RSD), *Buku Kajian Akademik Rumah Sakit Daerah (RSD) Sebagai Perangkat Daerah Dalam Rangka Upaya RSD Mendukung Keberhasilan Transformasi Kesehatan dan Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,* Jakarta: ARSADA, 2023.

**Jurnal**

Aljurida, A.M Azhar. *Restrukturisasi Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Sinjai.* Jurnal Ilmiah Paranata Edu, Vol.1 No.1, Maret 2019.

Muin, Fatkhul. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum,Vol. 8 No.1, Januari-Maret 2014.

Purnawan, Junadi, Yuli Trijayati. *Perubahan Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.* Journal Syntax Idea, Vol. 6 No.05, Mei 2024.

Rauf, Rahyunir. *Hakekat Organisasi Perangkat Daerah*. Jurnal UIR, Vol. III No. 2, Oktober 2017.

Simarmata, Jorawati. *Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan Perangkat Daerah Pasca Reformasi (Sekilas Tanggapan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 04, Desember 2016.

Suparto, S. *Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya*. Jurnal Ilmu Hukum 1–24, 2014.

Trijayati, Yuli, Purnawan Junadi. *Perubahan Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.* Journal Syntax Idea, Vol. 6 No.05, Mei 2024.

Waris*,* Irwan. *Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance.* Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1, Maret 2012.

Yuliantari, I Gusti Ayu Eviani. *Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Di Bidang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Asas Responsibiltas*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.9 No. 2, Desember 2023.

**Laman**

Ali, Eko Mulyani. *Tugas Pokok dan Fungsi*, dimuat dalam <http://rsud-drekomaulanaali.bangka.go.id/page/tugas-pokok-fungsi>, diakses tanggal 27 Agustus 2024.

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP INDUSTRI KRIPTO DI INDONESIA**

**(*IMPLICATIONS OF THE LAW NUMBER 4 OF 2023 ON THE DEVELOPMENT AND STRENGTHENING ECONOMIC SECTOR FOR THE CRYPTO INDUSTRY IN INDONESIA)***

# **Aryani Sinduningrum, S.H., M.H.**

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

\*Korespondensi: aryanisinduningrum@gmail.com

**Abstrak**

Industri kripto berkembang pesat di Indonesia sehingga perlu diundangkannya peraturan setingkat undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang meliputi juga aset keuangan digital termasuk kripto sehingga memiliki implikasi hukum. Terkait permasalahan tersebut, tulisan ini menganalisis: Pertama, bagaimana perbandingan pengaturan industri kripto sebelum dan sesudah diundangkannya UU P2SK serta evaluasinya terhadap kepastian hukum. Kedua, bagaimana tantangan dan peluang dari diundangkannya UU P2SK dalam mendorong inovasi tanpa menghambat pekembangan industri kripto. Ketiga, bagaimana analisis terhadap implikasi hukum diundangkannya UU P2SK terhadap industri kripto di Indonesia. Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis perbandingan pengaturan industri kripto sebelum dan sesudah diundangkannya UU P2SK, menganalisis tantangan dan peluang dari diundangkannya UU P2SK, serta menganalisis implikasi terhadap diundangkannya UU P2SK terhadap industri kripto di Indonesia. Metode penulisan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis. Hasil pembahasan menyimpulkan: Pertama, terdapat perubahan pengaturan industri kripto sesudah diundangkan UU P2SK terkait kewenangan lembaga yang mengatur dan mengawasi industri kripto, pelindungan data pribadi, ketentuan sanksi, dan penyelesaian sengketa. Kedua, terdapat berbagai tantangan yaitu perlu perubahan peraturan, waktu adaptasi, koordinasi, dan peningkatan biaya operasional. Sedangkan peluangnya adalah industri berkembang, peningkatan efektivitas pengaturan dan pengawasan industri, adanya tolak ukur dalam pengembangan produk inovatif. Ketiga, implikasi UU P2SK adalah terjadi peralihan kewenangan dari Bappebti kepada OJK sehingga Peraturan Bappebti mengenai industri kripto tidak berlaku lagi pada Januari 2025 mendatang, terjadi dualisme kedudukan pelanggan aset kripto, perubahan pihak yang dapat melakukan pengajuan pailit, dan penguatan pelindungan hukum dalam industri kripto.

Kata kunci: kripto, investasi, bitcoin, inovasi teknologi sektor keuangan

***Abstract***

*The crypto industry is growing rapidly in Indonesia so it is necessary to enact a law-level regulation, namely Law Number 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law) which also includes digital financial assets including crypto so that it has a legal implication. Related to these issues, this paper analyzes: First, how the regulation of the crypto industry compares before and after the enactment of the P2SK Law and its evaluation of legal certainty. Second, what are the challenges and opportunities of the enactment of the P2SK Law in encouraging innovation without hindering the development of the crypto industry. Third, how to analyze the legal implications of the enactment of the P2SK Law on the crypto industry in Indonesia. This paper aims to analyze the comparison of the regulation of the crypto industry before and after the enactment of the P2SK Law, analyze the challenges and opportunities of the enactment of the P2SK Law, and analyze the implications of the enactment of the P2SK Law for the crypto industry in Indonesia. The writing method uses a doctrinal research method with an analytical approach. The discussion concludes: First, there are changes in the regulation of the crypto industry after the enactment of the P2SK Law related to the authority of institutions that regulate and supervise the crypto industry, personal data protection, sanction provisions, and dispute resolution. Second, there are various challenges, namely the need for regulatory changes, adaptation time, coordination, and increased operational costs. Meanwhile, the opportunities are a growing industry, increasing the effectiveness of industry regulation and supervision, and the existence of benchmarks in the development of innovative products. Third, the implications of the P2SK Law are the transfer of authority from Bappebti to OJK so that the Bappebti Regulation regarding the crypto industry will no longer be valid in January 2025, dualism in the position of crypto asset customers, changes in parties that can file for bankruptcy, and strengthening legal protection in the crypto industry.*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat terutama dengan adanya revolusi industri 4.0 di setiap kehidupan masyarakat. Apalagi saat ini kita sudah memasuki era perkembangan menuju revolusi industri 5.0 yang semakin berkembang. Berbagai teknologi telah semakin maju dan tentu dimanfaatkan juga dalam sektor ekonomi dengan semakin berkembangnya ekonomi digital. Ekonomi digital di Indonesia berperan dalam mendukung kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga dapat menghubungkan berbagai etnis maupun budaya menggunakan media teknologi yang berbasis pada internet serta memanfaatkan juga media sosial.[[330]](#footnote-330) Digitalisasi ekonomi juga telah menghasilkan berbagai perubahan signifikan sebab dengan ekonomi digital setidaknya dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas menurunkan biaya produksi, memfasilitasi kolaborasi, dan menghubungkan berbagai pihak.[[331]](#footnote-331)

Ekonomi digital tidak hanya membuka perubahan yang signifikan namun juga perubahan terhadap cara bisnis yang dilakukan seperti contohnya pada teknologi baru yaitu *blockchain* yang kemudian dikembangkan dalam industri kripto di dunia. Berdasarkan laporan dari *World Economic Forum* pada tahun 2020 bahwa Indonesia menjadi salah satu negara tertinggi di dunia dalam hal pengadopsian *blockchain*.[[332]](#footnote-332) *Blockchain* berperan sebagai salah satu teknologi yang mendasari *bitcoin* namun perlu dipahami bahwa bukan hanya *blockchain* saja sebagai teknologi yang mendasari *bitcoin* sebab masih ada berbagai teknologi kriptografi lainnya yang juga dapat dikombinasikan dengan *blockchain*.[[333]](#footnote-333) *Blockchain* merupakan sebuah teknologi yang dimanfaatkan oleh mata uang digital dan terdiri dari blok yang dapat menampung transaksi serta blok-blok tersebut saling terkait melalui kriptografi sehingga membentuk suatu jaringan dan disebut sebagai buku besar yang bersifat transparansi, terdesentralisasi, menawarkan privasi kepada pengguna, dan tidak dapat dipalsukan.[[334]](#footnote-334) *Blockchain* bersifat sebagai *database* sehingga teknologi ini dapat menghilangkan perantara dalam melakukan sebuah transaksi sehingga transaksi tersebut dapat dilakukan secara langsung.[[335]](#footnote-335) Teknologi *blockchain* kemudian dimanfaatkan dalam industri kripto agar dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem industri kripto.

Di Indonesia, industri kripto lebih dulu berjalan walaupun tanpa adanya regulasi yang mengatur. Pada tahun 2012 lalu, kripto mulai diperdagangkan secara terbatas di kalangan komunitas. Perputaran uang dalam industri kripto ternyata memiliki nilai nominal transaksi yang besar sehingga pemerintah melihat adanya potensi bahwa dana yang ditransaksikan dalam industri kripto ini seharusnya dapat diinvestasikan di dalam negeri dan menjadi pemasukan bagi negara.[[336]](#footnote-336) Dengan adanya kebutuhan hukum di masyarakat maka industri kripto mulai diatur di Indonesia pada tahun 2018 yang menjadi landasan pengaturan industri kripto selanjutnya. Pengaturan dan pengawasan dalam industri kripto di Indonesia kemudian menjadi wewenang dari Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai lembaga di bawah Kementerian Perdagangan. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) kemudian Bappebti mengatur industri kripto dalam beberapa regulasi yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappepti Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Berdasarkan data dari Asosiasi Pedagang Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), nilai transaksi kripto di Indonesia juga tercatat semakin tinggi karena mengalami peningkatan sekitar 73,91% dengan nilai transaksi sepanjang tahun 2023 senilai Rp149,50 triliun.[[337]](#footnote-337) Nilai transaksi kripto semakin meningkat hingga periode Januari-Juni 2024 menjadi senilai Rp301,75 triliun.[[338]](#footnote-338)

Sebelum tahun 2023, belum ada peraturan setingkat undang-undang yang mengatur secara eksplisit mengenai industri kripto di Indonesia sampai akhirnya pada tahun 2023 diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam Bab XVI UU P2SK mengatur mengenai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang meliputi juga terhadap aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Dengan adanya pengaturan baru di dalam UU P2SK tentu memiliki implikasi hukum di dunia industri kripto terutama terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan di industri kripto yang beralih dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan hal di atas, implikasi hukum tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk menentukan arah dan dampak perubahan tersebut baik bagi pelaku industri yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan asosiasi, Pelanggan Aset Kripto selaku konsumen sektor jasa keuangan, dan lembaga yang terkait. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan akan berjalan efektif dengan menjaga stabilitas pasar serta melindungi para pihak yang terkait dalam industri kripto. Penting juga untuk dapat mengevaluasi terkait regulasi yang baru apakah sudah memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak terkait serta mendorong inovasi tanpa menghambat perkembangan industri kripto. Analisis juga perlu dilakukan untuk mengetahui tantangan dan peluang dari diundangkannya UU P2SK terhadap ekosistem industri kripto di Indonesia ke depannya.

1. **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan industri kripto sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta evaluasinya terhadap kepastian hukum?
2. Bagaimana tantangan dan peluang dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam mendorong inovasi tanpa menghambat perkembangan industri kripto di Indonesia?
3. Bagaimana analisis terhadap implikasi hukum diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap industri kripto di Indonesia?
4. **Tujuan**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan penulis diatas, tulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan industri kripto sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta evaluasinya terhadap kepastian hukum.
2. Untuk menganalisis tantangan dan peluang dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Mendorong Inovasi Tanpa Menghambat Perkembangan Industri Kripto di Indonesia.
3. Untuk menganalisis implikasi terhadap diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap industri kripto di Indonesia.
4. **Metode Penulisan**

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan analitis yaitu dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi serta menganalisis data. Penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[[339]](#footnote-339) Tujuan dari studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.[[340]](#footnote-340) Studi kepustakaan tersebut terdiri atas bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan industri kripto khususnya UU P2SK dan Peraturan Bappebti; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan kripto, serta laporan hasil penelitian yang didapat dari kegiatan pengumpulan data berupa wawancara kepada narasumber; dan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1. **Pembahasan**
2. **Kerangka Konsepsional**
3. **Konsep Kripto dalam Investasi Kripto**

Kriptologi berasal dari Bahasa Yunani: *krypt’os* yang artinya tersembunyi dan *l’ogos* yang artinya kata, dengan demikian arti dari kriptologi merupakan kata yang tersembunyi yang bermakna bahwa kriptologi berperan untuk menyembunyikan arti dari kata-kata tertentu dengan tujuan untuk melindungi kerahasiaan dari sebuah informasi. Istilah kriptologi ini digunakan pada kebanyakan aplikasi dengan tujuan untuk keamanan.[[341]](#footnote-341)

Sistem kripto merupakan kumpulan dari berbagai produk kriptografi yang menyediakan layanan-layanan kemanan informasi misalnya dengan enkripsi. Enkripsi merupakan proses mengubah suatu berita dengan sistem kriptografi dengan tujuan untuk merahasiakan sebuah informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan agar tidak dapat memahami isi dari informasi tersebut.[[342]](#footnote-342)

Awal mula industri kripto berkembang karena diperkenalkan oleh seorang tokoh bernama Satoshi Nakamoto. Tokoh ini merupakan seorang tokoh yang misterius karena hingga saat ini identitas asli dari Satoshi Nakamoto masih belum terungkap. Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto merilis sebuah *white paper* berjudul Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer. Selanjutnya, sistem kripto mulai dijalankan untuk pertama kalinya pada tanggal 3 Januari 2009.[[343]](#footnote-343) *Ethereum* kemudian menyusul untuk diperkenalkan pada tahun 2015.

Perkembangan kripto yang sedemikian pesat ternyata mulai digunakan sebagai sebuah mata uang atau alat tukar pembayaran di luar negeri. *Bitcoin* merupakan mata uang yang paling banyak digunakan sebagai alat pembayaran di berbagai *merchant*. Salah satu contohnya di Jepang, *bitcoin* telah diterima sebagai alat pembayaran yang sah sejak 1 April 2017.[[344]](#footnote-344) Hal serupa juga terjadi di beberapa wilayah Eropa karena Uni Eropa memiliki kebijakan sendiri bagi masing-masing negara contohnya seperti Belgia, Inggris, dan Jerman yang memperbolehkan *bitcoin* menjadi alat tukar pembayaran yang sah.[[345]](#footnote-345) Namun kondisi tersebut berbeda dengan di Indonesia karena di Indonesia kripto bukan dianggap sebagai sebuah mata uang melainkan dibatasi hanya sebagai aset digital. Menurut *Financial Action Task Force* (FATF) yang dimaksud dengan aset digital mengacu pada representasi digital apapun yang dapat diperdagangkan, ditransfer, atau digunakan untuk pembayaran.[[346]](#footnote-346) Namun aset digital yang dimaksudkan pada industri kripto di Indonesia tidak dapat digunakan sebagai alat tukar pembayaran karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Hal ini berkaitan dengan sifat dari aset kripto tersebut.

Kripto tidak memiliki *underlying asset* sehingga kripto memiliki sifat yang berbeda jika dibandingkan dengan aset tradisional lainnya. Kripto merupakan aset yang nilainya hanya didasarkan pada kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa aset tersebut bernilai. Tanpa adanya *underlying asset* tentu mengakibatkan kripto memiliki nilai volatilitas yang tinggi. Nilai dari kripto bahkan dapat berubah dengan dinamis dalam jangka waktu yang sangat cepat hingga bahkan berubah dalam hitungan detik. Tingkat volatilitas kripto yang tinggi, mengakibatkan kripto tidak dapat dijadikan sebagai mata uang di Indonesia karena dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas sistem keuangan.

1. **Pihak dalam Industri Kripto**

Industri kripto merupakan ekosistem yang kompleks sehingga terdapat berbagai pihak-pihak terlibat. Pihak-pihak ini mencakup Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto atau Kustodian, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto. Koordinasi dan peran aktif dari masing-masing pihak ini sangat penting agar dapat memastikan integritas dan kepercayaan dalam industri kripto tetap terus terjaga. Berbagai pihak terkait tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Bursa Berjangka Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

Pada tanggal 17 Juli 2023 didirikan bursa berjangka kripto untuk pertama kalinya di Indonesia dibawah PT Bursa Komoditi Nusantara atau yang biasa di kenal dengan sebutan CFX. Secara umum tugas dari Bursa Kripto adalah menerima laporan transaksi secara *realtime,* mengawasi integritas pasar, dan mengembangkan produk aset kripto yang akan diperdagangkan.[[347]](#footnote-347) CFX juga berperan untuk memastikan ekosistem kripto di Indonesia yang inovatif serta aman.[[348]](#footnote-348)

1. Pengelola Tempat Penyimpanan Aset atau Kustodian

Sama halnya dengan bursa kripto, pada tahun 2023 telah didirkan Pengeola Tempat Penyimpanan Aset Kripto atau yang biasa dikenal dengan Kustodian. Perusahaan tersebut Bernama PT Tennet Depository Indonesia yang didirikan pada Juli 2023 dan PT Kustodian Koin Indonesia yang didirikan pada Desember 2023.[[349]](#footnote-349) Kustodian kripto bertugas untuk melakukan penyimpanan, pengelolaan, dan penyimpanan aset digital, atas nama individu, bisnis, atau entitas lain dengan menggunakan penyimpanan kunci pribadi yang aman untuk mengakses dan mengontrol aset dalam jaringan *blockchain*. Aset kripto nantinya akan disimpan dalam *cold wallet* yang dapat diakses secara *offline* atau tanpa perlu menggunakan jaringan internet.[[350]](#footnote-350) Penyimpanan dalam *cold wallet* memiliki kelebihan yaitu lebih aman dan terlindungi dari serangan siber terhadap aset kripto yang disimpan.

1. Lembaga Kliring Berjangka

Pada tahun 2023, ditetapkan juga lembaga kliring berjangka yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia pada Juli 2023 dan PT Kliring Komoditi Indonesia pada 27 Desember 2023.[[351]](#footnote-351) Secara umum tugas dari lembaga kliring berjangka dalam transaksi kripto adalah melakukan pendaftaran transaksi, fungsi novasi atau substitusi, melakukan pengitungan atas keuntungan serta kerugian dari aset kripto, menyelesaikan transaksi kripto, manajemen risiko, serta melaksanakan sistem kliring derivatif.[[352]](#footnote-352)

1. Pedagang Fisik Aset Kripto

Selain Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) juga dikenal Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK). Perbedaan antara CPFAK dengan PFAK adalah CPFAK hanya memperoleh tanda daftar dari Kepala Bappebti dalam menjalankan transaksi terkait aset kripto selama Bursa dan Lembaga Kliring belum terbentuk,[[353]](#footnote-353) sedangkan PFAK merupakan pihak yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti dalam melaksanakan transaksi yang berkaitan dengan kripto dan bertujuan untuk memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto.[[354]](#footnote-354) Saat ini Bursa dan Lembaga Kliring sudah terbentuk, seharusnya semua sudah beralih dari CPFAK menjadi PFAK. Namun faktanya masih banyak yang belum mendapatkan persetujuan penuh dari Bappebti. PFAK yang sudah mendapatkan persetujuan penuh dari Bappebti hingga Bulan Oktober 2024 antara lain adalah Pintu, Pluang, Tokocrypto, Ajaib Kripto, Triv, dan Bitwewe.[[355]](#footnote-355) PFAK dan CPFAK dapat disebut sebagai Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK karena memberikan layanan di sektor jasa keuangan dan industri kripto juga termasuk sektor yang diatur dalam UU P2SK tersebut.

1. Pelanggan Aset Kripto

Pihak yang menggunakan jasa dari *platform* atau layanan yang disediakan oleh PFAK untuk membeli maupun menjual aset kripto disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto.[[356]](#footnote-356) Pelanggan Aset kripto dapat disebut juga sebagai konsumen sektor jasa keuangan sebagaimana merujuk dalam UU P2SK. Hal ini dilandasi karena Pelanggan Aset Kripto mendapatkan pelayanan dari PFAK sebagai PUSK.

1. **Sejarah Regulasi Industri Kripto di Indonesia**

Kripto pertama kali diatur di Indonesia pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Urgensi dari pengaturan kripto di Indonesia adalah untuk menjadikan kripto sebagai aset komoditas dengan potensi komersialnya yang tinggi baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kegunaan seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia industri. Permendag diterbitkan pada 2018 namun secara implementasinya dilaksanakan pada tahun 2019. Kripto juga dipastikan bukan menjadi alat tukar pembayaran dan hanya dibatasi sebagai sebuah komoditas.[[357]](#footnote-357)

Tindak lanjut dari Permendag Nomor 99 Tahun 2018 tersebut adalah Bappebti mengeluarkan Peraturan Bappebti sebagai pedoman dalam penyelenggaraan industri kripto di Indonesia. Peraturan Bappebti tersebut beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhitnya adalah Peraturan Bappebti No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Secara garis besar, pedoman yang diatur oleh Bappebti tersebut mencakup tentang persyaratan dan ketentuan dari Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto, serta sanksi administratif.

Bappebti juga mengatur aset kripto yang dapat diperjualbelikan dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dalam Peraturan Bappebti tersebut terdapat 545 jenis aset kripto yang terdaftar dan dapat diperdagangkan di Indonesia.

Pemerintah juga sudah melakukan pengaturan tentang ketentuan pengenaan pajak dalam ekosistem industri kripto karena pemerintah melihat adanya potensi pemasukan pajak bagi negara dari investasi kripto. Ketentuan terkait pengenaan pajak aset kripto tersebut kemudian dituangkan dalam PMK No. 68/PMK/03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Menindaklanjuti perkembangan teknlogi kripto yang pesat, pada tahun 2023 DPR RI melalui Komisi XI bersama Pemerintah perlu mendorong Kementerian dan/atau Lembaga terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti, serta *stakeholders* lainnya untuk dapat menciptakan ekosistem kripto yang aman, adil, serta menerapkan prinsip pelindungan konsumen, integritas pasar, dan melakukan pencegahan risiko sistemik melalui UU P2SK.[[358]](#footnote-358) Dalam UU P2SK tersebut, aset kripto masuk dalam ruang lingkup ITSK yang kewenangan pengaturan dan pengawasannya beralih kepada OJK.

Sebenarnya terdapat beberapa undang-undang lain selain UU P2SK yang juga bersinggungan dengan industri kripto walaupun tidak secara khusus mengatur mengenai kripto saja. Contohnya dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keterkaitan UU ITE dengan industri kripto adalah dalam industri kripto ini bergantung pada keamanan siber sebab data disimpan dalam *blockchain* yang berbasis pada teknologi informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga turut memberikan pelindungan hukum bagi industri kripto di Indonesia. Pelindungan data pribadi merupakan hal yang esensial sebab dalam pelaksanaan industri kripto melibatkan data pribadi milik Pelanggan Aset Kripto yang perlu di unggah pada *platform* milik PFAK dalam proses *Know Your Customer* (KYC). Data pribadi ini harus terlindungi kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap pelanggaran atau kebocoran data pribadi dapat berisiko pada sanksi hukum serta penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap industri kripto.

1. **Analisis**
2. **Perbandingan Pengaturan Industri Kripto Sebelum dan Sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Evaluasinya terhadap Kepasrian Hukum dalam Mendorong Inovasi tanpa Menghambat Perkembangan Industri Kripto**

Perkembangan industri kripto yang pesat kerap mendesak pengaturan industri kripto yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan setingkat undang-undang melainkan hanya dalam bentuk Peraturan Bappebti. Dengan adanya UU P2SK diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dalam industri kripto serta memperkuat pengawasan dan pengaturan aktivitas kripto. Dengan adanya UU P2SK kemudian mengubah ketentuan yang ada pada industri kripto sebagai berikut.

1. **Kewenangan Lembaga yang Mengatur dan Mengawasi Industri Kripto**

Sejak tahun 2018 hingga saat ini kewenangan pengaturan dan pengawasan industri kripto berada dalam wewenang Kepala Bappebti yang dibawahi oleh Kementerian Perdagangan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka Komoditi), bahwa beberapa wewenang Bappebti antara lain membuat pedoman teknis mengenai mekanisme perdagangan berjangka serta memberikan izin usaha kepada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.[[359]](#footnote-359) Dengan dasar hukum kewenangan tersebut maka setelah aset kripto dikategorikan sebagai aset berjangka maka seluruh peraturan terkait industri kripto tersebut ditetapkan oleh Bappebti dalam bentuk Peraturan Bappebti.

Pada Januari 2023 kemudian diundangkan UU P2SK yang mengubah kewenangan dalam industri kripto yang selama ini berjalan. Dalam Pasal 213 UU P2SK, aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk juga pada aset kripto masuk dalam salah satu ruang lingkup ITSK. Walaupun dalam UU P2SK tidak ada satu pasal pun yang sebenarnya mengkategorikan industri kripto masuk dalam sektor keuangan yang mana sehingga diinterprestasikan bahwa industri kripto merupakan entitas tersendiri yang terpisah dengan sektor keuangan lainnya.

Dalam Pasal 8 UU P2SK yang mengubah UU OJK pada Angka 4 Pasal 6 ayat (1) huruf e UU OJK mengatur bahwa OJK memiliki tugas yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto. Dengan adanya penambahan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap OJK maka terdapat perubahan susunan dewan komisoner OJK sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal 8 UU P2SK yang mengubah UU OJK pada Angka 7 Pasal 10 ayat (4) huruf g UU OJK bahwa susunan dewan komisioner OJK akan ditambahkan dengan seorang Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang merangkap anggota. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 311 UU P2SK di Bab Peralihan bahwa sampai dengan diangkat serta ditetapkannya pejabat Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto maka tugas dan wewenangnya akan dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.

Menindaklanjuti hal tersebut telah dilantik Hasan Fawzi yang merupakan anggota komisioner OJK sebagai Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto pada Agustus 2023.[[360]](#footnote-360) Pengangkatan ini juga merupakan amanat dalam UU P2SK Pasal 335 ayat (2) bahwa Kepala Eksekutif tersebut harus diangkat dan ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) bulan sejak UU P2SK ini diundangkan.

Perubahan kewenangan dalam industri kripto adalah sebuah terobosan baru yang merupakan hasil kesepakatan antara DPR RI dan Pemerintah dalam proeses pembentukan UU P2SK. Dalam tata kelola kelembagaan dalam UU P2SK bertujuan untuk melakukan penguatan dan penataan kelembagaan baik dalam segi pengaturan maupun juga dalam segi pengawasan pada sektor keuangan. Kripto dijadikan sebagai bagian dalam ITSK dengan maksud untuk melakukan penguatan dan pengawasan agar OJK menjadi otoritas yang secara terintegrasi dalam melakukan pengawasan di semua sektor keuangan.[[361]](#footnote-361)

UU P2SK telah memberikan kepastian hukum dalam industri kripto dengan mengatur secara konkrit terkait industri kripto yang belum pernah diatur sebelumnya dalam peraturan setingkat undang-undang. Dengan adanya tujuan yang baik dalam mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan kripto di bawah OJK, maka diharapkan peralihan ini akan diterima oleh seluruh pihak yang terkait dalam industri kripto. Langkah pengaturan industri kripto dalam UU P2SK juga menunjukkan upaya serius dalam melindungi kepentingan publik dan tentunya memastikan stabilitas sektor keuangan. Walaupun dalam transformasinya, tentu membutuhkan adaptasi dan sedikit banyak akan berakibat pada industri kripto yang saat ini sudah berjalan dengan cukup baik.

1. **Pelindungan Data Pribadi**

Permasalahan siber merupakan sebuah ancaman besar dalam pelaksanaan ITSK sebab siber dapat melumpuhkan sektor industri digital dalam waktu yang tidak terduga dan berakibat fatal serta sistemik. Pengamanan siber juga turut dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bekerjasama juga dengan Bappebti dan OJK dalam menyelenggarakan kegiatan seperti webinar terkait pencegahan kejahatan siber sebagai bentuk literasi dan inklusi keuangan. BSSN juga dilibatkan dalam penyusunan peraturan terkait industri kripto. Pelindungan dalam sisi kemanan siber tidak hanya didorong kepada investor atau pelanggan aset kripto saja namun juga ada sisi pelaku usaha industri yaitu PFAK yang dilindungi agar menerapkan standar-standar keamanan. Pada dasarnya pelaku industri kripto sudah memiliki perhatian lebih dengan keamanan sistemnya seperti memenuhi persyaratan ISO serta wajib untuk menerapkan sistem keamanan informasi sebagai salah satu persyaratan bagi Pedagang Fisik Aset Kripto.[[362]](#footnote-362)

Salah satu contoh serangan siber yang pernah terjadi dalam industri kripto adalah kasus yang baru saja menimpa Indodax pada September 2024 yang disebabkan karena adanya indikasi peretasan. Kejadian ini mengakibatkan aplikasi Indodax harus mengalami *maintenance* atau pembaharuan sistem bahkan selama lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Hal ini mengakibatkan Pelanggan Aset Kripto tidak dapat mengakses aset kripto yang disimpan melalui aplikasi Indodax. Ada kekhawatiran bagi Pelanggan Aset Kripto bahwa aset yang tersimpan akan hilang walaupun Indodax telah menjamin bahwa aset kripto yang disimpan akan dijamin dan tetap aman.[[363]](#footnote-363)

Pelindungan data pribadi dalam industri kripto sebenarnya secara umum dilindungi dalam UU PDP. Namun pengaturan dalam UU PDP tersebut belum mengatur secara spesifik dalam lingkup sektor keuangan. Selain UU PDP terdapat juga pengaturan tentang keamanan siber yang juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71 Tahun 2019) dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (Perpres 47 Tahun 2023) yang berfokus pada penguatan keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber.

Dengan diundangkannya UU P2SK, telah memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena sudah diatur terkait pelindungan data secara spesifik terhadap konsumen sektor jasa keuangan yang harus dilindungi oleh PUSK. Penyelenggara ITSK juga wajib untuk menerapkan prinsip pelindungan konsumen serta pelindungan data pribadi.[[364]](#footnote-364) Bahkan PUSK pun juga wajib untuk memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber.[[365]](#footnote-365) Hal Ini merupakan kemajuan bagi kepastian dan pelindungan hukum di Indonesia karena sudah ada UU P2SK yang merupakan peraturan *lex specialist* dalam industri sektor jasa keuangan. Dengan adanya ketentuan ini maka Pelanggan Aset Kripto yang juga termasuk dalam konsumen sektor jasa keuangan memiliki jaminan keamanan data yang lebih kuat dan pelindungan dari potensi serangan siber. PFAK yang termasuk dalam PUSK juga akan lebih dibebankan tanggung jawab dalam menjaga integritas sistem serta melindungi transaksi kripto dari penyalahgunaan ataupun manipulasi data.

1. **Ketentuan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana**

Sanksi dalam industri kripto sebelumnya hanya diatur dalam Peraturan Bappebti sehingga hanya bersifat sanksi administratif saja yang antara lain berupa peringatan tertulis, denda dengan pembayaran sejumlah uang, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran dan pembatalan persetujuan.[[366]](#footnote-366) Dengan diaturnya industri kripto dalam peraturan setingkat undang-undang maka sudah terdapat sanksi pidana serta perluasan sanksi administratif.

Dalam UU P2SK juga mengatur sanksi administratif terkait ITSK namun dengan perluasan sanksi administratif yang antara lain berupa peringatan tertulis; penurunan tingkat kesehatan; penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; denda administratif; pembatalan persetujuan; pembatalan pendaftaran; pemberhentian dan/atau penggantian pengurus; pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor keuangan; dan/atau pencabutan izin.[[367]](#footnote-367)

Dengan diaturnya industri kripto dalam peraturan setingkat undang-undang maka telah diatur ketentuan sanksi pidana terkait ITSK. Dengan diaturnya sanksi pidana dalam UU P2SK maka memberikan kepastian hukum dalam industri kripto karena sanksi pidana lebih kuat dibandingkan dengan sanksi administratif. Pengaturan sanksi pidana tersebut antara lain ditujukan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan ITSK maka akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 1 (satu) miliar dan paling banyak 1 (satu) triliun rupiah.[[368]](#footnote-368) Sanksi pidana lainnya juga diberikan kepada setiap orang yang melanggar mengenai larangan untuk menghimpun dana dari masyarakat, penerbitan surat berharga, penyediaan produk atau sistem jasa pembayaran dan kegiatan lain yang dipersamakan selain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit 1 (satu) miliar rupiah dan paling banyak 1 (satu) triliun rupiah.[[369]](#footnote-369)

Sanksi pidana lainnya juga diberikan kepada PUSK yang melanggar mengenai kewajiban dari PUSK di antaranya adalah tidak memberikan informasi produk yang jelas, tidak memperlakukan konsumen dengan benar, melayani konsumen dengan diskriminatif, tidak menjamin produk atau layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang dijanjikan, tidak menjaga simpanan dana atau aset konsumen, tidak bertanggung-jawab atas kerugian, serta tidak menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi konsumen, maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit 20 (dua puluh) miliar rupiah dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) miliar rupiah.[[370]](#footnote-370)

1. **Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Industri Kripto saat ini diatur dalam Pasal 50 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Ast Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Penyelesaian sengketa diawali dengan musyarawah yang ketentuannya didasarkan pada perjanjian para pihak atau dalam Peraturan Bappebti. Apabila tidak tercapai kata mufakat kemudian diselesaikan dengan sarana yang disediakan oleh Bursa Berjangka, namun jika belum berhasil juga maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau melalui Pengadilan Negeri (PN).[[371]](#footnote-371)

Dalam UU P2SK, mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen sektor keuangan lebih komprehensif sebab dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan mekanisme pengaduan dari konsumen. Apabila tidak berhasil maka dilanjutkan dengan penyampaian aduan kepada OJK atau dapat juga diajukan pada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang disetujui OJK.[[372]](#footnote-372) Dengan adanya UU P2SK yang mengatur kripto dalam ruang lingkup ITSK maka mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen sektor keuangan dapat diselesaikan juga melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK).[[373]](#footnote-373) Namun penyelesaian melalui LAPS-SK dapat dilakukan apabila Pedagang Fisik Aset Kripto sudah terdaftar sebagai anggota dari LAPS-SK terlebih dahulu.

1. **Analisis terhadap Tantangan dan Peluang dari Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Dalam Mendorong Inovasi Tanpa Menghambat Perkembangan Industri Kripto di Indonesia**

Dengan diundangkannya UU P2SK, menimbulkan tantangan baru dan peluang dalam mendorong inovasi di dunia kripto. Tantangan dan peluang tersebut harus diupayakan tanpa menghambat perkembangan industri kripto yang sudah berjalan selama ini. Berbagai tantangan dan peluang tersebut akan dijelasakan sebagai berikut.

1. **Tantangan**

Berbagai tantangan ke depannya adalah pertama, perlu upaya dalam perubahan peraturan terkait industri kripto karena Peraturan Bappebti menjadi tidak berlaku lagi. OJK harus segera menyusun regulasi teknis yang menggantikan peraturan Bappebti dalam penyelenggaraan industri kripto di Indonesia. Penyusunan POJK harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan pengaturan yang diatur dalam UU P2SK.

Kedua, perlu waktu untuk adaptasi terhadap peraturan yang baru tersebut terutama bagi pelaku industri. Salah satunya seperti perubahan proses alur pelaporan yang sudah tidak lagi diajukan oleh PFAK kepada Bappebti melainkan kepada OJK. PFAK perlu memperhatikan ketentuan kepatuhan kegiatan operasional agar terhindar dari sanksi. Selain masalah pelaporan, PFAK juga harus memahami ketentuan sanksi yang saat ini tidak hanya meliputi sanksi administratif saja namun juga sudah terdapat sanksi pidana.

Ketiga, adanya tantangan dalam koordinasi peralihan tugas dan fungsi dari peralihan kewenangan Bappebti kepada OJK. OJK harus berkoordinasi kepada pihak yang terlibat dalam industri kripto seperti bursa berjangka, kustodian, lembaga kliring berjangka, serta asosiasi kripto. OJK juga harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum karena sudah terdapat sanksi pidana yang diatur dalam UU P2SK.

Keempat, adanya potensi peningkatan biaya operasional karena perlu adanya peningkatan infrastruktur di bidang teknologi bagi pelaku industri kripto untuk memastikan keamanan dan kesiapan dari industri untuk mengembangkan inovasinya. Pelaku industri harus memperbaharui sistem internal termasuk perangkat lunak pelaporan dan kebijakan kepatuhan sehingga dapat sesuai dengan yang diatur dalam UU P2SK serta POJK yang akan diatur selanjutnya.

1. **Peluang**

Berbagai peluang dari diundangkannya UU P2SK adalah pertama, industri kripto memiliki peluang untuk semakin berkembang karena sudah memiliki kekuatan hukum. Industri kripto sudah diatur eksistensinya dalam peraturan setingkat undang-undang sehingga industri ini dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih leluasa. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam industri ini juga akan semakin meningkat sehingga mendorong masyarakat untuk dapat berinvestasi melalui kripto. Hal ini juga dilandasi karena ekosistem industri kripto menjadi lebih aman dan terjamin sebab pelindungan data konsumen sektor jasa keuangan juga sudah diatur secara komprehensif dalam UU P2SK.

Kedua, dalam industri kripto lebih berpeluang untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam hal pengaturan dan pengawasan karena terintegrasinya pengawasan industri kripto. Hal ini didasari sebab sektor pengawasan sudah berada dibawah kendali dan pengawasan langsung dari OJK. Semakin ketatnya pengawasan yang terintegrasi, maka diharapkan dapat meningkatkan pula stabilitas dan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam hal ini yaitu konsumen industri kripto agar lebih terjamin.

Ketiga, pelaku industri dapat berpeluang untuk memiliki tolak ukur yang lebih baik dalam mengembangkan produk inovatif dalam batasan yang aman. Pelaku industri yaitu PFAK sudah memiliki panduan yang lebih jelas dan terstruktur untuk mengembangkan produk inovatifnya namun tetap berada dalam kerangka batasan yang aman. Dengan demikian, dapat terciptanya ekosistem industri yang berkembang pesat dan kondusif.

1. **Analisis terhadap Implikasi Hukum Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Industri Kripto di Indonesia**
2. **Peralihan kewenangan pengaturan dan Pengawasan dari Bappebti kepada OJK serta Peraturan Teknis Terkait**

Dengan adanya UU P2SK maka akan beralihnya kewenangan pengawasan dan pengaturan dari Bapebbti kepada OJK pada Januari 2025 mendatang. Hal ini merupakan sebuah dinamika yang besar dalam industri kripto di Indonesia. Bappebti sebagai lembaga yang secara konsep memahami sejak awal perkembangan industri kripto di Indonesia akan kehilangan kewenangan tersebut dan beralih kepada OJK. Padahal industri kripto sedang berada pada kondisi yang baik dan berkembang dengan pesat saat ini. Peralihan kewenangan ini memang memberikan perspektif yang baik karena tujuan dari UU P2SK adalah untuk mengintegrasikan kewenangan kelembagaan pada sektor keuangan, namun perubahan ini tentu membutuhkan adaptasi pada industri kripto baik kepada Pedagang Fisik Aset Kripto maupun kepada Investor selaku Konsumen sektor jasa keuangan. Dengan beralihnya pengaturan dan pengawasan kepada OJK maka implikasinya adalah segala peraturan Bappebti yang sudah disusun secara komprehensif menjadi tidak berlaku dan perlu di susun Peraturan OJK (POJK) maupun Surat Edaran OJK (SEOJK) di industri kripto ini. Penyusunan POJK dan SEOJK tentu memakan waktu yang panjang, sebab hingga saat ini saja Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU P2SK yang seharusnya ditetapkan dalam 6 (enam) bulan sejak UU P2SK diundangkan masih belum ada.[[374]](#footnote-374)

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan, dan Aset Kripto di OJK yaitu Hasan Fawzi bahwa masih terdapat isu yang perlu dirundingkan salah satunya terkait ketentuan perpajakan dalam industri kripto. Asosiasi Pedagang Fisik Aset Kripto (ASPAKRINDO) menyatakan keberatan apabila industri kripto harus dikenakan pajak sebab industri ini masih terus berkembang. Namun pemerintah tetap ingin mengatur pengenaan pajak kepada industri kripto dengan besaran tarif yang akan ditentukan kemudian oleh Direktorat Jenderal Pajak.[[375]](#footnote-375)

Implikasi dari peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan ini maka seluruh Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai pelaksanaan industri kripto akan tidak berlaku lagi terhitung sejak Januari 2025 mendatang. Peraturan Bappebti seharusnya digantikan dengan POJK yang mengatur tentang pelaksanaan industri kripto. Hingga saat ini, OJK baru mengeluarkan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. POJK 3 Tahun 2024 secara garis besar mengatur mengenai *regulatory sandbox* yaitu ruang uji coba atau pengembangan inovasi. Belum ada POJK yang khusus mengatur mengenai industri kripto dibawah pengawasan dari OJK yang menggantikan Peraturan Bappebbti. Dengan demikian masih harus menunggu OJK untuk segera menyusun POJK maupun peraturan turunannya dalam SEOJK.

Ketentuan peralihan merupakan perintah dari undang-undang dan sudah seharusnya dipatuhi walaupun saat ini masih dalam tahap penyusunan peraturan pemerintah oleh OJK dan Bappebti yang dikoordinir oleh Kementerian Hukum dan HAM. Fokus dari pemerintah adalah industri kripto terus berjalan berkesinambungan dengan adanya regulasi baru kedepannya yang melibatkan juga Bappebti dan OJK dalam perumusannya. Dengan demikian, harapannya masa peralihan ini dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan stabilitas pada industri kripto. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut akan ada klausul yang dapat melibatkan Bappebti untuk turut serta dalam koordinasi dalam bentuk *sharing knowledg*e. Harapannya adalah apa yang selama ini sudah diatur oleh Bappebti, sebagai lembaga yang telah terlebih dahulu melakukan pengaturan dan pengawasan dalam industri kripto, akan terus berkesinambungan dan bertumbuh dalam perekonomian kedepannya ketika industri kripto sudah masuk dalam ranah pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Hal-hal yang belum diatur oleh Bappebbti juga diharapkan kedepannya dapat diatur oleh OJK serta semakin dikembangkan lagi.[[376]](#footnote-376)

Namun tentu dengan adanya perubahan peraturan di industri kripto ini akan membutuhkan waktu dalam penyesuaian baik bagi PFAK maupun Pelanggan Aset Kripto untuk memastikan bahwa peraturan yang baru telah dipatuhi dan dijalankan. Perlunya adaptasi terhadap peraturan yang baru akan berdampak terhadap pelaksanaan industri kripto. Dengan adanya peraturan baru tentu perlu waktu dalam sosialisasi dan adaptasi kepada para pihak yang terdampak.

Untuk menghadapi hal tersebut, OJK telah menerbitkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang diterbitkan pada bulan Agustus 2024. Dalam Peta Jalan tersebut bertujuan sebagai dasar dalam memandu pengembangan serta penguatan bagi OJK. Dalam peta jalan tersebut merencanakan pada fase 1 yaitu dalam rentang tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 adalah melakukan pengaturan dalam penguatan fondasi pengaturan dan pengawasan terhadap ITSK, Aset Keuangan Digital, Aset Digital dan Aset Kripto. Pengaturan tersebut diantaranya meliputi perizinan, pengawasan, dan pengembangan; standardisasi dan pedoman; pengembangan dalam *use case* dan *pilot project*; serta pengaturan terhadap inklusi dan literasi dalam rangka melakukan pelindungan terhadap konsumen.[[377]](#footnote-377)

Diharapkan bahwa OJK ini dapat tetap melibatkan Bappebti dalam masa peralihan ini sehingga peralihan dapat berjalan lancar dengan dukungan dari Bappebti yang lebih berpengalaman di bidang ini. Ekosistem industri kripto pun sudah cukup baik dengan adanya sinergi antara regulator maupun Pedagang Fisik Aset Kripto yang diwakili oleh Asosiasi Kripto yaitu Asosiasi Blockchain dan APFAK.

1. **Dualisme kedudukan Pelanggan Aset Kripto sebagai Investor dan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**

Terkait pelindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) namun UU PK mengatur terkait pelindungan konsumen secara umum. Meskipun dalam penjelasannya, UU PK disebutkan sebagai payung hukum yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.[[378]](#footnote-378) Dengan diundangkannya UU P2SK yang secara khusus mengatur pelindungan konsumen sektor keuangan maka ketentuan pelindungan konsumen di industri kripto tidak lagi merujuk pada UU PK melainkan secara *lex specialis* merujuk pada ketentuan pelindungan konsumen dalam UU P2SK.

Dengan adanya UU P2SK tersebut maka Pelanggan Aset Kripto memiliki kondisi dualisme dalam kedudukannya sebab pelanggan aset kripto tidak hanya berkedudukan sebagai investor yang melakukan investasi aset kripto namun juga dalam UU P2SK pelanggan aset kripto dapat dimaknai sebagai konsumen sektor jasa keuangan. Pengertian konsumen sektor jasa keuangan dalam UU P2SK adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUSK.[[379]](#footnote-379) Dalam hal ini, PFAK dapat dikategorikan sebagai PUSK karena termasuk dalam pelaku usaha sektor keuangan lainnya.[[380]](#footnote-380) Memang sebenarnya kripto tidak dikategorikan masuk dalam sektor jasa keuangan yang mana sehingga diinterprestasikan masuk ke dalam kegiatan usaha lainnya.

Padahal di satu sisi, Pelanggan Aset Kripto merupakan investor karena melakukan investasi pada aset kripto. Kedudukan investor dan konsumen memiliki perbedaan mendasar karena konsumen seharusnya dilindungi apabila terjadi kerugian yang menimpanya sedangkan investor sudah dengan sadar memahami risiko dari aset yang diinvestasikan apabila terjadi kerugian. Hal ini juga didasari bahwa dalam melakukan investasi bisa mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian. Dualisme ini yang menjadi kendala bagi Pelanggan Aset Kripto apabila terjadi kerugian yang terjadi karena harus menentukan dasar hukum yang melindungi Pelanggan Aset Kripto baik sebagai konsumen sektor jasa keuangan atau sebagai investor.

Dalam penyelesaian sengketa pelindungan konsumen sebenarnya termasuk dalam ranah sengketa yang dapat diajukan melalui gugataan perwakilan atau *class action*. Dasar hukum *class action* tersebut terdapat didalam UU PK yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran dapat diajukan oleh sekelompok konsumen namun dengan kondisi konsumen tersebut memiliki kepentingan yang sama.[[381]](#footnote-381) Namun dalam industri kripto sudah masuk dalam ranah pelindungan konsumen sektor jasa keuangan sehingga dasar hukum industri kripto seharusnya sudah merujuk pada UU P2SK. Sayangnya dalam UU P2SK tidak mengatur ketentuan mengenai gugatan *class action*. Terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan ini sehingga interprestasi hukum yang dapat digunakan adalah tetap merujuk dalam UU PK yang merupakan payung hukum untuk menyelesaikan sengketa pelindungan konsumen secara umum namun implikasinya adalah gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat apabila diajukan di pengadilan. Hal ini disebabkan karena guguatan dapat berpotensi di tolak dengan dasar hukum bahwa dengan adanya UU P2SK maka kedudukan pelanggan aset kripto memiliki dualisme dengan posisinya yang tidak hanya sebagai konsumen di sektor jasa keuangan namun juga dapat diposisikan sebagai investor yang menginvestasikan aset kriptonya sebagai aset komoditi.

1. **Perubahan Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto**

Ketentuan pengajuan pailit secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Namun hanya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pengajuan pailit terhadap debitor yang merupakan bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik saja sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU.[[382]](#footnote-382) Belum ada ketentuan yang mengatur mengenai permohonan pengajuan pailit terhadap lembaga jasa keuangan dalam industri kripto. Mengingat memang ketentuan mengenai industri kripto ini termasuk baru di Indonesia.

Kemudian dengan diundangkannya UU P2SK mengatur bahwa OJK adalah pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang salah satunya termasuk juga terhadap lembaga jasa keuangan lainnya yang terdaftar serta diawasi oleh OJK.[[383]](#footnote-383) Industri kripto memang tidak masuk dalam jenis industri yang mana sehingga dapat diinterprestasikan bahwa OJK dapat melakukan pengajuan pailit kepada Pedagang Fisik Aset Kripto sebagai lembaga jasa keuangan lainnya. Walaupun saat ini memang industri kripto belum diawasi oleh OJK, namun di tahun 2025 mendatang industri kripto mulai diawasi oleh OJK sehingga ketentuan tersebut akan berlaku.

Pengajuan pailit ini merupakan salah satu ikhtiar dalam melakukan Upaya hukum walaupun jika diimplementasikan maka pengajuan pailit oleh OJK dinilai kurang efektif serta sulit untuk diterapkan. Hal ini didasari karena adanya kekhawatiran untuk menjadi ketergantungan terhadap OJK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam mengajukan permohonan pailit. Adanya potensi bahwa OJK dapat bertindak secara subjektif karena bisa saja OJK tidak melanjutkan proses hukum terkait pengajuan pailit tersebut.

1. **Pelindungan Hukum yang Lebih Kuat dalam Industri Kripto**

Pelindungan hukum menjadi lebih jelas garis antara hitam dan putihnya karena sudah tidak ada ranah yang abu-abu baik bagi Pelanggan Aset Kripto maupun bagi PFAK. Namun secara garis besar pelindungan hukum lebih banyak melindungi bagi Pelanggan Aset Kripto selaku Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dengan adanya pengaturan pelindungan data pribadi memberikan ketegasan bagi PFAK untuk melindungi data pribadi milik konsumen.

Selain itu dengan adanya sanksi pidana yang diatur dalam UU P2SK ini menjadi dua sisi mata uang baik bagi Pelanggan Aset Kripto sebagai Konsumen Sektor Jasa Keuangan maupun bagi PFAK selaku PUSK. Dari perspektif konsumen jasa keuangan sanksi ini merupakan kemajuan dalam bidang pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Disisi lain dengan diaturnya sanksi pidana maka dapat menimbulkan kehati-hatian bagi PFAK dalam menjalankan industri kripto apalagi sanksi pidana penjara yang dicantumkan ternyata sangat berat dengan sanksi denda yang juga sangat besar. Dari perspektif bisnis bagi PFAK tentu dapat menjadi ancaman bagi PFAK untuk menjalankan bisnis di industri kripto ini. Apalagi bisnis kripto tergolong masih baru di Indonesia yaitu berjalan dalam kurun waktu masih dibawah 10 (sepuluh) tahun.

1. **Penutup**
2. **Simpulan**

Berdasarkan analisis dalam bab sebelumnya maka simpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan pengaturan industri kripto sebelum dan sesudah diundangkannya UU P2SK serta evaluasinya terhadap kepastian hukum adalah pertama, terkait kewenangan lembaga yang mengatur dan mengawasi industri kripto yang sebelumnya adalah Bappebti lalu beralih kepada OJK. Kedua, terkait pelindungan data pribadi sebelum adanya UU P2SK diatur secara umum dalam UU PDP, PP 71 Tahun 2019, dan Perpres 47 Tahun 2023, namun setelah adanya UU P2SK maka diatur secara khusus terkait pelindungan data pribadi bagi konsumen di sektor jasa keuangan. Ketiga, terkait sanksi administratif sebelumnya diatur dalam Peraturan Bappebti dan tidak ada sanksi pidana yang khusus mengatur industri kripto dalam ITSK, namun setelah adanya UU P2SK maka terdapat perluasan sanksi administratif dan juga ketentuan sanksi pidana yang ketat terhadap industri ini. Keempat, terkait penyelesaian sengketa sebelumnya diatur tahapannya secara bertingkat melalui prosedur musyawarah dan dilanjutkan menggunakan sarana yang disediakan oleh Bursa Berjangka, kemudian dilanjutkan lagi dengan BAKTI atau melalui PN. Dengan adanya UU P2SK maka sanksi administratif diatur juga secara komprehensif dan sudah terdapat sanksi pidana serta adanya beberapa perubahan salah satunya dikenal adanya lembaga penyelesaian sengketa LAPS-SK.
2. Terdapat berbagai tantangan dan peluang dari diundangkannya UU P2SK dalam mendorong inovasi tanpa menghambat perkembangan industri kripto di Indonesia. Adanya berbagai tantangan yaitu pertama, perlu Upaya perubahan peraturan terkait industri kripto yang menggantikan Peraturan Bappebti; kedua, butuh waktu untuk beradaptasi terkait peraturan yang baru terutama dalam hal pelaporan dan sanksi; ketiga, adanya tantangan koordinasi OJK kepada pihak yang terlibat dalam industri kripto; dan keempat, adanya potensi peningkatan biaya operasional dalam peningkatan infrastruktur di bidang teknologi bagi PFAK. Terdapat juga peluang yaitu pertama, peluang industri kripto semakin berkembang karena di regulasi dalam peraturan setingkat undang-undang sehingga sudah memiliki kekuatan hukum yang lebih; kedua, industri kripto berpeluang meningkatkan efektivitas di bidang pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di bawah OJK; dan ketiga, PFAK memiliki tolak ukur yang lebih baik dalam pengembangan produk inovatif dalam batasn yang aman.
3. Implikasi diundangkannya UU P2SK terhadap industri kripto adalah pertama, adanya peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan dari Bappebti kepada OJK serta penyesuaian peraturan teknis terkait. Kedua, adanya kondisi dualisme kedudukan Pelanggan Aset Kripto sebagai Investor dan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ketiga, adanya perubahan pihak yang dapat mengajukan pailit terhadap PFAK yaitu OJK. Keempat, adanya pelindungan hukum yang lebih kuat dalam industri kripto baik dari segi pelindungan data pribadi dengan adanya pula perluasan sanksi administratif serta sanksi pidana.
4. **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka terdapat saran yang dapat diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam industri kripto harus diimplementasikan dengan baik khususnya terkait pelindungan data pribadi. Selain itu, OJK dan Pemerintah juga sebaiknya menyelenggarakan forum diskusi terkait sosialisasi dan literasi terkait perubahan regulasi kepatuhan dalam industri kripto kepada Asosiasi Kripto dan masyarakat luas khususnya Pelanggan Aset Kripto. Kegiatan seperti Bulan Literasi Kripto juga penting untuk terus dilakukan rutin setiap tahunnya sehingga meningkatkan pengetahuan dan animo masyarakat terhadap industri kripto.
2. PFAK diharapkan dapat melakukan tinjauan terhadap regulasi terkait kepatuhan dalam industri kripto dengan penyesuaian terhadap regulasi yang baru dan memperkuat infrastruktur perusahaan dibidang teknologi.
3. OJK perlu memastikan bahwa peralihan kewenangan dari Bappebti berjalan dengan lancar tanpa menggangu operasional industri kripto. Dengan demikian, diharapakan OJK tetap melibatkan Bappebti dalam melakukan penyusunan regulasi dan sosialisasi. Penting juga untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU P2SK dan diharapkan juga OJK dapat segera menyusun POJK dan SEOJK terkait pelaksanaan industri kripto ke depannya di bawah OJK.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diubah oleh UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka Komoditi Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK/03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

**Buku**

Darmawan, Oscar dan Kamlet, Sintha Rosse. *Tokenisasi Cara Milenial Modern Menghasilkan Uang*. Jakarta: Jasakom, 2020.

Fajrin, Nurul Komara dan Kadly, Eureka Inola. *Revolusi Blockchain Indonesia*. Jakarta: Barifal Mega Fortuna, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan*, Edisi ke-1, Agustus 2024.

Raharjo, Budi. Uang Masa Depan Blockchain, *Bitcoin, Cryptocurrencies. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.* 2022.

Simarmata, Janner, dkk. *Kriptografi Teknik Keamanan Data & Informasi.* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.

Sumarkidjo, dkk. *Jelajah Kriptologi*. Jakarta: Lembaga Sandi Negara, 2014.

Wijaya, Dimaz Anka. *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency, lainnya*, *Bitcoin, Etherum, Monero, NXT, NEM &H Share*. Jakarta: Jasakom, 2018.

**Jurnal/Artikel**

Idat, Ghani Gunawan. *Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional.* Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 38 Juni 2019.

Rivani, Edmira. *Transisi Pengawasan Aset Kripto*. Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Edisi Agustus 2023.

**Bahan yang Tidak Diterbitkan**

Laporan Hasil Penelitian, Wawancara dengan Bapak Dr. Jerry Sambuaga selaku Wakil Menteri Perdagangan di Kementerian Perdagangan RI, wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024 di Jakarta.

Laporan Hasil Penelitian. Wawancara dengan Bapak Dody Frandika Abadi selaku Pemeriksa Bappebti. Wawancara dilaksanakan pada Senin, 29 April 2024 di Jakarta.

Laporan Hasil Penelitian. Wawancara dengan Bapak Mawidiyanto, A.M.S., S.T., selaku Fungsional Sandiman Madya di Badan Siber dan Sandi Negara. Wawancara dilaksanakan pada 8 Mei 2024 di Depok, Jawa Barat.

Laporan Hasil Penelitian. Wawancara dengan dengan Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H., selaku Perancang Undang-Undang Madya di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Wawancara dilaksanakan pada Rabu, 24 April 2024 di Jakarta.

**Laman**

Andhika, Kadek. *OJK Tengah Godok Peraturan Pemerintah Terkait Aset Kripto.* Dimuat dalam <https://www.rri.co.id/keuangan/902411/ojk-tengah-godok-peraturan-pemerintah-terkait-aset-kripto>, diakses tanggal 4 September 2024.

Bappebti, *Kliring Berjangka Aset Kripto*. Dimuat dalam <https://bappebti.go.id/kliring_kripto>, diakses tanggal 9 September 2024.

Bappebti. *Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto*. Dimuat dalam <https://bappebti.go.id/penyimpanan_kripto>, diakses tanggal 9 September 2024.

CFX. *Tentang CFX*. Dimuat dalam <https://www.cfx.co.id/id/tentang/>, diakses tanggal 8 Oktober 2024.

CFX, *Members and Partner*s. Dimuat dalam <https://www.cfx.co.id/members/>, diakses tanggal 15 November 2024.

Damayanti, Aulia. *Bappebti Panggil Indodax Buntut Dugaan Kena Hack*. Dimuat dalam <https://finance.detik.com/fintech/d-7536898/bappebti-panggil-indodax-buntut-dugaan-kena-hack>, diakses tanggal 12 September 2024.

Financial Action Task Force (TAFF). *Virtual Assets*. Dimuat dalam <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html>, diakses tanggal 21 Agustus 2024.

PT Kliring Berjangka Indonesia. *Perdagangan Berjangka Komoditi*. Dimuat dalam <https://www.ptkbi.com/perdagangan-berjangka-komoditi>. Diakses tanggal 9 September 2024.

Puspadini, Mentari. *Transaksi Kripto di RI Capai Rp301,75 T, Naik 354,17%.* Dimuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240725151436-17-557619/transaksi-kripto-di-ri-capai-rp-30175-t-naik-35417#:~:text=Nilai%20transaksi%20kripto%20di%20indonesia,mencatatkan%20Rp%2066%2C44%20triliun>, diakses tanggal 30 Agustus 2024.

Putra, Nuhansa Mikrefin Yoeda. *Ini Tugas Bursa Kripto, Kliring, dan Kustodian Aset Kripto yang Sedang Dibentuk Bappebti.* Dimuat dalam <https://market.bisnis.com/read/20230218/94/1629442/ini-tugas-bursa-kripto-kliring-dan-kustodian-aset-kripto-yang-sedang-dibentuk-bappebti>, diakses tanggal 9 September 2024.

Reku. *Daftar Negara yang Melegalkan Bitcoin, Apakah Kripto Ilegal?.* Dimuat dalam <https://reku.id/campus/daftar-negara-yang-melegalkan-bitcoin>, diakses tanggal 26 Agustus 2024.

Sugiarto, Eddy Cahyono. *Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia’s Economy*. Dimuat dalam <https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy>, diakses tanggal 13 Agustus 2024.

Tennet Depository. *Our Services*. Dimuat dalam <https://tennet.id>, diakses tanggal 9 September 2024.

**PENGATURAN HUNIAN BERIMBANG SEBELUM DAN PASCA DIUNDANGKANNYA**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

***(BALANCED HOUSING ARRANGEMENTS***

***BEFORE AND POST THE PROVISION***

***LAW NUMBER 6 OF 2023 CONCERNING THE DESIGNATION OF GOVERNMENT REGULATIONS IN LIEU OF LAW NUMBER 2 OF 2022 CONCERNING JOB CREATION TO BECOME LAW)***

# **Arif Usman, S.H., M.H.**

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

\*Korespondensi: [arif.usman@dpr.go.id](mailto:arif.usman@dpr.go.id)

**Abstrak**

Hak untuk memiliki rumah tinggal yang layak, merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi khususnya Pasal 28H ayat (1). Pemerintah berupaya mewujudkan hal tersebut melalui konsep hunian berimbang. Permasalahan dalam tulisan ini bagaimana pengaturan hunian berimbang sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan bagaimana arah pengaturan hunian berimbang pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Konsep hunian berimbang dimulai ketika Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan SKB Nomor 648-384 Tahun 1992, 739/KPTS/1992 dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang. Pengaturan mengenai hunian berimbang terus dilakukan penyempurnaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang yang diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013. Dalam prakteknya, penerapan hunian berimbang masih belum efektif, oleh sebab itu pemerintah kembali melakukan penyesuaian dan penambahan ketentuan hunian berimbang melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan adanya penambahan dan perubahan ketentuan yang ada membawa arah baru berkaitan dengan hunian berimbang yang bertujuan untuk memaksimalkan penerapan hunian berimbang.

Kata kunci: hunian berimbang, kawasan permukiman, UU tentang Cipta Kerja.

*Abstract*

*The constitution, particularly clause 28H paragraph (1), guarantees everyone the right to a suitable place to live. The government is attempting to achieve this through the balanced housing idea. The problem in this article is how balanced housing arrangements were made before the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and what direction the balanced housing arrangements will take after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. Using a statutory regulatory approach and a normative legal approach, this essay was put together. The notion of balanced housing emerged with the publication of SKB Numbers 648-384 of 1992, 739/KPTS/1992, and Number 09/KPTS/1992 regarding Guidelines for the Development of Housing and Settlements with Balanced Residential Environment by the Ministers of Home Affairs, Public Works, and State for Public Housing. Rules pertaining to balanced housing. In practice, implementation of balanced housing is still not effective, therefore the government has again adjusted and added provisions for balanced housing through Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and its derivative regulations, namely Government Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Government Regulation Number 14 of 2016 concerning the Implementation of Housing and Residential Areas. With the addition and changes to existing provisions, it brings a new direction related to balanced housing which aims to maximize the implementation of balanced housing.*

*Keywords: balanced housing, residential areas, Law on Job Creation.*

**I. Pendahuluan**

1. **Latar Belakang**

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan negara adalah melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, agar masyarakat Indonesia bisa memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam sebuah lingkungan yang harmonis, sehat, serta aman di seluruh wilayah Indonesia. Karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, maka idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama untuk masyarakat dengan penghasilan yang rendah dan untuk keluarga yang tinggal di daerah yang padat penduduk seperti di kota-kota besar.[[384]](#footnote-384)

Melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan rumah dan memberikan kemudahan kepemilikan rumah bagi masyarakat. Kemudahan perolehan dan ketersediaan rumah merupakan satu kesatuan fungsional dalam tata ruang, kehidupan sosial ekonomi, dan sosial budaya yang menjamin kelestarian lingkungan hidup seirama dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[[385]](#footnote-385)

Pemerintah sudah berupaya mewujudkan tempat tinggal yang layak sejak tahun 1992, melalui konsep bernama hunian berimbang yang diatur melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 Tahun 1992, 739/KPTS/1992, 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang. Salah satu tujuan penting dari keberadaan perumahan hunian berimbang adalah untuk mengembangkan manusia, keluarga, dan komunitas yang sehat dan berkelanjutan.[[386]](#footnote-386)

Pengaturan mengenai hunian berimbang terus dilakukan penyempurnaan demi mewujudkan tempat tinggal layak bagi seluruh rakyat dan sesuai dengan perkembangan zaman seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU tentang PKP), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang yang diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013.

Dalam praktiknya, penerapan hunian berimbang masih belum efektif dan memiliki beberapa hambatan. Kebanyakan lahan di perkotaan yang ada saat ini dikuasai oleh para pengembang besar lain dan peruntukannya bukan untuk hunian serta hal itu juga membuat pengembang yang ingin membangun rumah bersubsidi mengalami kesulitan karena harga lahan di perkotaan yang tidak terjangkau.[[387]](#footnote-387) Oleh sebab itu pemerintah kembali melakukan penyesuaian dan penambahan ketentuan berkaitan dengan hunian berimbang guna memaksimalkan penerapan hunian berimbang. Upaya tersebut dituangkan dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja) beserta aturan turunannya yang berkaitan dengan hunian berimbang yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP No. 12 Tahun 2021).

1. **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus permasalahan dalam tulisan ini adalah:

* 1. Bagaimana pengaturan hunian berimbang sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?
  2. Bagaimana arah pengaturan hunian berimbang pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?

1. **Tujuan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaturan hunian berimbang sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

2. Arah pengaturan hunian berimbang pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

1. **Metode Penulisan**

Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta dengan melakukan pengkajian terhadap sumber sumber kepustakaan yang terdiri dari berbagai literatur terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman dan mengkaji naskah pendukung dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait.[[388]](#footnote-388)Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-*undangan (The Statute Approach)* dan pendekatan konseptual *(Conseptual Approach).[[389]](#footnote-389)* Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif analitis guna memberikan gambaran yang mendalam sekaligus tetap mengemukakan analisis terhadap permasalahan yang akan dikaji.

**II. Pembahasan**

1. **Kerangka Konsepsional**
2. **Pengertian, Bentuk, dan Fungsi Rumah**

Rumah merupakan satu unit bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian sekaligus sarana pembinaan keluarga. Definisi rumah dapat dibagi menjadi dua yaitu rumah sebagai kata benda, di mana rumah sebagai tempat tinggal dan komoditi serta rumah sebagai kata kerja, yaitu sebagai suatu proses aktivitas manusia yang terjadi dalam pembangunan atau selama proses penghuniannya.[[390]](#footnote-390)

Rumah sebagai komoditi dimaksudkan bahwa bangunan rumah beserta sertifikatnya dapat dijadikan suatu jaminan, sehingga komoditi rumah dipengaruhi luas, kelengkapan fasilitas, lokasi dan konstruksi bangunan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, rumah sebagai suatu komoditas yaitu rumah sebagai investasi jangka panjang bagi pemiliknya, karena rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung dan beraktivitas tetapi juga dapat mendatangkan keuntungan untuk disewakan atau diperjualbelikan.[[391]](#footnote-391)

Rumah sebagai suatu proses yaitu rumah sebagai sarana pengembangan bagi diri manusia, memberikan ketentraman hidup dan sebagai pusat kegiatan berbudaya karena peranannya sebagai tempat untuk menampung, menyalurkan, dan mengembangkan usaha serta langkah menuju perbaikan taraf hidup manusia dan berkembang menjadi manusia yang berkepribadian. Untuk itu, dalam pembangunannya diperlukan beberapa pertimbangan terhadap aktivitas yang akan berlangsung di dalam perumahan tersebut termasuk aktivitas manusia yang ada di dalamnya merupakan suatu proses yang terus berkembang.[[392]](#footnote-392)

Rumah dapat dipersepsikan ke dalam tiga bentuk yaitu sebagai wujud fisik, sosial, dan ekonomi. Rumah dalam pengertian wujud fisik dianggap sebagai tempat berlindung dan memenuhi kelengkapan seperti dinding, atap, jendela, listrik, air bersih, tempat pembuangan air kotor, dan kelengkapan lainnya. Sedangkan dalam pengertian sosial dan ekonomi, rumah diperlakukan sebagai media proses sosialisasi. Dalam hal ini, fungsi rumah tidak hanya sebagai tempat berlindung tetapi juga sebagai tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Kondisi ini membuat proses penyediaan rumah berhubungan dengan tiga hal, yaitu kualitas lingkungan fisik, kelengkapan sarana, dan prasarana lingkungan, serta keamanan dan ketentraman lingkungan. Kondisi lingkungan tersebut memengaruhi nilai ekonomi rumah.[[393]](#footnote-393)

Fungsi rumah terbagi menjadi dua, yaitu fungsi secara fisik dan fungsi non-fisik. Fungsi rumah secara fisik digunakan untuk tempat tinggal untuk mendapatkan perlindungan fisik terhadap serangan binatang buas, hujan, dan panas matahari, keganasan alam serta pengamanan diri. Kemudian secara perlahan fungsi rumah berkembang lebih dari sekedar fungsi fisik yaitu memiliki fungsi lain yang di dalamnya terdapat fungsi sosial (non-fisik). Fungsi rumah diantaranya:[[394]](#footnote-394)

1. rumah sebagai pengejawantahan diri, maksudnya adalah rumah sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya atau rumah sebagai penunjang identitas keluarga yang diwujudkan pada kualitas hunian/perlindungan yang diberikan oleh rumah (*the quality of shelter provided by housing*);
2. rumah sebagai wadah keakraban, maksudnya adalah rasa memiliki, kebersamaan, kehangatan, kasih sayang, rasa aman, penunjang kesempatan (*opportunity*) keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi atau fungsi pengembangan keluarga;
3. rumah sebagai tempat untuk menyendiri dan menyepi, maksudnya rumah merupakan tempat untuk melepaskan diri dari dunia luar, tekanan, ketegangan, dan kegiatan atau rutinitas;
4. rumah sebagai akar dan kesinambungan, maksudnya rumah sebagai tempat untuk kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian proses ke masa depan;
5. rumah berfungsi sebagai penunjang rasa aman yang berarti jaminan keamanan atas lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan atau *the form of tenure*;
6. rumah sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari;
7. rumah sebagai pusat jaringan sosial; dan
8. rumah sebagai struktur fisik.
9. **Pengertian Permukiman dan Perumahan**

Dalam UU tentang PKP, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.[[395]](#footnote-395) Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.[[396]](#footnote-396)

Permukiman menurut Hadi Sabari Yunus dalam Wesnawa dapat diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami dengan segala kelengkapannya yang digunakan manusia sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya.[[397]](#footnote-397) Sedangkan Perumahan dikenal dengan istilah *housing*. *Housing* berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.[[398]](#footnote-398)

Menurut Budiharjo perumahan adalah suatu bangunan dimana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupanya, disamping itu rumah juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu diperkenalkan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai wadah kehidupan manusia bukan menyangkut aspek teknis dan fisik saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari penghuninya.[[399]](#footnote-399)

Menurut Sadana perbedaan nyata antara permukiman dan perumahan terletak pada fungsinya. Pada kawasan permukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuniannya. Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya berupa sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya. Fungsi perumahan hanya sebagai tempat tinggal, dan tidak merangkap sebagai tempat mencari nafkah.[[400]](#footnote-400)

Tipologi perumahan dikelompokan menjadi 2, yaitu *Single family housing* dan *Multi family housing*. Single *family housing* terdiri dari *detached* (rumah tunggal), *semi detached* (rumah kopel), *row house* (rumah deret), *maisonette*. *Multi Family Housing* terdiri dari Apartemen, Cluster, Rumah Susun, Rumah Susun Sederhana Sewa. Tipe perumahan berdasarkan ukuran:[[401]](#footnote-401)

* + - * 1. Rumah Tipe Kecil (21-45 m2);
        2. Rumah Tipe Sedang (54-70 m2); dan
        3. Rumah Tipe Besar (>70 m2).

Rumah yang terjangkau secara umum diartikan apabila total pengeluaran untuk membiayai kebutuhan terkait rumah tinggal (sewa/cicilan, ulititas dasar, dan perawatan rumah) kurang dari 30% sampai 35% pendapatan total keluarga. Untuk suatu keluarga (rumah tangga) dengan pendapatan bersih Rp1,8 juta per bulan, pengeluaran untuk perumahan hendaknya kurang dari Rp630 ribu per bulan (<35% *nett income*).

Keterjangkauan dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu kemampuan membayar (*ability to pay*) dan keinginan membayar (*willingness to pay*). Kemampuan membayar (*ability to pay*) sendiri adalah kemampuan seseorang untuk membayar/mencicil rumah berdasarkan pendapatan normal (rata-rata suatu wilayah). Sedangkan keinginan membayar merupakan besaran harga rumah berdasarkan persepsi keluarga. Besaran harga pada tingkat konsumen dilihat dari sudut pandang perbandingan antara besaran nilai barang atau jasa dan pengorbanan yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memperolehnya.

Istilah *affordable housing* di luar negeri sering dikaitkan dengan perumahan sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat dengan keterbatasan tertentu (*physical or mental disability, severe poverty, etc.*), tetapi rumah dalam kategori ini biasanya porsinya sangat kecil dibandingkan dengan total kebutuhan rumah bersubsidi. Hampir semua atau sebagian besar rumah dengan rumah yang tidak bersubsidi (*low cost/affordable housing*) dihuni oleh pekerja (buruh) bergaji rendah atau orang-orang tua yang sudah pensiun.

1. **Masyarakat Berpenghasilan Rendah** **(MBR)**

Pemahaman mengenai MBR menurut beberapa sumber sangat beragam batasannya khususnya terkait kondisi ekonomi dan sosialnya. Terkait kondisi sosial, menurut Lewis dalam Suparlan, MBR adalah kelompok masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang cukup lama sehinggga menghasilkan suatu kebudayaan yang disebut budaya miskin.[[402]](#footnote-402) Selain itu, *Asian Development Bank* (ADB) menyebutkan MBR adalah masyarakat yang tidak memiliki akses dalam proses menentukan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Secara sosial mereka tersingkir dari institusi masyarakat. Secara ekonomi terlihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan rendahnya tingkat penghasilan mereka. Secara budaya dan tata nilai, mereka terperangkap dalam etos kerja yang rendah, pola pikir pendek dan fatalisme. Serta akses mereka terhadap fasilitas lingkungan yang rendah.[[403]](#footnote-403)

Terkait kondisi ekonomi, batasan penghasilan dijabarkan dalam Permenpera No.5/PERMEN/M/2007, MBR merupakan masyarakat dengan penghasilan dibawah Rp 2.500.000,- per bulan. Sedangkan dari Program Nasional Pengembangan Sejuta Rumah 2004 menyebutkan bahwa MBR adalah keluarga/masyarakat yang memiliki penghasilan maksimal Rp 1.500.000,-. Pendapat lain yang menunjukkan kriteria penghasilan MBR adalah Karamoy bahwa MBR adalah mereka yang berpenghasilan Rp 10.000,- - Rp. 30.000 per bulan.[[404]](#footnote-404) Dari penjelasan diatas, batasan terkait pendapatan yang sangat mudah dipahami, bahwa MBR adalah mereka yang memiliki penghasilan dibawah 2,5 juta per bulan.

**B**. **Analisis**

**1**. **Pengaturan Hunian Berimbang Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.**

Konsep hunian berimbang dimulai pada era orde baru, ketika 3 (tiga) menteri terkait yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor 648-384 Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992 dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang (Selanjutnya disingkat SKB 3 (tiga) Menteri). Latar belakang diterbitkannya SKB 3 (tiga) Menteri ini adalah untuk menghindari terciptanya lingkungan perumahan dengan pengelompokan hunian yang dapat mendorong terjadinya kerawanan sosial. Selain itu, disebutkan pula tentang perlunya kesetiakawanan diantara berbagai kelompok masyarakat, sehingga dimungkinkan kelompok masyarakat mampu membantu masyarakat yang kurang mampu.[[405]](#footnote-405)

Di dalam UU tentang PKP telah dicantumkan pengaturan tentang hunian berimbang ini. Secara jelas diamanatkan bahwa hunian berimbang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Selanjutnya, substansi hunian berimbang diatur dalam Pasal 34 sampai Pasal 37 UU tentang PKP. Dalam Pasal 34 UU tentang PKP dinyatakan secara tegas bahwa badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang, sebagai berikut:

Pasal 34

* + 1. Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
    2. Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.
    3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum.
    4. Dalam hal pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang.

Kewajiban hunian berimbang tersebut meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU tentang PKP. Pasal 35 ayat (1) UU tentang PKP menjadi dasar bentuk kewajiban pelaku pembangunan ketika melakukan pembangunan harus terdapat 3 (tiga) jenis rumah tersebut yakni rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.

Sebagai perbandingan komposisi jumlah rumah yang harus di bangun 3:2:1 (tiga berbanding dua berbanding satu). Perbandingan 3:2:1 diartikan 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah. Artinya ketika pelaku pembangunan membangun 1 (satu) rumah mewah maka pelaku pembangunan wajib membangun 2 (dua) rumah menengah dan 3 (tiga) rumah sederhana. Jika pelaku pembangunan hanya membangun 1 (satu) rumah mewah atau 2 (dua) rumah menengah maka pelaku pembangunan harus membangun 3 (tiga) rumah sederhana. Komposisi ini diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang yang kemudian di ubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013. UU tentang PKP, juga memberikan batasan tempat hunian berimbang itu dapat dibangun. Jika pembangunan dilakukan dalam skala besar maka hunian berimbangan harus dibangun dalam satu hamparan. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU tentang PKP Pasal 34 ayat (2) yakni *“Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan”.* Jika pembangunan tidak dilakukan dalam skala besar maka pembangunannya dapat saja dilakukan tidak dalam satu hamparan tapi harus harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU tentang PKP Pasal 36 ayat (1) yakni ”*Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota”.*

Lokasi Hunian Berimbang dalam satu hamparan sekurang-kurangnya menampung 1.000 (seribu) rumah dan untuk lokasi yang tidak dalam satu hamparan sekurangkurangnya menampung 50 (lima puluh) rumah. Dalam hal tidak dalam satu hamparan, maka pembangunan rumah sederhana oleh setiap orang harus dibangun dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (Permenpera No. 7 Tahun 2013), Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum. Pengertian lainnya tentang hunian berimbang juga ditemukan Pasal 1 angka 8 PP No. 12 Tahun 2021 yang mengatur bahwa hunian berimbang adalah perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.

Pengaturan hunian berimbang tersebut dalam kernyatannya tidak dapat berjalan.[[406]](#footnote-406) Setidaknya terdapat beberapa kendala dalam implementasi hunian berimbang, antara lain:[[407]](#footnote-407)

* + - * 1. Pembangunan rumah sederhana dalam skema hunian berimbang terkesan seperti pergeseran tanggungjawab penyediaan perumahan dari pemerintah ke pengembang ketika tidak tersedia insentif dari pemerintah.
        2. Konsep hunian berimbang banyak disalahpahami sebagai hanya sekedar mengurangi *backlog,* padahal filosofi utamanya adalah menjaga keserasian sosial dalam masyarakat melalui hidup berdampingan diantara beragam strata sosial dalam satu lingkungan hunian.
        3. Pasar tanah dilepas ke pasar sehingga harga tanah tidak terkendali.
        4. Penerapan konsep hunian berimbang perlu memperhatikan keberagaman daerah, dan tidak menerapkan skema *‘one fit for all’.*
        5. Konsep hunian berimbang belum terakomodasi/terinternalisasi ke dalam skema Rencana Tata Ruang.
        6. Penerapan suatu kebijakan publik dalam hal ini hunian berimbang membutuhkan dasar pijak yang kuat berupa hasil evaluasi pelaksanaan hunian berimbang.
        7. Penerapan hunian berimbang membutuhkan penegakan hukum *(law enforcement)* yang kuat.

Dari beberapa permasalahan tersebut yang muncul kepermukaan dan terus menguat yakni:[[408]](#footnote-408)

* + - * 1. Kenaikan harga tanah tidak terkendali, karena pasar tanah di lepas ke pasar. Kenaikan harga tanah yang tidak terkendali menyebabkan pengembang terbebani secara finansial, terutama bagi daerah dengan harga tanah yang mahal. Hal ini menyulitkan ketika harus menyiapkan lahan tertentu bagi kebutuhan rumah sederhana yang harganya ditentukan, sementara harga tanahnya sendiri hampir mendekati harga rumah sederhana yang telah ditentukan tersebut.
        2. Tidak tersedianya insentif yang jelas dari pemerintah memberikan kesan bahwa pembangunan rumah sederhana dalam skema hunian berimbang seperti pergeseran tanggung jawab penyedia Perumahan dari pemerintah ke pengembang.

Pada akhirnya konsep hunian berimbang dianggap sebagai bentuk yang menghambat kegiatan usaha dari pelaku pembangunan. Padahal tujuan dari pelaksanaan hunian berimbang ini seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Meleteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang diantaranya:

* + - * 1. Menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana;
        2. Mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
        3. Mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembiayaan pembangunan perumahan;
        4. Menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi; dan
        5. Mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukkan bagi perumahan dan kawasan permukiman.

**2. Pengaturan Hunian Berimbang Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** **Menjadi Undang-Undang.**

Dalam praktiknya, penerapan hunian berimbang masih belum efektif dan memiliki beberapa hambatan. Kebanyakan lahan di perkotaan yang ada saat ini dikuasai oleh para pengembang besar lain dan peruntukannya bukan untuk hunian serta hal itu juga membuat pengembang yang ingin membangun rumah bersubsidi mengalami kesulitan karena harga lahan di perkotaan yang tidak terjangkau.[[409]](#footnote-409) Oleh sebab itu pemerintah kembali melakukan penyesuaian dan penambahan ketentuan berkaitan dengan hunian berimbang guna memaksimalkan penerapan hunian berimbang.

Pemerintah terus melakukan pembaharuan terkait dengan hunian berimbang dengan diundangkannya UU tentang Cipta Kerja beserta aturan turunan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Keberlakuan UU tentang PKP sebagian telah direvisi melalui ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 50 UU tentang Cipta Kerja. Dengan diundangkannya UU tentang Cipta Kerja, terdapat peraturan turunan yang diatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yaitu PP No. 12 Tahun 2021. Melalui PP 12 Tahun 2021, Pemerintah membuka kesempatan bagi pengembang untuk dapat bekerja sama dengan Badan Hukum lain dalam melaksanakan pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang, dimana sebelumnya belum diatur mengenai pengembang dapat bekerja sama dengan Badan Hukum lain dalam pelaksanaan pembangunan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 21A PP No. 12 Tahun 2021.

Pembaharuan kembali dilakukan berkaitan dengan ketentuan mengenai skala pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang yaitu perumahan selain skala besar, dimana sebelumnya hanya dikenal perumahan skala besar. Perumahan skala besar adalah kumpulan Rumah yang terdiri paling sedikit 3000 (tiga ribu) unit rumah, sedangkan perumahan selain skala besar merupakan kumpulan rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit rumah sampai dengan 3000 (tiga ribu) unit rumah sebagaimana diatur dalam pasal 21B PP No. 12 Tahun 2021. Syarat perbandingan jumlah rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana dalam pembangunan perumahan selain skala besar untuk memenuhi hunian berimbang.

Patokan mengenai kategori rumah sederhana, rumah menengah, dan mewah juga dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Rumah mewah merupakan rumah yang harga jualnya di atas lima belas kali harga rumah umum yang ditetapkan pemerintah pusat. Rumah menengah merupakan rumah yang harga jualnya paling sedikit tiga kali sampai dengan lima belas kali harga jual rumah umum yang ditetapkan pemerintah pusat. Sedangkan, rumah sederhana merupakan rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini diatur dalam pasal Pasal 21E PP No. 12 Tahun 2021.

Ketentuan Hunian berimbang melalui diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya lebih mendapatkan perhatian dikarenakan banyaknya ketentuan berkaitan dengan hunian berimbang yang diatur secara detail dan mendalam. Rumah sederhana pun diatur lebih detail yang kini dibagi menjadi rumah sederhana subsidi dan sederhana rumah non subsidi. [[410]](#footnote-410)Formasi daripada rumah sendiri pun diatur secara lengkap berdasarkan persentase yang diatur dalam Pasal 21F PP No. 12 Tahun 2021.

Alasan dilakukan perubahan maupun penambahan ketentuan mengenai hunian berimbang adalah kurang berjalannya penerapan hunian berimbang berdasarkan evaluasi pemerintah. Salah satu faktor yang menghambat penerapan hunian, sulitnya memperoleh tanah dan harga tanah yang mahal.[[411]](#footnote-411) Dengan keterbatasan lahan dan dan harga tanah yang melambung tinggi terutama di daerah perkotaan, pembangunan perumahan yang harus dilakukan dalam satu hamparan atau dalam satu wilayah kota/kabupaten sangat sulit sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2011 juncto Pasal 21D PP No. 12 Tahun 2021 juncto Pasal 5 Permenpera No. 10 Tahun 2012 menjadi sulit dilaksanakan. Maka dari itu pemerintah melakukan penyesuaian berkaitan dengan hal tersebut dengan memberikan jalan keluar bagi pengembang berkaitan dengan terbatasnya lahan dan harga lahan yang tinggi, yaitu melalui pembayaran dana konversi untuk pembangunan rumah umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2011 juncto Pasal 21G PP No. 12 Tahun 2021. Konversi tersebut dapat dilakukan berdasarkan jumlah unit rumah atau jumlah harga jual rumah sederhana yang harus dibangun pada hamparan yang sama.[[412]](#footnote-412)

Dana konversi ini nantinya disetor ke Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). BP3 adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembentukan BP3 besera pengaturannya dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Entitas baru ini nantinya yang akan mengelola dan memanfaatkan dana konversi guna kepentingan penyediaan hunian Dana tersebut nantinya akan ditujukan untuk penyediaan tanah, pembangunan rumah sederhana dan rumah susun umum, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, pengelolaan perumahan, dan investasi.[[413]](#footnote-413) Besaran dana konversi yang harus dibayarkan didasarkan pada beberapa pertimbangan yang diatur dalam Pasal 21G ayat (3) PP No. 12 Tahun 2021 yaitu, pertama, jumlah kewajiban rumah sederhana. Kedua, harga jual rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, persentase harga pokok produksi terhadap harga jual. Keempat, faktor pengali dengan memperhitungkan nilai uang atas waktu *(time value of money)* yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. Kelima, dana imbal jasa pengelolaan yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan terarah melalui Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya, tentunya membawa manfaat yang berguna terutama bagi MBR. Berikut tabel perbandingan UU tentang PKP dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja terkait pengaturan hunian berimbang

|  |  |
| --- | --- |
| **Undang-Undang tentang PKP** | **Undang-Undang tentang Cipta Kerja** |
| 1. Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten/kota. 2. Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. 3. Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah. 4. Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama. | * + 1. Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam 1 (satu) hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota.     2. Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat dikonversi dalam:        - 1. bentuk rumah susun umum yang dibangun dalam satu hamparan yang sama; atau          2. bentuk dana untuk pembangunan rumah umum.     3. Pengelolaan dana dari konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.     4. Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.     5. Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.     6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan perumahan dengan hunian berimbang diatur dalam Peraturan Pemerintah. |

Langkah penataan regulasi ini dapat menjadi solusi yang efektif, dalil keterbatasan tanah dapat dijawab dengan konversi dana yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini badan percepatan penyelenggaraan perumahan (BP3). Pembentukan badan ini juga dinilai tepat, mengingat “badan pelaksana“ yang menjadi amanat Undang-Undang belum juga terbentuk. BP3 dengan tugas yang diatur dalam Perpu 2/2022 tentang Cipta Kerja dapat menggantikan peran badan pelaksana. Artinya BP3 bukan hanya mengelola dana konvensi akan tetapi juga memiliki tugas memenuhi rumah umum untuk MBR. Bisa dikatakan BP3 semacam *public housing* ala Indonesia.

BP3 diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman “Pengelolaan dana dari konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan” dan Pasal 51 Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Rumah Susun “Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan”.

BAB IXA

BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Pasal ll7A

* + 1. Untuk mewujudkan penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi MBR, Pemerintah Pusat membentuk badan percepatan penyelenggaraan perumahan.
    2. Pembentukan badan percepatan penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
       - 1. mempercepat penyediaan rumah umum;
         2. menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR;
         3. menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum; dan
         4. melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah umum dan rumah khusus.
    3. Badan percepatan penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi mempercepat penyelenggaraan perurmahan dan kawasan permukiman.
    4. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan percepatan penyelenggaraan perumahan bertugas:
       - 1. melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan;
         2. melaksanakan pengelolaan dana konversi dan Pembangunan rumah sederhana serta rumah susun umum;
         3. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian;
         4. melaksanakan penyediaan tanah bagi perumahan;
         5. melaksanakan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan;
         6. melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah;
         7. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
         8. melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.

Saat ini aturan turunan dari BP3 telah diundangkan yakni melalui

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. BP3 mempunyai fungsi mempercepat Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan fungsi tersebut BP3 bertugas:[[414]](#footnote-414)

melakukan upaya percepatan pembangunan Perumahan;

* 1. melaksanakan pengelolaan Dana Konversi dan pembangunan Rumah sederhana serta Rumah Susun Umum;
  2. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian;
  3. melaksanakan penyediaan tanah bagi Perumahan;
  4. melaksanakan pengelolaan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan;
  5. melaksanakan pengalihan kepemilikan Rumah Umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah;
  6. menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
  7. melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang Rumah Susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri.

Sejak diundangkannya Peraturan Presiden tentang BP3 sampai saat ini belum ditetapkan ketua BP3, mengingat strategisnya posisi BP3 dalam Pembangunan hunian berimbang sudah seharusnya pemerintah segera menetapkan ketua dan struktur organisasi BP3.

1. **Penutup**
2. **Simpulan**

Berdasarkan analisis dalam bab sebelumnya maka simpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

* + - 1. Hak atas tempat tinggal yang layak adalah hak asasi manusia, sebagai bagian dari hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan aman. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi amanat bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mewujudkan hal tersebut melalui konsep hunian berimbang. Konsep hunian berimbang sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja dimulai pada era orde baru, ketika 3 (tiga) menteri terkait yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor 648-384 Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992 dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang. Pengaturan mengenai hunian berimbang terus dilakukan penyempurnaan demi mewujudkan tempat tinggal layak bagi seluruh rakyat seperti substansi hunian berimbang yang diatur dalam Pasal 34 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang yang diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013.
      2. Dengan diundangkannya UU tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, pengaturan mengenai hunian berimbang lebih mendapatkan perhatian khusus dimana ketentuan mengenai hunian berimbang lebih diatur secara jelas dan rinci. Ketentuan hunian berimbang baik yang diubah maupun yang baru diatur melalui UU tentang Cipta Kerja beserta aturan turunanya meliputi, *Pertama,* kesempatan bagi pengembang untuk dapat bekerja sama dengan Badan Hukum lain untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan. *Kedua*, mengenai skala pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. *Ketiga*, ketentuan baru mengenai perbandingan jumlah rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana dalam pembangunan selain skala besar. *Keempat,* mengenai pengelompokkan rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana berdasarkan harga jual. *Kelima*, mengenai pembagian rumah sederhana menjadi rumah sederhana subsidi dan rumah sederhana non-subsidi beserta formasinya. *Keenam*, mengenai konversi bagi pengembang yang tidak dapat melaksanakan pembangunan rumah sederhana. Berdasarkan ketentuan mengenai hunian berimbang baik yang dirubah maupun yang baru diatur melalui UU tentang beserta aturan turunannya, dapat dilihat bahwa arah regulasi hunian berimbang semakin diatur secara jelas dan lebih rinci sehingga kepastian hukum mengenai hunian berimbang makin kuat dan harus dipenuhi oleh seluruh pihak terutama pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan.

1. **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka terdapat saran yang dapat diajukan yaitu sebagai berikut: Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah diharapkan segera menerbitkan aturan turunannya yaitu berupa PP baru atau merevisi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang.

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 Tahun 1992, 739/KPTS/1992, 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang.

**Buku**

Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 8, 2016.

Budiharjo, Eko. *Sejumlah masalah permukiman kota*, Bandung: Alumni, 1998.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Sadana, Agus S. *Perencanaan Kawasan Permukiman*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Santoso, Urip. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.

Wesnawa. *Geografi Permukiman*, Yoyakarta: Graha Ilmu, 2015.

**Jurnal**

ADB, *ADB's Rural Credit Assistance in Bangladesh, Peoples Republic of China, Indonesia, Nepal, Philippines, Sri Lanka and Thailand,* dimuat dalam <https://www.adb.org/documents/adbs-rural-credit-assistance-bangladesh-peoples-republic-china-indonesia-nepal>, diakses tanggal 31 Agustus 2024.

Hanurawan, Fattah. *Perspektif Psikologi Sosial Terhadap Penerapan Kebijakan Pembangunan Perumahan Berimbang Untuk Pengembangan Individu, Keluarga, Dan Komunitas Yang Sehat Dan Berkelanjutan*, Universitas Negeri Malang: Jurnal Sains Psikologi, Volume 5 Nomor (1), Juni 2015.

Hermawan, Muhammad Ilham dan Meutia, Febri. *Pemenuhan Hunian Berimbang Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,* Gronwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Volume 2 Nomor 1, Januari 2023.

Indrianingrum, Lulut. *Rencana Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang),* UNNES: Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, Nomor 1 Volume 18 –Januari 2016.

Kurniawan, Kevin Hoo dan Saly, Jeane Neltje. *Arah Regulasi Hunian Berimbang Setelah Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 09, September 2022.

Maharani, Sri. *Pembangunan Perumahan Dengan Hunian Berimbang Bagi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Jurnal Penelitian Hukum: Legalitas, Volume 9 Nomor 1, Mei - Oktober 2015.

Probondaru, Ignatius Pradipa. *Problematika Pelaksanaan Hunian Berimbang di Indonesia*, E-Journal: Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol 1 No. 1, Februari 2018.

Soeranto, Dwityo Akoro, Pangihutan Marpaung, dan Chandra R.P. Situmorang. *Dinamika Pengembangan Perumahan Skala Besar*, Jakarta: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020.

Sunarti. *Buku Ajar Perumahan dan Permukiman*. Semarang: Undip Press, 2019.

**Harian/Surat Kabar**

Mungkasa*,* Oswar. *Catatan Kritis tentang Hunian Berimbang*, HUDmagz, Senin Edisi 4 -2013.

**Laman**

Fauzian, Rizkie. *“Ketersediaan Lahan Jadi Tantangan Sektor Perumahan*”, dimuat dalam https://www.medcom.id/properti/news-properti/zNA3WP6k-ketersediaan-lahan-jadi-tantangan-sektor-perumahan, diakses tanggal 31 Agustus 2024.

Guru Mahendra, Adi. *Telisik Kalkulasi Dana Konversi Kewajiban Pengembang,* dimuat dalam <https://www.industriproperti.com/nasional/telisik-kalkulasi-dana-konversi-kewajiban-pengembang/>, diakses tanggal 31 Agustus 2024.

**MATERI MUATAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI HUKUM ACARA PERDATA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG HUKUM ACARA PERDATA**

***(SUBJECT MATTER OF THE SUPREME COURT REGULATION AND SUPREME COURT CIRCULAR REGARDING CIVIL PROCEDURE LAW IN THE CIVIL PROCEDURE BILL*)**

# **Riyani Shelawati**

Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda

Pusat Perancangan Undang – Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

\*Korespondensi: riyani.shelawati@gmail.com

**Abstrak**

Pembentukan RUU Hukum Acara Perdata diperlukan untuk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Penataan kembali materi hukum acara perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan melalui RUU Hukum Acara Perdata dilakukan untuk mewujudkan kodifikasi hukum acara perdata yang bersifat unifikasi nasional sebagai sebuah sistem hukum nasional. Adapun rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, bagaimana lingkup pengaturan materi muatan Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata dalam RUU Hukum Acara Perdata? *Kedua*, bagaimana status hukum dari Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata setelah diundangkannya RUU Hukum Acara Perdata? Tujuan tulisan ini untuk mengetahui lingkup pengaturan materi muatan Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata dalam RUU Hukum Acara Perdata serta mengetahui status hukum dari Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata setelah diundangkannya RUU Hukum Acara Perdata. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan pengkajian Perma dan SEMA terkait hukum acara perdata serta RUU Hukum Acara Perdata. Hasil analisis menunjukkan masih ada beberapa materi muatan Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata yang belum dimasukkan menjadi materi muatan RUU Hukum Acara Perdata. Di dalam RUU Hukum Acara Perdata masih terdapat ketidakkonsistenan penggunaan istilah untuk satu istilah dengan maksud yang sama. Ada juga istilah dalam RUU Hukum Acara Perdata yang masih belum menggunakan istilah terkini sesuai dengan Perma yang berlaku saat ini. Terkait status hukum dari Perma dan SEMA setelah diundangkannya RUU Hukum Acara Perdata ditentukan dari materi muatan yang ada di dalam Perma, SEMA, dan UU Hukum Acara Perdata.

Kata kunci: peraturan mahkamah agung, surat edaran mahkamah agung, hukum acara perdata

***Abstract***

*The Indonesian Civil Procedure Law must be formed to ensure legal certainty, justice, and benefits for all parties involves. The Civil Procedure Law reorganizes civil procedural law material, dispersed across various regulations, to achieve a national unification and codification of civil procedural law as a component of the national legal system. This paper addresses the following issues: First, how does the Civil Procedure Bill regulate the material content of Supreme Court Regulations (Perma) and Supreme Court Circulars (SEMA) related to civil procedure? Second, what is the legal status of Perma and SEMA regarding civil procedure after the enactment of the Civil Procedure Bill? The aim of this paper is to comprehend the extent to which the Civil Procedure Bill regulates the material content of Perma and SEMA in relation to civil procedure, and to ascertain the legal standing of Perma and SEMA in relation to civil procedure following the enactment of the Civil Procedure Bill. This writing employs a normative juridical approach, which involves examining Perma and SEMA related to civil procedure, as well as the Civil Procedure Bill. The analysis results show that the Civil Procedure Bill still excludes several civil procedure-related materials from Perma and SEMA. The Civil Procedure Bill still contains inconsistencies in the use of terms with the same meaning. Additionally, there are terms in the Civil Procedure Bill that have not yet adopted the latest terminology in accordance with the currently applicable Perma. The material content presents in Perma, SEMA, and the Law on Civil Procedure determines the legal status of Perma and SEMA after the enactment of the Civil Procedure Bill.*

*Keywords: supreme court regulations, supreme court circulars, civil procedure law*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (RUU Haper) yang mulai dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak diterbitkannya Surat Presiden oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2021 diprediksi tidak akan selesai di akhir periode masa keanggotaan DPR tahun 2019 - 2024 ini. Pada rapat paripurna DPR tanggal 20 Agustus 2024, dalam agenda persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU Haper, Rachmat Gobel sebagai pimpinan rapat paripurna meminta kepada Komisi III untuk mengajukan usulan RUU Haper sebagai usulan rancangan undang-undang operan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan kepada Badan Legislasi.[[415]](#footnote-415) Hal ini mengingat DPR sudah memasuki masa sidang terakhir di periode keanggotaan 2019-2024. Pasal 110 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang disebutkan bahwa anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan RUU yang telah masuk dalam pembicaraan tingkat I dan memiliki Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan RUU operan dalam Prolegnas prioritas tahunan.

Dalam Penjelasan Presiden atas RUU Haper yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah, dinyatakan bahwa pembaharuan hukum acara perdata diperlukan dalam rangka usaha peningkatan pembinaan hukum nasional untuk pembaharuan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. RUU Haper diarahkan untuk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak, melindungi hak asasi manusia, mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak asasi dan kewajiban. Disampaikan pula bahwa peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[416]](#footnote-416)

Penataan kembali materi hukum acara perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan melalui RUU Haper dilakukan untuk mewujudkan kodifikasi hukum acara perdata yang bersifat unifikasi nasional sebagai sebuah sistem hukum nasional. Selain penataan kembali materi hukum acara perdata yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, RUU Haper juga sekaligus menginventarisasi substansi yang terkait dengan hukum acara perdata untuk memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat yaitu dengan menambah norma maupun mempertegas kembali pengaturan yang sudah ada.[[417]](#footnote-417)

Salah satu peraturan perundang-undangan yang memuat materi hukum acara perdata adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU Mahkamah Agung), “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum dicukup diatur dalam Undang-Undang ini.” Ketentuan tersebut menjadi dasar pembentukan Perma. Penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung memberikan beberapa batasan, di antaranya bahwa materi Perma adalah materi yang belum diatur dalam Undang-Undang dan ruang lingkup materi pengaturan Perma sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara. Perma yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri dan melampaui pengaturan hak dan kewajiban warga negara. Selain Perma, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). SEMA dapat digolongkan ke dalam aturan kebijakan. SEMA biasanya berisi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Perma sebagai peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang ini merupakan “*delegated legislations*”. Disebut demikan karena kewenangan untuk menentukan hal tersebut berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Kewenangan pembentukan Perma yang diberikan oleh UU Mahkamah Agung tersebut dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan terobosan hukum untuk mengisi kekosongan hukum acara. Keberadaan Perma dalam mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara perdata memberikan kepastian hukum bagi hakim serta para pihak dalam proses beracara di pengadilan. Perma bagi hakim merupakan pedoman dalam menjalankan hukum acara di persidangan. Dengan adanya pedoman tersebut maka akan terjadi keseragaman dalam penerapan hukum acara oleh para hakim dalam persidangan.

Mengingat substansi yang diatur dalam Perma dan SEMA ini banyak juga yang berisikan hukum formil maka pada akhirnya Perma dan SEMA lebih sering dijadikan pedoman dan dasar hukum bagi lembaga peradilan dalam melaksanakan hukum acara perdata. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) mengatur bahwa Perma merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hal ini mengingat pembuatan Perma diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU Mahkamah Agung. Dengan ditemukan beberapa substansi Perma dan SEMA yang berisikan hukum acara perdata perlu dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum acara perdata untuk “menaikkan” ketentuan dalam keduanya ke dalam pembaharuan hukum acara perdata ke depannya. Dalam tabel berikut terdapat beberapa Perma dan SEMA yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai hukum acara perdata:

| **No.** | **Perma dan SEMA** | **Materi** |
| --- | --- | --- |
|  | Perma No. 1 Tahun 2000 | Lembaga Paksa Badan |
|  | SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 | Putusan Serta Merta |
|  | Perma No. 1 Tahun 2002 | Acara Gugatan Perwakilan Kelompok |
|  | Perma No. 2 Tahun 2015 *juncto* Perma No. 4 Tahun 2019 | Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana |
|  | Perma No. 1 Tahun 2016 | Prosedur Mediasi di Pengadilan |
|  | Perma No. 1 Tahun 2019 *juncto* Perma No. 7 Tahun 2022 | Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik |

Ketujuh Perma dan SEMA yang berisikan materi hukum acara perdata tersebut (untuk selanjutnya disebut “Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata”) dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan menjadi materi muatan atau substansi dalam pembaharuan hukum acara perdata dalam RUU Haper.

1. **Permasalahan**

Dalam tulisan ini, permasalahan yang menjadi pokok bahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana lingkup pengaturan materi muatan Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata dalam RUU Haper?
2. Bagaimana status hukum dari Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata setelah diundangkannya RUU Haper?
3. **Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Lingkup pengaturan materi muatan Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata dalam RUU Haper.
2. Status hukum dari Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata setelah diundangkannya RUU Haper.
3. **Metode Penulisan**

Penyusunan tulisan ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan pengkajian sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.[[418]](#footnote-418) Kajian bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan hukum acara perdata, khususnya Perma dan SEMA. Kajian bahan hukum sekunder dalam penulisan ini terdiri dari pendapat hukum dan teori-teori mengenai hukum acara perdata yang didapat dari artikel ilmiah. Sedangkan, kajian bahan hukum tersier terdiri dari bahan-bahan yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder, misalnya jurnal dan laman yang memuat artikel terkait hukum acara perdata. Data yang diperoleh dari bahan hukum tersebut dianalisis secara normatif kualitatif guna menjawab permasalahan yang ada.

1. **Pembahasan**
2. **Kerangka Konsepsional**
3. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata sebagai Pembaharuan Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.[[419]](#footnote-419) Dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap negara atau badan hukum (demikian juga sebaliknya) seandainya ada hak dan kepentingan pihak yang terganggu, melalui suatu badan yang disebut badan peradilan, sehingga tercapai tertib hukum.[[420]](#footnote-420)

Sifat hukum acara perdata pada mulanya bersifat mengatur, namun apabila sudah digunakan maka sifatnya menjadi memaksa.[[421]](#footnote-421) Hal ini berarti para pihak diberi kebebasan ketika akan menyelesaikan sengketa perdata apakah akan menggunakan pengadilan sebagai lembaga litigasi, atau diselesaikan secara nonlitigasi. Kebebasan ini terkait dengan inisiatif dari para pihak yang berperkara khususnya penggugat. Akan tetapi, ketika para pihak telah memutuskan untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi, maka bukan saja para pihak dan kuasa hukumnya saja yang terikat pada peraturan, tata cara, atau peraturan hukum acara perdata, namun juga hakim yang memeriksa perkara.

Hingga saat ini pengaturan tentang cara menyelesaikan perkara perdata melalui pengadilan masih didasarkan pada peraturan-peraturan yang merupakan produk pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun demikian, sudah terdapat beberapa peraturan produk nasional tentang cara berperkara ke pengadilan yang diatur secara parsial dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hal yang demikian membuat hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralisme.[[422]](#footnote-422)

Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *het Herzienne Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: Stb. 1848 No. 16, Stb 1941 No. 44) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg atau Reglemen daerah seberang: Stb. 1927 No. 227). Dasar dari berlakunya kedua aturan tersebut di Indonesia adalah Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur tentang Tindakan-Tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Baik HIR maupun RBg mengatur hal yang sama yaitu tentang hukum acara perdata, hanya wilayah hukumnya saja yang berbeda. Akan tetapi, antara HIR dan RBg tidak dapat disatukan dalam arti satu berlaku untuk seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan secara formal sampai saat ini belum ada satu ketentuan yang mempersatukan HIR dan RBg untuk diberlakukan di semua wilayah yang sama. Oleh karenanya hingga saat ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih dualisme.

Saat ini dibutuhkan pembaharuan hukum acara perdata yang merupakan hukum formal dengan fungsi untuk menerapkan hukum materiil ke dalam peristiwa konkrit yang terjadi di masyarakat. Dalam praktik persidangan perdata sering terjadi hambatan dan juga permasalahan yang disebabkan karena sumber hukum utama dalam persidangan perdata yaitu HIR, atau RBg sudah sangat tertinggal dengan perkembangan di masyarakat. Banyak persoalan baru yang dihadapi oleh hakim dalam persidangan perdata, baik itu karena adanya suatu persoalan yang belum diatur sama sekali dalam peraturan perundang-undangan, atau persoalan tersebut sudah diatur namun tidak jelas atau tidak lengkap mengaturnya. Sedangkan terhadap permasalahan tersebut para hakim dituntut harus dapat mengatasinya dan tidak boleh menolak untuk mengadilinya.[[423]](#footnote-423)

Hal ini dikarenakan semakin pesatnya perkembangan dan pembaruan hukum materiil dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara parsial sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembaharuan hukum acara perdata diperlukan guna mengatur hubungan hukum keperdataan yang semakin berkembang dan beragam seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

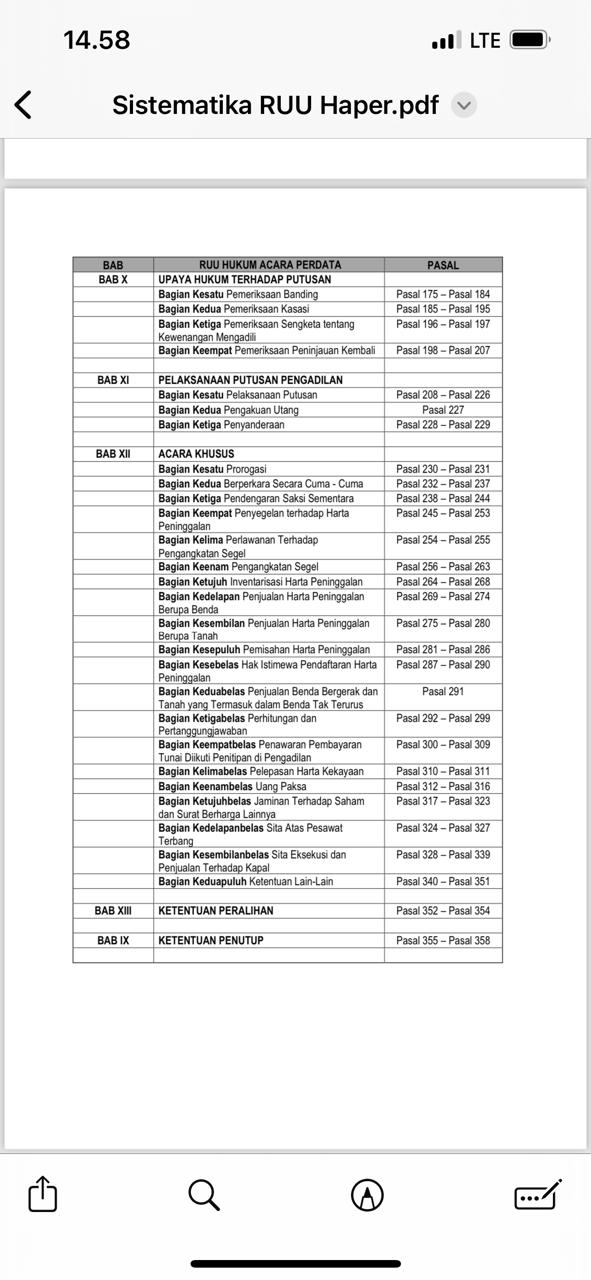
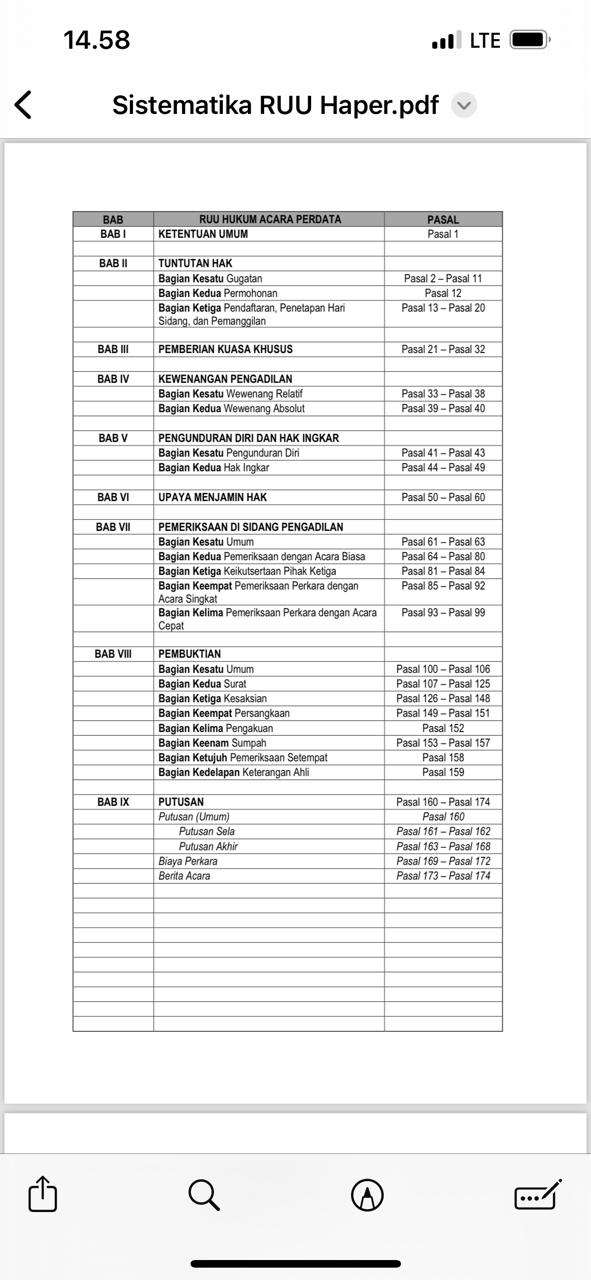
Oleh karena hukum acara perdata mempunyai sifat publik dan mengikat secara umum, maka untuk tercapainya kepastian hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui pengadilan, serta untuk terwujudnya ketertiban hukum dalam rangka penegakan hukum, diperlukan adanya suatu peraturan tentang acara perdata yang terkodifikasi.

Upaya untuk mewujudkan keinginan membentuk hukum acara perdata nasional sudah sejak lama dilakukan, akan tetapi pembentukannya dilakukan masih secara parsial, belum menyeluruh. Di antaranya adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Banding, Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Mahkamah Agung; Peradilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga, dan lain sebagainya. Sementara itu, rencana pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional juga telah lama diupayakan. Pada tahun 1987 diadakan simposium nasional mengenai rencana penyusunan RUU Haper yang diadakan di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1999 dilakukan penyusunan RUU Haper di Jakarta untuk selanjutnya diajukan ke DPR RI. Akan tetapi pada saat itu belum mendapat persetujuan.[[424]](#footnote-424)

Pada tahun 2015, RUU Haper masuk ke dalam *longlist* Prolegnas Tahun 2015 – 2019. Kemudian RUU Haper masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019, 2021, dan 2022. Presiden telah menyampaikan Surat Presiden Nomor R-35/Pres/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021 kepada Ketua DPR RI agar RUU Haper dapat dibahas bersama. Rapat Kerja antara Pemerintah dan Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022. Sejak bulan April hingga Juli 2022 telah dilakukan beberapa rapat dengar pendapat umum diantaranya dengan Ikatan Hakim Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Indepedensi Peradilan (LeIP), Ikatan Notaris Indonesia (INI) Peradi, Kongres Advokat Indonesia (KAI), serta *focus group discussion* dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan beberapa akademisi.[[425]](#footnote-425)

Di dalam dokumen Penjelasan Presiden atas RUU Haper yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI dinyatakan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi menuntut adanya hukum acara perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan biaya ringan. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang menetapkan target Indonesia untuk memenuhi kemudahan berusaha (*ease of doing bussiness* – EODB) yang ditetapkan oleh World Bank pada tahun 2024. Salah satu aspek untuk meningkatkan kemudahan berusaha adalah aspek penegakan kontrak (*enforcing contract*) yang diarahkan pada penyelesaian sengketa melalui hukum acara perdata yang efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam RUU Haper.[[426]](#footnote-426)

Berdasarkan draf RUU Haper per tanggal 6 April 2021 sebagai draf RUU Haper yang dijadikan bahan pembahasan antara Komisi III DPR RI dengan Pemerintah, RUU Haper terdiri dari 14 (empat belas) bab dan 358 pasal.[[427]](#footnote-427) Adapun sistematika dari RUU Haper adalah sebagai berikut:



1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan sebagai pelengkap guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.[[428]](#footnote-428) Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang diperlukan untuk memastikan perjalanan peradilan yang lancar ketika terdapat kekosongan dalam undang-undang. Dalam konteks ini Mahkamah Agung menghasilkan berbagai produk hukum yang berperan dalam menentukan tata cara, pedoman, dan panduan bagi hakim, pengadilan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diantaranya adalah Perma dan SEMA.

Perma dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung terhadap permasalahan teknis yudisial, terutama dalam mengisi kekosongan hukum, atau terhadap keberlakuan undang-undang yang belum ada peraturan organiknya, yang struktur susunannya menyerupai struktur perumusan undang-undang. Sedangkan SEMA dapat dikeluarkan oleh unsur pimpinan lain selain ketua yang bersifat kebijakan-kebijakan nonteknis, walaupun tidak sedikit SEMA yang substansinya mengatur kebijakan penerapan hukum teknis. Struktur susunannya lebih menyerupai surat biasa, sesuai dengan namanya “surat”. Perma memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan SEMA baik dari segi jangkauan, daya mengikat maupun tingkat kebutuhan mendesaknya.[[429]](#footnote-429) Perma merupakan salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan administrasi negara, untuk mengatur dan menjalankan tugas pemerintahan di bidang peradilan. Oleh karena itu, Perma sebagai fungsi pengaturan dapat dipahami sebagai pengisi kekosongan hukum dan sebagai pelengkap kekurangan hukum.[[430]](#footnote-430) Selain berperan sebagai pengisi kekosongan hukum, Perma juga berperan sebagai pelengkap kekurangan hukum. Fungsi pengaturan dari Mahkamah Agung terikat erat dengan wewenang Mahkamah Agung selaku penjaga supremasi hukum di Indonesia yang harus mampu memberikan rasa kepastian hukum.[[431]](#footnote-431)

Jika mencermati Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Perma merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk hukum.[[432]](#footnote-432) Secara yuridis, peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011. Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Perma diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sementara itu, SEMA merupakan sebuah peraturan kebijakan. Dalam konteks penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dasar bertindak Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan kebijakan dalam menjalankan administrasi pemerintahan adalah berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak (*freies ermessen*). Peraturan kebijakan berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan semacam hukum bayangan dari undang-undang sehingga disebut *pseudowetgeving* atau perundang-undangan semu.[[433]](#footnote-433) Peraturan kebijakan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. Peraturan kebijakan ditujukan kepada badan atau pejabat administrasi negara dan tidak ditujukan kepada masyarakat secara umum.[[434]](#footnote-434)

SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.[[435]](#footnote-435) SEMA merupakan perintah resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang umumnya berisi pedoman atau arahan untuk hakim dan pengadilan dalam pelaksanaan tugas mereka. SEMA mencakup berbagai topik, seperti petunjuk untuk hakim dalam mengadili kasus tertentu, prosedur panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, serta aplikasi ketentuan hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang tertentu. Meskipun SEMA tidak setara dengan peraturan perundang-undangan, namun mereka berperan sebagai panduan internal di dalam lingkungan peradilan.[[436]](#footnote-436)

1. **Analisis**
2. Lingkup Pengaturan Materi Muatan Perma dan SEMA mengenai Hukum Acara Perdata dalam RUU Hukum Acara Perdata.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan

Pada tahun 2000, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (Perma No. 1 Tahun 2000). Sebelum terbitnya Perma No. 1 Tahun 2000, istilah yang dikenal untuk lembaga paksa badan adalah penyanderaan (*gijzeling*). Penyanderaan merupakan salah satu instrumen dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga penyanderaan sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda. *Gijzeling* diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR. ~~Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan pelaksanaan keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk melaksanakan surat sita guna menyandera debitur.~~ Menurut ketentuan tersebut, yang disita bukanlah barang, melainkan orang dan berkaitan dengan hubungan antara debitur dan kreditur secara hukum perdata. Dalam ketentuan HIR diatur mengenai lama penyanderaan yang disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah yang harus dipenuhi oleh debitur dan juga diatur mengenai persyaratan usia, kondisi, dimana seseorang tidak dapat disandera, tempat penyanderaan, dan sebagainya.[[437]](#footnote-437)

Pada tahun 1964, penerapan lembaga *gijzeling* dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karenanya Mahkamah Agung membekukan pengaturan mengenai *gijzeling* melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR. Hal ini dikarenakan konsep penyanderaan dalam HIR tidak diterapkan bagi pihak yang membangkang, melainkan untuk orang yang tidak mampu yang tidak mungkin dapat melunasi utang-utang. Alasan lain yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung adalah karena sandera bertentangan dengan salah satu sila dari dasar falsafah negara Indonesia, yaitu bertentangan dengan sila perikemanusiaan.[[438]](#footnote-438) Dalam perkembangannya, pro dan kontra terhadap SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 Tahun 1975 terjadi karena landasan hukum pembekuan ketentuan mengenai penyanderaan yang ada di dalam HIR tersebut dianggap tidak memadai. Mahkamah Agung pada saat itu dinilai mulai menghambat pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, seperti yang diamanatkan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945.[[439]](#footnote-439)

Salah satu pertimbangan dibentuknya Perma No. 1 Tahun 2000 adalah untuk mencabut pembekuan penerapan lembaga *gijzeling.* Pembekuan lembaga *gijzeling* sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 Tahun 1975 dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Selain itu, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penerjemahan istilah *gijzeling* dengan kata "sandera" atau "penyanderaan" sebagaimana terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 Tahun 1975 dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian *Imprisonment for Civil Debts* yang berlaku secara universal.[[440]](#footnote-440) Dalam Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 2000 dinyatakan bahwa paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Sedangkan pengertian dari debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya.[[441]](#footnote-441)

Di dalam RUU Haper, ketentuan mengenai *gijzeling* atau penyanderaan diatur dalam Pasal 228 dan Pasal 229. Pengaturan mengenai penyanderaan dalam RUU Haper masuk menjadi salah satu bagian di dalam Bab XIV mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyanderaan

Pasal 228

1. Ketua Pengadilan memerintahkan penyanderaan atas Permohonan pihak kreditor atau Penggugat yang menang.
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kreditor atau Penggugat yang menang harus mengemukakan secara lengkap dan rinci dasar Permohonan penyanderaan dan jangka waktu debitor disandera.
3. Ketua Pengadilan dapat mengabulkan Permohonan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika terdapat alasan yang berdasar bahwa debitor dengan sengaja ingkar untuk membayar utangnya, sedangkan yang bersangkutan mampu dan sengaja tidak membayar utangnya kepada kreditor.

Pasal 229

1. Permohonan penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3) dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan jika kreditor atau Penggugat yang menang dapat membuktikan bahwa debitor atau Tergugat yang kalah wajib membayar uang kepadanya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Debitor atau Tergugat yang kalah yang sudah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, yang belum dewasa, yang berada di bawah pengampuan, atau wanita yang sedang hamil atau menyusui anaknya dilarang untuk disandera.
3. Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menitipkan tersandera di Rumah Tahanan Negara dengan meminta bantuan alat negara.
4. Biaya penyanderaan ditanggung oleh kreditor atau Penggugat yang menang dan harus dibayar lebih dahulu tiap kali untuk waktu 3 (tiga) bulan.
5. Penyanderaan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
6. Penyanderaan dan perpanjangan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa istilah *gijzeling* yang ada di dalam RUU Haper belum disesuaikan dengan istilah *gijzeling* yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2000. Istilah yang saat ini digunakan dalam lingkup peradilan perdata untuk lembaga *gijzeling* berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2000 adalah paksa badan, bukan menggunakan istilah penyanderaan seperti yang ada di dalam Pasal 228 dan Pasal 229 RUU Haper. Dalam RUU Haper sebenarnya telah terdapat ketentuan yang menyebut mengenai paksa badan, yakni di dalam Pasal 139 dan Pasal 338. Pasal 139 mengatur mengenai saksi yang telah datang di persidangan akan tetapi saksi yang bersangkutan menolak untuk didengar keterangannya. Saksi yang demikian atas permintaan pihak yang berkepentingan, hakim dapat memerintahkan agar saksi dipaksa badan atas biaya dari pihak yang berkepentingan tersebut sampai saksi memenuhi kewajibannya. Sedangkan Pasal 338 RUU Haper mengatur mengenai pembeli kapal yang tidak memenuhi kewajiban membayar harga pembelian kepada juru lelang paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah pelaksanaan penjualan lelang, kepada pembeli yang bersangkutan dikenakan paksa badan. Jika setelah dikenakan paksa badan pembeli tetap tidak melakukan pembayaran maka kapal dijual lagi.

Dapat diketahui bahwa masih terdapat inkonsistensi penggunaan istilah untuk satu maksud yang sama di dalam RUU Haper, yakni istilah penyanderaan dan paksa badan. Padahal salah satu ciri bahasa peraturan perundang-undangan antara lain adalah membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten. Selain itu menurut angka 250 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, di dalam peraturan perundang-undangan yang sama tidak menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama. Dalam hal ini, istilah penyanderaan yang ada di dalam Pasal 228 dan Pasal 229 RUU Haper seharusnya diganti dengan istilah paksa badan sesuai dengan istilah yang digunakan dalam Perma No. 1 Tahun 2000.

1. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 mengenai Putusan Serta Merta

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.[[442]](#footnote-442) Putusan pengadilan merupakan salah satu hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Dari beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan merupakan tahapan yang menjadi tujuan.[[443]](#footnote-443) Putusan hakim, atau yang biasa dikenal dengan istilah putusan pengadilan, merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya.[[444]](#footnote-444) Pada dasarnya pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya dapat dilaksanakan sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Pengecualian dari prinsip tersebut adalah terhadap putusan serta merta (*uitboerbaar bij voorraad*). Putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding, maupun kasasi.[[445]](#footnote-445) Pasal 180 ayat (1) HIR mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan serta merta, yakni: “*jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu.*”

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa instruksi dan SEMA mengenai putusan serta merta. SEMA mengenai putusan serta merta yang terakhir dikeluarkan Mahkamah Agung adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil (SEMA No. 3 Tahun 2000) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

Pada dasarnya Mahkamah Agung memberikan arahan kepada para hakim pengadilan untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal tertentu, yakni:

1. gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
2. gugatan tentang utang - piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
4. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
6. gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
7. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Di dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 juga diatur mengenai tata cara pelaksanaan putusan serta merta, yakni setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan tersebut diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke pengadilan tinggi. Jika penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan serta merta dan putusan provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke pengadilan tinggi disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Aturan lainnya yang ada di dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 adalah bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta, harus disertai penetapan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi. Hal yang demikian dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Akan tetapi, dalam praktiknya SEMA ini tidak diindahkan oleh para ketua pengadilan negeri di seluruh Indonesia karena isi atau ketentuan yang ada dalam SEMA tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dalam praktiknya banyak penggugat yang mengajukan gugatan yang dalam petitumnya memohon agar gugatannya dikabulkan dengan putusan *uit voerbaar bij voorraad*, sehingga para hakim tidak dapat memenuhi instruksi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan hakim dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengeluarkan keputusan serta merta sesuai dengan isi petitum yang diajukan oleh penggugat apabila gugatannya disertai dengan bukti-bukti yang autentik. Hal ini dikarenakan sifat SEMA tersebut hanyalah instruksi atau petunjuk pelaksanaan dan apabila dilanggar tidak ada sanksi hukuman.[[446]](#footnote-446)

Di dalam RUU Haper, putusan serta merta diatur dalam Pasal 168. Walaupun demikian, di dalam Pasal 168 RUU Haper tersebut tidak tertulis secara tegas istilah “putusan serta merta”. Pasal 168 RUU Haper menggunakan frasa “putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu”, yang selengkapnya tertulis sebagai berikut:

Pasal 168

Hakim dapat menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan, banding, atau kasasi, jika:

a. putusan tersebut berdasarkan suatu akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan bukti sempurna;

b. putusan tersebut didasarkan pada Putusan Pengadilan terdahulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

c. telah dikabulkan tuntutan provisi atau juga dalam sengketa penguasaan hak.

Istilah serta merta terdapat dalam Pasal 69 ayat (7) dan Pasal 208 ayat (1) RUU Haper. Pasal 69 ayat (7) RUU Haper mengatur mengenai dapat dijalankannya putusan verstek ketika ada pengajuan perlawanan, banding atau, kasasi jika putusan verstek tersebut bersifat serta merta. Dalam Pasal 208 ayat (1) RUU Haper mengatur bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan serta merta dapat dilaksanakan jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela memenuhi isi putusan dan pihak yang menang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan tersebut.

Dapat diketahui bahwa materi muatan mengenai putusan serta merta dalam RUU Haper ternyata masih merupakan materi muatan Pasal 180 ayat (1) HIR, belum disesuaikan dengan ketentuan mengenai putusan serta merta yang ada di dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Selain itu, RUU Haper masih menggunakan 2 (dua) istilah yang berbeda untuk maksud yang sama terkait dengan putusan serta merta, yakni istilah putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dan istilah putusan serta merta.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Hukum acara perdata di Indonesia dalam praktiknya mengalami perkembangan. Dewasa ini dikenal adanya gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang sebelumnya tidak dikenal dalam HIR. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Dalam sistem hukum *civil law* seperti yang dianut di Indonesia sebenarnya tidak dikenal prosedur gugatan perwakilan kelompok. Akan tetapi karena mempunyai banyak manfaat kemudahan yang efisien dan ekonomis, prosedur pengajuan gugatan *class action* ini semakin berkembang dan diadopsi oleh negara-negara lain penganut sistem hukum *civil law* termasuk di Indonesia.[[447]](#footnote-447)

Gugatan perwakilan kelompok berkembang di Indonesia sejalan dengan semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Secara substantif, hak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok diatur dalam undang-undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; perlindungan konsumen; jasa konstruksi; kehutanan; pengelolaan sampah; dan sumber daya air.

Mekanisme gugatan perwakilan kelompok baru dikenal di Indonesia secara resmi pada tahun 2002, diatur dalam bentuk Perma, yakni Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Perma No. 1 Tahun 2002). Perma No. 1 Tahun 2002 mengatur bahwa gugatan perwakilan kelompok merupakan suatu cara pengajuan gugatan perdata biasa yang dilakukan oleh sejumlah orang banyak. Perma No. 1 Tahun 2002 tidak menentukan berapa banyak jumlah orang yang dapat mengajukan gugatan. Hal yang menjadi ukuran adalah orang yang banyak sekali jumlahnya sehingga akan tidak efisien dan efektif lagi bila mereka mengajukan gugatannya langsung atau melalui kuasa hukumnya. Oleh karenanya sejumlah orang banyak yang merasa dirugikan tersebut harus mewakilkan kepada wakil kelompok untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok. Jika hakim berpendapat bahwa kriteria gugatan perwakilan kelompok telah terpenuhi, sahnya gugatan perwakilan kelompok kemudian dituangkan dalam sebuah penetapan pengadilan. Setelah gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, hakim akan memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan kepada anggota kelompok yang harus mendapat persetujuan dari hakim. Adapun cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintahan, kantor pengadilan atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan. Dalam pemberitahuan tersebut tercantum penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir. Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.[[448]](#footnote-448)

Di dalam RUU Haper, gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 5. RUU Haper menggunakan istilah gugatan perwakilan saja (tanpa “kelompok”) yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 RUU Haper sebagai gugatan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan sekaligus sebagai wakil kelompok yang juga merupakan korban. Ketentuan mengenai gugatan perwakilan dalam RUU Haper masuk di dalam Bab II Tuntutan Hak, Bagian I Gugatan, yakni di Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

###### Pasal 5

1. Dalam hal sekelompok orang berpendapat haknya telah dilanggar, dapat mengajukan Gugatan Perwakilan.
2. Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh wakil kelompok atau advokat selaku kuasanya.
3. Gugatan Perwakilan dapat diajukan, jika:

a. Gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama sebagai Penggugat dalam 1 (satu) Gugatan tidak efektif dan efisien;

b. terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; dan

c. wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

1. Wakil kelompok berhak untuk melakukan penggantian advokat, jika advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai gugatan perwakilan kelompok dalam RUU Haper belum mengatur mengenai bagaimana mekanisme gugatan perwakilan kelompok diajukan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002, yakni mengenai pemeriksaan awal sah atau tidaknya persyaratan gugatan perwakilan kelompok; mekanisme pemberitahuan kepada anggota kelompok; mekanisme pernyataan keluar dari anggota kelompok yang tidak ingin terlibat dalam proses gugatan; dan mekanisme pembagian ganti rugi bagi anggota kelompok.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Secara umum penyelesaian sengketa perkara perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi). Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa secara formal yang didasarkan pada penerapan hukum acara perdata dengan tahapan-tahapan penyelesaian sesuai prosedur beracara yang dimulai dari pengajuan surat gugatan melalui pendaftaran perkara ke pengadilan yang berkompeten, penomoran dan pendistribusian perkara pada majelis hakim dan panitera yang ditunjuk untuk memeriksa, upaya perdamaian/mediasi di pengadilan, tahap proses pemeriksaan perkara di persidangan dan tindakan pasca putusan hakim sampai dengan pelaksanaan putusan.[[449]](#footnote-449)

Proses pemeriksaan perkara di persidangan dimulai dari sidang pertama dengan acara pemeriksaan identitas para pihak dan upaya perdamaian oleh hakim, kemudian sidang-sidang berikutnya dengan acara jawaban tergugat, replik, duplik, kesimpulan pertama, pembuktian oleh para pihak, kesimpulan terakhir, dan putusan. Tahapan-tahapan ini memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi bila ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim maka dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.[[450]](#footnote-450) Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat, biaya ringan. Sementara pada kenyataannya di masyarakat banyak terjadi sengketa perdata yang memerlukan penyelesaian secara cepat dengan biaya murah, khususnya sengketa bisnis terutama yang nilai gugatannya kecil dan yang memerlukan hasil penyelesaian yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sehingga dapat dipaksakan pelaksanaanya manakala para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, proses pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019. Perma ini dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum dalam praktik mengingat dalam hukum acara perdata yang berlaku tidak diatur mengenai cara menyelesaikan perkara/gugatan yang nilai gugatannya kecil, semua gugatan perdata diselesaikan dengan mekanisme hukum acara yang sama. Sementara dalam praktiknya di masyarakat seringkali nilai gugatannya kecil sehingga tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan gugatan.

Di dalam RUU Haper, materi muatan yang mengatur mengenai gugatan sederhana terdapat dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 99 yang membahas mengenai ketentuan pemeriksaan perkara dengan acara cepat. Dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat, hakim yang melakukan pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara adalah hakim tunggal. Perkara yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara cepat adalah perkara yang nilai gugatannya paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah). Adapun jenis perkaranya meliputi perkara utang piutang, kerusakan barang, atau cedera badan pribadi yang kesemuanya timbul berdasarkan perjanjian, serta perkara pembatalan perjanjian.[[451]](#footnote-451)

Jumlah penggugat dan tergugat dalam gugatan dengan pemeriksaan acara cepat dibatasi, tidak boleh lebih dari satu orang. Domisili dari penggugat dan tergugat harus berada di daerah hukum pengadilan yang sama. Jika penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil. Jika penggugat tidak hadir pada siang pertama tanpa alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur. Sedangkan jika tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua. Jika setelah pemanggilan kedua tergugat masih tidak hadir, maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek.[[452]](#footnote-452)

Dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat, pembuktiannya dilakukan dengan cara pembuktian sederhana. Dalil gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dilakukan pembuktian. Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian hanya terhadap dalil gugatan yang dibantah. Proses pemeriksaan perkara dengan acara cepat sejak tanggal perkara didaftarkan sampai dengan hakim memutus perkara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Putusan pengadilan dengan pemeriksaan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.[[453]](#footnote-453)

Terdapat beberapa materi muatan yang sama terkait gugatan sederhana yang ada di dalam Perma No. 2 Tahun 2015 *juncto* Perma No. 4 Tahun 2019 dengan materi mengenai pemeriksaan perkara dengan acara cepat yang ada di dalam RUU Haper. Materi muatan yang diatur sama tersebut antara lain:

1. batasan nilai gugatan yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara cepat, yakni paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
2. jumlah penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu;
3. tergugat harus diketahui alamat tempat tinggalnya;
4. penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama;
5. penggugat dan tergugat wajib menghadiri sidang secara langsung; dan
6. dapat diletakkannya sita jaminan dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat.

Akan tetapi masih ada materi muatan krusial dalam Perma No. 2 Tahun 2015 *juncto* Perma No. 4 Tahun 2019 yang belum ada pengaturannya dalam RUU Haper. Materi muatan tersebut antara lain:

1. aturan mengenai perkara yang tidak boleh menggunakan pemeriksaan perkara dengan acara cepat, yakni: perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah;
2. aturan mengenai dapat diajukannya perlawanan (*verzet*);
3. aturan mengenai upaya hukum keberatan bagi tergugat yang tidak puas dengan putusan pada pemeriksaan gugatan sederhana (pemeriksaan perkara dengan acara cepat); dan
4. aturan putusan keberatan yang merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Selain itu, di dalam RUU Haper sebaiknya perlu ada pengaturan atau penjelasan mengenai mekanisme pemeriksaan perkara dengan acara cepat, terutama tahapan persidangannya yang hanya ada sidang pembacaan gugatan, jawaban, bukti, kesimpulan dan pembacaan putusan. Perlu ditegaskan dalam RUU Haper bahwa dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat tidak ada mekanisme replik dan duplik.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan

Munculnya lembaga mediasi dilatarbelakangi dengan adanya kenyataan di masyarakat yang beranggapan bahwa pengadilan sebagai salah satu lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak yang berperkara. Hal ini berbeda jika melalui mediasi, di mana kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat sama-sama menguntungkan.[[454]](#footnote-454) Tujuan utama dari mediasi adalah membantu mencari jalan keluar atau alternatif penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian masalah.[[455]](#footnote-455)

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2016). Diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 mediasi mendapat kedudukan yang penting karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Setiap hakim, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jika pada pengadilan tingkat pertama hakim tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi, apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu.

Pasal 4 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 menentukan perkara yang wajib menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Sedangkan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi antara lain sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yakni: sengketa pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial; keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; serta sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Di dalam RUU Haper, mediasi atau perdamaian diatur dalam Pasal 69 dan Pasal 70. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa hakim wajib berusaha mendamaikan pihak yang berperkara. Usaha perdamaian masih dapat dilaksanakan setiap saat sebelum perkara diputus. Hakim dalam melakukan usaha perdamaian mengikutsertakan semua pihak yang berperkara. Jika kewajiban hakim untuk mendamaikan tidak dilaksanakan maka putusan batal karena hukum. Jika para pihak yang bersengketa berhasil didamaikan oleh hakim, maka perdamaian akan dituangkan dalam akta perdamaian dalam bentuk putusan perdamaian yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati putusan tersebut. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Dapat diketahui bahwa materi muatan mengenai mediasi yang ada di dalam RUU Haper belum seluruhnya sesuai dengan materi muatan mediasi yang ada di dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Di dalam RUU Haper masih terdapat ketentuan bahwa jika kewajiban hakim untuk mendamaikan tidak dilaksanakan maka putusan batal karena hukum. Ini adalah materi muatan mengenai mediasi yang ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah dicabut dengan Perma No. 1 Tahun 2016. Padahal di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 diatur bahwa jika pada pengadilan tingkat pertama hakim tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi, apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu. Selain perlu disesuaikan dengan materi muatan mengenai mediasi yang ada di dalam Perma No. 1 Tahun 2016, di dalam RUU Haper perlu juga ditambahkan mengenai aturan pendelegasian mengenai ketentuan lebih lanjut dari mediasi dan materi muatan lainnya yang akan diatur dalam Perma. Hal ini mengingat tidak semua ketentuan hal yang teknis dimasukkan ke dalam RUU Haper. RUU Haper seharusnya hanya mengatur hal pokoknya saja sedangkan untuk detail lebih lanjutnya dapat diatur dalam Perma.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Secara filosofis, gagasan konsep persidangan secara elektronik muncul sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sebagai suatu nilai yang diwujudkan secara lebih nyata melalui prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adanya persidangan secara elektronik memberi harapan kepada para pihak untuk dapat memperoleh keadilan dengan lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.[[456]](#footnote-456) Dari sisi sosiologis, lahirnya konsep persidangan secara elektronik adalah suatu jalan keluar yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada pencari keadilan yang membutuhkan proses peradilan di bidang perdata yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah. Berlakunya prosedur persidangan secara elektronik di Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pencari keadilan.

Secara yuridis, persidangan secara elektronik merupakan suatu konsep hukum yang baru. Sebelumnya tidak ada ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Oleh karenanya agar persidangan secara elektronik dapat diselenggarakan perlu dibentuk dasar hukumnya terlebih dahulu. Pada mulanya Mahkamah Agung mengenalkan layanan peradilan elektronik pada tahun 2018 yakni Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 3 Tahun 2018). Layanan elektronik dalam Perma No. 3 Tahun 2018 tersebut meliputi pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan pihak yang berperkara secara elektronik. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019) yang kemudian dilakukan perubahan dengan Perma No. 7 Tahun 2022. Perma yang mengatur mengenai persidangan di pengadilan secara elektronik dimaksudkan untuk mengisi kekurangan dan/atau kekosongan hukum dari dasar hukum acara di Indonesia yang berasal dari produk hukum kolonial yang sudah lama diberlakukan dan tidak mengatur tentang administrasi secara elektronik maupun persidangan secara elektronik.[[457]](#footnote-457)

Salah satu perbedaan Perma No. 3 Tahun 2018 dengan Perma No. 1 Tahun 2019 adalah bahwa persidangan secara elektronik yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 hanya dilakukan pada tahap administrasi saja, seperti pendaftaran, pembayaran biaya perkara, dan juga pemanggilan para pihak, tidak sampai pada tahap persidangan. Sedangkan pada Perma No. 1 Tahun 2019 *juncto* Perma No. 7 Tahun 2022 persidangan secara elektronik diselenggarakan secara lengkap terhadap setiap tahapan persidangan, seperti pengiriman dokumen gugatan, replik, duplik, kesimpulan dan/atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.[[458]](#footnote-458) Bahkan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, pelaksanaan mediasi pun bisa dilakukan secara elektronik apabila dikehendaki bersama oleh para pihak.

Pada Perma No. 7 Tahun 2022 yang mengubah Perma No. 1 Tahun 2019 terdapat beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang “tidak mau” melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam sistem informasi pengadilan sehingga bisa diakses oleh penggugat. Sebaliknya, dokumen penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada tergugat.[[459]](#footnote-459)

Di dalam RUU Haper, persidangan secara elektronik baru hanya mengatur sebatas soal pemanggilan para pihak saja, yakni ada di dalam Pasal 17 ayat (7), Pasal 346 ayat (2), dan Pasal 351. Pasal 17 ayat (7) RUU Haper mengatur bahwa pemanggilan lanjutan para pihak yang berperkara dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan diantara para pihak. Sedangkan Pasal 346 RUU Haper mengatur mengenai pemanggilan seseorang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa, dilakukan melalui surat kabar harian dan/atau media elektronik serta melalui pengumuman yang ditempelkan pada kantor Pengadilan dan kantor pemerintah daerah setempat, dalam waktu selama 3 (tiga) bulan atau lebih sesuai dengan perintah Pengadilan. Sementara itu, Pasal 351 RUU Haper mengatur mengenai harus diumumkannya penetapan pengadilan tentang adanya dugaan hukum tentang kematian dalam surat kabar harian dan/atau media elektronik yang sama yang mengumumkan pemanggilan seseorang yang meninggalkan alamat tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa.

Materi muatan mengenai persidangan secara elektronik dalam RUU Haper perlu dilengkapi, tidak hanya mengenai pemanggilan para pihak saja, melainkan juga mengenai proses persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik, yakni penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan. Selain itu perlu juga diatur mengenai pelaksanaan mediasi yang dapat dilakukan secara elektronik apabila memang dikehendaki bersama oleh para pihak. Hal ini mengingat Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

1. Status hukum dari Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Hukum Acara Perdata setelah diundangkannya Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.

Jika RUU Haper telah disahkan dan diundangkan menjadi UU Haper, terdapat beberapa kemungkinan terkait dengan status dari Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata, yakni:

1. Batal Demi Hukum

Jika isi Perma atau SEMA bertentangan dengan ketentuan dalam UU Haper, Perma atau SEMA tersebut secara otomatis batal demi hukum. Hal ini terkait dengan hierarki dari peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika materi muatan yang ada di dalam Perma atau SEMA sudah diatur secara lengkap dan jelas dalam UU Haper, Perma dan SEMA tersebut tidak lagi relevan dan dapat dianggap tidak berlaku.

1. Tetap Berlaku Sebagian

Terdapat kemungkinan bahwa beberapa materi muatan dalam Perma atau SEMA yang bersifat teknis pelaksanaan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam UU Haper. Terlebih jika di dalam UU Haper terdapat aturan pendelegasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan materi muatan yang diatur dalam UU Haper ke dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, seperti Perma. UU Haper sebagai undang-undang baru seringkali mengatur masa transisi, di mana peraturan lama masih berlaku untuk sementara waktu untuk memberikan kesempatan penyesuaian.

1. Dibatalkan Melalui Keputusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan dapat mengeluarkan keputusan untuk membatalkan Perma atau SEMA yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan UU Haper.

1. **Penutup**
2. **Simpulan**
   * + 1. Masih ada beberapa materi muatan Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata yang belum dimasukkan menjadi materi muatan RUU Haper, di antaranya aturan mengenai penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, jawaban, replik, duplik, pembuktian kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan yang dilakukan secara elektronik; mekanisme teknis pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok *(class action*); mekanisme teknis pemeriksaan perkara dengan acara cepat; dan mekanisme pelaksanaan putusan serta merta. Diketahui juga bahwa masih ada penggunaan istilah yang tidak konsisten di dalam RUU Haper dimana RUU Haper masih menggunakan 2 (dua) istilah yang berbeda untuk maksud yang sama. Ada juga istilah dalam RUU Haper yang belum dimutakhirkan dengan istilah yang dipergunakan dalam Perma, yakni istilah penyanderaan yang seharusnya menggunakan istilah paksa badan.
       2. Status hukum dari Perma dan SEMA mengenai hukum acara setelah diundangkannya RUU Haper menjadi UU Haper tergantung dari materi muatan yang ada di dalam Perma, SEMA, dan UU Haper. Jika materi muatan yang ada di dalam Perma dan SEMA bertentangan dengan UU Haper, tentunya Perma dan SEMA yang demikian tidak berlaku lagi. Akan tetapi, materi muatan dalam Perma dan SEMA masih dapat tetap berlaku sebagian jika materi muatan tersebut bersifat teknis pelaksanaan yang secara umum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UU Haper.
3. **Saran**

Dalam draf RUU Haper perlu dimasukkan beberapa materi muatan yang terdapat dalam Perma dan SEMA mengenai hukum acara perdata. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang terlibat dalam pembahasan RUU Haper harus mencermati dengan saksama istilah-istilah yang ada di dalam RUU Haper, apakah telah konsisten antara pasal satu dengan pasal lainnya dan telah dimutakhirkan dengan istilah terbaru yang diatur dalam Perma atau SEMA.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

**Buku**

Ali, Zainuddin. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Fakhirah, Efa Laela. Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju, 2019.

Fauzan, M. Peranan *PERMA dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung.* Jakarta: Kencana, 2013.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Mertokusumo, Sudikno*. Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Nusantara, Tim Literasi. *KUHAPer: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Beserta Penjelasannya.* Malang: CV Literasi Nusantara, 2020.

Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.

Projodikoro, Wirjono*. Hukum Acara Perdata di Indonesia.* Bandung: Sumur Bandung, 1992.

Saifullah, Muhammad. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Sunandar, Nandang. Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik. Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.

Sundari, E. *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.* Bandung: CV Mandar Maju, 2019.

**Jurnal**

Al Fasil, Maulana Rihdo, dkk. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh terhadap Putusan Hukum*. Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023.

Ardiansyah,Mohammad Kamil*. Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia..* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 2, Juli 2020.

Kamah, Sigit Arfansyah, Abdurahman Konoras, dan Hendrik B. Sompotan. *Prosedur Persidangan Secara Elektronik (Tinjauan Menurut Hukum Acara Perdata)*. Jurnal Lex Privatum, Volume IX Nomor 2, Maret 2021.

Kirana, Gandes Candra *. Gijzeling dalam Teori dan Praktek Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021.

Kurniawan, M. Beni. *Implementation of Electronic Trial (Elitigation) on The Civil Cases in Indonesia Courts A Legal Renewal of Civil Procedural Law*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 9 Nomor 1, 2020.

Suwito, Heri*. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Pengembalian Ke Dalam Keadan Semula di Pengadilan Negeri Purbalingga*,.Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Universitas Tanjung Pura, Volume 11. No. 3, Tahun 2015.

**Bahan yang Tidak Diterbitkan**

Penjelasan Presiden atas RUU tentang Hukum Acara Perdata, disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Februari 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku Panduan *e-court* Mahkamah Agung 2019. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata per tanggal 6 April 2021.

**Laman**

Parlementaria. *Rapat Paripurna Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Perubahan UU Narkotika.* Dimuat dalam[https://jdih.dpr.go.id/berita /detail/id/51008/t/javascript](https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/51008%20/t/javascript), diakses tanggal 27 Agustus 2024.

Nursobah, Asep. *Kini Persidangan Elektronik dapat Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Tergugat.* Dimuat dalam <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>, diakses 15 September 2024.

**URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN HEWAN**

***(THE URGENCY OF LAW FORMATION***

***ABOUT VETERINARY EDUCATION)***

# **Woro Wulaningrum**

Perancang Undang-Undang Madya

Pusat Perancangan Undang-Undang Ekuinbang Kesra

Badan Keahlian DPR RI

Korespondensi: [worowulaningrum@gmail.com](mailto:worowulaningrum@gmail.com)

**Abstrak**

Pendidikan kedokteran bermula pada jaman penjajahan Hindia Belanda tahun 1862. Berdirinya sekolah pendidikan kedokteran hewan saat ini karena terjadinya wabah yang menyerang ternak. Pada saat itu, hewan sangat dibutuhkan sebagai alat transportasi, sumber pangan, dan sebagai mata pencarian masyarakat. Pendidikan kedokteran didirikan untuk menghasilkan dokter hewan yang berfungsi menjaga kesehatan hewan, kelestarian hewan, dan keseimbangan ekosistem. Namun sampai dengan saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang terkait pendidikan kedokteran hewan secara komprehensif. Dalam pelaksanaanya masih berdasarkan pada Undang-Undang tentang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU tentang Pendidikan Tinggi). Permasalahan dalam penulisan ini, yaitu apa urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan dan apa ruang lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan. Tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui urgensi dan ruang lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan. Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dan analisa dalam tulisan ini disajikan secara deskriptif analitis. Urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan dapat dilihat dari filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis berdasarkan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Secara sosiologis, yaitu belum ada keterlibatan pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan dan belum adanya standar nasional pendidikan kedokteran hewan, serta secara yuridis, yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus dan komprehensif mengenai pendidikan kedokteran hewan.

Kata kunci: pendidikan, kedokteran hewan, kesehatan hewan

***Abstract***

*Medical education began during the Dutch East Indies colonial era in 1862. The establishment of the current veterinary education school is due to the outbreak that attacks livestock. At that time, animals were needed as a means of transportation, a source of food for humans, and as a livelihood for the community. Medical education was established to produce veterinarians who function to maintain animal health, preserve animals and balance the ecosystem. However, until now, Indonesia has not had a law that regulates veterinery education comprehensively, so that its implementation is still based on Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (Law on National Education System) and Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education (Law on Higher Education). The problem in this writing is whether the urgency of the formation of the Law on Veterinary Education and what is the scope in the regulation of the Law on Medical Education. The purpose of this writing is to find out the urgency and scope of the regulation of the Law on Veterinary Education. The method used in this writing is normative juridical with a legal and regulatory approach. The problems and analyses in this paper are presented in a descriptive analytical manner. The urgency of the formation of the Law on Veterinary Education can be seen from philosophical, sociological and juridical. Philosophically based on the preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia, which is to protect the entire Indonesian nation and promote general welfare. Then Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely the right of everyone to get a good environment and get health services. Sociologically, the problems that arise are that there is no government involvement responsible for the implementation of veterinary education and there are no national standards for veterinary education, and juridically, there are no regulations that specifically and comprehensively regulate veterinary education.*

*Keywords: education, veterinary medicine, animal health.*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan tujuan negara Pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1). Berdasarkan hal ini, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pengaturan terkait sistem pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas). Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.[[460]](#footnote-460) Tujuan dari UU tentang Sisdiknas yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[[461]](#footnote-461) Melalui UU tersebut, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, masih memerlukan pengaturan agar pendidikan tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.[[462]](#footnote-462)

Pengaturan terkait pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU tentang Pendidikan Tinggi). Pendidikan tinggi sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.[[463]](#footnote-463)

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.[[464]](#footnote-464) Pendidikan kedokteran hewan merupakan salah satu program dari pendidikan tinggi yaitu program sarjana kedokteran hewan dan program profesi kedokteran hewan.

Di Indonesia, pendidikan kedokteran hewan di mulai tahun 1861 pada jaman penjajahan Hindia Belanda, sedangkan pendidikan tinggi kedokteran hewan yang pertama di dunia di Lyon Perancis pada tahun 1761.[[465]](#footnote-465) Wabah penyakit yang menyerang hewan ternak pada abad 19 mendorong pemerintah Kolonial Belanda untuk mendidik tenaga dokter hewan pribumi. Hewan pada saat itu dimanfaatkan untuk berbagai keperluan mulai dari alat angkut, transportasi, dan menjadi bahan pangan sehingga jika terjadi masalah kesehatan pada hewan maka seluruh aspek kehidupan pada masa itu menjadi terganggu. Secara nyata hasil pendidikan kedokteran hewan tersebut mampu menjaga hewan tetap sehat serta mengurangi berjangkitnya dan mencegah meluasnya wabah penyakit hewan sehingga jaminan kesejahteraan masyarakat pun dapat terwujud saat itu. Pendidikan kedokteran hewan pada proses awal yang dimulai pada tahun 1861–1875 masih berbentuk sekolah yang dilanjutkan sampai dengan tahun 1880 dan berdiri secara penuh pada tahun 1907.[[466]](#footnote-466)

Sejak berdirinya sekolah pendidikan kedokteran hewan sampai dengan saat ini, pendidikan kedokteran hewan mengacu pada UU tentang Sisdiknas dan UU tentang Pendidikan Tinggi. Sebagaimana diketahui UU tentang Sisdiknas dan UU tentang Pendidikan Tinggi hanya mengatur yang bersifat umum. Beda halnya dengan pendidikan kedokteran yang telah memiliki peraturan tersendiri yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran kemudian Undang-Undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU tentang Kesehatan) yang telah diatur secara komprehensif.

Sampai dengan saat ini pendidikan kedokteran hewan belum memiliki peraturan yang khusus mengatur pendidikan kedokteran hewan sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan yaitu *pertama,* dalam pendidikan kedokteran hewan belum ada pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun standar nasional pendidikan kedokteran hewan. Karena tidak ada pihak dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap hal ini, organisasi profesi kedokteran hewan mengambil peran untuk menyusun standar nasional pendidikan kedokteran hewan yang bekerjasama dengan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI).

*Kedua*, pada daerah yang memiliki fakultas kedokteran hewan masih kurang tempat yang dapat digunakan sebagai wahana pendidikan kedokteran hewan. Hal tersebut mengakibatkan para mahasiswa harus ke daerah lain untuk memperoleh wahana pendidikan sebagai tempat magang atau koas. Di sisi lain, belum ada standar dan persyaratan tempat yang digunakan sebagai wahana pendidikan kedokteran hewan. Saat ini, yang menentukan layak atau tidaknya suatu tempat dijadikan sebagai wahana pendidikan adalah perguruan tinggi. Hal tersebut berakibat setiap perguruan tinggi memiliki standar yang berbeda beda, tentunya mempengaruhi standar mutu lulusan pendidikan kedokteran hewan.

*Ketiga,* belum ada Kementerian atau Lembaga (K/L) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan. Seperti halnya pendidikan kedokteran dimana Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Saat ini hanya ada kementerian yang bertanggung jawab atas kesehatan hewan yaitu Kementerian Pertanian.

*Keempat, World Organisation Animal Health* (WOAH) telah mengeluarkan rekomendasi untuk dijalankan oleh seluruh negara sebagai anggota WOAH. Rekomendasi tersebut yaitu:[[467]](#footnote-467)

1. Otoritas Veteriner;
2. Penyelenggara pendidikan kedokteran hewan;
3. Uji kompetensi dan penerbitan Surat Tanda Registrasi Veteriner;
4. Badan Penentu Status Veteriner;
5. Undang-Undang yang mengatur pendidikan kedokteran hewan dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Hewan; dan
6. Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

Indonesia saat ini telah menjadi anggota dari WOAH, ada kewajiban bagi Indonesia untuk mematuhi rekomendasi dari WOAH tersebut. Dari keenam rekomendasi WOAH tersebut, Indonesia baru memenuhi angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga). Oleh sebab itu, Indonesia sebagai anggota WOAH belum sepenuhnya menjalankan rekomendasi dari WOAH[[468]](#footnote-468).

Mengingat pendidikan kedokteran hewan bertujuan untuk menghasilkan dokter hewan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan hewan yang menjalankan fungsi One Health. One health adalah pendekatan pemersatu yang bertujuan untuk secara berkelanjutan menyeimbangkan dan mengoptimalkan hubungan erat dan ketergantungan diantara manusia, hewan dan ekosistem, mengakui kesehatan hewan peliharaan dan liar, tumbuhan, dan  lingkungan yang lebih luas.[[469]](#footnote-469) Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan dengan melihat ruang lingkup pendidikan kedokteran hewan yang menjadi dasar atau landasan dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran hewan. Dengan demikian dapat diketahui urgensi pembentukan undang-undangtentang pendidikan kedokteran hewan.

1. **Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, adalah:

1. Apa urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan?
2. Apakah ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan?

**C. Tujuan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan dan ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan.

**D. Metode Penulisan**

Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, pengkajian dilakukan dengan menganalisis UU tentang Sisdiknas dan UU tentang Pendidikan Tinggi serta peraturan pelaksanaannya terkait pendidikan. Permasalahan dan analisa dalam tulisan ini disajikan secara deskriptif analitis yakni memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan.

1. **Pembahasan**
2. **Kerangka Konsepsional**
   * + 1. **Pendidikan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan secara umum merupakan hal yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan manusia melalui pengalaman yang kemudian akan membentuk suatu pola berpikir yang sesuai dengan proses yang dialami melalui pengalaman tersebut.[[470]](#footnote-470) Pendidikan hendaknya diperhatikan sejak seseorang menginjak usia dini karena merupakan tahap awal sebelum seseorang mengalami situasi dewasa, alangkah baiknya seseorang tersebut disuguhkan dengan pengalaman akan pengetahuan yang efektif untuk menunjang perkembangan pola pikirnya.

Pendidikan menurut John Locke merupakan sebuah pengalaman yang hendak dialami oleh setiap manusia karena mencakup pengembangan karakter kepribadian dari manusia itu sendiri.[[471]](#footnote-471) Karakter yang dibentuk melalui pengalaman akan membawa seseorang kepada suatu pola pemahaman yang baik dan tentunya melalui pengalaman itulah yang akan memampukan seseorang untuk dapat berelasi dengan orang lain. Pengalaman hendaknya dijadikan sebagai proses untuk mendidik dan membangun karakter dari setiap pribadi manusia, menurutnya manusia secara manusiawi akan berkembang melalui pengalaman yang dialami.[[472]](#footnote-472)

Menurut Aristoteles,[[473]](#footnote-473) pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Negara merupakan institusi sosial tertinggi yang mengamankan tujuan tertinggi atau kebahagiaan manusia. Pendidikan adalah persiapan/bekal untuk beberapa aktivitas/pekerjaan yang layak. Pendidikan semestinya dipandu oleh undang-undang untuk membuatnya sesuai koresponden dengan hasil analisis psikologis, dan mengikuti perkembangan secara bertahap, baik secara fisik (lahiriah) maupun mental (batiniah/jiwa). Berdasarkan teori pendidikan yang dipaparkan oleh Aristoteles dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan langkah awal untuk menyiapkan peserta didik yang berkualitas melalui [proses pembelajaran](https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/macam-macam-strategi-pembelajaran-serta-contoh-penerapan-cara-menentukannya/) serta perkembangan fisik dan mental yang matang.

Menurut Plato, teori pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaa.[[474]](#footnote-474) Menurut Plato pendidikan direncanakan dan di program menjadi tiga tahap dengan tingkat usia. Tahap pertama[[475]](#footnote-475) adalah pendidikan yang diberikan kepada murid hingga sampai dua puluh tahun; dan tahap kedua, dari usia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun; sedangkan tahap ketiga, dari tiga puluh tahun sampai dengan usia empat puluh tahun.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan[[476]](#footnote-476) merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru (penyerahan kultur), tidak hanya berupa “pemeliharaan”, tetapi juga dengan maksud “memajukan” serta “memperkembangkan” kebudayaan, menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah berfokus pada kodrat individu yang bebas dan mandiri, sedangkan pembelajaran adalah pedoman untuk mengarahkan anak-anak untuk menentukan tujuan hidupnya kelak.[[477]](#footnote-477)

Selain itu, konsep pendidikan yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara adalah menjunjung tinggi pendidikan budi pekerti yang akan membantu mengembangkan sikap dan perilaku peserta didik yang lebih baik.[[478]](#footnote-478) Melihat konsep di atas dapat ditarik simpulan bahwa perkembangan pendidikan yang dulu diterapkan selaras dengan sistem pendidikan di Indonesia saat ini, yakni menghargai kebebasan dan kemerdekaan peserta didik.

Menurut H.Horne, pendidikan adalah proses yang dilakukan terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.[[479]](#footnote-479) Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

* + - 1. **Pendidikan Tinggi**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU tentang Pendidikan Tinggi yang dimaksud dengan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sejalan dengan pendapat Manzoor bahwa pendidikan tinggi dapat didefinisikan sebagai pendidikan tingkat universitas yang menawarkan sejumlah kualifikasi mulai dari jenjang diploma, sarjana, dan program pascasarjana seperti master dan doktor.[[480]](#footnote-480)

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU tentang Sisdiknas, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan tumpuan akhir seluruh jenjang pendidikan dan sebagai wahana pembentukan sarjana yang memiliki budi pekerti luhur, melangsungkan nilai-nilai kebudayaan, memajukan kehidupan dan membentuk satria pinandita.[[481]](#footnote-481)

Pendidikan tinggi di Indonesia dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu universitas, politeknik, institut, sekolah tinggi, akademi, dan akademi komunitas.[[482]](#footnote-482) Adapun fungsi pendidikan tinggi berdasarkan Pasal 4 UU tentang Pendidikan Tinggi adalah:

1. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
3. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Sedangkan tujuan pendidikan tinggi berdasarkan Pasal 5 UU tentang Pendidikan Tinggi, yaitu:

a. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;

b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;

c. dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan

d. terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan tinggi di Indonesia menurut jenisnya dibagi menjadi tiga, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.[[483]](#footnote-483) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana. Arahnya adalah penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma. Jenis pendidikan tinggi ini mempersiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu hingga program sarjana terapan. Pendidikan vokasi ini dapat dikembangkan oleh pemerintah hingga program magister terapan maupun doktor terapan.

Jenis pendidikan tinggi yang terakhir adalah pendidikan profesi. Pendidikan ini merupakan lanjutan dari program sarjana untuk mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang membutuhkan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian yang membidangi perguruan tinggi, maupun kementeraian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan juga organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu pelayanan profesi.

Dari sisi program, pendidikan tinggi terbagi menjadi program sarjana, program magister dan program doktor.[[484]](#footnote-484) Program sarjana merupakan lanjutan dari pendidikan menengah. Dosen atau pengajar program ini minimal lulusan program magister atau sederajat. Lulusan program sarjana berhak menyandang gelar sarjana. Lulusan program sarjana dapat meneruskan ke program berikutnya, yakni magister. Dosen atau pengajar program magister harus berpendidikan minimal doktor atau sederajat. Lulusan program ini berhak menyandang gelar magister.

Program pendidikan tinggi yang paling tinggi adalah program doktor. Pengampu program ini minimal lulusan doktor atau setara. Lulusan program doktor berhak menyandang gelar doktor, demikian pula dari program sarjana hingga doktor terdapat jenis program terapan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Menurut Raillon perguruan tinggi adalah sebuah alat kontrol masyarakat dengan tetap terpeliharanya kebebasan akademis terutama dari campur tangan penguasa.[[485]](#footnote-485) Perguruan tinggi juga merupakan agen utama pembaharuan dalam kehidupan bernegara, seperti dalam proses pembentukan pemerintah orde baru tahun 1970-an dimana peran nyata yang telah dimainkan kalangan dosen dengan mahasiswa dengan cara-caranya sendiri telah memberikan sumbangan besar bagi pemerintah orde baru.

Menurut Barnet ada empat pengertian atau konsep tentang hakikat perguruan tinggi:[[486]](#footnote-486)

1. Perguruan tinggi sebagai penghasil [tenaga kerja](https://www.educhannel.id/blog/artikel/tenaga-kerja.html)  yang bermutu (*qualified manpower)*. Dalam pengertian ini pendidikan tinggi merupakan suatu proses dan mahasiswa dianggap sebagai keluaran (*output*) yang mempunyai nilai atau harga (*value*) dalam pasaran kerja, dan keberhasilan itu di ukur dengan tingkat penyerapan lulusan dalam masyarakat (*employment rate*) dan kadang-kadang di ukur juga dengan tingkat penghasilan yang mereka peroleh dalam karirnya.
2. Perguruan tinggi sebagai lembaga pelatihan bagi karier peneliti. Mutu perguruan tinggi ditentukan oleh penampilan/prestasi penelitian anggota staf. Ukuran masukan dan keluaran di hitung dengan jumlah staf yang mendapat hadiah/penghargaan dari hasil penelitiannya (baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional), atau jumlah dana yang diterima oleh staf dan/atau oleh lembaganya untuk kegiatan penelitian, ataupun jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh pakar sejawat (*peer group*).
3. Perguruan tinggi sebagai organisasi pengelola pendidikan yang efisien. Dalam pengertian ini perguruan tinggi dianggap baik jika dengan sumber daya dan dana yang tersedia, jumlah mahasiswa yang lewat proses pendidikannya (*throughput*) semakin besar.
4. Perguruan tinggi sebagai upaya memperluas dan mempertinggi pengayaan kehidupan. Indikator sukses kelembagaan terletak pada cepatnya pertumbuhan jumlah mahasiswa dan variasi jenis program yang ditawarkan. Rasio mahasiswa-dosen yang besar dan satuan biaya pendidikan setiap mahasiswa yang rendah juga dipandang sebagai ukuran keberhasilan perguruan tinggi.  
   * + 1. **Kompetensi Pendidikan**

Menurut Mc.Clelland, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan situasi pekerjaan atau situasi.[[487]](#footnote-487) Menurut Marshall, kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu.[[488]](#footnote-488) Menurut Brian E Becher, Mark Huslid dan Dave Ulrich mendefinisikan kompetensi sebagai pengetahuan keahlian, kemampuan, atau karakteristik pribadi individu yang mempengaruhi secara langsung kinerja pekerjaan.[[489]](#footnote-489)

Kompetensi terdapat beberapa komponen. Menurut Boyatzis komponen kompetensi terdiri dari:[[490]](#footnote-490)

* + - * 1. *Motive* (dorongan)

Perhatian berulang terhadap pernyataan tujuan atau kondisi yang muncul dalam bayangan yang mendorong, memerintahkan, atau menyeleksi perilaku individu.

* + - * 1. *Traits* (ciri, sifat, karakter pembawaan)

Pemikiran dan aktivitas psikomotorik yang berhubungan dengan kategori umum dan kejadian.

* + - * 1. *Self Image* (citra diri) merupakan persepsi orang terhadap dirinya dan evaluasi terhadap citranya tersebut.
        2. *Social role* (peran sosial) merupakan persepsi orang terhadap seperangkat norma sosial perilaku yang diterima dan dihargai oleh kelompok sosial atau organisasi yang memilikinya.
        3. *Skill* (keahlian) merupakan kemampuan yang menunjukkan sistem atau urutan perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja.

Menurut Spencer, komponen kompetensi terdiri dari:[[491]](#footnote-491)

*Motives*, adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki seseorang yang menyebabkan tindakan.

*Traits* adalah karakteristik-karakteristik fisik dan respon-respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi.

*Self Concept* adalah sikap, nilai dan citra diri seseorang.

*Knowledge* adalah pengetahuan dan informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu.

Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu.

Dari komponen diatas dapat di lihat dan mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, sedangkan citra diri, watak, motif sifatnya tidak tampak dan lebih sulit untuk dikembangkan melalui program pelatihan sumber daya manusia.

* + - 1. **Pendidikan Kedokteran Hewan**

Pendidikan kedokteran hewan terdiri dari pendidikan program sarjana dan pendidikan program profesi. Pendidikan program sarjana kedokteran adalah program studi yang mendalami ilmu tentang kesejahteraan hewan dan interaksinya dengan lingkungan sekitar dan manusia.[[492]](#footnote-492) Kesejahteraan yang dimaksud terkait dengan penyakit, kesehatan tubuh, virus, budidaya atau pemeliharaan hewan, hingga keamanannya. Dalam mendalami ilmu ini, akan lebih banyak belajar tentang kesejahteraan hewan peliharaan, hewan ternak, hingga hewan liar. Proses pembelajaran tersebut diimplementasikan melalui mata kuliah yang diampu. Secara umum, belajar tentang anatomi hewan, siklus kehidupan, dan sejenisnya. Jadi tidak hanya belajar tentang bagaimana mengobati hewan terluka, tetapi justru lebih dalam daripada itu. Setelah lulus dari program studi ini akan mendapatkan gelar pendidikan yaitu Sarjana Kedokteran Hewan (S.K.H).

Adapun kompetensi seorang sarjana kedokteran hewan yaitu seorang sarjana yang dapat mengemban tugas terkait dengan kewenangan veteriner dalam bidang biomedis, manajemen (sistem) kesehatan hewan, serta pengawasan keamanan dan mutu produk hewan.[[493]](#footnote-493) Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan kedokteran hewan yaitu kurikulum sistem mayor-minor.[[494]](#footnote-494)Lulusan S.K.H dapat langsung menempuh program pendidikan profesi dokter hewan (PPDH) jika ingin menjadi dokter spesialis hewan, bisa langsung melanjutkan ke program pascasarjana atau langsung bekerja.

Program sarjana kedokteran hewan dapat ditempuh dalam 8 semester atau 4 tahun.[[495]](#footnote-495) Pada tahun pertama (dua semester), mahasiswa lebih dahulu mengikuti kuliah tingkat persiapan bersama-sama dengan mahasiswa dari fakultas lain dengan materi ilmu-ilmu dasar. Tahun kedua sampai dengan tahun keempat (enam semester), mahasiswa mengikuti perkuliahan seluruhnya di fakultas dengan materi berisikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kondisi normal hewan, mekanisme penyakit dan aplikasi ilmu kedokteran hewan.

Perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kedokteran yang sangat cepat memerlukan strategi untuk pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum pendidikan tinggi adalah bagian dari instrumen pengajaran yang merupakan penjabaran dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang. Kebutuhan masyarakat senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman sehingga kurikulum pendidikan tinggi juga senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Seperti jurusan kedokteran pada umumnya, mahasiswa jurusan kedokteran hewan setidaknya harus menguasai biologi, kimia dan matematika. Selain itu, di jurusan ini akan dituntut lebih banyak memahami dan menghapal dibanding menghitung dengan rumus. Beberapa mata kuliah yang akan dipelajari diantaranya anatomi veteriner (struktur yang menopang tubuh hewan seperti tulang-tulang), fisiologi veteriner (ilmu fungsi dan sistem tubuh hewan secara normal), farmakologi (ilmu tentang obat-obatan), virologi, bakteriologi, ilmu penyakit dalam, patologi, endoparasit, dan lainnya.

Pendidikan program profesi dokter hewan (prodi VPE) merupakan kelanjutan dari program studi sarjana ilmu kedokteran hewan (prodi BVS). Setelah menyelesaikan program studi pendidikan profesi dokter hewan, lulusan akan memperoleh gelar Doktor Kedokteran Hewan (DVM).[[496]](#footnote-496) Pendidikan program profesi dokter hewan bertujuan sebagai penjamin kesehatan hewan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan visi institusi yang berorientasi ke masa depan dan disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang berwawasan One Health.

1. **Analisis**

**1.Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Pendidikan Kedokteran Hewan**

Urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan perlu dilihat dari beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. **Pertimbangan Filosofis**

Hewan adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang berperan besar dalam mata rantai ekologi/ekosistem kehidupan. Adapun peran hewan dalam ekosistem yaitu membantu penyerbukan, menyuburkan tanah,dan menjaga populasi hewan tertentu sehingga tercipta keseimbangan di alam. Selain hewan,tumbuhan pun berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Agar keseimbangan ekosistem terjaga maka keberadaan hewan perlu dijaga kelestariannya. Jaminan kelestarian hewan dilakukan dengan cara menjaga dan melindungi kesehatan hewan beserta lingkungannya agar dapat berkembang biak, baik yang hidup di alam maupun yang dipelahara oleh manusia untuk kepentingan tertentu.

Jaminan kelestarian dan kesehatan hewan menjadi jaminan bagi kesejahteraan manusia mengingat peran hewan sebagai salah satu sumber pangan yang dibutuhkan oleh manusia. Sumber pangan yang beredar tentunya harus dijamin mutu dan manfaatnya oleh negara sehingga masyarakat aman untuk mengonsumsi pangan asal hewan. Dengan terjaganya kesehatan dan kelestarian hewan tentunya secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang sehat bagi manusia. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu hak asasi setiap orang yang telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, sebagaimana kita ketahui hewan sebagai salah satu pembawa penyakit yang dapat menularkan ke sesama hewan dan dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia. Dengan terjaganya kesehatan hewan tentunya menjaga kesehatan manusia terutama dari penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia. Oleh sebab itu, kesehatan hewan perlu dijaga demi pemenuhan kebutuhan manusia. Jaminan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya pada alinea keempat UUD NRI Tahun 1945, negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Melindungi segenap bangsa Indonesia, salah satu nya melalui penyelenggaraan  **kesehatan hewan** dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan. Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia dan negara agraris, tentunya telah lama memanfaatkan hewan darat dan hewan air untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi masyarakat. Selain itu, hewan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat dan sumber penghasilan bagi negara. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk menjaga kesehatan hewan agar terjaminnya kelestarian kehidupan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

1. **Pertimbangan sosiologis**

Pendidikan kedokteran hewan di Indonesia dimulai tahun 1861 pada jaman penjajahan Hindia Belanda, sedangkan pendidikan tinggi kedokteran hewan pertama di dunia di Lyon Perancis  pada tahun 1761. Hindia Belanda mendirikan pendidikan kedokteran hewan di Indonesia, berawal dari tingginya kasus penyakit pada hewan ternak yang mengakibatkan terganggunya perekonomian dan pertahanan pada saat itu.[[497]](#footnote-497) Hewan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan mulai dari alat transportasi, sampai dengan untuk kebutuhan bahan pangan sehingga jika terjadi masalah kesehatan pada hewan maka seluruh aspek kehidupan pada masa itu menjadi terganggu. Secara nyata hasil pendidikan kedokteran hewan tersebut mampu mengurangi berjangkit dan meluasnya wabah penyakit hewan serta mampu menjaga hewan tetap sehat serta mengurangi berjangkitnya dan mencegah meluasnya wabah penyakit hewan sehingga jaminan kesejahteraan masyarakatpun dapat terwujud saat itu. Pendidikan kedokteran hewan pada proses awal dimulai pada tahun 1861 – 1875 masih berbentuk sekolah, namun lulusannya tidak bergelar dokter hewan (tenaga kesehatan hewan) sampai dengan tahun 1880. Sejak 1907 berdiri secara penuh berbentuk universitas serta lulusannya bergelar dokter hewan.

Berdirinya pendidikan kedokteran hewan di Indonesia merupakan kebutuhan negara dalam menjaga, memulihkan, dan menjamin kesehatan hewan sebagai sistem penjaminan mutu bagi keamanan pangan asal hewan, kesejahteraan manusia, dan pelestarian lingkungan. Saat ini, jumlah dokter hewan di Indonesia berdasarkan CIVAS (2019) berkisar di angka 13.000 yang berarti masih jauh dari cukup.[[498]](#footnote-498) Dengan jumlah penduduk di Indonesia saat ini maka dibutuhkan hampir 70 ribu dokter hewan.[[499]](#footnote-499) Namun pendidikan kedokteran hewan saat ini baru menghasilkan lulusan sekitar 30.000 orang padahal kebutuhan dokter hewan secara nasional baik untuk pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun sektor swasta diperkirakan jumlahnya cukup besar. Sebagai contoh, kebutuhan dokter hewan di pusat kesehatan hewan saat ini sebanyak 5.898 orang sehingga masih diperlukan tambahan dokter hewan sampai tahun 2027 sebanyak 7.210 orang.[[500]](#footnote-500)

Manfaat keberadaan pendidikan kedokteran hewan sudah nampak dari jaman kolonial sampai saat ini. Namun, dari awal berdirinya sampai dengan saat ini pendidikan kedokteran hewan belum memiliki undang-undang sebagai landasan yang kuat untuk mengatur pendidikan kedokteran hewan secara komprehensif.

Dengan belum adanya undang-undang terkait pendidikan kedokteran hewan maka penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan hanya mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan secara umum yaitu UU tentang Sisdiknas dan UU tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kedokteran saat ini, belum ada kementerian yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan. Padahal dalam penyelenggaraan tersebut dibutuhkan keterlibatan langsung pemerintah agar terjaga dan terjamin mutu lulusan pendidikan kedokteran hewan.

Dengan tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) sebagai organisasi profesi dokter hewan dan AFKHI mengambil peran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Tentunya kondisi tersebut menimbulkan permasalahan, *pertama*, tidak adanya keseragaman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Hal ini disebabkan tidak adanya standar nasional pendidikan kedokteran hewan yang disusun oleh pemerintah. Oleh sebab itu, PDHI dan AFKHI menyusun standar pendidikan kedokteran hewan. Hasil penyusunan standar pendidikan kedokteran hewan tersebut hanya bersifat kesepakatan saja sehingga tidak ada daya paksa kepada perguruan tinggi untuk mengikuti kesepakatan yang telah disusun oleh PDHI dan AFKHI.

*Kedua,[[501]](#footnote-501)* dengan tidak adanya standar nasional pendidikan hewan maka menimbulkan banyak implikasi, yaitu tidak adanya standar untuk menjadi wahana pendidikan yang dijadikan sebagai tempat magang/pelatihan atau *internship*. Sehingga setiap Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) membuat standar untuk tempat yang akan dijadikan sebagai wahana pendidikan. Tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi standar kompetensi bagi lulusan kedokteran hewan di Indonesia.

*Ketiga,* di Indonesia saat ini jumlah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran hewan sebanyak 13 (tiga belas) perguruan tinggi.[[502]](#footnote-502) Dari 13 (tiga belas) perguruan tinggi tersebut, tidak semuanya berbentuk FKH. Saat ini perguruan tinggi yang memiliki FKH yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Syiah Kuala, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, [Universitas Wijaya Kusuma Surabaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Wijaya_Kusuma_Surabaya), [Universitas Udayana](https://id.wikipedia.org/wiki/Fakultas_Kedokteran_Hewan_Universitas_Udayana), [Universitas Nusa Cendana](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Nusa_Cendana), Universitas Brawijaya, dan Universitas Pendidikan Mandalika. Sedangkan Universitas Riau, Universitas Negeri Padang, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanudin memiliki program studi kedokteran hewan yang berada di Fakultas Kedokteran. Dari kondisi tersebut nampak bahwa belum ada standar untuk membuka program pendidikan kedokteran hewan.

Selain itu, dalam penyelenggaran pendidikan kedokteran hewan masih diperbolehkan menjadi bagian dari prodi fakultas kedokteran. Bagaimana mungkin suatu pendidikan yang menghasilkan seorang dokter hewan, penyelenggaraannya masih berupa program studi dari fakultas kedokteran hewan. Tentunya dari segi sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan lainnya terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara program studi dan FKH. Luasnya variasi jenis hewan baik berdasar habitat, taksonomi, cara makan, dan lain sebagainya memerlukan perluasan variasi mata ajar, keterampilan, pemahiran dan tentu kemampuan para tenaga pendidik di lingkup pelaksana pendidikan itu sendiri.

Perguruan tinggi adalah suatu lembaga pendidikan yang menghasilkan seorang dokter hewan. Lulusan dari pendidikan kedokteran hewan adalah dokter hewan yang menjadi tenaga kesehatan hewan,berperan utama dalam layanan kesehatan hewan. Maka dapat dikatakan manfaat sosial keluaran hasil pendidikan kedokteran hewan adalah jaminan keterlanjutan layanan kesehatan hewan sehingga manfaat ekologi, sosial, ekonomi hewan tetap lestari bagi kesejahteraan bangsa dan negara ini.

*Keempat,[[503]](#footnote-503)* belum ada kementerian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan kedokteran hewan, padahal sesungguhnya hal tersebut sangat dibutuhkan. Apabila terdapat kementerian yang ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pendidikan kedokteran hewan maka akan tersusun standar nasional pendidikan kedokteran hewan. Standar nasional pendidikan kedokteran hewan ini akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pendidikan kedokteran hewan sehingga lulusan pendidikan kedokteran akan memiliki kompetensi yang terstandar nasional dan terukur. Dengan demikian, peran PDHI dan AFKHI sebagai pihak yang berperan serta membantu kementerian dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan.

*Kelima*,[[504]](#footnote-504) *World Organization for Animal Health* (WOAH) telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan kepada seluruh anggota WOAH dan Indonesia merupakan anggota WOAH. Oleh sebab itu Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan rekomendasi tersebut. Adapun rekomandasi yang telah dibuat oleh WOAH yaitu:

1. Otoritas Veteriner;
2. Penyelenggara pendidikan kedokteran hewan;
3. Uji kompetensi dan penerbitan Surat Tanda Registrasi Veteriner;
4. Badan Penentu Status Veteriner;

5.Undang-Undang yang mengatur pendidikan kedokteran hewan dan standar nasional pendidikan kedokteran hewan; dan

6.Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

Dari keenam rekomendasi WOAH tersebut, Indonesia baru memenuhi angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga). Oleh sebab itu, Indonesia sebagai anggota WOAH belum sepenuhnya menjalankan rekomendasi WOAH tersebut.

1. **Pertimbangan Yuridis**

Saat ini Indonesia baru memiliki peraturan terkait dengan kesehatan hewan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan). Namun regulasi tesebut hanya mengatur hal-hal teknis, administratif, dan strategis.

Pendidikan kedokteran hewan hanya mengikuti aturan tentang pendidikan secara umum yang mengacu pada UU tentang Sisdiknas dan UU tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan kedokteran hewan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi belum memiliki dasar pengaturan sebagaimana halnya pendidikan kedokteran pada manusia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang kemudian dicabut dan diganti dengan UU tentang Kesehatan. Selama ini penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing perguruan tinggi berdasarkan prinsip otonomi.

Jika hanya berpedoman pada aturan pendidikan dan pendidikan tinggi secara umum maka tidak dapat menjamin penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan dapat bermutu serta keterkaitannya dengan manfaat sosial yaitu pendidikan tersebut juga dapat hilang yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian negara dan bangsa ini. Keluaran dari pendidikan kedokteran hewan adalah dokter hewan yang merupakan tenaga kesehatan hewan, berperan utama dalam memberikan layanan kesehatan hewan di negara ini. Ketentuan substansi mulai dari sistem penyelenggaran pendidikan, pendanaan, keterlibatan para pemangku kepentingan, dan tata kelola pendidikan kedokteran hewan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara spesifik dan tersendiri.

1. **Ruang Lingkup Pengaturan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan**

Perkembangan penyakit hewan akibat pemanasan global, perdagangan bebas antar negara, baik yang menular antar hewan (*enzootik*) maupun yang menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya (*zoonosis*) akibat perkembangan jaman, wajib diantisipasi oleh dunia pendidikan kedokteran hewan dan lembaga layanan kesehatan hewan di Indonesia. Semua ini membutuhkan regulasi yang kuat dan komprehensif serta holistik. Mutu pendidikan kedokteran hewan dan mutu layanan kesehatan hewan saling berkaitan, mengingat keluaran pendidikan kedokteran hewan adalah tenaga utama kesehatan hewan dan juga menjadi alasan utama pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan. Oleh sebab itu, ruang lingkup dalam peraturan tersebut mengatur terkait:

1. **Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Hewan**
2. Perguruan tinggi dalam bentuk universitas sebagai penyelenggara pendidikan kedokteran hewan. Setiap perguruan tinggi yang akan membuka pendidikan kedokteran hewan harus berbentuk FKH supaya terpenuhinya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan. Selain itu, perlu juga diatur mengenai pihak-pihak yang bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan, antara lain PDHI, AFKHI, akademisi atau wahana pendidikan kedokteran hewan dan/atau pengguna lulusan pendidikan kedokteran hewan.
3. Standar nasional pendidikan kedokteran hewan yang disusun oleh kementerian sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran hewan bekerjasama dengan kementerian lain yang terkait dengan kesehatan hewan, organisasi profesi, asosiasi dan akademisi. Dalam penyusunan standar nasional ini termasuk juga di dalamnya terkait standar kurikulum, tenaga pengajar, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana meliputi juga di dalamnya standar wahana pendidikan sebagai tempat yang akan digunakan oleh mahasiswa dalam berpraktik.
4. Pengaturan terkait tenaga pengajar baik berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Calon tenaga pengajar yang berasal dari luar negeri tentunya harus memenuhi persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengaturan terkait uji kompetensi.

Penyelenggaraan uji kompetensi mempunyai tujuan untuk menjaga mutu dan kompetensi lulusan pendidikan dokter hewan. Upaya untuk menjaga mutu dan kompetensi lulusan tersebut merupakan keniscayaan dalam mewujudkan layanan kesehatan hewan secara maksimal.

1. Pengaturan terkait mahasiswa asing yang menempuh pendidikan kedokteran hewan di Indonesia.

Dalam UU tentang Pendidikan Tinggi terdapat ketentuan bahwa warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi. Penerimaan mahasiswa warga negara asing tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain: kualifikasi akademik, program studi, dan jumlah mahasiswa. Sebagaimana diketahui, saat ini Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga telah membuka program kelas Internasional, program tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan dokter hewan yang mampu bersaing dengan lulusan dari negara-negara lain serta memiliki kompetensi yang berbasis Internasional. [[505]](#footnote-505)Oleh karena itu, perlu pengaturan warga negara asing yang akan menempuh pendidikan kedokteran hewan di Indonesia.

1. **Pendanaan dan Standar Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran Hewan**

Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam menyediakan dana pendidikan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Selain itu, pemerintah daerah dapat berperan serta dalam hal pendanaan penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan. Sebagai contoh, di Jawa Barat, pemerintah provinsi membangun rumah sakit hewan yang digunakan sebagai tempat wahana pendidikan kedokteran hewan.[[506]](#footnote-506)

Selain itu, menteri menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan kedokteran hewan yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran hewan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selanjutnya, penetapan biaya pendidikan kedokteran hewan yang ditanggung mahasiswa untuk semua perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran hewan harus dilakukan dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

**III.PENUTUP**

**A. Simpulan**

**1. Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan.**

Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan dilakukan dengan pertimbangan:

1. Filosofis

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal ini negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut salah satunya dengan menjaga keseimbangan ekosistem melalui penjagaan pemeliharaan kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Hewan sebagai salah satu sumber pangan kebutuhan manusia oleh sebab itu perlu dijaga kesehatan hewan agar pangan yang berasal dari hewan dapat dikonsumsi aman oleh manusia. Hal ini sebagai salah satu tanggung jawab negara untuk memberikan pelindungan kepada bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

1. Sosiologis

Belum adanya pengaturan terkait pendidikan kedokteran hewan maka menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan, yaitu tidak ada kementerian yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan, belum adanya standar nasional pendidikan kedokteran hewan, belum menjalankan rekomendasi dari WOAH, dan belum adanya standar dalam pembukaan pendidikan kedokteran hewan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

1. Yuridis

Belum adanya peraturan yang mengatur terkait pendidikan kedokteran hewan sehingga pelaksanaannya berlandaskan UU tentang Sisdiknas dan UU tentang Pendidikan Tinggi yang mana kedua undang-undang tersebut hanya mengatur secara umum terkait pendidikan. Saat ini peraturan yang terkait dengan kesehatan hewan UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Namun regulasi tesebut hanya mengatur hal-hal teknis, administratif, dan strategis.

**2.Ruang Lingkup Pengaturan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan**

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang terkait pendidikan kedokteran hewan yaitu:

a.Penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan yang mengatur terkait perguruan tinggi, standar nasional pendidikan kedokteran hewan, tenaga pengajar, uji kompetensi dan mahasiswa asing yang belajar di Indonesia.

b.Pendanaan dan standar satuan biaya pendidikan kedokteran hewan.

**B.Saran**

Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan perlu dibentuk oleh Pemerintah atau DPR sebagai upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas layanan kedokteran hewan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

**Buku**

Anjaryani, A.Maria dan Edwina,T.Noor. *Motivasi Belajar Pada Siswa Asli Papua Terhadap Implementasi Pendidikan Karakter.* G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 2020.

Akmal, H. *Pendidikan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014.

Arbangi, Dakir dan Umiarso. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.

Fadhli, M. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2017.

Huda, M. *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran* : *Isu-Isu Metodis dan Paradigmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Ismaya, Bambang. *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Kompri. *Manajemen Pendidikan Jilid 3*. Bandung: Alfabet, 2015.

Prawiradilaga, Dewi Salma. *Wawasan Teknologi Pendidikan*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sanjaya, Wina. *Pembelajaran dalam implementasi kurikulum Berbasis Kompetensi.* Jakarta: Kencana, 2008.

**Jurnal**

Julaiha, S. *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran.* Jurnal: Dinamika Ilmu, 2014.

Machmuddah, Z. *Peranan good university governance terhadap kinerja perguruan tinggi.* Jurnal Akuntansi Indonesia, 2019.

Rahman,Abd, *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan*, Journal Unismuh: Vol.2 No.1, Juni 2022.

Ryan, Hendrik dan Renna, Puan. *Konsep Pendidikan Menurut John Locke dan Relevansinya bagi Pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Pedalaman Papua.* Jurnal Papeda: Vol 4 No 1, Januari 2022.

**Bahan yang tidak Diterbitkan**

Dharrnojono, *Pendidikan Dokter Hewan Praktis Paska Kampus,* Bogor: Proceeding of KIVNAS, 2008.

Kemendikbud Ristek Dikti*, Urgensi Peraturan tentang pendidikan Kedokteran Hewan*, Bahan Paparan Kemendikbud Ristek Dikti, tanggal 6 April 2021.

OIE, *OIE recommendations on the Competencies of graduating veterinarians (‘Day 1 graduates’) to assure National Veterinary Services of quality,* PVS, Pathway, Mei 2012.

PDHI, Bahan Paparan PDHI, diskusi dengan Pusat Perancangan Undang-Undang, 22 Juni 2022.

Program Studi Kedokteran Hewan, *Hasil diskusi dengan Program Studi pendidikan kedokteran hewan UNPAD,* tanggal15 Sepetember 2022.

Tim Penyusun RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan, *Laporan Pengumpulan Data*, Oktober 2022.

UGM, *Regulasi Pendidikan Kedokteran Hewan,* Bahan Paparan FKH UGM, diakses tanggal 23 Agustus 2022.

**Laman**

Humas BKPK. *Inisiatif One Health Untuk Dunia Yang Lebih Baik*. Dimuat dalam Badan www.badankebijakan. kemkes.go.id, diakses tanggal 12 September 2024.

IPB University. *Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan (S1)*. Dimuat dalam [Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan (S1) | SVMBS (ipb.ac.id)](https://svmbs.ipb.ac.id/program-sarjana-kedokteran-hewan/), diakses tanggal 14 September 2024.

PDHI. *Jumlah Dokter Hewan di Indonesia Tak Sampai Setengah dari yang Dibutuhkan*. Dimuat dalam <https://portal.pdhi.or.id/berita/detail/jumlah-dokter-hewan-di-indonesia-tak-sampai-setengah-dari-yang-dibutuhkan>, diakses tanggal 14 September 2024.

Program Studi [Kedokteran Hewan. *Kedokteran Hewan*. Dimuat dalam | FK UNPAD - OfficiaSite](https://fk.unpad.ac.id/program-studi-sarjana/kedokteran-hewan/), diakses tanggal 13 September 2024.

UGM. [*Ingin jadi Dokter Hewan? Yuk, Kenali Seluk Beluk Kuliah di FKH UGM* Dimuat dalam Universitas Gadjah Mada](https://ugm.ac.id/id/berita/ingin-jadi-dokter-hewan-yuk-kenali-seluk-beluk-kuliah-di-fkh-ugm/), diakses tanggal 14 September 2024.

Universitas Airlangga. [*Praktik Dokter Hewan dan Telemedicine di Indonesia.* Dimuat dalam Universitas Airlangga Official Website (unair.ac.id)](https://unair.ac.id/praktik-dokter-hewan-dan-telemedicine-di-indonesia/), diakses tanggal 14 September 2024.

**KEWENANGAN PENYIDIKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH YURISDIKSI LAUT INDONESIA**

***(INVESTIGATIVE AUTHORITY OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE IN THE JURISDICTION OF INDONESIAN SEA TERRITORY)***

# **Sutriyanti**

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

\*Korespondensi: [sutriyantilddpr@gmail.com](mailto:sutriyantilddpr@gmail.com)

**Abstrak**

Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi kelautan yang luar biasa. Namun, banyak ancaman dan tantangan dalam tata kelola keamanan dan penegakan hukum di yurisdiksi laut misalnya pembajakan, penyelundupan, tindak pidana pencemaran laut, dan tindak pidana perikanan. Ada beberapa lembaga yang terlibat dalam penyidikan di yurisdiksi, salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Namun, dalam pelaksanaan kewenangan tersebut masih banyak tumpang tindih dengan lembaga lain di antaranya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Polri salah satu institusi yang diberikan kewenangan utama dalam penyidikan di yurisdiksi namun Polri tidak dapat mendasarkan diri sebagai penyidik utama di yurisdiksi sebagaimana selama ini berlaku pada penyidikan di darat. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan penyidikan di wilayah yurisdiksi dan bagaimana kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui pengaturan penyidikan di yurisdiksi laut dan mengetahui kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia. Penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melakukan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada banyak lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan di yurisdiksi laut Indonesia seperti TNI AL, KKP, Bea dan Cukai, juga Polri. Polri melalui unit di bawahnya yaitu Polisi Perairan memiliki kewenangan pada perairan Indonesia dan landas kontinen. Namun untuk zona ekonomi ekslusif dan zona tambahan, Polri tidak memiliki kewenangan penyidikan. Untuk kelancaran tugas penyidikannya ke depan Polri harus berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang. Selain itu, Polri juga harus melengkapi sarana dan prasarananya serta meningkatkan kemampuan personilnya.

Kata kunci: kewenangan, penyidikan, laut

***Abstract***

*Indonesia has a vast sea area with extraordinary marine potential. However, there are many threats and challenges in security governance and law enforcement in maritime jurisdictions, for example, piracy, smuggling, marine pollution crimes, and fisheries crimes. Several institutions are involved in investigations within the jurisdiction, including the Indonesian National Police (Polri). However, in implementing this authority, there is still a lot of overlap with other institutions, including the Navy, Coast Guard, and Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP). Polri is one of the institutions given the main authority in investigations in the jurisdiction. Still, Polri cannot base itself as the main investigator in the jurisdiction as has currently been the case for investigations on land. The problem in this paper is how to regulate investigations in jurisdictional areas and what is the authority of the National Police in carrying out investigations in Indonesian maritime jurisdictions. The purpose of this article is to understand the arrangements for investigations in maritime jurisdictions and to understand the authority of Polri in carrying out investigations in Indonesian maritime jurisdictions. The writing uses a normative jurudical approach, namely searching primary and secondary legal materials. The results of the analysis show that many institutions have investigative authority in Indonesian maritime jurisdictions, such as the Indonesian Navy, KKP, Customs, as well as the Polri. Polri, through its subordinate unit, namely the Water Police, has authority over Indonesian waters and the continental shelf. However, for exclusive economic zones and additional zones, Polri does not have investigative authority. To carry out its investigative duties smoothly in the future, Polri must coordinate with the authorized institutions. Apart from that, Polri must also complete its facilities and infrastructure and improve the capabilities of its personnel.*

*Keywords: authority, investigative, sea*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara maritim dan juga negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas. Total luasnya hingga 8,3 juta kilometer persegi (km2), memiliki 17.504 pulau, dan garis pantai yang membentang hingga sepanjang 108.000 km.[[507]](#footnote-507) Jika melihat hal tersebut, Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar. Ada berbagai jenis pemanfaatan potensi laut yang dapat dilakukan terutama terkait dengan sektor perekonomian Indonesia seperti, perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata, transportasi laut, sumber daya alam, pertambangan dan energi, dan masih banyak pemanfaatan lain yang dapat dilakukan.[[508]](#footnote-508)

Potensi sumber daya kelautan yang melimpah yang dimiliki Indonesia dan posisi Indonesia yang strategis, menempatkan Indonesia sebagai negara yang krusial terhadap berbagai negara dari beberapa wilayah. Dengan potensi kekayaan sumber daya laut yang besar, di samping memberikan peluang juga menyajikan tantangan.[[509]](#footnote-509) Ada banyak tantangan dan kejahatan yang terjadi di laut, antara lain pembajakan, penyelundupan, tindak pidana di bidang pelayaran, tindak pidana pencemaran laut, tindak pidana benda budaya, tindak pidana terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tindak pidana konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, dan tindak pidana perikanan.[[510]](#footnote-510)

Tata kelola kelautan merujuk pada proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan sumber daya kelautan dan lingkungan maritim. Hal ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, industri, dan organisasi non-pemerintah. Keterkaitan dengan banyak sektor dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, tidak jarang menimbulkan permasalahan di lapangan, terutama terkait dengan koordinasi dan kewenangan antar instansi/lembaga pemerintah. Di sisi lain, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional, dituntut untuk melaksanakan hukum internasional dengan mengintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan dan meningkatkan peran aktif dalam percaturan kelautan global. Tantangan yang dihadapi tidak sederhana karena kompleksitas dalam tataran koordinasi, kewenangan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya laut guna keberlanjutan kehidupan di laut, keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut, serta membangun sistem keamanan laut.[[511]](#footnote-511)

Tata kelola keselamatan, keamanan, dan penegakkan hukum di laut Indonesia saat ini dilaksanakan oleh beberapa instansi/lembaga dengan menggunakan dasar hukum yang juga beragam. Dari beberapa kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan keselamatan, keamanan, dan penegakan hukum di laut, terdapat 6 (enam) kementerian/lembaga yang memiliki armada/kapal patroli sebagai alat penegakan hukum di laut, yakni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Negara Republik Indonesia/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan/Direktoran Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla)/Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Kelautan dan Perikanan/Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), Kementerian Keuangan/Dirjen Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Demikian juga terdapat berbagai Lembaga/Instansi yang melaksanakan kewenangan di wilayah laut. Kewenangan lembaga di wilayah laut namun masih bersifat sektoral dan masing-masing lembaga melakukan operasi patroli dan penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya.[[512]](#footnote-512)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisilan Negara Republik Indonesia (UU tentang Kepolisian), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengayoman kepada masyarakat.[[513]](#footnote-513) Kemudian, tugas pokok Kepolisian negara republik Indonesia adalah a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b. Menegakan Hukurn. c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.[[514]](#footnote-514) Polri bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan.[[515]](#footnote-515)

Polri merupakan salah satu bagian dari tata kelola keselamatan, keamanan, dan penegakkan hukum di laut Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wilayahan. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang di pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di tingkat ke wilayahan disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda).[[516]](#footnote-516) Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Perkapolri No.14 Tahun 2018), Polda merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dibantu oleh subbagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air (Ditpolair).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) disebutkan bahwa wilayah perairan berbeda dengan wilayah yurisdiksi. Wilayah perairan meliputi: a. perairan pedalaman; b. perairan kepulauan; dan c. laut teritorial. Sedangkan untuk wilayah yurisdiksi meliputi: a. zona tambahan; b. zona ekonomi eksklusif indonesia; dan c. landas kontinen.[[517]](#footnote-517)

Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), pada wilayah perairan, Indonesia memiliki kedaulatan. Sedangkan, pada wilayah yurisdiksi, Indonesia memiliki hak berdaulat. Karakteristik wilayah perairan dan yurisdiksi tentu berbeda. Begitupun, karakteristik tindak pidana di wilayah perairan dan yurisdiksi laut berbeda. Dengan perbedaan tersebut tentu pendekatan penyidikan akan berbeda di kedua wilayah tersebut. Pada wilayah yurisdiksi laut Indonesia, terdapat lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sampai ke wilayah yurisdiksi yaitu Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (misalnya untuk sektor perikanan yaitu KKP), dan TNI AL. Sedangkan, Bakamla memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan keamanan dan keselamatan sampai wilayah yurisdiksi laut Indonesia, namun Bakamla tidak memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana. Dengan banyaknya lembaga yang terlibat dan kompleksnya permasalahan tindak pidana di laut maka perlu bagaimana kewenangan penyidikan yang diberikan oleh peraturan undang-undang kepada institusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen (UU Landas Kontinen), kewenangan penyidikan tindak pidana Polri hanya pada wilayah landas kontinen, artinya tidak semua wilayah yurisdiksi dapat dilakukan penyidikan oleh Polri. Selain itu, dengan tata laksana organisasi, sumber daya manusia, prasarana, dan sarana yang dimiliki oleh Polri saat ini dikaitkan dengan kompleksitas kewenangan kelautan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilihat lebih lanjut efektivitas kewenangan Polri di wilayah yurisdiksi laut Indonesia.

1. **Permasalahan**

Dalam tulisan ini, permasalahan yang menjadi pokok bahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyidikan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan dan efektivitas Polri dalam melakukan penyidikan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia?

1. **Tujuan**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyidikan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia.
2. Untuk mengetahui kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia.
3. **Metode Penulisan**

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[[518]](#footnote-518)

Penyusunan tulisan ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan pengkajian sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.[[519]](#footnote-519) Kajian bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penyidikan, kelembagaan, perairan, dan kelautan. Kajian bahan hukum sekunder dalam penulisan ini terdiri dari pendapat hukum dan teori-teori penyidikan, kelembagaan, perairan, dan kelautan yang didapat dari artikel ilmiah dan *website* yang memuat hasil penelitian. Lebih lanjut, kajian bahan hukum tersier terdiri dari bahan-bahan yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder, misalnya jurnal dan laman yang memuat artikel terkait penyidikan, kelembagaan, perairan, dan kelautan.

1. **Pembahasan**
2. **Kerangka Konsepsional**
3. **Konsep Kedaulatan dan Hak Berdaulat**

Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya baik darat, air, maupun udara. Hukum yang berlaku yaitu hukum nasional negara masing-masing. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu.[[520]](#footnote-520) Lebih lanjut, negara juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan hukum dalam wilayah kedaulatannya. Permasalahan yurisdiksi negara timbul karena dalam masyarakat internasional masing-masing negara merupakan anggota yang berdaulat. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubung antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.[[521]](#footnote-521) Hubungan kehidupan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat internasional terjadi melampaui batas-batas suatu negara. Prinsip teritorial menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada di wilayahnya.[[522]](#footnote-522) Kondisi tersebut secara tidak langsung menyebabkan semua benda termasuk laut yang ada dalam wilayah suatu negara tunduk pada kekuasaan dan hukum negara yang bersangkutan.

Laut merupakan salah satu wilayah kedaulatan suatu negara yang sering digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.[[523]](#footnote-523)

UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan kedaulatan negara pantai atas laut teritorial tepatnya pada bab II Pasal 2 ayat 1 konvensi dikatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi juga jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut laut teritorial.[[524]](#footnote-524)Adapun dalam *UNCLOS* 1982 yang tertuang pada Pasal 55 ayat 1 huruf (a) UNCLOS 1982 menyatakan:

“bahwa sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan secara penuh *(sovereignty)* tetapi tetaplah memiliki hak berdaulat *(sovereign rights)* yang artinya memiliki hak untuk mengelola serta memanfaatkan, hak berdaulat tersebut untuk kepentingan melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi serta melakukan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati.”[[525]](#footnote-525)

Oleh karena perbedaan tersebut di atas antara prinsip Kedaulatan *(sovereignty)* dan Hak Berdaulat *(sovereign right)* adalah sesuatu yang memiliki arti yang berbeda dalam konteks hukum internasional.[[526]](#footnote-526)

UNCLOS 1982 telah membedakan zona laut berdasarkan kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara di wilayah lautnya. Prinsipnnya kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign rights*) adalah dua hal yang berbeda sesuai dengan konteks hukum internasional.[[527]](#footnote-527) Pengertian hak berdaulat menurut pasal 56 ayat 1 huruf (a) UNCLOS 1982 adalah hak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya.[[528]](#footnote-528) Berdasarkan definisi tersebut, yang dimaksud dengan hak berdaulat ini adalah hak yang mengatur kekuasaan dan mengelola sumber daya alam untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh negara pantai yang ada pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Menurut ayat 2 mengemukakan bahwa kedaulatan juga meliputi pula ruang udara di atasnya dan dasar laut beserta tanah di bawahnya.

Secara bahasa pengertian kedaulatan yang tertulis dalam bahasa inggris dengan sebutan s*overeignty* dan dari bahasa Latin *superanus* dapat diartikan sebagai yang tertinggi atau teratas.[[529]](#footnote-529) Sejalan dengan itu C.F. Strong menyatakan bahwa kedaulatan berarti superioritas yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum. Lebih lanjut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Sementara itu menurut kamus filsafat karya Simon Blackburn kedaulatan *(sovereignty)* adalah otoritas tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas lainya.[[530]](#footnote-530)

Berdasarkan konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki artian sebagai kewenangan penuh atas suatu wilayah *(territory)* yang di mana dalam hal ini termasuk keseluruhan wilayah daratan, perairan kepulauan, dan laut teritorial dan secara umum yang berlaku pada wilayah tersebut di atas ialah hukum nasional suatu negara yang bersangkutan.[[531]](#footnote-531) Adapun dalam konsep tradisional kedaulatan memiliki dua pengertian antara lain: pertama disebut dengan aspek intern kedaulatan ialah hak setiap negara secara bebas untuk menentukan hubungannya dengan berbagai negara maupun kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain. Adapun yang kedua merupakan aspek ekstern kedaulatan adalah kemampuan negara-negara melakukan hubungan internasional ataupun interaksi dengan negara-negara lain.[[532]](#footnote-532) Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh wilayah negara, sehingga negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayahnya. Serta tanpa adanya wilayah batas dengan batas-batas tertentu, maka suatu negara tidak bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional.[[533]](#footnote-533)

Hak berdaulat atau *sovereign rights* bisa dikatakan tidaklah sama secara pengertian maupun secara hukum dengan kedaulatan. Jika melihat pengertian hak berdaulat berdasarkan yang tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak Berdaulat ialah hak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah. Hak berdaulat dalam hukum tepatnya hukum laut akan lebih kepada memperjelas mengenai batasan suatu negara dalam pengelolaan wilayah lautnya, hak berdaulat ini berkaitan dengan hak-hak tertentu namun tidak bersumber atau berdasarkan pada kedaulatannya, melainkan hak yang dijamin dan diakui oleh hukum internasional.[[534]](#footnote-534)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa hak negara pantai itu terbatas dan tidak mempengaruhi status perairan atau ruang udara di atasnya sebagai perairan internasional. Batasan dalam penjelasan sebelumnya bukanlah mengenai kedaulatan semata-mata suatu negara melainkan batasan hak suatu negara untuk melakukan pengelolaan dan pemberdayaan kekayaan sumber daya laut, hak tersebut berimplikasi jika negara yang bersangkutan tidak melakukan eksplorasi ataupun eksplotasi terhadap sumber daya lautnya, maka tidak seorangpun dapat melakukannya tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan.

1. **Konsep Penyidikan**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan antara tindakan hukum yang dinamakan penyelidikan dan penyidikan, walaupun penyidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyelidikan. Penyidikan sendiri merupakan kegiatan lanjutan dari penyelidikan, jika dalam tahap penyelidikan telah dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana maka dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.[[535]](#footnote-535)

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai perbedaan penyelidikan dan penyidikan, patut dipahami bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah bagian dari hukum acara pidana. Masyarakat pun sering terbalik tentang proses penyelidikan atau penyidikan dulu sebelum berlanjut ke penuntutan dan persidangan. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, tahapan penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang digunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyatakan penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyelidik sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.[[536]](#footnote-536) Menurut KUHAP Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah: 1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan 2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Terkait dengan tindak pidana yang terjadi di laut, terdapat perlakuan khusus karena wilayah laut juga berbeda dengan darat. Tindak pidana tertentu dilaut merupakan kategori tindak pidana khusus maka disebut juga delik khusus, atau delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan demikian maka penyelesaiannyapun mempunyai kekhususan yang tidak sesuai dengan tindak pidana umum dalam KUHP maupun dengan hukum acara KUHAP.

Asas-asas hukum pidana dalam buku 1 KUHP juga berlaku terhadap tindak pidana di laut. Hal ini didasarkan Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab VIII KUHP diperlakukan terhadap ketentuan perundang-undangan di luar KUHP yang diancam dengan ancaman pidana, kecuali diatur khusus oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 284 KUHAP disebutkan bahwa semua perkara diberlakukan hukum acara dalam KUHAP dengan pengecualian dan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana yang dibawa oleh undang-undang tertentu. Dengan demikian maka pada tindak pidana di laut, yang diatur adalah acaranya, sebagai contoh misalnya penghentian kapal, pemeriksaan diatas kapal, tata cara membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan sebagainya yang semua itu menyimpang dari pada KUHAP, karena KUHAP tidak mengatur hal tersebut.

1. **Analisis**
2. **Pengaturan Penyidikan di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia**

Dalam penegakan hukum di laut terdapat 14 (empat belas) kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan penegak hukum di laut. Dari 14 (empat belas) kementerian dan/atau lembaga tersebut 6 (enam) kementerian/lembaga sudah memiliki armada/kapal patroli sebagai alat penegakan hukum di laut, yakni TNI AL, Polri/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan/Dirjen Hubla (KPLP), Kementerian Kelautan dan Perikanan/Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan/Dirjen Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Setiap lembaga tersebut memiliki operasi masing-masing yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Area operasi 6 (enam)armada instansi tersebut memiliki irisan dan keterkaitan yang erat.

Adapun 6 (enam) instansi penegakan hukum tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

| **No.** | **Lembaga** | **Penegakan Hukum/penyidik** | **Dasar Hukum** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP) | Penyidik Perikanan | * UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. * Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |
| 2. | Bea Cukai | Penyidik Kepabeanan | UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan |
| 3. | Polri | Penyidik pidana di laut (hanya yang terjadi di wilayah perairan teritorial) | * UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia * UU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen * Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah |
| 4. | KPLP | Penyidik pelayaran | UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran |
| 5. | TNI AL | Penyidik pidana pembajakan dan perompakan di laut, perikanan, pelayaran, pelanggaran wilayah dan pidana yang terjadi di ZEEI. | * UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia * UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia |
| 6. | Bakamla | Tidak memiliki kewenangan penyidikan namun memiliki kewenangan patroli dan penangkapan/penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum di wilayah perairan teritorial sampai dengan perairan yurisdiksi ZEEI. | UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan |

Sumber: Kompilasi Penegakan Hukum/Penyidik oleh lembaga dari berbagai peraturan perundang-undangan

Sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut diatas, dari 6 (enam) kementerian/lembaga yang melakukan penegakan hukum di laut hanya Bakamla yang tidak memiliki kewenangan penyidikan. Bakamla hanya memiliki kewenangan patroli dan penangkapan terhadap dugaan pelanggaran hukum, sementara cakupan wilayah penegakan hukum yang menjadi kewenangan Bakamla sangat luas yakni meliputi wilayah perairan teritorial.

Untuk wilayah kerja ke enam lembaga tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Lembaga** | **Penegakan Hukum/penyidik** |
| 1. | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | WPP NRI (perairan Indonesia, ZEEI, landas kontinen, sungai, waduk air, dan rawa lainnya untuk pembudidayaan ikan yang potensial) |
| 2. | Bea Cukai | Wilayah kepabeanan Indonesia |
| 3. | Polri | * Perairan Indonesia * Landas kontinen |
| 4. | KPLP | Wilayah Perairan Indonesia |
| 5. | TNI AL | * Wilayah Perairan Indonesia * Wilayah Yurisdiksi Indonesia |
| 6. | Bakamla | * Wilayah Perairan Indonesia * Wilayah Yurisdiksi Indonesia |

Sumber: Disarikan dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan kedua tabel di atas bahwa lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sampai ke wilayah yurisdiksi yaitu Polri, KKP dan TNI AL. Namun, untuk kewenangan Polri hanya di wilayah landas kontinen. Secara yuridis formal bahwa tiga instansi yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yurisdiksi laut Indonesia. Namun, dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara tegas dan jelas pembagian kewenangan dan pengaturan mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut dapat menyatakan berwenang dalam penegakan hukum tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Pengaturan yang demikian ini dapat menimbulkan kerawanan adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan dan perbedaan pola penegakan hukum di antara sesama aparat, bahkan timbul kekhawatiran akan adanya ketidakharmonisan atau gesekan antar aparat serta tumpang tindih dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum di laut. Keadaan ini sangat potensial untuk menimbulkan konflik kewenangan dalam penegakan hukum. Timbulnya Konflik kewenangan dapat menyebabkan keadaan yang tidak menguntungkan dan mencerminkan penegakan hukum yang lemah dan tidak optimal.

Tindak pidana tertentu di laut merupakan kategori tindak pidana khusus maka disebut juga delik khusus, atau delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan demikian maka penyelesaiannya pun mempunyai kekhususan yang tidak sesuai dengan tindak pidana umum dalam KUHP maupun dengan hukum acara KUHAP. Tindak pidana khusus memiliki karakteristik dan penanganan perkara yang bersifat khusus dan spesifik, baik dari segi aturan hukum yang diterapkan, hukum acara yang digunakan, dan penegak hukum yang terlibat.

Wilayah yurisdiksi laut Indonesia memiliki luas sebesar 6,4 km2 (zona tambahan 270.000 km2, ZEEI 3 juta km2, dan landas kontinen 2,8 juta km2).[[537]](#footnote-537) Faktanya dengan luas wilayah yurisdiksi laut yang luas tersebut, bahwa penyidikan dilakukan oleh ketiga instansi tersebut (KKP melakukan penyidikan tindak pidana perikanan), TNI AL, dan Polri hanya di wilayah landas kontinen, tentu sinergitas dan kewenangan serta sarana prasana harus optimal dilakukan. Polri sebagai penyidik utama dalam KUHP hanya dapat melakukan penyidikan di wilayah landas kontine. Oleh karena itu, untuk wilayah yurisdiksi seperti ZEE dan zona tambahan untuk penyidikan hanya dapat dilakukan oleh TNI AL dan KKP untuk tindak pidana perikanan. Sedangkan tindak pidana yang terjadi di yurisdiksi laut Indonesia sangat beragam dan terjadi sangat cepat, tentu optimalisasi dan sinergi harus dapat dilakukan oleh berbagai institusi yang diberikan kewenangan. Oleh karena itu, selain sinergitas antar institusi yang ada, ke depan juga harus ada pembagian kewenangan dan pengaturan mekanisme kerja yang pasti, serta *leading* dalam hal penyidikan tindak pidana di wilayah landas kontinen.

1. **Kewenangan Kepolisian RI Dalam Melakukan Penyidikan di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia**

Berdasarkan UU Kepolisian, fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 13 UU Kepolisian, tugas pokok Polri yaitu:

* 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. menegakkan hukum; dan
  3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari tugas Kepolisian di atas bahwa secara garis besar, tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam ketentuan Pasal 5 disebutkan bahwa:[[538]](#footnote-538)

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari ketentuan Pasal 5 di atas tampak jelas bahwa ruang lingkup kewenangan Kepolisian lebih dipusatkan pada pemeliharaan keamanan dalam negeri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pemberlakuan UU Kepolisian tidak mencakup zona tambahan yang bukan merupakan wilayah ”dalam negeri”. Zona tambahan merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia atau wilayah maritim yang berdekatan dengan laut teritorial dan memiliki hak berdaulat serta kewenangan tertentu.

Kemudian pada Pasal 14 huruf (g) UU Kepolisian, salah satu tugas Kepolisian yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Wewenang Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik telah diatur dalam KUHAP. Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi negara Republik Indonesia.[[539]](#footnote-539) Kemudian, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[[540]](#footnote-540)

Polri memegang peranan utama dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, tanpa mengurangi kewenangan yang dimiliki penyidik lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Wewenang Polri sebagai penyelidik dan penyidik juga diatur sesuai pengaturan dalam ketentuan KUHAP. Dalam pasal 4 KUHAP dikatakan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam hal penegakan hukum di perairan di laksanakan oleh polisi perairan yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indone-sia. Yang menjadi fokus dari Kepolisian Perairan adalah pengamanan perairan lewat penegakan hukum, dengan target pemberantasan kejahatan yang berhubungan dengan perairan dan kelautan atau *admiralty crimes*.[[541]](#footnote-541)

Berdasarkan Pasal 1 angka 26, Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Berdasarkan lampiran Perkapolri No.14 Tahun 2018, bahwa Ditpolairud memiliki tugas dan fungsi. Ditpolairud Polda bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara. Kemudian, dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditpolairud menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
2. pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud, serta pelayanan masyarakat;
3. pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti;
4. pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda;
5. penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polda serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres; dan
6. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara.

Berdasarkan fungsi Ditpolairud tersebut bahwa Ditpolairud memiliki fungsi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti. Kewenangan penyidikan Polairud dilakukan di wilayah perairan Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen, Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa “penyidikan tindak pidana di landas kontinen dilakukan oleh: a. penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia; b. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/ atau c. penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian, pada ayat (5) disebutkan bahwa “penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan pasal tersebut bahwa Polri juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan di landas kontinen.

KUHAP tidak seluruhnya dapat diterapkan pada hukum acara di laut karena beberapa alasan antara lain:[[542]](#footnote-542)

1. Status kapal/pesawat udara belum diatur sebagai subyek.
2. KUHAP memberlakukan hukum acara pidana khusus via pasal 284 KUHAP.
3. KUHAP belum mengatur kewenangan penyidik diluar Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. KUHAP tidak mengatur wilayah di luar Indonesia padahal ada tindak pidana di laut yang terjadi di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).
5. Tembusan surat penangkapan seharusnya diberikan kepada keluarga, tetapi bila yg ditangkap merupakan kapal maka tidak mempunyai keluarga.
6. Penahanan untuk kapal tidak bisa dilaksanakan di rumah tahanan negara.
7. Pengadilan di laut tidak mengenal yurisdiksi pengadilan, pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan yang mempunyai yurisdiksi terdekat (berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dimana kapal diserahkan ke pelabuhan terdekat.

Kepolisian Perairan dalam pelaksanaan kewenangan kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia terbatas pada wilayah laut teritorial saja, yaitu pada wilayah sampai dengan 12 mil dari garis pantai terluar. Kepolisian Perairan tidak dapat menangani masalah hingga menyentuh ZEEI. Sehingga jika harus menangkap kapal milik asing atau milik warga negara Indonesia di wilayah ZEEI, Polri harus menyerahkannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau TNI AL.

Jika melihat Pasal 284 KUHAP, bahwa semua perkara diberlakukan hukum acara dalam KUHAP dengan pengecualian dan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana yang dibawa oleh undang-undang tertentu. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 284 tersebut pada tindak pidana di laut, yang diatur merupakan proses beracaranya, misalnya penghentian kapal, pemeriksaan diatas kapal, penanganan dan tata cara membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan lain sebagainya. Jika dilihat berbagai proses beracara tersebut semuanya menyimpang dari pada KUHAP, karena KUHAP tidak mengatur detail hal tersebut. Oleh karena itu, Polri tidak dapat mendasarkan diri sebagai penyidik utama di wilayah yurisdiksi sebagaimana selama ini berlaku pada penyidikan di darat.

Pada dasarnya, pelanggaran atau tindak pidana di darat dapat terjadi di laut. Namun, tindak pidana di laut akan lebih sulit, mahal, kompleks, dan sangat dinamis. Selain itu, juga bersifat multi dimensi, multi sektor, dan trans nasional. Kompleksitas isu di sektor maritim nyatanya memang membutuhkan kerjasama seluruh *stakeholder*. Permasalahan keamanan laut sangat kompleks melibatkan berbagai kegiatan, seperti sengketa batas, terorisme, perompakan, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan hingga bencana. Dengan kelembagaan eksisting saat ini, seringkali terjadi tumpang tindih dalam penegakkan hukum di laut. Lebih lanjut, penindakan di laut membutuhkan sarana prasarana yang menunjang dan lengkap, personil yang terlatih, dan membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Sebagaimana diketahui bahwa prosedur dan tata cara pemeriksaan tindak pidana di laut sebagai bagian dari penegakan hukum di laut mempunyai ciri dan cara yang khas serta mempunyai beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana di darat. Hal ini disebabkan karena di laut terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan tetapi terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati. Selain itu, hampir semua tindak pidana diwilayah perairan laut merupakan tindak pidana yang terorganisir, sehingga diperlukan ketrampilan hukum yang mumpuni dan profesional dalam menanganinya. Oleh karena itu, diperlukan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, di mana, setiap aparat penegak hukum pada institusi yang berwenang dan ditunjuk sebagai penyidik tindak pidana di wilayah yurisdiksi laut Indonesia harus memiliki kemampuan baik dan *expert* (ahli) dalam bidang hukum khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana.

Polri melalui Kepolisian Perairan menjadi salah satu unsur utama dalam penyidikan tindak pidana di wilayah yurisdiksi laut selain TNI AL dan PPNS tertentu memiliki kewenangan dan kewajiban yang sejajar. Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di wilayah yurisdiksi laut Indonesia agar efektif dan optimal tentu Polisi Perairan perlu melakukan berbagai upaya, antara lain:

* 1. Kewenangan penyidikan tindak pidana di wilayah zona tambahan dan ZEEI.
  2. Kerjasama dan sinergitas lintas sektor yang jelas dan terarah antara institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan.
  3. Peningkatan prasarana dan sarana para penegakan hukum.
  4. Peningkatan kuantitas dan kemampuan para penegak hukum.

1. **Penutup**
2. **Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka dalam tulisan ini dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada wilayah yurisdiksi laut Indonesia ada banyak lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum, namun ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan yaitu Polri di wilayah landas kontinen, PPNS (misal sektor Perikanan oleh KKP), dan TNI AL. Namun, dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara tegas terkait pembagian kewenangan dan pengaturan mekanisme kerjanya. Hal tersebut, berpotensi menimbulkan adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan dan perbedaan pola penegakan hukum di antara sesama aparat, sehingga dapat menyebabkan ketidakharmonisan atau tumpang tindih dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia.
2. Dalam hal penegakan hukum di perairan di laksanakan oleh Kepolisian Perairan. Kepolisian Perairan dalam pelaksanaan kewenangan kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia pada wilayah perairan Indonesia dan berdasarkan UU Landas Kontinen memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan di wilayah landas kontinen. Kepolisian Perairan tidak dapat menangani masalah hingga menyentuh ZEEI dan zona tambahan. Sehingga jika harus menangkap kapal milik asing atau milik warga negara Indonesia di wilayah ZEEI dan zona tambahan, Kepolisian Perairan harus menyerahkannya dan berkoordinasi salah satunya dengan TNI AL.
3. **Saran**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa saran untuk perbaikan legislasi pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran atau tindak pidana di laut sangat kompleks dan bersifat trans nasional, sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi antar aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia.
2. Untuk menunjang tugasnya Kepolisian Perairan perlu melengkapi sarana dan prasarananya ketika melakukan penegakan hukum tindak pidana di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, baik dari segi teknologi maupun kemampuan personil dari Kepolisian Perairan, seperti mampu menguasai medan laut yang sangat luas maupun penguasaan atau pemahaman secara menyeluruh atas peraturan perundang-undangan terkait.
3. Saat ini kewenangan penyidikan tindak pidana Kepolisian di wilayah yurisdiksi laut Indonesia hanya di landas kontinen, sedangkan Kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk wilayah ZEEI dan zona tambahan. Oleh karena itu, ke depan perlu dikaji lagi penambahan kewenangan penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian pada wilayah ZEEI dan zona tambahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Taun 2014 tentang Kelautan.

**Buku**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arifin, Saru. *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jimly, Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve., 1994.

Kusumaatmadja, Mochtar, & Etty R Agoes. *Pengantar Hukum Internasional.* Bandung: Alumni, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi).* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Parthiana, I Wayan. *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional.* Bandung: Mandar Maju, 2015.

Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, 2014.

Widagdo, Setyo dkk. *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional.* Malang: UB Press, 2019.

Zulkarnain. *Praktik Peradlan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.

**Jurnal**

Darajati, Muhammad Rafi dan Muhammad Syafei. *Politik Hukum Pembentukan Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Maritim di Indonesia.* Jurnal Era Hukum, Vol. 16 Nomor 1, Juni 2018.

Haiba, Syahan Nur Muhammad, Sofia Annisa, & Riska Andi Fitriono. *Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi.* Jurnal Res Judicata, Volume 4 Nomor 2, 2021.

Runtukahu, Jurian. *Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia.* Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV No. 1, Jan 2016.

Santoso, M. Imam. *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian.* Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7 No.1, Juli 2018.

Sutrisno, Moeh Roem, Ilham Abbas, & Baharuddin Badaru. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.* Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.1 Nomor 7, 2020.

Tenripadang, Andi. *Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Dictum, Vol. 14 No. 1, 2016.

**Bahan yang Tidak Diterbitkan**

Afriansyah, Ari. *Sinergitas Kelembagaan Bidang Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia,* Presentasi Disampaikan dalam Kegiatan *Focus Group Discussion* Diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI, 15 Mei 2024.

J., Andiyanto. *Keamanan Laut Dan Penegakan Hukum,* Makalah Dipresentasikan Dalam Kegiatan Kunjungan Kerja Pansus DPR RI tentang RUU Kelautan, Pangkalan TNI AL, Semarang, Januari 2024.

**Laman**

Ditjen KKHL KKP. *Data Rujukan Nasional Kelautan.* Dimuat dalam <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>, diakses pada 14 November 2024.

Maritimenews.com. *Kedaulatan dan Hak Berdaulat di Laut Menurut UNCLOS 1982.* Dimuat dalam http://maritimnews.com/2016/04/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982/, diakses pada 15 September 2024.

Oktavira, Bernadhetha Aurelia. *Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.* Dimuat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/, diakses pada 14 September 2024.

Polres Ogan Komering Ulu. *Sejarah.* Dimuat dalam https://resoku.sumsel.polri.go.id/sejarah/, diakses pada 7 September 2024.

Sinulingga, Ardinanda. *Beda Kedaulatan dan Hak Berdaulat di Laut Menurut UNCLOS 1982.* Dimuat dalam https://maritimnews.com/2016/04/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982/, diakses pada 13 September 2024.

# **PEDOMAN/PANDUAN PENULISAN NASKAH JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN PRODIGY**

1. Naskah yang dikirim dalam bentuk karya tulis ilmiah di bidang peraturan perundang-undangan seperti hasil pengumpulan data, survei, hipotesis, kajian teori, studi kepustakaan, saduran buku, dan gagasan kritis konseptual yang bersifat objektif, sistematis, analisis dan deskriptif.
2. Naskah yang dikirim berupa karya tulis asli yang belum pernah dimuat atau dipublikasikan di media lain.
3. Setiap naskah ditulis oleh maksimal 2 (dua) orang penulis.
4. Naskah diketik 1,5 (satu koma lima) spasi di atas kertas A4 dengan huruf Bookman Old Style ukuran 12 (dua belas).
5. Panjang naskah minimal 25 (dua puluh lima) halaman dan maksimal 35 (tiga puluh lima) halaman (termasuk daftar pustaka).
6. Penulisan menggunakan bahasa Indonesia baku, lugas, sederhana dan mudah dipahami serta tidak mengandung makna ganda.
7. Pokok pembahasan atau judul penulisan berupa kalimat singkat dan jelas dengan kata atau frasa kunci yang mencerminkan tulisan.
8. Redaksi berhak mengubah teknik penulisan (redaksional) tanpa mengubah arti.
9. Redaksi dapat mengusulkan perubahan substansi.
10. Cara penulisan penyingkatan:
11. Singkatan untuk nama undang-undang, UU tentang nama singkat/sebutan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU tentang Nakeswan).
12. Singkatan untuk nama undang-undang yang terlalu panjang termasuk undang-undang perubahan, singkatan dengan menyebut nomor undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No.10 Tahun 2016).
13. Singkatan untuk peraturan pelaksana, singkatan dengan menyebut nomor peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (PP No.11 Tahun 2016).
14. Konsistensi penyingkatan dalam seluruh penulisan.
15. Penyingkatan peraturan perundang-undangan dimulai di batang tubuh tulisan.
16. Penulisan kutipan langsung mulai dari 4 (empat) baris ke atas, ditulis menjorok ke dalam, satu ketuk, spasi 1 (satu), dan ukuran huruf 12 (dua belas).

Contoh:

Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

1. Penulisan kutipan langsung kurang dari 4 (empat) baris, ditulis langsung (tidak menjorok), ditulis miring, diawali dan diakhiri dengan tanda kutip.

Contoh:

Fungsi dan peran ganda Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus diakui pula dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”*

1. Penulisan kutipan langsung dalam Bahasa Inggris mulai dari 4 (empat) baris ke atas, ditulis cetak miring, menjorok ke dalam, satu ketuk, spasi 1 (satu), dan ukuran huruf 12 (dua belas).

Contoh:

*For the purposes of this Convention, “enforced disappearance” is considered to be the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law.*

1. Penulisan kutipan langsung dalam Bahasa Inggris kurang dari 4 (empat) baris, ditulis cetak miring, langsung (tidak menjorok), ditulis miring, diawali dan diakhiri dengan tanda kutip.

Contoh:

Pasal 24 ayat (1) Konvensi Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa menyatakan: “*For the purposes of this Convention, “victim” means the disappeared person and any individual who has suffered harm as the direct result of an enforced disappearance*”.

1. Pengiriman naskah dilengkapi dengan alamat *e-mail* untuk korespondensi. Alamat *e-mail* korespondensi penulis harus sesuai dengan *e-mail* yang digunakan untuk mengirim naskah dan harus *e-mail* pemilik naskah.
2. Metode penulisan disesuaikan dengan tulisan ilmiah dan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang secara garis besar sebagai berikut:
   1. Judul dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
   2. Nama Penulis (unit kerja, nama instansi, dan alamat korespondensi/alamat *email* penulis).
   3. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (ditulis dalam 1 (satu) paragraf dengan 1 (satu) spasi, ukuran huruf 10 (sepuluh), jumlah kata minimal 100 (seratus) dan maksimal 250 (dua ratus lima puluh) kata.
   4. Kata kunci minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata terpenting dalam makalah yang dicantumkan di bawah abstrak.
   5. Sistematika penulisan ditulis sebagai berikut:
3. Jika tulisan calon kontributor yang bukan pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dimuat, diharapkan melampirkan syarat administrasi yang dapat dikirimkan bersamaan dengan konsep awal tulisan utuh, yang terdiri dari:
4. fotokopi NPWP atas nama calon kontributor;
5. fotokopi KTP atas nama calon kontributor; dan
6. fotokopi buku rekening atas nama calon kontributor.

Syarat admiinstrasi tersebut harus sesuai dengan nama penulis dalam naskah yang akan diterbitkan.

**JUDUL**

***(TITLE)***

**Penulis**

Jabatan

Instansi

\*Korespondensi: *e-mail*

**Abstrak**

Abstrak merupakan penyajian uraian ringkas, cermat, dan menyeluruh dari isi tulisan yang berfungsi untuk memberikan gambaran ringkas tentang isi tulisan dan disusun sedemikian rupa untuk menggugah pembaca. Penulis hendaknya memperhatikan ketentuan penulisan abstrak termasuk dalam pemilihan kata yang efisien dan tepat, menggunakan bahasa baku dan komunikatif, penyusunan kalimat yang syarat makna dan penataan kalimat menjadi sebuah paragraf yang koheren. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang terdiri atas satu paragraf dengan maksimum 250 kata, informasi dalam abstrak mencakup latar belakang, masalah, tujuan, metode penulisan, hasil, dan kesimpulan. (Bookman Old Style, 10, spasi tunggal).

Kata kunci: minimal tiga kata dan maksimal lima kata terpenting dalam makalah (Bookman Old Style 10, spasi tunggal) tanpa diakhiri tanda baca titik

***Abstract***

*Abstract is a brief description of the presentation, a careful and thorough the paper that gives a quick overview of the paper and arranged in such a way to arouse the reader. The author should consider the abstract provisions consisting the selection of efficient and precise words, using the standard language and communicative. the sentence structure and meaning is written in a coherent paragraph. Abstract is written in Bahasa and English which consists of a single paragraph with a maximum of 250 words, including the information of background, formulation of the problem, purposes, writing methods/approach, results, and conclusions.* (Book style oldman, 10, single spaced).

*Keywords: Minimum three words and maximum five words of most important words in the paper* ***without ending with a period***

**I. Pendahuluan (Bookman Old Style 12, spasi 1 1/2)**

1. **Latar Belakang**
2. **Permasalahan**
3. **Tujuan**
4. **Metode Penulisan**

**II. Pembahasan**

**A. Kerangka Konsepsional**

1. ...

2. ...

3. ...

**B. Analisis Materi Tulisan (Judul bagian ini disesuaikan dengan materi tulisan masing-masing)**

1. ...

2. ...

3. ...

**III. Penutup (berisi simpulan dan saran)**

**DAFTAR PUSTAKA**

* 1. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang terdiri atas satu paragraf dengan maksimum 250 kata, informasi dalam abstrak mencakup latar belakang, masalah, tujuan, metode penulisan, hasil, dan kesimpulan. (Bookman Old Style, 10, spasi tunggal). Abstrak disertai dengan Kata kunci: minimal tiga kata dan maksimal lima kata terpenting dalam makalah (Bookman Old Style 10, spasi tunggal).

Contoh:

**Abstrak**

Otonomi khusus (otsus) Papua jilid pertama telah berjalan selama 20 (dua puluh) tahun dan berakhir di tahun 2021. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah melanjutkan otsus Papua, sebagai otsus Papua jilid kedua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Otsus Papua Jilid pertama dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, terutama dalam hal tata kelola dana otsus Papua yang berakibat pada kurang optimalnya kesejahteraan dan gangguan keamanan di Papua. Terkait dengan permasalahan tersebut, tulisan ini menganalisis: Pertama, bagaimana pengelolaan otsus Papua jilid pertama selama ini? Kedua, bagaimana strategi pengelolaan otsus Papua jilid kedua agar tidak mengulangi kegagalan otsus Papua jilid pertama? Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis pengelolaan otsus Papua jilid pertama dan menganalisis strategi pengelolaan otsus Papua jilid kedua agar tidak mengulangi kegagalan otsus Papua jilid pertama. Metode penulisan hukum normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil pembahasan menyimpulkan: Pertama, meskipun otsus Papua jilid pertama telah meningkatkan aspek kesejahteraan namun belum signifikan hasilnya, masih terdapat masalah tata kelola anggaran dari perencanaan hingga pengawasan, dan masih terjadi gangguan keamanan di Papua; Kedua, perlu ada *grand design* untuk peningkatan kesejahteraan di Papua dan realisasi kartu dana otsus, perlu ada *grand design* tata kelola anggaran dana otsus, dan mempercepat pemekaran daerah guna memperpendek rentang kendali pemerintah terhadap peningkatan keamanan dan kesejahteraan.

Kata kunci: otonomi khusus, Papua, tata kelola, dana, pemekaran daerah

* 1. Contoh penulisan nama, jabatan, instansi, dan korespondensi:

Rangga Leksana

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

\*Korespondensi: rangga@gmail.com

* 1. Penulisan kutipan menggunakan sistem catatan kaki (*footnote*), yang ditulis menjorok 1 (satu) ketuk, masuk ke dalam, huruf Bookman Old Style, ukuran10 (sepuluh), paragraf *single*, dengan mengikuti pedoman sebagai berikut:

**Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal, Judul Peraturan PUU (tanpa LN atau TLN)

Contoh:

3Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

**Putusan Pengadilan**

Judul dan Nomor Putusan, halaman.

Contoh:

4Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hal. 4.

**Buku**

Nama Penulis/Pengarang, *Judul Buku*, Tempat Terbit: Penerbit, tahun, halaman.

Contoh:

1Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 21.

Sumber kutipan berikutnya yang menunjuk kepada sumber yang telah disebut dalam catatan kaki di atasnya, menggunakan *Ibid* (jika halaman sama) atau *Ibid.,* hal. 35 (jika berbeda halaman).

Penulisan sumber kutipan yang telah disebut sebelumnya dan telah disisipi sumber kutipan lain, sebagai berikut:

Nama Penulis/Pengarang, *Judul Buku/Karangan*, halaman. (tidak menggunakan *op.cit, loc.cit*).

Contoh:

7Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* hal. 53.

Jika kutipan berasal dari sumber kedua maka mengikuti pedoman sebagai berikut:

Nama Penulis/Pengarang asal dalam nama Penulis/Pengarang yang bukunya dikutip, judul buku yang dikutip, Tempat Terbit buku yang dikutip: Penerbit, tahun, halaman.

Contoh:

*John Rawls* dalam Munir Fuady, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 60.

**Jurnal**

Nama Penulis/Pengarang, *Judul Tulisan*, Nama Jurnal, Volume dan tahun, halaman.

Contoh:

8Oksidelfa Yanto, *Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Prodigy: Jurnal Perundang-undangan, Vol. 5 No.1, Juli 2017, hal. 29.

**Terjemahan**

Nama Penulis/Pengarang, *Judul Tulisan (Buku)*, diterjemahkan oleh..., Tempat Terbit: Penerbit, tahun, halaman.

Contoh:

9Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi (Law and Society in Transition: Toward Responsive Law),* diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco, Jakarta: HuMa, 2003, hal. 51.

**Harian/Surat Kabar**

Nama Penulis/Pengarang, *Judul Tulisan*, Nama Harian/Surat Kabar, hari, tanggal, tahun, halaman.

Contoh:

2Robert Endi Jaweng, *Korupsi dan Revisi UU Pemda*, Harian Media Indonesia, Jumat, 24 Januari 2014, hal. 9.

**Bahan yang Tidak Diterbitkan**

Makalah, Risalah UU, Draf RUU

Nama Penulis/Pengarang/Institusi, *Judul Tulisan*, Institusi, hari/tanggal/tahun, halaman.

Tim Naskah Akademik RUU Paten, *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008*, BPHN-Kemenkumham, Maret 2015, hal. 3.

**Laman**

Nama Penulis, *Judul Tulisan*, dimuat dalam http..., diakses tanggal bulan tahun.

Contoh:

4John Ferry Situmeang, *Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, dimuat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52652eaab3489/iquo-vadis-i-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-broleh--john-ferry-situmeang--sh-, diakses tanggal 27 Januari 2014.

1. Isi, materi, dan susbtansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.
2. Setiap naskah bebas menggunakan referensi dari buku dan jurnal dari tahun berapapun akan tetapi setiap naskah wajib menggunakan minimal 10 referensi dari **buku dan jurnal**, baik cetak maupun *online* dengan ketentuan menggunakan pustaka terbitan 10 tahun terakhir (minimal tahun 2014) yang digunakan sebagai sumber kutipan di *footnote* dan daftar pustaka.
3. Daftar pustaka ditulis menjorok 1 (satu) ketuk pada baris ke 2 (dua), huruf Bookman Old Style, ukuran 12 (dua belas), dengan mengikuti pedoman sebagai berikut:

**Peraturan Perundang-undangan**

Judul Peraturan PUU (tanpa LN atau TLN)

Contoh:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**Putusan Pengadilan**

Contoh:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

**Buku**

Nama Penulis/Pengarang (jika nama terdiri dari dua kata atau lebih, nama belakang diletakkan di depan). *Judul Buku*. Tempat terbit: Penerbit, tahun.

Contoh:

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

**Jurnal**

Nama Penulis/Pengarang. *Judul Tulisan*. Nama Jurnal: Volume dan tahun.

Contoh:

Yanto, Oksidelfa. *Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Prodigy: Jurnal Perundang-undangan, Vol. 5 No.1, Juli 2017.

**Terjemahan**

Nama Penulis/Pengarang. *Judul Tulisan (Buku),* diterjemahkan oleh... . Tempat terbit: Penerbit, tahun.

Contoh:

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi (Law and Society in Transition: Toward Responsive Law)*, diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco. Jakarta: HuMa, 2003.

**Harian/Surat Kabar**

Nama Penulis/Pengarang. *Judul Tulisan*. Nama Harian/Surat Kabar, Hari, Tanggal Bulan Tahun.

Contoh:

Jaweng, Robert Endi. *Korupsi dan Revisi UU Pemda*. Harian Media Indonesia, Jumat, 24 Januari 2014.

**Bahan yang Tidak Diterbitkan**

Makalah, Risalah UU, Draf RUU

Contoh:

Tim Naskah Akademik RUU Paten. *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008*. BPHN-Kemenkumham, Maret 2015.

**Laman**

Nama Penulis. Dimuat dalam *Judul Tulisan*. http ..., diakses Tanggal Bulan Tahun.

Contoh:

Situmeang, John Ferry. *Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Dimuat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52652eaab3489/iquo-vadis-i-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-broleh--john-ferry-situmeang--sh-, diakses tanggal 27 Januari 2014.

1. Nils Melzer, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif,* Jakarta: International Committee of the Red Cross, 2019, hal. 12. [↑](#footnote-ref-1)
2. Katherine Natanel, *Border Collapse and Boundary Maintenance: Militarisation and The Micro-Geographies of Violence in Israel–Palestine,* Journal Gender: Place and Culture, Vol. 23 No. 6, Juni 2016, hal. 897–911. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ludwina Andhara Herawati, *Sejarah dan Asal Usul Bangsa Palestina,* dimuat dalam <https://news.okezone.com/read/2023/12/09/18/2935766/sejarah-dan-asal-usul-bangsa-palestina?page=all>, diakses tanggal 11 November 2024 [↑](#footnote-ref-3)
4. Mohd Roslan Mohd Nor, *Konflik Israel-Palestina dari Aspek Sejarah Modern dan Langkah Pembebasan dari Cengkaman Zionis*, Jurnal of Al-Tamaddun, Vol. 5 No. 1, Juli 2010, hal. 73–92. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vera Ellen Paat, *Posisi Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1*, Jurnal Politico, Vol. 2 No. 1, Januari 2013, hal. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nur Islamiyah dan Agus Trilaksana, *Aspek Historis Peranan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1955*, Jurnal Avatara, Vol. 3 No. 4, Juni 2016, hal. 4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yefta Christopherus Asia Sanjaya, *Alasan Militan Palestina Hamas Serang Israel, Korban Tewas 250 Orang*, dimuat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/08/074500765/alasan-militan-palestina-hamas-serang-israel-korban-tewas-250-orang?page=all>, diakses tanggal 10 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-7)
8. Simela Victor Muhamad, *Konflik Palestina (Hamas)-Israel,* Jurnal Info Singkat, Vol. 15 No. 20, Oktober 2023, hal. 7-8. [↑](#footnote-ref-8)
9. Noor Atika Shafinaz Binti Nazri, *Peranan Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) Dalam Konflik Kemanusiaan Di Palestina*,Journal of Islamic & Social Studies, Vol. 3 No. 1, Januari 2017, hal. 48. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ega Nur Cahya, *Agresi Israel Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Palestina,* Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 1, April 2022, hal. 47. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nurlita Pratiwi, *Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina,* Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 2, April 2023, hal. 7. [↑](#footnote-ref-11)
12. Novi Christiastuti, *Penyelidikan PBB Simpulkan Israel-Hamas Lakukan Kejahatan Perang,* dimuat dalam <https://news.detik.com/internasional/d-7387551/penyelidikan-pbb-simpulkan-israel-hamas-lakukan-kejahatan-perang/1>, diakses tanggal 8 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34. [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 13. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 23-24. [↑](#footnote-ref-15)
16. Heru Cahyono, *Kejahatan Perang yang Diatur Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional,* Jurnal Hukum Humaniter, Vol 1 No. 1, Juli 2005, hal. 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Eddy O.S Hieriej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional,* Jakarta: Erlangga, 2009, hal. 63. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 5 (b) The International Military Tribunal for the Far East, dimuat dalam <https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf>, diakses tanggal 15 September 2024. [↑](#footnote-ref-18)
19. Devian Abdulfatah Lamadju, *Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional,* Jurnal Lex Administratum, Vol. 6 No. 4, Juli 2018, hal. 5. [↑](#footnote-ref-19)
20. Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, dimuat dalam https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf, diakses tanggal 8 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-20)
21. Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 57. [↑](#footnote-ref-21)
22. ELSAM, S*tatuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional Mengadili Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi,* Jakarta:ELSAM, 2000, hal. 4-5. [↑](#footnote-ref-22)
23. I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional,* Bandung: Yrama Widya, 2015, hal. 361. [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 50 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Akibat Konflik Bersenjata Baik yang Bertaraf Internasional maupun non-internasional. [↑](#footnote-ref-25)
26. Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, hal. 75. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2015, hal. 329-330. [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdul Ghani*, Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa Perdamaian,* Jakarta: PT Gramedia, 2013, hal. 43 [↑](#footnote-ref-28)
29. Dave Maynard Soselisa, *Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional,* Pattimura Law Study Review, Vol. 1 No. 1, Agustus 2023, hal. 84 [↑](#footnote-ref-29)
30. Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2019, hal. 12-15. [↑](#footnote-ref-30)
31. ICRC, *Protocols Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949,* Genewa: ICRC, 2010, hal 36-38. [↑](#footnote-ref-31)
32. Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Bec, *Costumary International Humanitarian Law Volume I,* Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hal. 48. [↑](#footnote-ref-32)
33. Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional,* Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005, hal. 146. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid,* hal. 166. [↑](#footnote-ref-34)
35. Hendrik B. Sompotan, *Peranan Hukum Humaniter Dalam Masyarakat Internasional,* Jurnal Lex et Societatis, Vol. 3 No. 1, Januari 2015, hal. 175. [↑](#footnote-ref-35)
36. Qrei M Poluakan, *Perlindungan HAM Bagi Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perspektif Hukum HUmaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011),* Jurnal Lex Adminstratum, Vol. 10 No. 3, Juli 2023, hal. 3. [↑](#footnote-ref-36)
37. Hendrik B. Sompotan, *Peranan Hukum Humaniter Dalam Masyarakat Internasional,* hal. 176. [↑](#footnote-ref-37)
38. Joshua R Wotulo, *Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Ditinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional,* Jurnal Lex et Societatis, Vol. 7 No. 4, April 2019, hal. 50-51. [↑](#footnote-ref-38)
39. Tommy Patrio Sorongan, *Deretan Rumah Sakit Yang Kena Rudal Israel, Ada RS RI,* dimuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231025091852-4-483436/deretan-rumah-sakit-gaza-yang-kena-rudal-israel-ada-rs-ri>, diakses tanggal 8 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-39)
40. Fajar Nugraha, *Lebih Dari 1.000 Tenaga Kesehatan di Gaza Dibunuh Oleh Pasukan Israel,* dimuat dalam <https://www.metrotvnews.com/read/b1oC9vA8-lebih-dari-1-000-tenaga-kesehatan-di-gaza-dibunuh-oleh-pasukan-israel>, diakses tanggal 8 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-40)
41. Nabil Ihsan, *Hampir 80 Persen Masjid Di Jalur Gaza Hancur Akibat Serangan Israel,* dimuat dalam <https://www.antaranews.com/berita/4378646/hampir-80-persen-masjid-di-jalur-gaza-hancur-akibat-serangan-israel>, diakses tanggal 8 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-41)
42. Muhammad Razi Rahman, *PBB: Agresi Israel Telah Hancurkan 212 Sekolah Di Gaza,* dimuat dalam <https://www.antaranews.com/berita/4035390/pbb-agresi-israel-telah-hancurkan-212-sekolah-di-gaza>, diakses tanggal 8 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-42)
43. Nabil Ihsan, *RI Kecam Keras Blokade Bantuan Kemanusiaan Gaza Oleh Warga Israel,* dimuat dalam <https://www.antaranews.com/berita/4106226/ri-kecam-keras-blokade-bantuan-kemanusiaan-gaza-oleh-warga-israel>, diakses tanggal 9 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ida Rosdalina, *Jajak Pendapat Palestina: Dukungan Terhadap Serangan 7 Oktober Menurun Jauh,* dimuat dalam <https://dunia.tempo.co/read/1917435/jajak-pendapat-palestina-dukungan-terhadap-serangan-7-oktober-menurun-jauh>, diakses tanggal 11 Oktober 2024 [↑](#footnote-ref-44)
45. Hasanudin Aco, *Hima Persis: Hentikan Kejahatan Perang, Wujudkan Kemerdekaan Palestina,* dimuat dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/06/01/hima-persis-hentikan-kejahatan-perang-wujudkan-kemerdekaan-palestina>, diakses tanggal 8 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-46)
47. Aryuni Yuliantiningsih, *Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2, Mei 2009, hal. 115. [↑](#footnote-ref-47)
48. Julianto Jover Jotam Kalolo, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court Of Justice/Mahkamah Internasional),* Jurnal Jurisprudentie, Vol. 3 No. 2, Desember 2016, hal. 104-106. [↑](#footnote-ref-48)
49. Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 45. [↑](#footnote-ref-49)
50. Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*,Bandung: Alumni, 2005*,* hal. 263. [↑](#footnote-ref-50)
51. Desia Rakhma Banjarani, *Studi Perbandingan Kelembagaan Dan Yurisdiksi Internasional Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) Dan The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC),* Jurnal Fakultas Hukum Unila, Vol. 1 No. 1 Juli 2017, hal. 43-45. [↑](#footnote-ref-51)
52. Julianto Jover Jotam Kalolo, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court of Justice/Mahkamah Internasional),* hal. 105-107. [↑](#footnote-ref-52)
53. Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020, hal. xiii. [↑](#footnote-ref-53)
54. H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006, hal. 18. [↑](#footnote-ref-54)
55. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. [↑](#footnote-ref-55)
56. Pasal 97A, *Ibid*. [↑](#footnote-ref-56)
57. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 7 April 2022, hal. 10-15. [↑](#footnote-ref-57)
58. Hendra Kurnia Putra, *Problematika Penerapan Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, dalam Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2021, hal. 78. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ihsan Badruni Nasution, *Tesis:* *Materi Muatan Perubahan dan/atau Pencabutan Undang-Undang yang Menggunakan Metode Omnibus (Tinjauan Atas Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*, Jakarta: Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2024, hal. 11. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid*. hal. 84. [↑](#footnote-ref-60)
61. Lovika Augusta Purwaningtyas, et.al., *Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang*, Jurnal Interdisciplinary, Journal on Law, Social, Science, and Humanities, Vol. 4 No. 1, 2023, hal. 27. [↑](#footnote-ref-61)
62. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hal. 93. [↑](#footnote-ref-62)
63. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 8, 2016, hal.105. [↑](#footnote-ref-63)
64. Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang, Cetakan Kelima,* Jakarta: Rajawali Press, 2020, hal. 22. [↑](#footnote-ref-64)
65. Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, *Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,* Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 242. [↑](#footnote-ref-65)
66. Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2021, hal. 60. [↑](#footnote-ref-66)
67. Wicipto Setiadi, *Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Pendekatan Omnibus Law*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1, April 2020, hal. 44. [↑](#footnote-ref-67)
68. *Ibid,* hal. 45. [↑](#footnote-ref-68)
69. Muhammad Idris, *Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?*, dimuat dalam <https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law?page=all>, diakses tanggal 3 September 2024. [↑](#footnote-ref-69)
70. Ahmad Redi, *Omnibus Law: Metode Sakti Mengatasi Kebuntuan Praktik Berhukum*, dalam Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2021, hal. 7. [↑](#footnote-ref-70)
71. A. Ahsin Thohari, *Menakar Omnibus Law*, Opini Koran Sindo, Rabu 30 Oktober 2019. [↑](#footnote-ref-71)
72. Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020, hal. 6. [↑](#footnote-ref-72)
73. Sodikin, *Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1, April 2020, hal. 147. [↑](#footnote-ref-73)
74. Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, et.al., *Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 2, 2022, hal. 176. [↑](#footnote-ref-74)
75. Antoni Putra, *Penggunaan Pendekatan Omnibus Law dalam Penyusunan Peraturan Pemerintah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 2, 2022, hal. 200. [↑](#footnote-ref-75)
76. Wicipto Setiadi, *Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Pendekatan Omnibus Law*, hal. 45. [↑](#footnote-ref-76)
77. Maria Farida Indrati dalam Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang Undangan Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No.1, 2020, hal. 22. [↑](#footnote-ref-77)
78. Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, hal. 6. [↑](#footnote-ref-78)
79. Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia,* hal. 6. [↑](#footnote-ref-79)
80. Pasal 44 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan:

    1. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
    2. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang Undang ini.

    Pasal 64 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan:

    1. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang Undangan.
    2. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang Undang ini.
    3. Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

    [↑](#footnote-ref-80)
81. Bayu Dwi Anggono, *Omnibus law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No.1, 2020, hal. 23. [↑](#footnote-ref-81)
82. Badan Keahlian DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,* 1 Februari 2022, hal. 1.

    Pertimbangan Hukum Mahkamah [3.18.2.2]: bahwa teknis atau metode apa pun yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam upaya penyederhanaan undang-undang, menghilangkan berbagai tumpang tindih undang-undang, ataupun mempercepat proses pembentukan undang-undang, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Diperlukannya tata cara yang jelas dan baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya merupakan amanat konstitusi dalam mengatur rancang bangun pembentukan undang-undang. Artinya metode ini tidak dapat digunakan selama belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. [↑](#footnote-ref-82)
83. Penjelasan Umum UU Nomor 13 Tahun 2022. [↑](#footnote-ref-83)
84. Inosentius Samsul, *Argumentasi terhadap Pasal 97A UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dalam Bentuk RUU Penggantian*, Bahan Paparan Badan Keahlian DPR RI, disampaikan di Komisi X DPR RI, 4 Juni 2024. [↑](#footnote-ref-84)
85. A. Ahsin Thohari, *Menakar Omnibus Law.* [↑](#footnote-ref-85)
86. Jimly Asshiddiqie, *UU Omnibus (Omnibus Law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif*, dimuat dalam https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif, diakses tanggal 2 September 2024. [↑](#footnote-ref-86)
87. Hendra Kurnia Putra, *Problematika Penerapan Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, dalam Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2021, hal. 78. [↑](#footnote-ref-87)
88. Ihsan Badruni Nasution, *Tesis:* *Materi Muatan Perubahan dan/atau Pencabutan Undang-Undang yang Menggunakan Metode Omnibus (Tinjauan Atas Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*, hal. 83. [↑](#footnote-ref-88)
89. Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Ahmad Naufal Zulfaroh, *Poin-Poin Draf Revisi UU Polri yang Disorot*, dimuat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/29/201500165/poin-poin-draf-revisi-uu-polri-yang-disorot-tambah-masa-jabatan-dan>, diakses tanggal 10 September 2024. [↑](#footnote-ref-89)
90. Badan Legislasi DPR RI, *Kajian Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Atas Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan*, 22 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-90)
91. Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, hal. 70. [↑](#footnote-ref-91)
92. Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia,* hal. xiii. [↑](#footnote-ref-92)
93. Wicipto Setiadi, *Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,* Jakarta, Damera Press, 2022, hal. 2. [↑](#footnote-ref-93)
94. H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, 2006, hal. 18. [↑](#footnote-ref-94)
95. Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, hal. 30. [↑](#footnote-ref-95)
96. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-96)
97. Angka 62 Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UU tentang PPP. [↑](#footnote-ref-97)
98. Angka 67 Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UU tentang PPP. [↑](#footnote-ref-98)
99. Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, hal. 60. [↑](#footnote-ref-99)
100. Angka 63, *Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UU tentang PPP*. [↑](#footnote-ref-100)
101. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, P*andangan Fraksi PPP dalam Rapat Paripurna DPR RI*, 8 Februari 2022, hal. 3-4. F-PPP berpandangan: “bahwa terhadap adanya usulan penambahan Pasal 97A yang disisipkan diantara Pasal 97 dan Pasal 98, Fraksi PPP DPR RI dapat menyetujuinya, jika tujuannya untuk menjaga kesinambungan regulasi. Artinya UU yang terdampak perubahan dengan menggunakan metode *omnibus law*, maka tidak boleh lagi UU sektoral melakukan perubahan kepada materi muatan-muatan yang sudah masuk dalam *omnibus law*, dan hanya bisa dilakukan perubahan melalui UU *Omnibus Law* itu sendiri. Jadi perubahan terhadap UU sektoral harus dibatasi, kecuali atas kesepakatan antara Pemerintah Bersama Parlemen, yang hanya bertujuan untuk menguatkan dan menyempurnakan politik legislasi yang ada di UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan demikian untuk penambahan Pasal 97B dan Pasal 97C sebagaimana telah disebutkan dalam usulan Draf RUU PPP ini juga dapat kami terima.” [↑](#footnote-ref-101)
102. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Kerja Badan Legislasi Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 7 April 2022, hal. 10-11. [↑](#footnote-ref-102)
103. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 13 April 2022, hal. 15. [↑](#footnote-ref-103)
104. Lihat Angka 242 dan Angka 243 Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UU tentang PPP. [↑](#footnote-ref-104)
105. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI daring*, dimuat dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hanya, diakses tanggal 10 September 2024. [↑](#footnote-ref-105)
106. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU tentang PPP, materi muatan yang harus diatur dengan UU yaitu tindak lanjut atas putusan MK dan tindak lanjut tersebut dapat dilakukan oleh DPR atau Presiden. [↑](#footnote-ref-106)
107. Badan Keahlian DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,* 1 Februari 2022, hal. 91. [↑](#footnote-ref-107)
108. *Ibid*., hal. 93. [↑](#footnote-ref-108)
109. *Ibid*., hal. 96. [↑](#footnote-ref-109)
110. Angka 176, Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UU tentang PPP. [↑](#footnote-ref-110)
111. Inosentius Samsul, *Evaluasi Metode Omnibus Law Termasuk Pasal 97A UU No 13 Tahun 2022*, Bahan Paparan Badan Keahlian DPR RI disampaikan dalam Seminar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Evaluasi dan Tantangan ke Depan, 29 Juli 2024. [↑](#footnote-ref-111)
112. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hal. 392-393*.* [↑](#footnote-ref-112)
113. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cetakan 11, Jakarta: Kanisius, 2013, hal. 226. [↑](#footnote-ref-113)
114. Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 201. [↑](#footnote-ref-114)
115. Dian Sadiawati, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi*,Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2015, hal. 39. [↑](#footnote-ref-115)
116. Richard Susskin, *Legal Information: a Personal Appraisal of Context and Progress,* European Journal of Law and Technology, Vol. 1. No. 1, 2010, hal. 90-92. [↑](#footnote-ref-116)
117. Website Peraturan.go.id, Kementerian Hukum dan HAM, dimuat dalam https://peraturan.go.id, diakses tanggal 4 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-117)
118. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 hal. 61. [↑](#footnote-ref-118)
119. Konsiderans menimbang huruf d Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [↑](#footnote-ref-119)
120. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,* Yogyakarta: Kanisius, 2007, hal. 6. [↑](#footnote-ref-120)
121. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal.392-393. [↑](#footnote-ref-121)
122. Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Vol. XXI No. 3, September, 2016, hal. 222. [↑](#footnote-ref-122)
123. Bivitri Susanti, *Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2006, hal. 60. [↑](#footnote-ref-123)
124. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 24. [↑](#footnote-ref-124)
125. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2017, hal. 33-36. [↑](#footnote-ref-125)
126. Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hal. 93. [↑](#footnote-ref-126)
127. Joko Riskiyono, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan,* Jurnal Aspirasi, Vol. 6, No. 2, Desember, 2015, hal. 161. [↑](#footnote-ref-127)
128. Ibid. [↑](#footnote-ref-128)
129. Adam Latif, Irwan, Ahmad Mustanir, Pengaruh Kepemimpinan terhadap Partisipasi Masyarakat pada perencanaan Pembangunan, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 5, No.2, Desember 2019, hal.149. [↑](#footnote-ref-129)
130. Elida Imro’atin Nur Laily, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3, No. 3, September-Desember, 2015, hal.301 [↑](#footnote-ref-130)
131. Sad Dian Utomo,*Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan*, dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi Daerah: *Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, 2003, hal. 267-272. [↑](#footnote-ref-131)
132. Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal. 56. [↑](#footnote-ref-132)
133. Ibid. [↑](#footnote-ref-133)
134. Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [↑](#footnote-ref-134)
135. Atiek Ishlahiyah Al Hamasy, Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Kesehatan Dinilai Belum Bermakna, dimuat dalam https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/13/ruu-kesehatan, diakses tanggal 6 September 2024 [↑](#footnote-ref-135)
136. Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara praktis menyusun dan merancang Peraturan Daerah, Jakarta: Kencana 2010, hal. 153. [↑](#footnote-ref-136)
137. Pasal 115 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib [↑](#footnote-ref-137)
138. Pataniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Penerbit Konpress, 2012, hal. 431 [↑](#footnote-ref-138)
139. Ibid, hal. 432 [↑](#footnote-ref-139)
140. Ibid, hal. 434. [↑](#footnote-ref-140)
141. Wawan Ichwanuddin, Masyarakat Sipil dan Kebijakan Publik, Studi Kasus Masyarakat Sipil dalam Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan*,* Jakarta: YAPPIKA, 2006, hal.33 [↑](#footnote-ref-141)
142. Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan 2, Ibid. hal. 263. [↑](#footnote-ref-142)
143. Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH FH UII, 2004, hal. 85. [↑](#footnote-ref-143)
144. Moh. Fadli, Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa Partsipatif (*Head To A Good Village Governance*), Malang: UB Press, 2011, hal. 142. [↑](#footnote-ref-144)
145. Noval Ali Muchtar, Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Jurnal Prodigy Vol.10, No.2, Desember 2022, hal. 277. [↑](#footnote-ref-145)
146. Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tahun 2000. [↑](#footnote-ref-146)
147. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hal. 2. [↑](#footnote-ref-147)
148. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Kuota 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Ibadah Haji*, dimuat dalam <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/kuota-2024-terbesar-sepanjang-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji>, diakses tanggal 26 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-148)
149. Satu Data Kementerian Agama Republik Indonesia, *Daftar Tunggu Jemaah Haji Indonesia Menurut Usia*, dimuat dalam <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/daftar-tunggu-jemaah-haji-indonesia-menurut-usia>, diakses tanggal 28 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-149)
150. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-150)
151. Penjelasan Umum dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. [↑](#footnote-ref-151)
152. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-152)
153. Mnf/wis, *DPR Resmi Bentuk Pansus Angket Beranggotakan 30 Orang*, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240709123541-32-1119175/dpr-resmi-bentuk-pansus-angket-haji-beranggotakan-30-orang>, diakses tanggal 26 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-153)
154. Ady Thea, *Tok! DPR Resmi Bentuk Pansus Angket Pengawasan Haji 2024*, dimuat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tok-dpr-resmi-bentuk-pansus-angket-pengawasan-haji-2024-lt668d1e4e17525/?page=2>, diakses tanggal 27 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-154)
155. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-155)
156. Badan Pengelola Keuangan Haji, *Laporan Keuangan BPKH Tahun 2023*, dimuat dalam <https://bpkh.go.id/download/laporan-keuangan-bpkh-tahun-2023-audited-format-koran/>, diakses tanggal 3 September 2024. [↑](#footnote-ref-156)
157. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-157)
158. ### Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Diah Pitaloka Nilai Perlu Adanya Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Haji*, dimuat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39044/t/Diah%20Pitaloka%20Nilai%20Perlu%20Adanya%20Revisi%20UU%20Pengelolaan%20Keuangan%20Haji%20dan%20UU%20Haji>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024.

     [↑](#footnote-ref-158)
159. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021, hal. 5. [↑](#footnote-ref-159)
160. Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2015, hal.22. [↑](#footnote-ref-160)
161. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2017, hal. 33-36. [↑](#footnote-ref-161)
162. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, hal. 213. [↑](#footnote-ref-162)
163. Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. [↑](#footnote-ref-163)
164. Imam Syaukani (ed.), *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2019, hal.11. [↑](#footnote-ref-164)
165. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. [↑](#footnote-ref-165)
166. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. [↑](#footnote-ref-166)
167. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. [↑](#footnote-ref-167)
168. Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Balai Pustaka, 2019, hal. 334. [↑](#footnote-ref-168)
169. Kriswanto, *Harmonisasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan, Istinbath: Jurnal Hukum, Volume 19 Nomor 1, 2022, hal.37-57.*  [↑](#footnote-ref-169)
170. Sadijiono, *Hukum Antara Sollen dan Sein*, Jawa Timur: Ubhara press dan Laksbang Pressindo, 2018, hal 28-30. [↑](#footnote-ref-170)
171. Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2009, hal. 82-83. [↑](#footnote-ref-171)
172. Pasal 22 UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur bahwa BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. [↑](#footnote-ref-172)
173. W. Friedmann, *Legal Theory*, Fifth Edition, New York: Columbia University Press, 1967, hal. 316. [↑](#footnote-ref-173)
174. L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif,* Pidato pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1995, mengutip Ruddolf Stammler dalam Julius Stone, *Provine and Function of Law, Law as Logic Justice and Sosial Control, A Study of Jurisprudence*, (Sydney: Maitland Publications PTY.LTD, 1950), hal. 359. [↑](#footnote-ref-174)
175. *Ibid.*, hal. 8-9. [↑](#footnote-ref-175)
176. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-176)
177. M. Zulfa Aulia, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, Universitas Jambi:, 2018, hal.159-185. [↑](#footnote-ref-177)
178. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. Harmonisasi vertikal adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi horizontal adalah harmonsasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024, hal. 47. [↑](#footnote-ref-178)
179. ## Indra Gunawan, *Tantangan Kinerja, Tatakelola dan Sinergi serta Inovasi Investasi Dana Haji Menuju Kemaslahatan yang Berkesinambungan*, dimuat dalam <https://bpkh.go.id/tantangan-kinerja-tatakelola-dan-peluang-sinergi-bpkh-sinergi-dan-inovasi-investasi-dana-haji-menuju-kemaslahatan-yang-berkesinambungan/>,diakses tanggal 10 September 2024.

     [↑](#footnote-ref-179)
180. Humas BPKH, *Catat Biaya Pelunasan BPIH 1445H/2023M dan Masa Waktu Pembayarannya,* <https://bpkh.go.id/catat-biaya-pelunasan-bpih-1445h-2023m-dan-masa-waktu-pembayarannya/>, diakses tanggal 9 September 2024. [↑](#footnote-ref-180)
181. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-181)
182. Badan Pengelola Keuangan Haji, *Tiga Cara BPKH Jalankan Transparansi Pengelolaan Dana Haji,* dimuat dalam <https://bpkh.go.id/tiga-cara-bpkh-jalankan-transparansi-pengelolaan-danuruta-haji/>, diakses tanggal 27 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-182)
183. #### PPID BPKH, Konsisten *Jaga Laporan Keuangan Haji, BPKH Raih Opini WTP 5 Kali berturut-turut dari BPK RI*, dimuat dalam <https://ppid.bpkh.go.id/foto/konsisten-jaga-laporan-keuangan-haji-bpkh-raih-opini-wtp-5-kali-berturut-turut-dari-bpk-ri/>, diakses tanggal 11 September 2024.

     [↑](#footnote-ref-183)
184. Tim Kajian Puspanlak, *Buku Kajian Akademik Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Haji*, PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW IV 2022, hal 6. [↑](#footnote-ref-184)
185. Muhammad Syahrullah, *Manajemen Investasi Keuangan Haji Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan*, Jurnal ISLAMIKA, Vol. 5, No. 2, 2023, hal 1-7. [↑](#footnote-ref-185)
186. Humas BPKH. *BPKH Nyatakan Kesiapan Pendanaan Haji Tahun 1444 H/2023,* dimuat dalam<https://bpkh.go.id/bpkh-nyatakan-kesiapan-pendanaan-haji-tahun-2023/>, diakses tanggal 6 September 2024. [↑](#footnote-ref-186)
187. Setiawan, R., dan Restu Diantina Putri. *BPKH Bantah Biaya Haji Naik untuk Pembangunan Infrastruktur,* dimuat dalam <https://tirto.id/bpkh-bantah-biaya-haji-naik-untuk-pembangunan-infrastruktur-gBtH>, diakses tanggal 6 September 2024. [↑](#footnote-ref-187)
188. *BPKH : 70% Dana Haji Diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara*. dimuat dalam <https://minanews.net/bpkh-70-dana-haji-diinvestasikan-pada-surat-berharga-syariah-negara/>, diakses tanggal 7 September 2024. [↑](#footnote-ref-188)
189. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-189)
190. Prasetyo, B. *Risk Integration in Hajj Fund Investment Management*. dimuat dalam <https://www.academia.edu/>, diakses tanggal 9 September 2024. [↑](#footnote-ref-190)
191. Tim Kajian Puspanlak, *Buku Kajian Akademik Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Haji*, hal 6. [↑](#footnote-ref-191)
192. NA RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji [↑](#footnote-ref-192)
193. Nurhidayah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, *Usulan Amandemen UU No. 34 Tahun 2014*, disampaikan pada diskusi dengan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, tanggal 21 Mei 2024. [↑](#footnote-ref-193)
194. Badan Pengelola Keuangan Haji, *Kontroversi Biaya Haji,* dimuat dalam <https://bpkh.go.id/kontroversi-biaya-haji/>, diakses tanggal 10 September 2024. [↑](#footnote-ref-194)
195. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-195)
196. Zubakhrum B. T, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak,* Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020, hal. 86. [↑](#footnote-ref-196)
197. Imam Hamdi, *Pakar Sebut Putusan MA Untungkan Kaesang Bukan untuk Buka Jalan Anak Muda,* dimuat dalam https://nasional.tempo.co/read/1875279/pakar-sebut-putusan-ma-untungkan-kaesang-bukan-untuk-buka-jalan-anak-muda, diakses tanggal 26 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-197)
198. Adinda Aulia Pratiwi, *Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK terhadap Pelaksanaan Pilkada,* dimuat dalam https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/, diakses tanggal 27 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-198)
199. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hal. 33. [↑](#footnote-ref-199)
200. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 24. [↑](#footnote-ref-200)
201. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 27-28. [↑](#footnote-ref-201)
202. A. Ubaidillah, *et al, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2014, hal. 162. [↑](#footnote-ref-202)
203. Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hal. 105. [↑](#footnote-ref-203)
204. Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 157. [↑](#footnote-ref-204)
205. Syawal Abdul Ajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer,* Cetakan Pertama, Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2013, hal. 39. [↑](#footnote-ref-205)
206. Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam Menyingkap Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, Cetakan Pertama, Jakarta: Salemba Diniyah, 2013, hal. 18. [↑](#footnote-ref-206)
207. Lady Lesmana dkk, *Memahami Dengan Lebih Baik,* Jakarta: Grafindo Persada, 2015,  
     hal. 4. [↑](#footnote-ref-207)
208. Kevin Angkow, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Lex Administratum, Manado, Vol 2. No.2, 2014. Hal. 131. [↑](#footnote-ref-208)
209. Ma’shum Ahmad, *Politik Kekuasaan Kehakiman Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945,* Yogyakarta: Total Media, 2017, hal. 1. [↑](#footnote-ref-209)
210. Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 86. [↑](#footnote-ref-210)
211. Konsideran Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. [↑](#footnote-ref-211)
212. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung . [↑](#footnote-ref-212)
213. Biro Advokasi Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan RI, *Buku 5 Pedoman Penanganan Perkara Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bunga Rampai Advokasi, 2019, hal. 157. [↑](#footnote-ref-213)
214. Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,* Jurnal Konstitusi, Jakarta Pusat, Vol 7, No 5, 2015, hal.115. [↑](#footnote-ref-214)
215. A. Hamid S. Attamimi, *“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Bersifat Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV)”,* Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. hal. 22. [↑](#footnote-ref-215)
216. Achmad Ruslan, *Teori dan Pantuan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,* Tangerang: Rangkang Education, 2021, hal. 48. [↑](#footnote-ref-216)
217. Tanto Lailam, *Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1 Juni 2014, hal. 23. [↑](#footnote-ref-217)
218. Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 25. [↑](#footnote-ref-218)
219. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 64-65. [↑](#footnote-ref-219)
220. Maruarar Siahaan, *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2016, hal. 10. [↑](#footnote-ref-220)
221. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hal. 67-68. [↑](#footnote-ref-221)
222. Marsudin Nainggolan dkk, *Kajian Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung,* cetakan pertama, Jakarta: kencana, 2021. hal. 170. [↑](#footnote-ref-222)
223. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-223)
224. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hal. 65-66. [↑](#footnote-ref-224)
225. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

     . [↑](#footnote-ref-225)
226. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-226)
227. Dhitta Puti Sarasvati, *"The Devils are in The Details", Karut Marut Pendidikan Indonesia*, dimuat dalam  https://edukasi.kompas.com/read/2012/04/18/16184013/~Edukasi~News?page=all., diakses tanggal 27 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-227)
228. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, hal. 30-31. [↑](#footnote-ref-228)
229. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-229)
230. Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.  [↑](#footnote-ref-230)
231. S.F. Marbun, P*eradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia,* Yogyakarta: Liberty, 2017, hal. 211. [↑](#footnote-ref-231)
232. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-232)
233. Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2014, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-233)
234. Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 23. [↑](#footnote-ref-234)
235. Ibid.*,* hal. 1-2. [↑](#footnote-ref-235)
236. Ibid., hal. 3. [↑](#footnote-ref-236)
237. Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945*, Buku VI, Kekuasaan Kehakiman, Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 364. [↑](#footnote-ref-237)
238. Gabisel Barsallo dan Elisa Mendoza, *Enough Crises to Choose from: The Perceived Sense of Crisis in Panama*, Panama City: Social Science Article, 2022, hal. 7. [↑](#footnote-ref-238)
239. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hal. 393. [↑](#footnote-ref-239)
240. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 64. [↑](#footnote-ref-240)
241. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020, hal. 86. [↑](#footnote-ref-241)
242. Andy Omara, *The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institution in Judicial Review*, Constitutional Review, Vol. 3 No. 2, December 2017, hal. 23. [↑](#footnote-ref-242)
243. Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, hal. 118. [↑](#footnote-ref-243)
244. Soerjono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. jakarta:UI Press, 1984, hal. 20. [↑](#footnote-ref-244)
245. Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik,* Jurnal Konstitusi, vo. 8, No. 6, 2011, hal. 850. [↑](#footnote-ref-245)
246. Ibid*.* hal. 851. [↑](#footnote-ref-246)
247. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem diakses Selasa, 10 September 2024. [↑](#footnote-ref-247)
248. Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (judul asli *The Legal Science: A Social Science Perspective*), Cetakan Keempat, Bandung: Nusamedia, 2017, hal. 86. [↑](#footnote-ref-248)
249. Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting (Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan*, Malang: Setara Press, 2016, hal. 23 [↑](#footnote-ref-249)
250. Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: EA Books, 2022, hal. 23. [↑](#footnote-ref-250)
251. A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,* Malang: Setara Press, 2015, hal. 33-37. [↑](#footnote-ref-251)
252. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. [↑](#footnote-ref-252)
253. Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang,* Cetakan Kelima, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020, hal. 224. [↑](#footnote-ref-253)
254. ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. [↑](#footnote-ref-254)
255. Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, hal. 88. [↑](#footnote-ref-255)
256. Ibid*.* [↑](#footnote-ref-256)
257. Markus Bockenforde, *A Practical Guide to Constitution Building: The Design of the Legislature*, Stockholm: International IDEA, 2011, hal. 41. [↑](#footnote-ref-257)
258. Hofler, Stefan, and friends, *Legislation in Switzerland*, , University of Zurich Zurich: Open Repository and Archive, 2020, hal. 483. [↑](#footnote-ref-258)
259. Sherry R. Arnstein, *A Ladder of Citizen Participation*, Journal of the American Institute of Planners, Volume 35, Issue 4, 2007, hal. 216-224. [↑](#footnote-ref-259)
260. Ibid*.* [↑](#footnote-ref-260)
261. Ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-261)
262. The National Assembly, Parliament of Kenya, *Public Participation in the Legislative Process*, dimuat dalam <https://www.google.com/search?q=arliament+of+Kenya%2C+%22Public+Participation+in+the+Legislative+Process%22%2C+Fact+She&sca_esv=56a6e72bcd16fe02&rlz=1C1YTUH_enID1083ID1083&biw=1280&bih=631&sxsrf=ADLYWIIUFuIgo52lKCie2T_FlDUnkWv_2Q%3A1725950525347&ei=PerfZpLuFKmz4-EPr-6kOA&ved=0ahUKEwjSgNrf4reIAxWp2TgGHS83CQcQ4dUDCA4&uact=5&oq=arliament+of+Kenya%2C+%22Public+Participation+in+the+Legislative+Process%22%2C+Fact+She&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiT2FybGlhbWVudCBvZiBLZW55YSwgIlB1YmxpYyBQYXJ0aWNpcGF0aW9uIGluIHRoZSBMZWdpc2xhdGl2ZSBQcm9jZXNzIiwgRmFjdCBTaGVIAFAAWABwAHgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMAkgcAoAcA&sclient=gws-wiz-serp>, diakses tanggal 10 September 2024. [↑](#footnote-ref-262)
263. Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, hal. 177. [↑](#footnote-ref-263)
264. I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 153 [↑](#footnote-ref-264)
265. Ibid., hal. 154. [↑](#footnote-ref-265)
266. Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media, 2017, hal. 145. [↑](#footnote-ref-266)
267. Andryan, *Open Court Principle for the Public in Material Judicial Review Right in the Supreme Court*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22, No. 3, 2022, hal. 387. [↑](#footnote-ref-267)
268. Ran Hirschl, *The Judicialization of Politics*, ​Oxford: ​Oxford University Press, 2018, hal. 266. [↑](#footnote-ref-268)
269. I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, hal. 13. [↑](#footnote-ref-269)
270. George Tridimas, *Independent Judiciary*, New York: Springer Encyclopedia of Law and Economics, , 2019, hal. 5 [↑](#footnote-ref-270)
271. Andy Omara, *The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institution in Judicial Review*, hal. 190. [↑](#footnote-ref-271)
272. Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, hal. 81. [↑](#footnote-ref-272)
273. Robert Uwe Hess, *Nemo Judex in Sua and The Challenge Procedure Under the Uncitral Model Law*, International Law and Politics, Vol. 50, 2018, hal. 1431. [↑](#footnote-ref-273)
274. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,* hal. 39. [↑](#footnote-ref-274)
275. Miro Cerar, *The Relationship Between Law and Politics*, Annual Survey of International & Comparative Law, Vol. 15, Issue 1, 2019, hal.19. [↑](#footnote-ref-275)
276. I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaints)*, hal. 30. [↑](#footnote-ref-276)
277. M. Nur Rasyid, dkk *The Decrease of Legislative Functions of The People’s Representative Council of The Republic of Indonesia In the Reform Era*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22, No. 2, 2022, hal. 221-222. [↑](#footnote-ref-277)
278. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, 2011, hal.12. [↑](#footnote-ref-278)
279. *Ibid*., hal.19. [↑](#footnote-ref-279)
280. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal.9. [↑](#footnote-ref-280)
281. Konsideran menimbang huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-281)
282. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal.1. [↑](#footnote-ref-282)
283. Lihat Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-283)
284. Lihat Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-284)
285. A.M. Azhar Aljurida, *Restrukturisasi Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Sinjai,* Jurnal Ilmiah Paranata Edu, Vol. 1 No 1, Maret 2019, hal 28*.* [↑](#footnote-ref-285)
286. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2017, hal. 33-36. [↑](#footnote-ref-286)
287. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, hal.213. [↑](#footnote-ref-287)
288. Amelia Haryanti, *Sistem Pemerintahan Daerah*, Banten: Surya Kencana, 2019, hal. 39. [↑](#footnote-ref-288)
289. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-289)
290. Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah,* Semarang: Unnisula Press, 2019, hal 12. [↑](#footnote-ref-290)
291. Rahyunir Rauf, *Hakekat Organisasi Perangkat Daerah*, Jurnal UIR, Vol. III No. 2, Oktober 2017, hal. 348. [↑](#footnote-ref-291)
292. Kusworo, *Manajemen konflik dan perubahan dalam organisasi,* Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2019, hal. 213. [↑](#footnote-ref-292)
293. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-293)
294. M. U. Fithriyyah, *Dasar-Dasar Teori Organisasi*, Jakarta: *Institue for Research and Development,* 2021, hal. 67. [↑](#footnote-ref-294)
295. A. R. Astuti, *Manajemen Organisasi (Teori dan Kasus)*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019, hal. 57. [↑](#footnote-ref-295)
296. Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, Jakarta: UB Press, 2018, hal. 27. [↑](#footnote-ref-296)
297. Rahyunir Rauf, *Hakekat Organisasi Perangkat Daerah*, hal. 346. [↑](#footnote-ref-297)
298. *Ibid*., hal. 28. [↑](#footnote-ref-298)
299. Fatkhul Muin, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum,Vol. 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal.72. [↑](#footnote-ref-299)
300. I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, *Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Di Bidang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Asas Responsibiltas*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.9 No. 2, Desember 2023, hal 390. [↑](#footnote-ref-300)
301. S. Suparto, *Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya*, Jurnal Ilmu Hukum 1–24, 2014, hal.10. [↑](#footnote-ref-301)
302. Azrul Azwar, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 19. [↑](#footnote-ref-302)
303. Azrul Azwar, *Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1994, hal. 28. [↑](#footnote-ref-303)
304. Lihat Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. [↑](#footnote-ref-304)
305. RSUD Eko Mulyani Ali, *Tugas Pokok dan Fungsi*, dimuat dalam <http://rsud-drekomaulanaali.bangka.go.id/page/tugas-pokok-fungsi>, diakses tanggal 27 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-305)
306. Imbalo Pohan, *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan*: Dasar-Dasar Pengertian Dan Penerapan, Jakarta: EGC, 2007, hal. 32. [↑](#footnote-ref-306)
307. Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. [↑](#footnote-ref-307)
308. Imbalo Pohan, *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan*, hal. 19. [↑](#footnote-ref-308)
309. *Ibid.*, hal. 21. [↑](#footnote-ref-309)
310. Notoatmodjo Soekidjo, *Peran Pelayanan Kesehatan Swasta dalam Menghadapi Masa Krisis,* Jakarta: Suara Pembaruan Daily, 2001, hal. 38. [↑](#footnote-ref-310)
311. Anwar, *Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: Bina Putra, Edisi Ketiga, 1996, hal. 17. [↑](#footnote-ref-311)
312. *Ibid*., hal. 44. [↑](#footnote-ref-312)
313. S.Herlambang, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2016, hal. 28. [↑](#footnote-ref-313)
314. A. Muninjaya, *Manajemen Kesehatan*, Jakarta: EGC, Edisi 2, 2004, hal. 44. [↑](#footnote-ref-314)
315. Irwan Waris*, Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1, Maret 2012, hal. 40. [↑](#footnote-ref-315)
316. Massyitoh Basabih, *Buku Putih Rumah Sakit Daerah*, Jakarta: ARSADA, 2017, hal. 10. [↑](#footnote-ref-316)
317. Irwan Waris*, Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance,* Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1, Maret 2012, hal. 39. [↑](#footnote-ref-317)
318. Arsada, *Kajian Akademik RSD Sebagai Perangkat Daerah Dalam Rangka RSD Mendukung Keberhasilan Transformasi Kesehatan Dan Implementasi,* Jakarta: Arsada, 2023, hal. 10. [↑](#footnote-ref-318)
319. *Ibid,* hal. 11. [↑](#footnote-ref-319)
320. Badan Litbangkes Kemenkes, *Laporan Hasil Survei Kepuasan pada Rumah Sakit Daerah*, Kementerian Kesehatan RI, 2019, hal.45. [↑](#footnote-ref-320)
321. *Ibid.,* hal. 30. [↑](#footnote-ref-321)
322. Jorawati Simarmata, *Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan Perangkat Daerah Pasca Reformasi (Sekilas Tanggapan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 04 Desember 2016, hal. 356. [↑](#footnote-ref-322)
323. Tim Kajian Akademik Rumah Sakit Daerah (RSD), *Buku Kajian Akademik Rumah Sakit Daerah (RSD) Sebagai Perangkat Daerah Dalam Rangka Upaya RSD Mendukung Keberhasilan Transformasi Kesehatan dan Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,* Jakarta: ARSADA, 26 September 2023, hal.10. [↑](#footnote-ref-323)
324. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-324)
325. Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. [↑](#footnote-ref-325)
326. Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. [↑](#footnote-ref-326)
327. Yuli Trijayati, Purnawan Junadi, *Perubahan Kelembagaan Rumah Sakit Daerah,* Journal Syntax Idea, Vol. 6 No.05, Mei 2024, hal. 2357. [↑](#footnote-ref-327)
328. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-328)
329. Arsada, *Rumah Sakit Daerah, haruskah Mengalami Kemunduran*, Jakarta: Arsada, 2019, hal.8. [↑](#footnote-ref-329)
330. Ghani Gunawan Idat, *Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional, Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 38 Juni 2019, hal. 9. [↑](#footnote-ref-330)
331. Eddy Cahyono Sugiarto, *Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia’s Economy*, dimuat dalam <https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_digital_the_new_face_of_indonesias_economy>, diakses tanggal 13 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-331)
332. Nurul Komara Fajrin dan Eureka Inola Kadly, *Revolusi Blockchain Indonesia*, Jakarta: Barifal Mega Fortuna, 2024, hal. 2. [↑](#footnote-ref-332)
333. Budi Raharjo, Uang Masa Depan Blockchain, *Bitcoin, Cryptocurrencies, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik,* 2022, hal. 3. [↑](#footnote-ref-333)
334. Oscar Darmawan dan Sintha Rosse Kamlet, *Tokenisasi Cara Milenial Modern Menghasilkan Uang*, Jakarta: Jasakom, 2020, hal. 18. [↑](#footnote-ref-334)
335. Budi Raharjo, Uang Masa Depan Blockchain, *Bitcoin, Cryptocurrencies,* hal. 4. [↑](#footnote-ref-335)
336. Laporan Hasil Penelitian, Wawancara dengan Bapak Dody Frandika, S.E., M.Sc. selaku Pemeriksa di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 di Jakarta. [↑](#footnote-ref-336)
337. Otoritas Jasa Keuangan, *Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan*, Edisi ke-1, Agustus 2024, hal. 5. [↑](#footnote-ref-337)
338. Mentari Puspadini, Transaksi Kripto di RI Capai Rp301,75 T, Naik 354,17%., dimuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240725151436-17-557619/transaksi-kripto-di-ri-capai-rp-30175-t-naik-35417#:~:text=Nilai%20transaksi%20kripto%20di%20indonesia,mencatatkan%20Rp%2066%2C44%20triliun>., diakses tanggal 30 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-338)
339. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 23-24. [↑](#footnote-ref-339)
340. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015, hal. 112. [↑](#footnote-ref-340)
341. Janner Simarmata, dkk, *Kriptografi Teknik Keamanan Data & Informasi,* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019, hal. 12. [↑](#footnote-ref-341)
342. Sumarkidjo, dkk, *Jelajah Kriptologi*, Jakarta: Lembaga Sandi Negara, 2014, hal 18. [↑](#footnote-ref-342)
343. Dimaz Ankaa Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency, lainnya*, *Bitcoin, Etherum, Monero, NXT, NEM &H Share*, Jakarta: Jasakom, 2018, hal. 10. [↑](#footnote-ref-343)
344. *Ibid.*, hal. 38. [↑](#footnote-ref-344)
345. Reku, *Daftar Negara yang Melegalkan Bitcoin, Apakah Kripto Ilegal?,* dimuat dalam <https://reku.id/campus/daftar-negara-yang-melegalkan-bitcoin>, diakses tanggal 26 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-345)
346. Financial Action Task Force (TAFF), *Virtual Assets*, dimuat dalam <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html>, diakses tanggal 21 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-346)
347. Nuhansa Mikrefin Yoeda Putra, *Ini Tugas Bursa Kripto, Kliring, dan Kustodian Aset Kripto yang Sedang Dibentuk Bappebti,* dimuat dalam <https://market.bisnis.com/read/20230218/94/1629442/ini-tugas-bursa-kripto-kliring-dan-kustodian-aset-kripto-yang-sedang-dibentuk-bappebti>, diakses tanggal 9 September 2024. [↑](#footnote-ref-347)
348. CFX, Tentang CFX, dimuat dalam <https://www.cfx.co.id/id/tentang/>, diakses tanggal 9 September 2024. [↑](#footnote-ref-348)
349. Bappebti, Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto, dimuat dalam <https://bappebti.go.id/penyimpanan_kripto>, diakses tanggal 9 September 2024. [↑](#footnote-ref-349)
350. Tennet Depository, *Our Services*, dimuat dalam <https://tennet.id>, diakses tanggal 9 September 2024. [↑](#footnote-ref-350)
351. Bappebti, *Kliring Berjangka Aset Kripto*, dimuat dalam <https://bappebti.go.id/kliring_kripto>, diakses tanggal 9 September 2024. [↑](#footnote-ref-351)
352. PT Kliring Berjangka Indonesia, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, dimuat dalam <https://www.ptkbi.com/perdagangan-berjangka-komoditi>, diakses tanggal 9 September 2024. [↑](#footnote-ref-352)
353. Pasal 1 Angka 9 Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Ast Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka Komoditi Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-353)
354. Pasal 1 Angka 8 Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Ast Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka Komoditi Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-354)
355. CFX, *Members and Partner*s, dimuat dalam <https://www.cfx.co.id/members/>, diakses tanggal 15 November 2024. [↑](#footnote-ref-355)
356. Pasal 1 Angka 10 Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Ast Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka Komoditi Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-356)
357. Laporan Hasil Penelitian, Wawancara dengan Bapak Dr.Jerry Sambuaga selaku Wakil Menteri Perdagangan di Kementerian Perdagangan RI, wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024 di Jakarta. [↑](#footnote-ref-357)
358. Edmira Rivani, *Transisi Pengawasan Aset Kripto*, Isu Sepekan Bidang Ekkuinbang, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Agustus 2023, hal. 2. [↑](#footnote-ref-358)
359. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. [↑](#footnote-ref-359)
360. Zefanya Aprilia, *Jadi Pengawas Kripto OJK, Ini Tugas Hasan Fawzi*, dimuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230818095918-17-464026/jadi-pengawas-kripto-ojk-ini-tugas-hasan-fawzi>, diakses tanggal 2 September 2024. [↑](#footnote-ref-360)
361. Laporan Hasil Penelitian, Wawancara dengan dengan Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H., selaku Perancang Undang-Undang Madya di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, wawancara dilaksanakan pada Rabu, 24 April 2024. [↑](#footnote-ref-361)
362. Laporan wawancara dengan Bapak Mawidiyanto, A.M.S., S.T., selaku Fungsional Sandiman Madya di Badan Siber dan Sandi Negara, wawancara dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024 di Depok, Jawa Barat. [↑](#footnote-ref-362)
363. Aulia Damayanti, *Bappebti Panggil Indodax Buntut Dugaan Kena Hack*, dimuat dalam <https://finance.detik.com/fintech/d-7536898/bappebti-panggil-indodax-buntut-dugaan-kena-hack>, diakses tanggal 12 September 2024. [↑](#footnote-ref-363)
364. Pasal 215 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. [↑](#footnote-ref-364)
365. Pasal 246 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. [↑](#footnote-ref-365)
366. Pasal 48, Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. [↑](#footnote-ref-366)
367. Pasal 284 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. [↑](#footnote-ref-367)
368. Pasal 304 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. [↑](#footnote-ref-368)
369. Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. [↑](#footnote-ref-369)
370. Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. [↑](#footnote-ref-370)
371. Pasal 50 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan di Pasar Fisik Aset kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. [↑](#footnote-ref-371)
372. Pasal 245 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. [↑](#footnote-ref-372)
373. Pasal 246 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. [↑](#footnote-ref-373)
374. Pasal 312 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. [↑](#footnote-ref-374)
375. Kadek Andhika, OJK Tengah Godok Peraturan Pemerintah Terkait Aset Kripto, dimuat dalam <https://www.rri.co.id/keuangan/902411/ojk-tengah-godok-peraturan-pemerintah-terkait-aset-kripto>, diakses tanggal 4 September 2024. [↑](#footnote-ref-375)
376. Wawancara kepada Dody Frandika Abadi selaku Pemeriksa Bappebdi, dalam Wawancara Penelitian Tesis pada Senin, 29 April 2024 di Jakarta. [↑](#footnote-ref-376)
377. Otoritas Jasa Keuangan, *Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan*, Edisi ke-1, Agustus 2024, hal. 105-107. [↑](#footnote-ref-377)
378. Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. [↑](#footnote-ref-378)
379. Pasal 1 Angka 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. [↑](#footnote-ref-379)
380. Pasal 1 Angka 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. [↑](#footnote-ref-380)
381. Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-381)
382. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. [↑](#footnote-ref-382)
383. Pasal 8B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan. [↑](#footnote-ref-383)
384. Ignatius Pradipa Probondaru, *Problematika Pelaksanaan Hunian Berimbang di Indonesia*, E-Journal: Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol 1 No. 1, Februari 2018, Hal. 241-242. [↑](#footnote-ref-384)
385. Urip Santoso. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014, hal 1. [↑](#footnote-ref-385)
386. Fattah Hanurawan. *Perspektif Psikologi Sosial Terhadap Penerapan Kebijakan Pembangunan Perumahan Berimbang Untuk Pengembangan Individu, Keluarga, Dan Komunitas Yang Sehat Dan Berkelanjutan*, Universitas Negeri Malang: Jurnal Sains Psikologi, Volume 5 Nomor (1), Juni 2015. hal. 7. [↑](#footnote-ref-386)
387. Kevin Hoo Kurniawan dan Jeane Neltje Saly, *Arah Regulasi Hunian Berimbang Setelah Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 09, September 2022, hal. 14485. [↑](#footnote-ref-387)
388. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 8, 2016, hal.105. [↑](#footnote-ref-388)
389. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hal. 137. [↑](#footnote-ref-389)
390. Sunarti. *Buku Ajar Perumahan dan Permukiman*. Semarang: Undip Press, 2019, hal. 6-27. [↑](#footnote-ref-390)
391. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-391)
392. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-392)
393. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-393)
394. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-394)
395. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. [↑](#footnote-ref-395)
396. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. [↑](#footnote-ref-396)
397. Wesnawa. *Geografi Permukiman*, Yoyakarta: Graha Ilmu, 2015, hal. 2. [↑](#footnote-ref-397)
398. Agus S Sadana, *Perencanaan Kawasan Permukiman*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hal. 19. [↑](#footnote-ref-398)
399. Eko Budiharjo, *Sejumlah masalah permukiman kota*, Bandung: Alumni, 1998, hal. 148. [↑](#footnote-ref-399)
400. Agus S Sadana, *Perencanaan Kawasan Permukiman*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hal. 20. [↑](#footnote-ref-400)
401. Sunarti, *Op. Cit*  [↑](#footnote-ref-401)
402. Lulut Indrianingrum, *Rencana Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang),* UNNES: Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, Nomor 1 Volume 18 –Januari 2016, hal. 15 – 20. [↑](#footnote-ref-402)
403. ADB, *ADB's Rural Credit Assistance in Bangladesh, Peoples Republic of China, Indonesia, Nepal, Philippines, Sri Lanka and Thailand,* dimuat dalam <https://www.adb.org/documents/adbs-rural-credit-assistance-bangladesh-peoples-republic-china-indonesia-nepal>, diakses tanggal 31 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-403)
404. Eko Budiharjo. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Bandung: Penerbit Alumni, 1998, hal. 56. [↑](#footnote-ref-404)
405. Muhammad Ilham Hermawan dan Febri Meutia, *Pemenuhan Hunian Berimbang Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,* Gronwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Volume 2 Nomor 1, Januari 2023, hal. 160. [↑](#footnote-ref-405)
406. Sri Maharani, *Pembangunan Perumahan Dengan Hunian Berimbang Bagi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Jurnal Penelitian Hukum: Legalitas, Volume 9 Nomor 1, Mei - Oktober 2015, hal. 43. [↑](#footnote-ref-406)
407. Oswar Mungkasa*, Catatan Kritis tentang Hunian Berimbang*, HUDmagz, Senin Edisi 4 -2013, hal 19 – 21. [↑](#footnote-ref-407)
408. Dwityo Akoro Soeranto, Pangihutan Marpaung, dan Chandra R.P. Situmorang, *Dinamika Pengembangan Perumahan Skala Besar*, Jakarta: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020, hal. 9. [↑](#footnote-ref-408)
409. Rizkie Fauzian. *“Ketersediaan Lahan Jadi Tantangan Sektor Perumahan*”, dimuat dalam https://www.medcom.id/properti/news-properti/zNA3WP6k-ketersediaan-lahan-jadi-tantangan-sektor-perumahan, diakses tanggal 31 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-409)
410. Adi Guru Mahendra. *Telisik Kalkulasi Dana Konversi Kewajiban Pengembang,* dimuat dalam <https://www.industriproperti.com/nasional/telisik-kalkulasi-dana-konversi-kewajiban-pengembang/>, diakses tanggal 31 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-410)
411. Muhammad Ilham Hermawan dan Febri Mutia. *Pemenuhan Hunian Berimbang Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*, JAHPHTN: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara, Volume 2 No. (1), Juli 2023, hal. 156-174. [↑](#footnote-ref-411)
412. Sri Maharani. *Pembangunan Perumahan Dengan Hunian Berimbang Bagi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, JPHL: Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Volume 9 No (1), Juni 2015, hal. 41-50. [↑](#footnote-ref-412)
413. Kevin Hoo Kurniawan dan Jeane Neltje Saly, *Arah Regulasi Hunian Berimbang Setelah Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7 No. 09, September 2022, hal. 1488. [↑](#footnote-ref-413)
414. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan [↑](#footnote-ref-414)
415. Parlementaria, *Rapat Paripurna Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Perubahan UU Narkotika,* dimuat dalam [https://jdih.dpr.go.id/berita /detail/id/51008/t/javascript](https://jdih.dpr.go.id/berita%20/detail/id/51008/t/javascript), diakses tanggal 27 Agustus 2024. [↑](#footnote-ref-415)
416. Penjelasan Presiden atas RUU tentang Hukum Acara Perdata, disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Februari 2022, hal. 2. [↑](#footnote-ref-416)
417. *Ibid.,* hal. 4. [↑](#footnote-ref-417)
418. Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 23 – 24. [↑](#footnote-ref-418)
419. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia,* Bandung: Sumur Bandung, 1992, hal. 13. [↑](#footnote-ref-419)
420. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta: Liberty, 2006, hal. 2. [↑](#footnote-ref-420)
421. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik,* Bandung: CV Mandar Maju, 2019, hal. 4. [↑](#footnote-ref-421)
422. Efa Laela Fakhirah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2019, hal. 1. [↑](#footnote-ref-422)
423. Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia,* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 2Juli 2020, hal. 367. [↑](#footnote-ref-423)
424. *Ibid.*, hal. 10. [↑](#footnote-ref-424)
425. Rapat dengar pendapat umum dengan IKAHI, LeIP, dan INI diselenggarakan pada 7 April 2022, rapat dengar pendapat umum dengan Peradi diselenggarakan pada 25 Mei 2022, rapat dengar pendapat umum dengan KAI diselenggarakan pada 13 Juni 2022, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI. Sedangkan *focus group discussion* dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan akademisi diselenggarakan pada 4 Juli 2022. [↑](#footnote-ref-425)
426. Penjelasan Presiden atas RUU tentang Hukum Acara Perdata, disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Februari 2022, hal 2- 3. [↑](#footnote-ref-426)
427. RUU tentang Hukum Acara Perdata per tanggal 6 April 2021 yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI melalui Surat Presiden Nomor R-35/Pres/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. [↑](#footnote-ref-427)
428. Penjelasan Umum angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. [↑](#footnote-ref-428)
429. M. Fauzan, Peranan *PERMA dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung,* Jakarta: Kencana, 2013, hal. viii. [↑](#footnote-ref-429)
430. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-430)
431. *Ibid.*, hal. xi. [↑](#footnote-ref-431)
432. Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 54. [↑](#footnote-ref-432)
433. Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara.* Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 175. [↑](#footnote-ref-433)
434. *Ibid.*, hal. 181 – 182. [↑](#footnote-ref-434)
435. Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001, hal. 144. [↑](#footnote-ref-435)
436. Maulana Rihdo Al Fasil, dkk, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh terhadap Putusan Hukum*, Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023, hal. 231. [↑](#footnote-ref-436)
437. Tim Literasi Nusantara, *KUHAPer: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Beserta Penjelasannya,* Malang: CV Literasi Nusantara, 2020, hal. 226 – 230. [↑](#footnote-ref-437)
438. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 149. [↑](#footnote-ref-438)
439. Gandes Candra Kirana, *Gijzeling dalam Teori dan Praktek Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021, hal. 53. [↑](#footnote-ref-439)
440. Ketentuan Menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. [↑](#footnote-ref-440)
441. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. [↑](#footnote-ref-441)
442. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 201. [↑](#footnote-ref-442)
443. Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik,* Bandung: Nuansa Cendekia, 2020, hal. 21. [↑](#footnote-ref-443)
444. Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hal. 124. [↑](#footnote-ref-444)
445. Heri Suwito, *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Pengembalian Ke Dalam Keadan Semula di Pengadilan Negeri Purbalingga*, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Universitas Tanjung Pura, Volume 11. No. 3, Tahun 2015, hal. 5. [↑](#footnote-ref-445)
446. Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 126 [↑](#footnote-ref-446)
447. E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002, hal. V. [↑](#footnote-ref-447)
448. Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok. [↑](#footnote-ref-448)
449. Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, hal. 125. [↑](#footnote-ref-449)
450. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-450)
451. Pasal 94 RUU Hukum Acara Perdata. [↑](#footnote-ref-451)
452. Pasal 95 dan Pasal 96 RUU Hukum Acara Perdata. [↑](#footnote-ref-452)
453. Pasal 98 dan Pasal 99 RUU Hukum Acara Perdata. [↑](#footnote-ref-453)
454. Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hal. 211. [↑](#footnote-ref-454)
455. Nurnaningsih, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 85. [↑](#footnote-ref-455)
456. M. Beni Kurniawan, *Implementation of Electronic Trial (Elitigation) on The Civil Cases in Indonesia Courts A Legal Renewal of Civil Procedural Law*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 9 Nomor 1, 2020, hal. 56. [↑](#footnote-ref-456)
457. Sigit Arfansyah Kamah, Abdurahman Konoras, dan Hendrik B. Sompotan, *Prosedur Persidangan Secara Elektronik (Tinjauan Menurut Hukum Acara Perdata)*, Jurnal Lex Privatum, Volume IX Nomor2, Maret 2021, hal. 247. [↑](#footnote-ref-457)
458. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan e-court Mahkamah Agung 2019, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019, hal 7 – 8. [↑](#footnote-ref-458)
459. Asep Nursobah, *Kini Persidangan Elektronik dapat Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Tergugat,* <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>, diakses 15 September 2024. [↑](#footnote-ref-459)
460. Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. [↑](#footnote-ref-460)
461. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. [↑](#footnote-ref-461)
462. Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. [↑](#footnote-ref-462)
463. Lihat konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

     Tinggi. [↑](#footnote-ref-463)
464. Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. [↑](#footnote-ref-464)
465. Kemendikbudristek, *Urgensi RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan*, bahan paparan Kemendikbudristek, Jakarta, 8 Juli 2022. [↑](#footnote-ref-465)
466. PDHI, *Bahan Paparan Diskusi*, bahan paparan PDHI kepada Tim RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan, Pusat Perancangan Undang-Undang BKD, Jakarta, 22 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-466)
467. OIE, *OIE recommendations on the Competencies of graduating veterinarians (‘Day 1 graduates’) to assure National Veterinary Services of quality,* PVS, Pathway, May 2012, hal. 4. [↑](#footnote-ref-467)
468. Bahan Paparan Direktorat Dikti Kemendikbud Riset dan Tekonologi, tanggal 22 Juli 2022. [↑](#footnote-ref-468)
469. Humas BKPK, *Inisiatif One Health Untuk Dunia Yang Lebih Baik*, dimuat dalam www.badankebijakan. kemkes.go.id, diakses tanggal 12 September 2023. [↑](#footnote-ref-469)
470. [↑](#footnote-ref-470)
471. A.Maria Anjaryani, dan T.Noor Edwina, *Motivasi Belajar Pada Siswa Asli Papua Terhadap Implementasi Pendidikan Karakter,* G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 2020, hal. 120–125. [↑](#footnote-ref-471)
472. Hendrik Ryan Puan Renna, *Konsep Pendidikan Menurut John Locke dan Relevansinya bagi Pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Pedalaman Papua,* Jurnal Papeda: Vol 4, No 1, Januari 2022, hal. 49. [↑](#footnote-ref-472)
473. Abd Rahman, *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan*, Journal Unismuh: Vol. 2 No.1, Juni 2022, hal.27. [↑](#footnote-ref-473)
474. M.Fadhli, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2017, hal. 215. [↑](#footnote-ref-474)
475. *Ibid,.* Hal. 216. [↑](#footnote-ref-475)
476. Dewi Salma Prawiradilaga, *Wawasan Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 69. [↑](#footnote-ref-476)
477. *Ibid,.* Hal.69. [↑](#footnote-ref-477)
478. *Ibid,*. Hal. 70. [↑](#footnote-ref-478)
479. S. Julaiha, *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran.* Jurnal: Dinamika Ilmu, 2014, hal. 226. [↑](#footnote-ref-479)
480. H. Akmal, *Pendidikan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014, hal. 24. [↑](#footnote-ref-480)
481. M. Huda, *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran* : *Isu-Isu Metodis dan Paradigmatis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hal. 22. [↑](#footnote-ref-481)
482. Lihat Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. [↑](#footnote-ref-482)
483. Lihat Bab II Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. [↑](#footnote-ref-483)
484. Lihat Bab II Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. [↑](#footnote-ref-484)
485. Z. Machmuddah, *Peranan good university governance terhadap kinerja perguruan tinggi,* Jurnal Akuntansi Indonesia, 2019, hal.167. [↑](#footnote-ref-485)
486. *Ibid,.* Hal. 33. [↑](#footnote-ref-486)
487. Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam implementasi kurikulum Berbasis Kompetensi,* Jakarta: Kencana, 2008, hal. 42. [↑](#footnote-ref-487)
488. Dakir Arbangi dan Umiarso, *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016, hal. 31. [↑](#footnote-ref-488)
489. Kompri, *Manajemen Pendidikan Jilid 3*, Bandung: Alfabet, 2015, hal. 17. [↑](#footnote-ref-489)
490. Bambang Ismaya, *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hal 21. [↑](#footnote-ref-490)
491. *Ibid*,. Hal. 21 [↑](#footnote-ref-491)
492. Program Studi [Kedokteran Hewan, *Kedokteran Hewan*, dimuat dalam | FK UNPAD - Official Site](https://fk.unpad.ac.id/program-studi-sarjana/kedokteran-hewan/), diakses tanggal 13 September 2024. [↑](#footnote-ref-492)
493. Dharrnojono, *Pendidikan Dokter Hewan Praktis Paska Kampus,* Bogor: *Proceeding of* KIVNAS, 2008, hal.6. [↑](#footnote-ref-493)
494. # IPB University, *Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan (S1)*, dimuat dalam [Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan (S1) | SVMBS (ipb.ac.id)](https://svmbs.ipb.ac.id/program-sarjana-kedokteran-hewan/), diakses tanggal Agustus 2024.

     [↑](#footnote-ref-494)
495. *ibid,.* [↑](#footnote-ref-495)
496. Program Studi Kedokteran Hewan, *Hasil Diskusi dengan Program Studi pendidikan kedokteran hewan UNPAD,* 15 Sepetember 2022. [↑](#footnote-ref-496)
497. PDHI, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan* (bahan paparan PDHI), diskusi dengan Pusat Perancangan Undang-Undang, 22 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-497)
498. Universitas Airlangga, [*Praktik Dokter Hewan dan Telemedicine di Indonesia,* dimuat dalam Universitas Airlangga Official Website (unair.ac.id)](https://unair.ac.id/praktik-dokter-hewan-dan-telemedicine-di-indonesia/), diakses tanggal14 September 2024. [↑](#footnote-ref-498)
499. PDHI, *Jumlah Dokter Hewan di Indonesia Tak Sampai Setengah dari yang Dibutuhkan*, dimuat dalam <https://portal.pdhi.or.id/berita/detail/jumlah-dokter-hewan-di-indonesia-tak-sampai-setengah-dari-yang-dibutuhkan>, diakses tanggal 14 September 2024. [↑](#footnote-ref-499)
500. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-500)
501. Hasil Pengumpulan Data Pusat Perancangan Undang-Undang di UNPAD dan IPB, tanggal 19 Agustus 2022, hal.3. [↑](#footnote-ref-501)
502. UGM, [*Ingin jadi Dokter Hewan? Yuk, Kenali Seluk Beluk Kuliah di FKH UGM ,* https://ugm.ac.id/id/berita/ingin-jadi-dokter-hewan-yuk-kenali-seluk-beluk-kuliah-di-fkh-ugm/*,* dimuat dalam Universitas Gadjah Mada](../../../../../../../../../../../../../../../Users/ontow/Downloads/Ingin%20jadi%20Dokter%20Hewan?%20Yuk,%20Kenali%20Seluk%20Beluk%20Kuliah%20di%20FKH%20UGM%20,%20https:\ugm.ac.id\id\berita\ingin-jadi-dokter-hewan-yuk-kenali-seluk-beluk-kuliah-di-fkh-ugm\,%20dimuat%20dalam%20Universitas%20Gadjah%20Mada), diakses tanggal 14 September 2024. [↑](#footnote-ref-502)
503. Kemendikbud Ristek Dikti*, Urgensi Peraturan tentang Pendidikan Kedokteran Hewan*, Bahan Paparan Kemendikbud Ristek Dikti, 6 April 2021. [↑](#footnote-ref-503)
504. UGM, *Regulasi Pendidikan Kedokteran Hewan,* Bahan Paparan FKH UGM, tanggal 23 Agustus 2022. [↑](#footnote-ref-504)
505. Unair, *Rapat Koordinasi Pengelolaan Mahasiswa Asing*, dimuat dalam

     *,*<https://unair.ac.id/post_fetcher/fakultas-kedokteran-hewan-rapat-koordinasi-pengelolaan-mahasiswa-asing/>*,* diakses tanggal 10 Oktober 2024. [↑](#footnote-ref-505)
506. Tim Penyusun RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan, *Laporan Pengumpulan Data ke Jawa Barat*, PUU, Februari 2022, hal. 4. [↑](#footnote-ref-506)
507. Muhammad Rafi Darajati dan Muhammad Syafei, *Politik Hukum Pembentukan Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Maritim di Indonesia,* Jurnal Era Hukum, Vol. 16 Nomor 1, Juni 2018, hal.108. [↑](#footnote-ref-507)
508. Syahan Nur Muhammad Haiba, Sofia Annisa, & Riska Andi Fitriono, *Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi,* Jurnal Res Judicata, Volume 4 Nomor 2, 2021, hal.174. [↑](#footnote-ref-508)
509. Moeh Roem Sutrisno, Ilham Abbas, & Baharuddin Badaru, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perikanan,* Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.1 Nomor 7, 2020, hal.1048. [↑](#footnote-ref-509)
510. Syahan Nur Muhammad Haiba, Sofia Annisa, & Riska Andi Fitriono, *Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi,* Jurnal Res Judicata, Volume 4 Nomor 2, 2021, hal.175-177. [↑](#footnote-ref-510)
511. Ari Afriansyah, *Sinergitas Kelembagaan Bidang Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia,* Presentasi Disampaikan dalam Kegiatan Focus Group Discussion Diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI, 15 Mei 2024, hal.10-11. [↑](#footnote-ref-511)
512. Andiyanto, J., *Keamanan Laut Dan Penegakan Hukum,* Makalah Dipresentasikan Dalam Kegiatan Kunjungan Kerja Pansus DPR RI tentang RUU Kelautan, Pangkalan TNI AL, Semarang, Januari 2024, hal.5-7. [↑](#footnote-ref-512)
513. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisilan Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-513)
514. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisilan Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-514)
515. Pasal 14 huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisilan Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-515)
516. Polres Ogan Komering Ulu, *Sejarah,* dimuat dalam https://resoku.sumsel.polri.go.id/sejarah/, diakses pada 7 September 2024. [↑](#footnote-ref-516)
517. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Taun 2014 tentang Kelautan. [↑](#footnote-ref-517)
518. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi),* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hal.35. [↑](#footnote-ref-518)
519. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal.23-24. [↑](#footnote-ref-519)
520. Andi Tenripadang, *Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Dictum, Vol. 14 No. 1, 2016, hal.70. [↑](#footnote-ref-520)
521. Setyo Widagdo, dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional,* Malang: UB Press, 2019, hal.1. [↑](#footnote-ref-521)
522. M. Imam Santoso, *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian,* Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7 No.1, Juli 2018, hal.3. [↑](#footnote-ref-522)
523. Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2014, hal.5. [↑](#footnote-ref-523)
524. *Ibid*, hal.22 [↑](#footnote-ref-524)
525. Pasal 56 United Nations Convention on The Law of The Sea 1982. [↑](#footnote-ref-525)
526. Maritimenews.com, *Kedaulatan dan Hak Berdaulat di Laut Menurut UNCLOS 1982,* dimuat dalam http://maritimnews.com/2016/04/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982/, diakses pada 15 September 2024. [↑](#footnote-ref-526)
527. Ardinanda Sinulingga, *Beda Kedaulatan dan Hak Berdaulat di Laut Menurut UNCLOS 1982,* dimuat dalam <https://maritimnews.com/2016/04/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982/>, diakses pada 13 September 2024. [↑](#footnote-ref-527)
528. Pasal 56 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. [↑](#footnote-ref-528)
529. Mochtar Kusumaatmadja, Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional,* Bandung: Alumni, 2003, hal.16. [↑](#footnote-ref-529)
530. Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve., 1994, hal.64. [↑](#footnote-ref-530)
531. Maritimenews.com, *Kedaulatan dan Hak Berdaulat di Laut Menurut UNCLOS 1982,* dimuat dalam http://maritimnews.com/2016/04/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982/, diakses pada 15 September 2024. [↑](#footnote-ref-531)
532. Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal.30. [↑](#footnote-ref-532)
533. Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2014, hal.19. [↑](#footnote-ref-533)
534. I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional,* Bandung: Mandar Maju, 2015, hal.48. [↑](#footnote-ref-534)
535. Zulkarnain, *Praktik Peradlan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hal.40. [↑](#footnote-ref-535)
536. Bernadhetha Aurelia Oktavira, *Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana,* dimuat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>, diakses pada 14 September 2024. [↑](#footnote-ref-536)
537. Ditjen KKHL KKP, *Data Rujukan Nasional Kelautan,* dimuat dalam <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>, diakses pada 14 November 2024. [↑](#footnote-ref-537)
538. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-538)
539. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-539)
540. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-540)
541. Jurian Runtukahu, Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia, Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV No. 1, Januari 2016, hal.48. [↑](#footnote-ref-541)
542. Jurian Runtukahu, *Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia,* Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV No. 1, Januari 2016, hal.49-50. [↑](#footnote-ref-542)